



CITRA SUMATERA BARAT DALAM ARSIP

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Nopember, 2006

CITRA SUMATERA BARAT DALAM ARSIP

Sambutan

Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, Nopember 2006

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL_____	i
Sambutan Kepala ANRI_____	ii
DAFTAR ISI _____	v
PENDAHULUAN _____	1
Latar Belakang _____	1
Letak Geografis _____	4
Periode Kolonialisme Bangsa Eropa _____	8
Periode Kemerdekaan RI _____	25
Sumatera Barat dalam Khasanah Arsip_____	
CITRA SUMATERA BARAT DALAM ARSIP _____	
A. Pemerintahan_____	
B. Politik dan Pertahanan_____	
C. Ekonomi_____	
D. Sosial_____	
E. Kebudayaan_____	
F. Kesehatan_____	
G. Pendidikan_____	
H. Agama_____	
I. Infrastruktur_____	
J. Bangunan_____	
K. Tokoh-tokoh Sumatera Barat_____	
DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN _____	255
PENUTUP _____	289

Pendahuluan

CITRA SUMATERA BARAT DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjalanan Bangsa Indonesia bergerak dinamis seiring dengan tumbuhnya tata kehidupan dan sikap hidup baru dalam masyarakat. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia sedang menghadapi pengaruh globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas wilayah dan negara, yang dapat menjadi masalah krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi politik saat ini, telah menunjukkan kepada kita munculnya fenomena kebangsaan yaitu ditandai dengan mudarnya semangat kebangsaan dan identitas nasional. Bahkan, akhir-akhir ini telah berkembang menjadi persoalan konflik internal yang mengarah pada tahap disintegrasi bangsa. Situasi krisis ini bisa muncul karena kurangnya pemahaman yang obyektif akan peran Daerah dalam membangun pilar tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penerapan kebijakan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya telah membawa

implikasi sosial bagi kehidupan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing. Salah satu implikasi sosial tersebut adalah menurunnya kualitas pelayanan publik. Padahal Pemerintah Daerah dituntut untuk secara konsisten melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penekanan pada perlunya profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Diperlukan berbagai sumber data akurat dan bukti-bukti yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yang salah satunya diperoleh melalui arsip.

Sumatera Barat merupakan salah satu yang memiliki sejarah perjalanan panjang dan tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Propinsi Sumatera Barat telah menjadi sebuah mata rantai sejarah lokal dengan karakteristik yang sangat kuat dalam ikut membentuk negara kebangsaan (*nation state*). Realita sejarah ini perlu diungkap kembali melalui rekonstruksi sejarah dengan memanfaatkan arsip sebagai sumber informasi utama.

Pengungkapan kehidupan Sumatera Barat pada masa lampau melalui arsip, pada hakekatnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat secara optimal. Melalui arsip ini, kita dapat mengetahui keberhasilan dan kegagalan bangsa pada masa

lampau, sebagai pelajaran berharga bagi perjalanan generasi yang akan datang.

Pengungkapan kehidupan Sumatera Barat pada masa lampau juga merupakan upaya nyata untuk membendung degradasi solidaritas dan rasa kebangsaan dalam masyarakat yang cenderung memprihatinkan. Hal itu akan tercapai apabila Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama belajar dari kegagalan masa lampau dan meningkatkan keberhasilan masing-masing. Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal akan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kemajuan daerahnya.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupaya berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah salah satunya melalui Program "Citra Daerah", yaitu dengan menyerahkan hasil alih media dari khsanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun kerja 2006 ini salah satu daerah yang menjadi sasaran program Citra Daerah ANRI adalah penyerahan Arsip Citra Daerah kepada Pemerintah Sumatera Barat.

Citra Sumatera Barat Dalam Arsip diharapkan dapat mengawali tumbuhnya gagasan kebangsaan. Melalui materi yang ditampilkan dapat membangun kesadaran anak bangsa bahwa NKRI yang dinikmati saat ini merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para pendahulu. Oleh karena itu

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintahan Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar pelestarian arsip statis di daerah terus berkembang pada masa-masa berikutnya.

Arsip Sumatera Barat yang akan diserahkan tersebut mencakup kurun waktu dari mulai awal abad 17 sampai dengan abad 20, yakni sejak zaman VOC, Hindia Belanda sampai dengan masa Republik tentang berbagai interaksi yang terjadi di Sumatera Barat periode tersebut, yang diharapkan dapat menjadi stimulan bagi masyarakat Sumatera Barat dapat memacu peningkatan upaya perluasan Khasanah arsip statis Propinsi Sumatera Barat.

Letak Geografis

Propinsi Sumatera Barat terletak di bagian Barat Pulau Sumatera, pada posisi 0°45" Lintang Utara (LU) - 3°30" Lintang Selatan (LS) dan 98°36"-101°53" Bujur Timur (BT). Wilayah ini dilalui garis khatulistiwa, tepatnya melintas tepat di kota Bonjol yang terletak di Kabupaten Pasaman. Secara geografis Propinsi

Sumatera Barat, berbatasan dengan Propinsi Sumatera utara di sebelah utara, Propinsi Bengkulu di daerah di sebelah selatan, Samudra Indonesia di sebelah Barat dan Propinsi Riau dan Propinsi Jambi di sebelah timur.

Propinsi Sumatera Barat meliputi daratan sebelah Barat pulau Sumatera dan gugusan pulau-pulau di Kepulauan Mentawai. Luas wilayah Propinsi ini adalah 42.297,30 Km², yang meliputi daratan P. Sumatera seluas 35.490,30 km² dan daerah daratan kepulauan Mentawai seluas 6.807.00 km². Kepulauan Mentawai mempunyai empat pulau utama yaitu P. Siberut, P. Sipora, P. Pagai Utara, dan P. Pagai Selatan.

Secara administratif, luas wilayah itu dibagi dalam 15 daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sembilan kabupaten, yaitu: Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pasaman. Sedangkan enam kota adalah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Sawah Lunto dan Kota Payakumbuh.

Masa Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa

Sejarah daerah Propinsi Sumatera Barat sebelum kedatangan bangsa Eropa bisa dikatakan identik dengan sejarah Minangkabau. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis, dapat

dipastikan bahwa asal-usul penduduk Sumatera Barat tidak begitu berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia umumnya dan di pulau Sumatera khususnya, yaitu berasal dari benua Asia. Berdasarkan interpretasi terhadap peninggalan tradisi megalitik yang terdapat di kabupaten Lima Puluh Koto, dapat disimpulkan bahwa manusia pendukung kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson. Kebudayaan ini dikembangkan oleh ras Mongoloid yang berpangkal di daerah Indo-cina dan berkembang dengan pesatnya antara zaman Megalitikum dengan zaman Hindu.

Peninggalan zaman prasejarah di Sumatera Barat selain terbanyak ditemukan di kabupaten 50 Koto, juga ditemukan di daerah Solok Selatan. Sisa-sisa peninggalan tradisi batu besar ini berwujud dalam berbagai bentuk; bentuk batu dakon, batu besar berukir, batu besar berlubang, batu punden, kubur batu, dan batu altar, namun bentuk yang paling dominan adalah bentuk menhir. Peninggalan zaman prasejarah lainnya yang juga di jadikan sebagai tempat hunian. Daerah Taram di Managua serupa ini ditemukan, dahulunya diduga terletak di pinggir Sungai Purba.

Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di atas bisa memberi indikasi bahwa daerah-daerah sekitar kabupaten 50 Koto merupakan daerah atau kawasan Minangkabau yang pertama di huni oleh nenek moyang orang Sumatera Barat. Penafsiran ini rasanya beralasan, karena dari daerah 50 Koto ini

mengalir beberapa sungai besar yang akhirnya bermuara di pantai timur Pulau Sumatera. Sungai-sungai ini dapat dilayari dan memang menjadi sarana transportasi yang penting dari zaman dahulu hingga akhir abad yang lalu.

Nenek moyang orang Minangkabau di duga datang melalui rute ini. Mereka berlayar dari daratan Asia (Indo-Cina) mengarungi laut Cina Selatan, menyebrangi Selat Malaka dan kemudian memudiki Sungai Kampar, Siak dan Indragiri (atau; Kuantan). Sebagian di antaranya tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban mereka di sekitar kabupaten 50 Koto sekarang.

Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat kebudayaan mereka jadi berubah dan jumlah mereka jadi bertambah. Lokasi pemukiman mereka menjadi semakin sempit dan akhirnya mereka menyebar ke berbagai bagian Sumatera Barat yang lainnya. Sebagian pergi ke daerah Kabupaten Agam dan sebagian lagi sampai ke Kabupaten Tanah Datar sekarang. Dari sini penyebaran dilanjutkan lagi, ada yang sampai ke utara daerah Agam, terutama ke daerah Libuk Sikaping, Rao, dan Ophir. Banyak di antara mereka menyebar ke daerah selatan, kedaerah Solok, Seloyo, sekitar Muara, dan sekitar daerah Sijunjung.

Temuan-temuan arkeologis yang cukup banyak tersebut belum lagi di iringi dengan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat pendukungnya.

Sangat sedikit informasi yang baru diperoleh mengenai sistem kepercayaan, adat-istadat, dan keadaan sosial-budaya mereka. Namun adanya sejumlah besar peninggalan arkeologis tersebut telah cukup memberi bukti bahwa pada masa-masa prasejarah, tingkat kebudayaan masyarakat Sumatera Barat telah cukup tinggi.

Sejarah daerah Propinsi Sumatera Barat menjadi lebih terbuka sejak masa pemerintah Raja Adityawarman. Raja ini cukup banyak meninggalkan prasasti mengenai dirinya. Walaupun dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai raja Minangkabau.

Adityawarman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau. Di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, dia juga membawa suatu sumbangan yang besar bagi alam Minangkabau. Kontribusinya yang cukup penting itu adalah penyebaran agama Budha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau. Terbukti dari nama beberapa negari di Sumatera Barat dewasa ini yang berbau Budha atau Jawa seperti Saruaso, Parangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo.

Sejarah Sumatera Barat sepeninggalan Adityawarman hingga pertengahan abad ke-17 terlihat semakin kompleks. Pada masa ini hubungan Sumatera Barat dengan dunia luar, terutama Aceh semakin intensif. Sumatera Barat waktu itu berada dalam dominasi politik Aceh yang juga memonopoli kegiatan

perekonomian di daerah ini. Seiring dengan semakin intensifnya hubungan tersebut, suatu nilai baru mulai di masukan ke Sumatera Barat. Nilai baru itu akhirnya menjadi suatu fundamen yang begitu kukuh melandasi kehidupan sosial-budaya masyarakat Sumatera Barat. Nilai baru tersebut adalah agama Islam. Syekh Burhanudin dianggap sebagai penyebar agama Islam pertama di Sumatera Barat, ulama ini pernah menuntut ilmu di Aceh.

Periode Kolonialisme Bangsa Eropa

Orang Eropa pertama yang datang ke Sumatera Barat adalah seorang pelancong berkebangsaan Prancis yang bernama Jean Parmentier yang datang sekitar tahun 1523, namun bangsa Eropa pertama yang datang dengan tujuan ekonomis dan politis adalah Bangsa Belanda. Armada-armada dagang bangsa Belanda telah mulai terlihat di Pantai Barat Sumatera Barat sejak tahun 1595-1598. Selain bangsa Belanda, bangsa Eropa lainnya yang datang ke Sumatera Barat pada waktu itu adalah bangsa Portugis.

Armada dagang bangsa Belanda yang diwakili oleh VOC memulai aktivitasnya secara sungguh-sungguh sejak pertengahan abad ke-17, tepatnya sejak tahun 1641 ketika Belanda (VOC) berhasil merebut benteng Malaka dari tangan Portugis. Hegemoni politik Belanda di Sumatera Barat dimulai dari pembangunan loji dagang mereka di pulau Cingkuk dekat

Painan dan diiringi dengan pembangunan bentengnya di Padang tahun 1666. Seiring dengan makin kukuhnya kedudukan Belanda di Sumatera Barat, dominasi ekonomi dan politik orang-orang Aceh di Sumatera Barat sedikit demi sedikit makin berkurang. Sedangkan lawan-lawan dagang Belanda yang juga berasal dari bangsa Eropa dengan sendirinya juga ikut tersingkir.

Periode kolonialisme Belanda sesungguhnya merupakan suatu periode yang penting dalam sejarah Sumatera Barat. Pada masa inilah, nama Sumatera Barat muncul sebagai suatu unit administrasi sosial budaya, dan politik. Nama Sumatera Barat ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *de Westkust van Sumatra* atau *Sumatra's Westkust*, yaitu suatu daerah bagian pesisir barat pulau Sumatera yang mula-mula sekali jatuh kedalam kekuasaan serta pengawasan ekonomi dan politik administratif Belanda sekitar pertengahan abad ke-17.

Kekuasaan VOC di Sumatera Barat yang betul-betul efektif sesungguhnya hanyalah di sepanjang daerah pantai. Kekuasaan tersebut terutama terkonsentrasi di kota Padang, Pariaman, Tiku, Painan, dan Indrapura. Di kota-kota dagang, di mana loji-loji VOC berada ditempatkan seorang *opperkoopman* (saudagar kepala) dengan beberapa orang stafnya yang terdiri dari *boekhouders* (pertugas pembukuan) dan *klerken* (juru tulis). Di samping itu juga ada personal militer dan maritim, sekelompok rohaniawan (*perdikanten*) serta beberapa orang pegawai rendahan (*ambachtlieden*).

Pada masa VOC ini, penduduk Sumatera Barat menjadi semakin beragam. Di samping kehadiran orang Eropa dan para *Mardijkers*, penduduk Sumatera Barat pada masa itu juga ditambah dengan masuknya bangsa Cina dan orang Nias. Bangsa Cina lebih banyak bergerak dalam lapangan perdagangan dan orang Nias semula banyak diperkerjakan pada beberapa tambang emas di daerah Salido dan sekitarnya serta juga banyak yang bekerja pada lojo-loji dagang VOC.

Di akhir abad ke-18, tepatnya bulan November 1795 kekuasaan Belanda (VOC) berakhir di Sumatera Barat untuk kemudian digantikan oleh pemerintah Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Sumatera Barat bersamaan dengan mulainya pergolakan Paderi. Pergolakan ini dicetuskan pada tahun 1803 setelah kembalinya Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang dari Mekkah. Tujuan utama dari gerakan mereka adalah untuk memurnikan praktek ajaran Islam dari berbagai penyimpangan. Perbuatan yang bertentangan dengan agama seperti berjudi, menyambung ayam, minum tuak sampai mabuk, dan berbagai jenis kebatilan lain memang tengah merajalela di Sumatera Barat waktu itu.

Kekuasaan bangsa Inggris memang tidak begitu lama di Sumatera Barat, hanya sekitar 23 tahun, oleh karena itu pengaruh kehadiran bangsa Inggris di Sumatera Barat tidak begitu dalam. Kecuali, perjalanan ilmiah Thomas Stamford Raffles ke pedalaman Sumatera Barat tahun 1818, tidak banyak

lagi aktivitas Bangsa Inggris yang tercatat oleh sejarah di Sumatera Barat.

Sementara itu, Gerakan Paderi meluas ke seluruh daerah Sumatera Barat. Gerakan yang semula hanya bertujuan untuk memurnikan praktek-praktek keagamaan yang yang dinilai menyimpang akhirnya menjurus ke arah perang saudara. Di saat-saat pertentangan semakin memuncak inilah bangsa Belanda datang kembali ke Sumatera Barat. Inggris harus menyerahkan Sumatera Barat kembali ke tangan Belanda sebagai realisasi dari Konvensi London tahun 1814.

Untuk kedua kalinya Belanda menguasai Sumatera Barat. Kekuasaan yang kedua ini dimulai pada tahun 1819. Berbeda dengan pendekatan politik VOC sebelumnya, kali ini pemerintah Belanda menguasai Sumatera Barat secara keseluruhan. Niat pemerintah Belanda diperlancar dengan datangnya empat belas orang penghulu yang mengaku sebagai wakil sah raja Minangkabau untuk minta bantuan Belanda memerangi golongan agama (Paderi). Dengan menawarkan kerajaan Minangkabau sebagai imbalan bantuannya, Belanda memulai aksi politiknya memerangi golongan Paderi sekitar tahun 1821.

Sampai tahun 1831, pengaruh Pemerintahan Belanda di Sumatera Barat telah demikian jauh, sehingga pada masa ini telah berhasil menciptakan suatu struktur birokrasi pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padang serta Asisten Residen untuk daerah

pedalaman (*padangsche Bovenlanden*) dan dipusatkan di Bukittinggi. Disamping itu, di bentuk jabatan-jabatan Tuanku Lareh yang membawahi suatu Kelarasan serta juga diangkat beberapa penghulu kepala yang membawahi setiap Kenagarian.

Kerja sama antara golongan penghulu wakil sah raja Minangkabau dan Belanda akhirnya bubar pada penghujung tahun 1831. Para penghulu akhirnya menyadari bahwa tindakan mereka selama ini adalah salah. Sejak saat itu seluruh rakyat Sumatera Barat bersama-sama berjuang menghadapi Belanda. Tidak tanggung-tanggung, gerakan pertama rakyat Sumatera Barat ini sempat membuat Belanda mengumbar janji-janji muluk lewat **Plakat Panjang**. Perjanjian berisi ajakan Belanda untuk saling bekerja sama dengan penduduk Sumatera Barat, tidak saling serang menyerang, menghormati hukum dan adat istiadat warga Sumatera Barat dan lain sebagainya. Namun, janji-janji ini hanyalah tipuan semata, karena segera setelah kekuatan mereka pulih, gebrakan militer terhadap kubu-kubu pertahanan warga Sumatera Barat di lanjutkan lagi bahkan lebih terorganisasi dan lebih intensif dari waktu-waktu sebelumnya.

Pada masa-masa inilah tampil **Tuanku Imam Bonjol**, seorang pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat, Tuanku Imam Bonjol berusaha mempertahankan negeri Bonjol sebagai benteng terakhir Paderi terhadap serbuan Belanda. Namun upaya masyarakat ini akhirnya kandas juga, tatkala pada tahun 1837 Belanda berhasil

menembus benteng terakhir warga Sumatera Barat di Nagari Bonjol serta berhasil menguasainya. Tuanku Imam Bonjol ditawan dan diasingkan ke Lotak (Manado).

A.V. Michealis sebagai komandan militer untuk daerah Sumatera Barat tidak ragu-ragu melakukan reorganisasi terhadap struktur birokrasi pemerintah yang telah ada sebelumnya. Perombakan ini dilakukan pada saat-saat perang Paderi akan berakhir (1837).

Pertama-tama *Michealis* mengubah bentuk *Residentie* ke bentuk *Gouvernements* yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan berpusat di Padang. Selanjutnya *Gouvernements* ini dibagi lagi menjadi tiga *Residentie* yang dikepalai oleh seorang Residen. Ketiga *Residentie* tersebut adalah *Residentie Padangsche Bovenlanden* dengan pusatnya di *Fort de Kock* (Bukittinggi), *Residentie Padangsche Benedenlanden* dengan kedudukan Residenya di Padang dan terakhir *Residentie Tapanoeli* yang semula berpusat di Air Bangis tetapi kemudian dipindahkan ke Sibolga. Dalam menjalankan tugas-tugas administratif, masing-masing Residen dibantu oleh seorang Asisten Residen. Untuk jabatan yang paling bawah dari daftar para pejabat Belanda (*Binnenlandsch Bestuur*) adalah pejabat yang bergelar *Controleur*.

Reorganisasi birokrasi pemerintahan ini juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat Bumiputera (*Inlandsche Bestuur*). Sistem Kelarasan diganti dengan Sistem Keregenan yang

dikepalai oleh seorang Regen, yaitu suatu unit administratif yang mencakup beberapa buah Nagari. Dan tingkat yang paling bawah (Kenagarian) diperintah oleh seorang Penghulu Kepala.

Penataan kembali sistem pemerintahan oleh *A. V. Michealis* ini juga beriringan dengan diperkenalkannya sistem Tanam paksa kopi di Sumatera Barat. Guna menunjang kesuksesan Tanam paksa kopi tersebut, maka korp pegawai pemerintah seperti yang telah disebut di atas masih bertambah lagi dengan beberapa jabatan yang berhubungan langsung dengan sistem tanam paksa kopi. Mereka itu tergabung ke dalam pejabat Dinas Tanaman (*dienst cultuur*) yang di beri nama-nama tertentu seperti *opziener*, *mandoer kommies*, *pakhuismeester* dan lain sebagainya.

Eksplorasi ekonomi Belanda di Sumatera Barat lewat sistem Tanam Paksa memang membawa banyak kesengsaraan bagi warga Sumatera Barat. Banyak tanah penduduk yang subur dirampas untuk ditanami dengan kopi dan banyak pula kaum laki-laki yang mesti bekerja di ladang-ladang kopinya. Kehadiran kebun-kebun kopi itu membuat pemerintah Belanda membutuhkan tenaga administrasi murah untuk membantu mengelola kebun-kebun kopinya, tenaga-tenaga murah itu ada pada penduduk bumiputra.

Berlatar belakang kepada kebutuhan inilah Belanda akhirnya memperkenalkan sistem pendidikan di Sumatera Barat

untuk pertama kalinya. Upaya ini di buktikan dengan pembangunan beberapa buah sekolah negeri di beberapa tempat di Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah pusat penghasil kopi seperti di Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, Bonjol, dan Painan. Sistem pendidikan ini pada mulanya hanya bertujuan untuk mencetak tenaga administrasi yang bisa tulis baca, tetapi akhirnya berubah ke arah sejajar dengan tujuan pendidikan dalam artian yang sesungguhnya.

Sekolah-sekolah mulai banyak didirikan dan tingkatannya pun mulai beragam. Sekolah Raja (*Kweekschool*) yang didirikan di Bukittinggi pada tahun 1856 adalah suatu contoh sekolah yang cukup tinggi dan begitu populer di Sumatera Barat pada pertengahan kedua abad yang lalu. Di sekolah ini dididik putra-putra terbaik Sumatera Barat dan akhirnya menduduki beberapa jabatan yang cukup terpandang dalam masyarakat Sumatera Barat waktu itu.

Pendidikan pada berbagai bentuk sekolah yang ada itu bukan hanya melahirkan para pegawai pemerintah kolonial Belanda, tetapi akhirnya juga melahirkan tokoh-tokoh yang mulai menyadari bahwa dirinya dan bangsanya adalah yang terjajah. Oleh karena itu, pada periode kebangkitan nasional Indonesia dan periode pergerakan kemerdekaan cukup banyak kaum intelektual produk pendidikan Barat ini yang tampil ke permukaan.

Memasuki abad ke-20, sistem tanam paksa kopi ini mulai berakhir seiring dengan semakin banyaknya kritik dari bangsa Belanda sendiri. Untuk mencari jalan keluar bagi penghasilan pemerintahan kolonial, maka dirancanglah suatu bentuk peraturan baru yakni memungut pajak dari rakyat. Waktu ini hampir semua bentuk kegiatan dan aktivitas rakyat dikenakan pajak. Pajak yang begitu menjerat ini ditambah lagi dengan berbagai kekangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat kebijakan baru ini, mencetuskan berbagai perlawanan dan pemberontakan rakyat Sumatera Barat pada waktu itu. Perlawanan rakyat Kamang dan perjuangan rakyat Manggopoh adalah dua dari sekian banyak perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap kolonialis Belanda.

Struktur birokrasi pemerintahan yang dibentuk oleh *A.V. Michealis* berlaku hingga pertengahan kedua abad ke-20, sampai pada saat berlakunya lagi reorganisasi pemerintahan tahun 1914. Struktur birokrasi yang baru ini selain untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi pemberontakan rakyat juga dalam rangka mengefesiensikan penerimaan negara lewat sektor pajak, maka sekali lagi pemerintah kolonial Belanda melakukan reorganisasi struktur pemerintahannya di Sumatera Barat. Peta administratif Sumatera Barat pada waktu itu dimulai dari tingkat karesidenan (mencakup seluruh Sumatera Barat). Di tingkat yang lebih rendah ada *Districtonderdistrict* (bekas karesidenan yang lama). Berikutnya lagi ada lagi *Afdeelingen-*

onderafdeelingen yang terdiri dari *Afdeeling* Padang, Kerinci-Painan, Agam, Lima Puluh Koto, Tanah Datar dan *Afdeeling* Solok. Ditingkat bawah masih dipertahankan unit administratif yang bernama kenagarian, ditingkat kenagarian inilah sesungguhnya pelaksanaan pemungutan pajak dari rakyat betul-betul dikonsentrasikan. Dan pemungutan pajak itu merupakan salah satu tugas utama dari setiap Kepala Nagari.

Pembentukan dua *Gemeente* (kotapraja) Padang dan Bukittinggi serta memasukan kepulauan Mentawai ke dalam jajaran administrative Sumatera Barat juga terjadi pada masa ini. *Onderafdeeling* kepulauan Mentawai dimasukan ke dalam *Afdeeling Padang* dan tercantum dalam lembaran negara No.356 tahun 1915.

Dengan masuknya kepulauan Mentawai dalam jajaran daerah administratif Sumatra Barat, maka upaya Kristenisasi juga mulai terjadi di Sumatera Barat. Upaya Kristenisasi itu hanya terbatas untuk kepulauan Mentawai dan untuk penduduk Sumatera Barat selain penduduk asli (Minangkabau) seperti orang Nias, Cina, dan berbagai etnis lainnya. Penyebaran agama Kristen kepada penduduk Minangkabau tidak diperkenalkan, karena ada larangan dari pemerintah Belanda. Pembangunan beberapa buah geraja yang ada di Sumatera Barat sekarang, terutama yang ada di Kota Padang juga dilaksanakan pada kurun waktu ini.

Seiring dengan masuknya para penginjil ke kepulauan Mentawai, di Sumatera Barat juga terjadi suatu gerakan pembaruan agama Islam. Suatu gerakan yang mencoba memberantas *bid'ah* dan *khurafat* serta mencoba merasionalisasikan dimensi-dimensi sosial-religius. Semua upaya ini sesungguhnya bertujuan untuk menumbuhkan jatidiri para penganut Islam di Sumatera Barat khususnya. Proses reformasi ini tidak lagi dilakukan dengan perang bersenjata, tetapi lebih sederhana, namun mempunyai sasaran yang dalam. Proses pembaruan ini dilakukan lewat sekolah-sekolah agama yang telah mempunyai corak baru yang sedikit banyak meniru pola pendidikan Barat. Adabiah dan Sumatera Thawalib serta berbagai bentuk sekolah Islam lainnya adalah contoh-contoh sekolah yang dijadikan sebagai sarana pembaruan itu. Media massa seperti surat kabar dan majalah juga dipergunakan. *AL-Munir*, *Munirul Manar*, dan *AL-Ittiqan* adalah tiga dari sekian banyak surat kabar dan majalah Islam yang di jadikan sebagai sarana modernisasi oleh golongan pembaru. *Haji Abdullah Ahmad*, *Muhamad Jamil Jambek* adalah tokoh-tokoh pembaruan yang mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya gerakan pembaruan itu.

Gerakan pembaruan yang dipelopori oleh para tokoh pembaruan yang telah menyadari dirinya bangsa yang tertindas, ditambah lagi dengan munculnya kesadaran dari golongan intelektual Barat, akhirnya berubah menjadi embrio nasionalisme

Indonesia di tingkat lokal. Beberapa organisasi yang berlandaskan kepada kebangsaan mulai muncul. Dimulai oleh masuk dan diterimanya **Serikat Islam** yang kemudian mengalami perkembangan menjadi Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Kemudian juga muncul organisasi pemuda ***Jong Sumateranen Bond*** serta berbagai organisasi lainnya seperti **Partai Nasional Indonesia, Persatuan Muslimin Indonesia (Permai), Partai Serikat Islam Indonesia, Muhammadiyah**, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi ini telah pula mencoba memperjuangkan inti dasar dari gagasan keberadaan mereka, yakni mengusir Belanda dari Sumatera Barat.

Pengalaman dalam menghadapi pemberontakan serta kecemasan akan tampilnya kembali ideolog komunis, menyebabkan pemerintah kolonial Belanda makin memperkeras pengawasannya terhadap Sumatera Barat. Aktivitas-aktivitas sosial politik semakin dikekang. Beberapa tokoh Sumatera Barat yang di anggap membahayakan dibuang ke Boven Digul. Pemerintah Belanda juga melakukan pengawasan yang sangat ketat kepada aktivitas golongan kaum Muslimin. Lahirnya ***Goeroe Ordonantie*** dapat juga dikaitkan dengan proses peningkatan pengawasan oleh pemerintah Belanda terhadap Sumatera Barat.

Ketatnya pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut, seiring dengan terjadinya depresi ekonomi atau yang

lebih dikenal dengan istilah *Maleise*. Kombinasi dari dua kenyataan ini menyebabkan warga Sumatera Barat mengalihkan bentuk perjuangan ke bentuk yang lebih aman. Bentuk itu di temukan dalam upaya pengembangan sistem pendidikan yang sifatnya lebih terarah kepada peningkatan kemampuan diri sendiri. Pembangunan INS Oleh **Mr. M. Syafei** di Kayutanam adalah suatu contoh yang paling baik mengenai pengertian pola perjuangan warga Sumatera Barat kedalam bentuk yang lebih lunak namun punya pengaruh yang besar.

Politik reaksioner yang dijalankan pemerintah Belanda akhirnya ternyata tidak efektif. Maka untuk lebih mengefektifkan lagi pengawasan terhadap segala aktivitas warga Sumatera Barat dan dalam rangka menyempurnakan sistem pemerintahan, untuk kesekian kalinya pemerintah Belanda melakukan reorganisasi pemerintahannya. Reorganisasi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1936 dan termuat dalam Lembaran Negara No. 450 tahun 1935 mencoba menyederhanakan jumlah *afdeeling* yang ada di Sumatera Barat menjadi lima buah. *Afdeeling-afdeeling* itu antara lain adalah :

1. *Afdeeling Zuid Benedenlanden* dengan ibukotanya Padang yang terdiri dari *Onderafdeeling* Padang, Kerinci-Indrapura, Painan, dan Kepulauan Mentawai;
2. *Afdeeling Tanah Datar* dengan ibukotanya Padang Panjang yang terdiri dari *Onderafdeeling* Batipuh dan X Koto, Batu Sangkar dan Pariaman;

3. *Afdeeling* Agam dengan ibukotanya Bukittinggi dan terdiri dari *Onderafdeeling Oud Agam*, Maninjau, Lubuk Sikaping, dan Ophir;
4. *Afdeeling* 50 Koto dengan ibukotanya Payakumbuh dan terdiri dari *Onderafdeeling* Payakumbuh, Suliki dan Bangkinang;
5. *Afdeeling* Sawahlunto dan terdiri dari *Onderafdeeling* Sawahlunto, Alahan Panjang, Muara Labuh dan Sijunjung.

Nasionalisme pada tahun-tahun 1930-an, dalam rangka pelaksanaan politik desentralisasi dan untuk lebih menggairahkan rakyat Sumatera Barat bekerja sama dengan Belanda, dibentuklah **Dewan Minangkabau (*Minangkabau-Raad*)**. Dewan ini dibentuk pada tahun 1938, disamping bertujuan sebagai dewan penasehat pemerintah, Dewan Minangkabau dapat pula digunakan oleh rakyat Sumatera Barat sebagai lembaga penyaluran aspirasi politik mereka. Anggota Dewan Minangkabau ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Sumatera Barat, seperti ulama, golongan intelektual, wakil-wakil dari berbagai badan usaha, orang cina dan juga ada orang Belanda.

Dalam periode ini, Sumatera Barat juga menempatkan seorang wakilnya dalam ***Volksraad***. Kesempatan itu diserahkan kepada **Muhamad Yamin**, seorang putra Sumatera Barat yang punya andil besar dalam proses lahirnya Sumpah Pemuda tahun

1928. Kehadiran M. Yamin di dewan itu telah memberikan sumbangan yang cukup berarti.

Sejak pembentukan Dewan Minangkabau hingga masuknya Jepang tahun 1942, sejarah Sumatera Barat tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Tidak banyak peristiwa dan kejadian penting yang terjadi pada masa ini. Ketika balatentara Jepang memasuki daerah Sumatera Barat, sambutan yang hangat juga diberikan karena sebelum masuk Indonesia, Jepang telah melancarkan propagandanya untuk membebaskan Asia termasuk Indonesia dari genggaman kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Balantentara Jepang mulai menduduki Bukittinggi dan Padang 17 Maret 1942 dan beberapa hari kemudian, seluruh Sumatera Barat dapat mereka kuasai.

Setelah menguasai seluruh daerah Sumatera Barat, Jepang mulai mengatur administrasi pemerintahannya. Unit-unit administrasi serta luas teritorialnya masih tetap seperti yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda dalam reorganisasi struktur birokrasi pemerintahan mereka yang terakhir pada tahun 1936. Perbedaan yang paling nyata hanyalah mengenai nama-namanya, kalau dahulu dalam bahasa Belanda dan sekarang dalam bahasa Jepang, karesidenan Sumatera Barat disebut *Sumatora Nishi Kaigan Shu*. Jadi istilah karesidenan diganti dengan *Shu. Afdeeling menjadi Bun Shu* dan *Onderafdeeling* menjadi *Fuku bun*. Disamping itu perbedaan

yang paling nyata lagi adalah mengenai pusat pemerintahan Sumatera Barat dipindahkan ke Bukittinggi.

Mengingat letak geografis Bukittinggi yang berada di tengah-tengah pulau Sumatera, pimpinan tertinggi balatentara Jepang juga menjadikan kota Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan militernya untuk wilayah Sumatera. Dikota inilah *Gunsereikan* atau panglima militer untuk wilayah Sumatera berkedudukan.

Sebagaimana yang terjadi didaerah lain di Indonesia, masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat juga membawa banyak kesengsaraan bagi rakyat Sumatera Barat. Pada masa ini rakyat Sumatera Barat mengalami kekurangan bahan pangan sampai ke tingkat yang paling parah. Banyak rakyat Sumatera Barat yang meninggal akibat kekurangan makan. Di samping itu, dalam rangka memudahkan pangangkutan batu bara dari Sawahlunto ke Pantai Timur Sumatera atau ke Singapura, maka di bangunlah jalan kereta api ke arah Pantai Timur Sumatera. Dalam pembangunan jalan ini tidak sedikit laki-laki Sumatera Barat yang dibawa ke sana dan banyak pula di antaranya yang tidak kembali lagi.

Pada masa-masa awal pendudukan, balantentara Jepang mempercayakan beberapa jabatan dan pekerjaan penting seperti asisten residen, kontrolir, dan kepala-kepala kantor kepada penduduk Sumatera Barat. Dengan tidak sengaja Jepang telah mendidik dan memberi kesempatan luas kepada warga

Sumatera Barat untuk memperoleh pengalaman dalam jabatan-jabatan pimpinan.

Pada awal masa pendudukan Jepang juga diizinkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disamping itu, dalam rangka membantu memantapkan ketenangan rakyat, Jepang juga mengizinkan berdirinya **Komite Rakyat**, suatu organisasi kepemudaan.

Ketika suasana Perang Pasifik mulai berubah dan balantera Jepang mulai terdesak, mereka akhirnya juga memberi kesempatan kepada para pemuda Sumatera Barat untuk mendapat latihan militer, belajar disiplin ketentaraan dan menggunakan senjata. Pada bulan Februari 1943 diresmikanlah pembentukan tentara sukarela (*giyu gun*) yang akhirnya lebih terkenal dengan sebutan *giyu gun* laskar rakyat, atau *Giyu Gun Ko En Bu*. Ada sekitar 44.000 orang pemuda yang pernah dididik dan dilatih dalam organisasi tentara sukarela ini.

Proses pembentukan *Giyu Gun* melibatkan semua unsur pemuka masyarakat, pemuka adat, alim ulama, dan kaum cerdik pandai (intelektual). *Giyu Gun* berpusat di Padang dan pimpinannya adalah **Chatib Sulaiman**. Sayap kiri dari *Giyu gun* ini diberi nama Ha Ha No Kai (perkumpulan wanita). Selain itu tidak kalah pula pentingnya adalah didirikannya sekolah administrasi dan pamongpraja di Batu Sangkar serta dibentuknya organisasi pemuda ***Sei Nen Dan*** dan ***Bo Go Dan***.

Terbentuknya berbagai organisasi tersebut di atas dan diberinya kesempatan kepada warga Sumatera Barat untuk mengecap berbagai kemudahan, ternyata banyak memberi keuntungan setelah perginya Jepang di akhir perang Dunia II. Segi-segi positif kehadiran Jepang di Sumatera Barat ini banyak membantu perjuangan daerah ini pada masa berikutnya, terutama selama periode perang kemerdekaan.

Masa Setelah Kemerdekaan RI

Sesungguhnya proses lahirnya pemerintahan daerah di Sumatera Barat agak unik. Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 diterima secara tidak langsung di daerah ini. Informasi awal diterima dari opsir-opsir Jepang yang ada di Padang, kemudian melalui Kantor Berita Jepang, *Domei*, yang berhasil dimonitor oleh para aktivis pergerakan di Padang. Setelah berita tersebut berhasil dikonfirmasi, para pemuda yang sudah lama siap menyambut saat yang diidam-idamkan itu langsung menyusun barisan dengan membentuk laskar-laskar sukarela untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok nagari. Mereka juga berusaha untuk mengibarkan Sang Merah Putih, sekalipun bendera Jepang *Hinomaru* sampai saat itu masih tetap berkibar di tiangnya. Selain di Padang, sasaran yang ingin dicapai para pemuda Padang adalah mengibarkan Sang Merah Putih di puncak bangunan Jam Gadang di Bukittinggi.

Setelah menyebarluaskan berita kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, upaya lain yang dilakukan pemuka Sumatera Barat adalah mengadakan musyawarah di Padang yang dihadiri berbagai unsur dalam masyarakat Minangkabau. Musyawarah yang berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 1945 itu memutuskan untuk mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta. Pernyataan dukungan itu ditandatangani **Mohammad Syafei**, tokoh terkemuka Sumatera Barat yang terkenal sebagai penggerak bidang pendidikan.

Keputusan lain dari musyawarah tersebut adalah membentuk **Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)** dan menetapkan Mohammad Syafei sebagai ketua KNID. Disusul kemudian pembentukan **Badan Keamanan Rakyat (BKR)** yang kemudian berubah menjadi **Tentara Keamanan Rakyat (TKR)** yang merupakan cikal-bakalnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sumatera Barat yang menjadi bagian dari Komandemen Sumatera di bawah **Mayor Jenderal Hidayat**, ditetapkan sebagai Divisi III Banteng, dengan Komandan Kolonel **Dahlan Jambek**.

Sumatera Barat oleh Pemerintah Pusat kemudian ditetapkan sebagai salah satu karesidenan dari Propinsi Sumatera. Sebagai Residen Sumatera Barat yang pertama ditunjuk **Mohammad Syafei**, yang pelantikannya dilakukan Gubernur Sumatera **Mr. Teuku Mohammad Hasan** pada

tanggal 1 Oktober 1945. Masa jabatan Moh. Syafei berlangsung singkat, karena pada tanggal 15 November 1945 Mohammad Syafei mengundurkan diri dan digantikan oleh **Rusad Datuk Papatih Baringek**.

Susunan pemerintahan Keresidenan Sumatera Barat waktu itu dibagi atas delapan luhak atau setingkat kabupaten sekarang ini, yang masing-masing luhak dikepalai oleh seorang Kepala Luhak atau Bupati. Adapun kedelapan luhak itu adalah Luhak Padang, Painan, Kerinci Indrapura. Tanah Datar, Agum, Lima Puluh Koto, Solok, dan Talu sebagai luhak yang terkecil. Setingkat di bawah luhak ada unit administratif kedemangan dengan dipimpin oleh seorang Demang dan dibantu oleh Demang Muda. Pada masa itu di seluruh Sumatera Barat masih terdapat dua buah kotapraja, yaitu Kotapraja Padang dan Bukittinggi.

Pada tanggal 13 Oktober 1945 tentara sekutu yang ditugaskan melucuti pasukan Jepang mendarat di Teluk. Mereka menyatakan tidak akan mencampuri urusan Pemerintahan RI, namun tanpa diduga di antara mereka rupanya menyusup agen-agen NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), yaitu perwira-perwira Belanda yang diperintahkan untuk mempersiapkan kembalinya kekuasaan kolonial di Indonesia. Karena itu para pemuda Sumatera Barat memberontak, hingga pada tanggal 5 Desember 1945 terjadi pengepungan terhadap

posisi Pasukan Sekutu di sebuah gedung sekolah yang mengakibatkan hampir semua penghuninya tewas.

Menyusul pernyataan Pemerintah RI mengenai negara dalam keadaan bahaya tanggal 28 Juni 1946, di Sumatera Barat lalu dibentuk **Dewan Pertahanan Daerah (DPD)**, yang dipimpin oleh Residen Sumatera Barat yang waktu itu dijabat **Dr. J. Djamil** yang menggantikan Rusad Datuk Papatih Baringek.

Pada tanggal 28 November 1946 pasukan Sekutu meninggalkan Padang. Tapi mereka tidak menyerahkan kekuasaan pada Pemerintah RI, melainkan pada Belanda, Karena itu sekalipun lembaga-lembaga pemerintahan RI telah terbentuk, Belanda berusaha menegakkan kembali kekuasaannya. Untuk sementara itu mereka hanya mampu tinggal di kota-kota besar, khususnya di Padang, sebab kekuasaan nyata berada di tangan pemerintah RI yang bermarkas di luar kota.

Ketika Belanda melancarkan Aksi Militer II tahun 1948 yang menyebabkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibukota negara dan Soekarno-Hatta ditangkap bersama sejumlah anggota kabinet lainnya, Sumatera Barat ditetapkan menjadi **Pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)** yang diketuai oleh **Syafruddin Prawiranegara** selaku Menteri Kemakmuran yang waktu itu sedang berada di Sumatera.

Gerakan militer Belanda tersebut tentu saja dihadapi rakyat Sumatera Barat dengan semangat yang berapi-api. Banyak pengorbanan yang diberikan antara lain dengan tewasnya **Bagindo Azis Chan**, Walikota Padang yang paling keras terhadap Belanda, serta syahidnya 69 orang pemimpin dan penduduk dalam **Peristiwa Situjuh** dan 30 orang lainnya pada **Peristiwa Jembatan Ratapan Ibu**.

Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda yang kemudian disusul dengan pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Agustus 1950, Propinsi Sumatera dipecah menjadi tiga Propinsi yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan. Dalam struktur yang baru ini, daerah Sumatera Barat menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Tengah, bersama-sama dengan daerah Riau dan daerah Jambi. Ibukota Propinsi Sumatera Tengah adalah Bukittingi. Untuk Propinsi Sumatera Tengah Gubernur Militernya ditetapkan **Mr. St. Mohd. Rasyid**, namun karena menetap di Jakarta diganti oleh **Mr. M. Nasrun**. Karena terjadi ketidaksesuaian antara pihak legislatif **Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST)** dengan Gubernur, Mr. M. Nasrun kemudian ditarik ke Jakarta dan mengangkat **Roeslan Muljomihardjo** sebagai penggantinya. Gubernur Ruslan Muljomihardjo lebih mengutamakan program rehabilitasi daerah yang berjalan selama enam tahun.

Pada waktu itu Sumatera Barat juga terbagi atas delapan daerah administratif setingkat kabupaten. Kedelapan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Singgalang Pasaman (ibukotanya Bukittinggi), Kabupaten Sinamar (ibukotanya Payakumbuh), Kabupaten Talang (ibukotanya Solok), Kabupaten Samudera (ibukotanya Pariaman), Kabupaten Kerinci Pesisir Selatan (ibukotanya Sungai Penuh). Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanan, yang pada waktu itu jumlahnya tercatat 23 buah kewedanan.

Tahun 1956 beberapa tokoh pejuang Sumatera Barat yang pada masa perang kemerdekaan tergabung dalam Divisi Banteng mengadakan semacam reuni di Padang. Pertemuan ini memutuskan membentuk Dewan Banteng dengan tujuan antara lain mendesak pelaksanaan Otonomi Daerah, perhatian terhadap cacat veteran dan janda-janda korban perang. Dalam kenyataannya pembentukan **Dewan Banteng** itu adalah merupakan awal dari satu pemberontakan. Ketua Dewan Banteng **Letkol Ahmad Hosen** yang waktu itu menjabat Komandan Resimen Infantri IV Sumatera Barat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Propinsi Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Roeslan. Tindakan Ahmad Hosen mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat dengan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) yang disusul Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada bagian kedua tahun 1957.

Sumatera Barat kemudian ditetapkan menjadi Propinsi melalui Undang-Undang Daerah No. 19 tahun 1957 yang memperoleh penetapan dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pemekaran Propinsi Sumatera Tengah menjadi tiga Propinsi masing-masing Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat ditetapkan Padang dan sebagai Gubernur yang pertama adalah **Kaharuddin Datuk Rangkayo Baso**.

Sementara itu, sejumlah pendukung Dewan Banteng pada awal tahun 1958 mengadakan pertemuan di Sungaidareh (Jambi), dengan melahirkan pembentukan **Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)** yang diumumkan di Padang pada tanggal 15 Februari 1958.

Untuk menghadapi gerakan separatis PRRI itu, pemerintah pusat melancarkan **Operasi 17 Agustus** yang dipimpin **Kolonel Achmad Yani**. Dalam dua setengah bulan setelah proklamasi PRRI, tepatnya pada tanggal 4 Mei 1958, kota Bukittinggi berhasil diduduki TNI dan sebelum akhir tahun itu juga seluruh wilayah Sumatera Barat yang menjadi basis pemberontak berhasil dikuasai TNI.

Pada tahun 1967 berlangsung Penggantian Gubernur dari Kaharuddin Datuk Rajo Baso kepada **Harun Zein** yang semula menjabat Rektor Universitas Andalas, karena berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan daerah, terpilih untuk dua masa jabatan. Selanjutnya jabatan Gubernur Sumatera

Barat dipegang **Azwar Anas**, yang pada masa jabatannya berhasil mengantarkan Propinsi ini memperoleh petaka Parasamya Purna Karya Nugraha untuk Repelita III. Setelah dua masa jabatan, Azwar Anas diganti oleh **Hasan Basri Durin**.

Sumatera Barat dalam Khasanah Arsip

- Tema **pemerintahan** mengawali pengumpulan materi Citra Daerah Sumatera Barat, antara lain: Perjanjian antara Gubernur Jendral Hindia Belanda yang diawali oleh *Laukens Pit de Jounge* dengan kepala adat di wilayah pasifik Sumatera Barat tentang hubungan persahabatan dan jaminan keamanan di Sumatera Barat, daftar tentang daerah Padang Lawas dan *Tamboezij* yang terdiri dari distrik-distrik, disertai nama-nama dari kepala-kepala distriknya, laporan umum pemerintahan Sumatera Barat tahun 1860, rancangan undang-undang No.15 November 1949 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah.
- Tema **politik** berisi tentang: Peta sebagian daerah *Padangche Bovenladen* yang dipakai sebagian daerah tempat operasi militer, laporan perang di Pantai Barat Sumatera mulai Juni 1835 sampai berakhirnya Perang Bonjol 1837, telegram dari Mayor Jendral Soekarjo di *Fort de Kock* Padang tentang berita jatuhnya kapal terbang Belanda yang menewaskan 27 orang Belanda dan 1 orang luka parah, serta Wakil Presiden

Moh. Hatta menyaksikan pemakaman anggota TRI Divisi IX di bukittinggi.

- Tema **ekonomi** merupakan salah satu tema yang ada dalam citra daerah, berisi antara lain: Laporan tentang daerah-daerah yang menghasilkan lada, di Pariaman, perdagangan kopi dari Padang untuk dikirim ke Batavia, tarif pajak perusahaan di *Onderafdeeling* Agam tahun 1916, dan peninjauan Pabrik Genting di Padang oleh Wapres RI Moh. Hatta.
- Tema **sosial** merupakan salah satu gambaran kondisi sosial yang ada di Sumatera Barat, yang berisi antara lain: Peraturan pemerintah tentang urusan penanganan orang-orang miskin di Kota Padang, laporan dari Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Tanah Datar tentang penyelesaian saluran air minum yang tertunda.
- Tema **kebudayaan** berisi dinamika kebudayaan di Sumatera Barat. Arsip-arsipnya sebagai berikut: Naskah tulisan Muhamad Yamin tentang prosa dalam bahasa Padang, pernikahan Adat Bukittinggi, tari payung dan pertunjukan silat pemuda-pemuda Minangkabau.
- Tema **kesehatan** antara lain berisi tentang, Bangsal rumah sakit di Sawah Lunto, rumah sakit untuk buruh tambang di Sawah Lunto dan peletakan batu pertama gedung rumah sakit di Padang oleh Wapres Moh. Hatta.

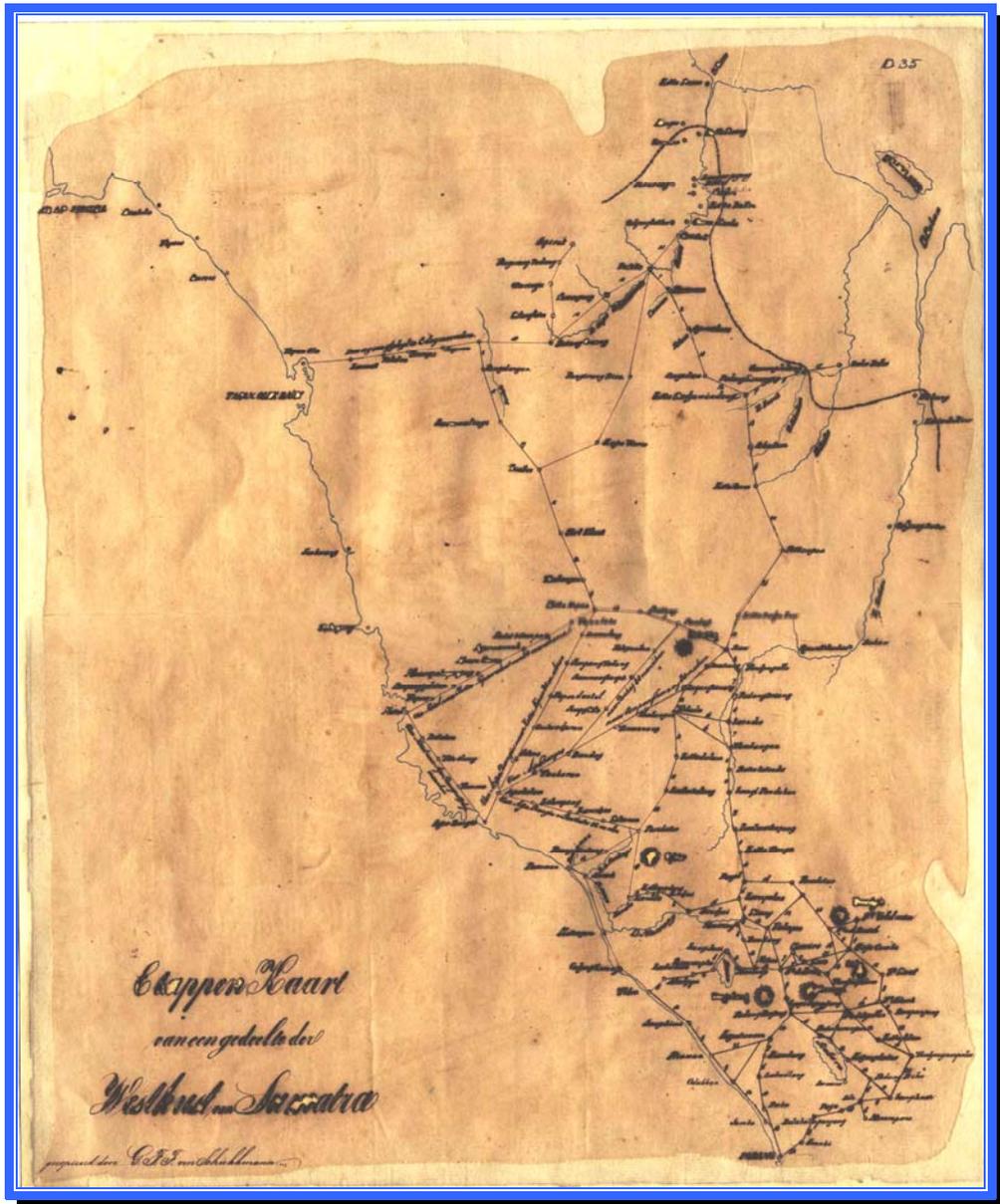
- Tema **pendidikan** menggambarkan kondisi pendidikan di Sumatera Barat, Arsip-arsipnya antara lain: Surat Keputusan Gubernur Jenderal No.13 tahun 1856 tentang pendidikan sekolah raja "*Kweekschool*" bagi kaum Bumi putra di *Fort de Kock* (*padangche Bovenlanden* sekarang Bukittinggi), surat keputusan Gubernur Jendral tentang pemberian subsidi bagi sekolah pribumi di Loeboeksikaping, sket gedung sekolah lanjutan pada sekolah keterampilan di Padang.
- Tema **agama** berisi antara lain: masjid di Sungai Puak, surau di Baso Fort de Kock, dan para calon haji di Payakumbuh.
- Tema **infrastruktur** berisi tentang perkembangan wilayah di Sumatera Barat, Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang perekonomian peralatan dari Eropa bagi perluasan jalur kereta *Fort de Kock* (Bukittinggi) Payakumbuh, pembangunan kanal di Payakumbuh, frekuensi pengawasan lapangan terbang Oplik, lahan tandus yang direncanakan di jadikan ibu kota Solok oleh bupati/kepala daerah Kabupaten Solah, tampak rakyat sedang bergotong royong.
- Tema **bangunan** merupakan suatu tema yang ada dalam khasanah Arsip Nasional RI, seperti: Prototip Rumah Adat Minangkabau, Balai Adat di Lawang, Danau Maninjau Sumatera Barat, Jam Gadang di *Fort de Kock* Bukittinggi, Tugu Kemerdekaan Republik Indonesia di Bukittinggi.
- Sumatera Barat banyak melahirkan **tokoh-tokoh pergerakan Nasional**. Beberapa tokoh tersebut arsipnya,

tersimpan di Arsip Nasional RI, seperti: Panglima Perang Bonjol, Tuanku Imam Bonjol, yang lahir di Tanjung Bungo, tahun 1796. dengan nama Muhamad Sohab atau Peto Syarif, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA) sebagai pujangga Indonesia, Haji Agus Salim, lahir di Bukittinggi tahun 1884, pemimpin Serikat Islam dan mantan menteri muda luar negeri pada Kabinet Syahrir II, Ibrahim Datuk Tanjung Malaka lahir di Padang Godang 14 Oktober 1897 terkenal sebagai promotor Persatuan Perjuangan Pendiri Partai Republik Indonesia (PARI), mantan Wakil Presiden R.I. Mohamad Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

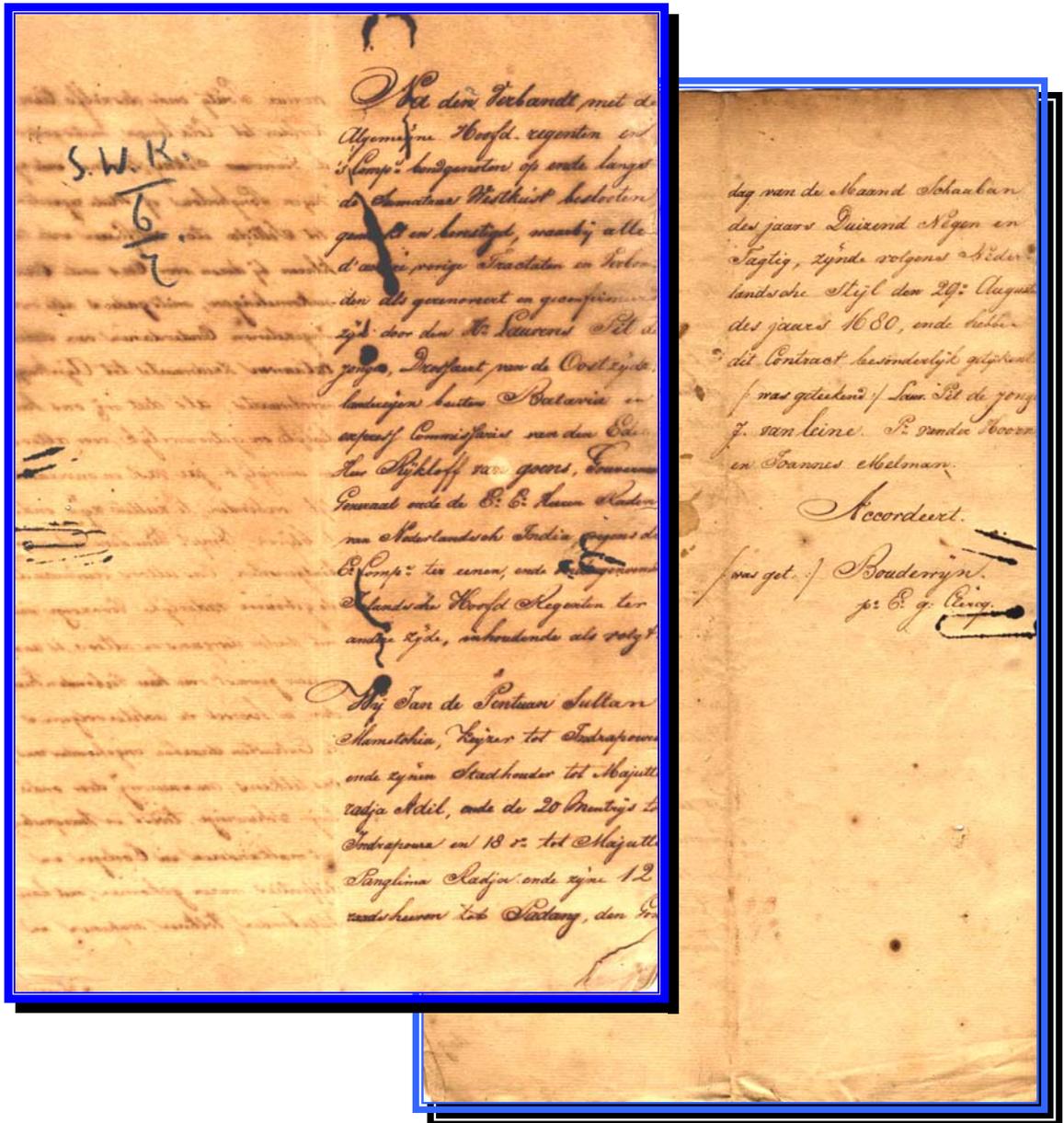
CITRA SUMATERA BARAT DALAM ARSIP

Pemerintahan



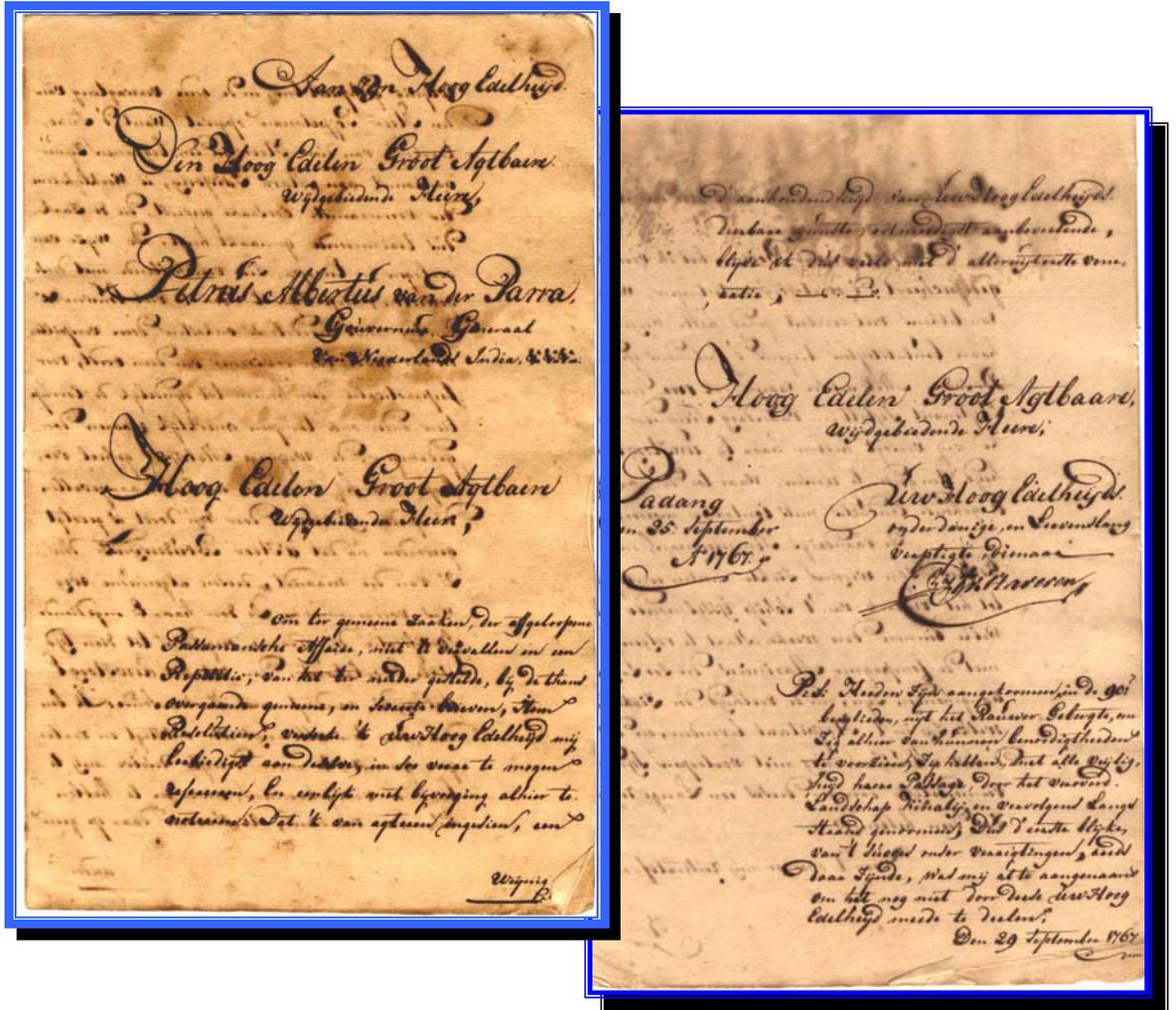
Peta Sumatera Barat,
Tanpa tahun [?]

ANRI : De Haan No. D 35



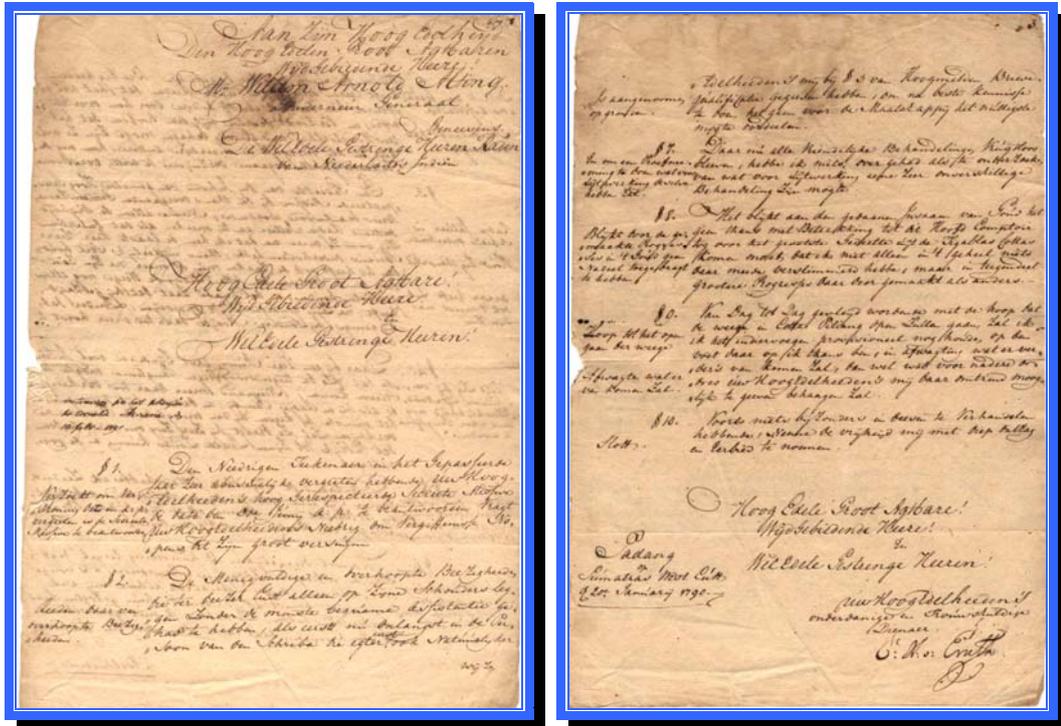
Perjanjian antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diwakili oleh *Laurens Pit de Jonge* dengan Kepala Adat di wilayah Pantai Barat Sumatera tentang hubungan persahabatan dan jaminan keamanan di Sumatera Barat. 29 Agustus 1680

ANRI: SWK No.6/7



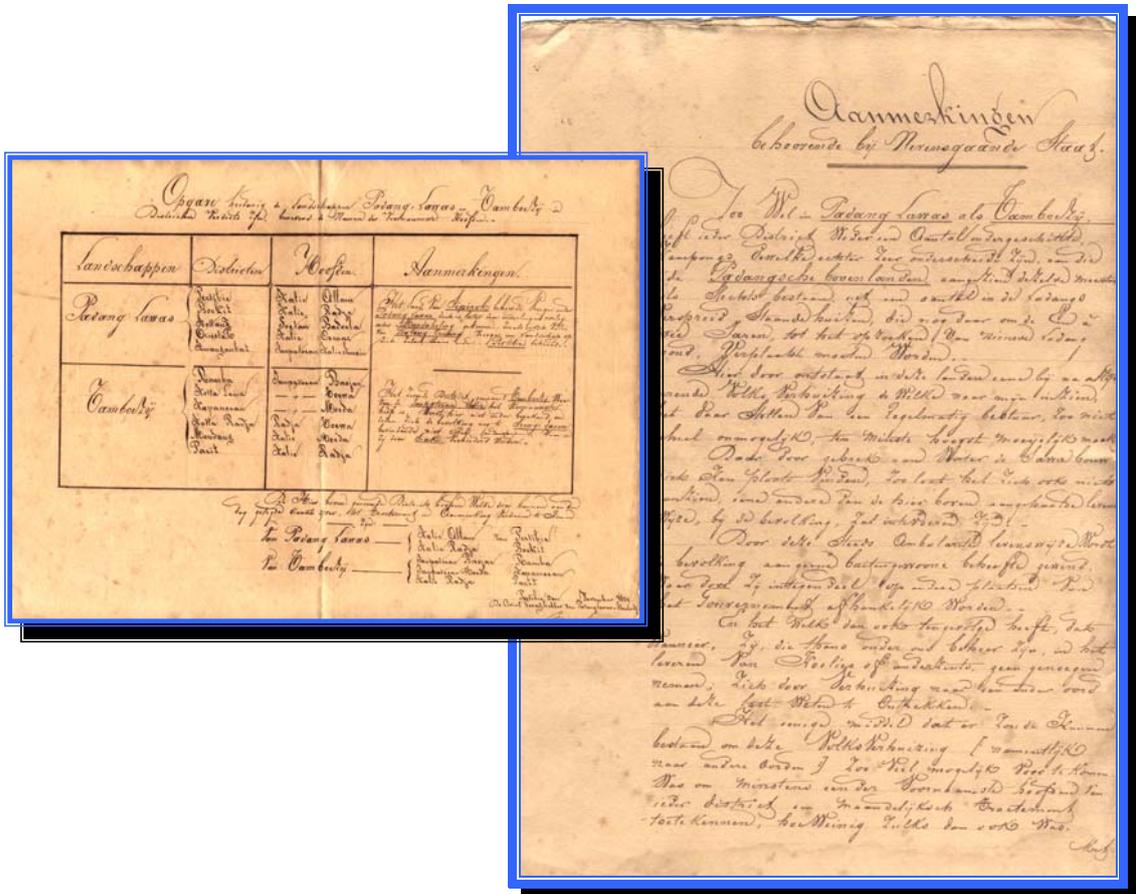
Surat dari *J. Gv. Staveren* kepada Gubernur Jenderal *P.A. van der Parra* tentang keadaan di wilayah Pasaman, 25 Desember 1767

ANRI : SWK No. 3/4



Surat rahasia dari E.H.Eneth kepada Gubernur Jenderal *Alting* tentang peraturan perdagangan pemerintah di Pantai Barat Sumatera 20 Januari 1790

ANRI: SWK no. 4/6



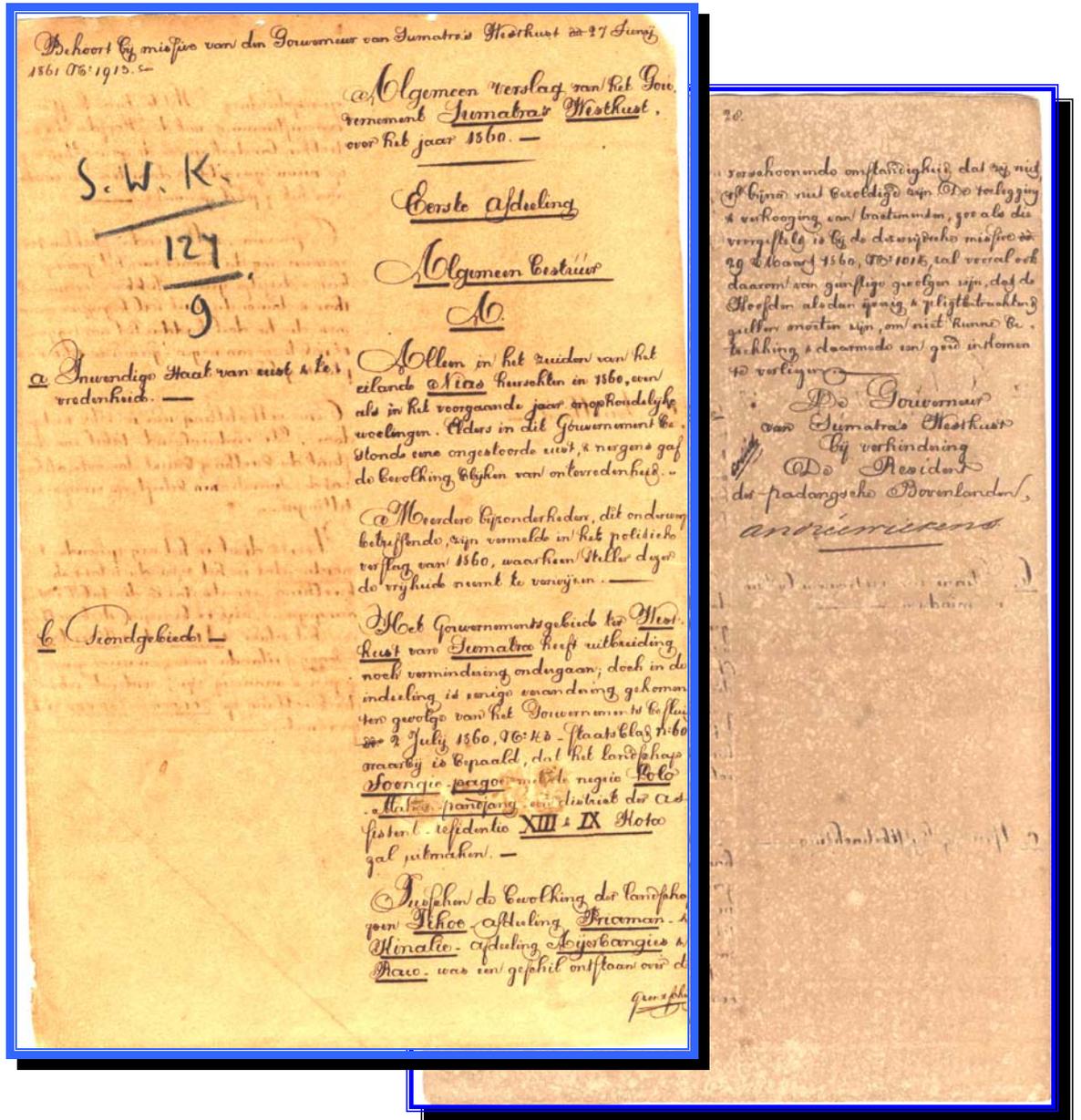
Daftar tentang daerah Padang Lawas dan Tamboezij yang terdiri dari distrik-distrik, disertai nama-nama kepala distriknya, November 1839

ANRI: SWK 151/4



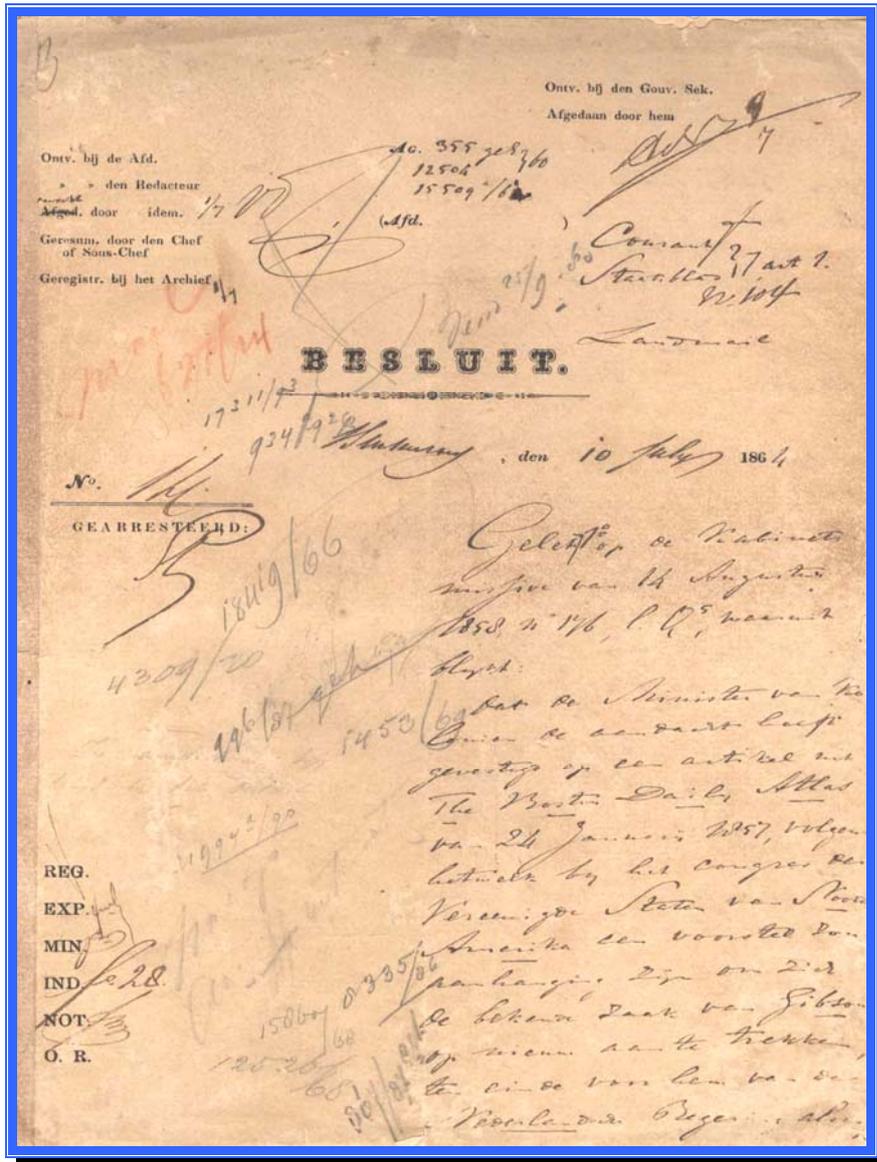
Peta Padang,
Tanpa tahun

ANRI: De Haan E 80



Laporan umum pemerintahan Sumatera Barat tahun 1860, 27 Juni 1861

ANRI : SWK No. 127/9



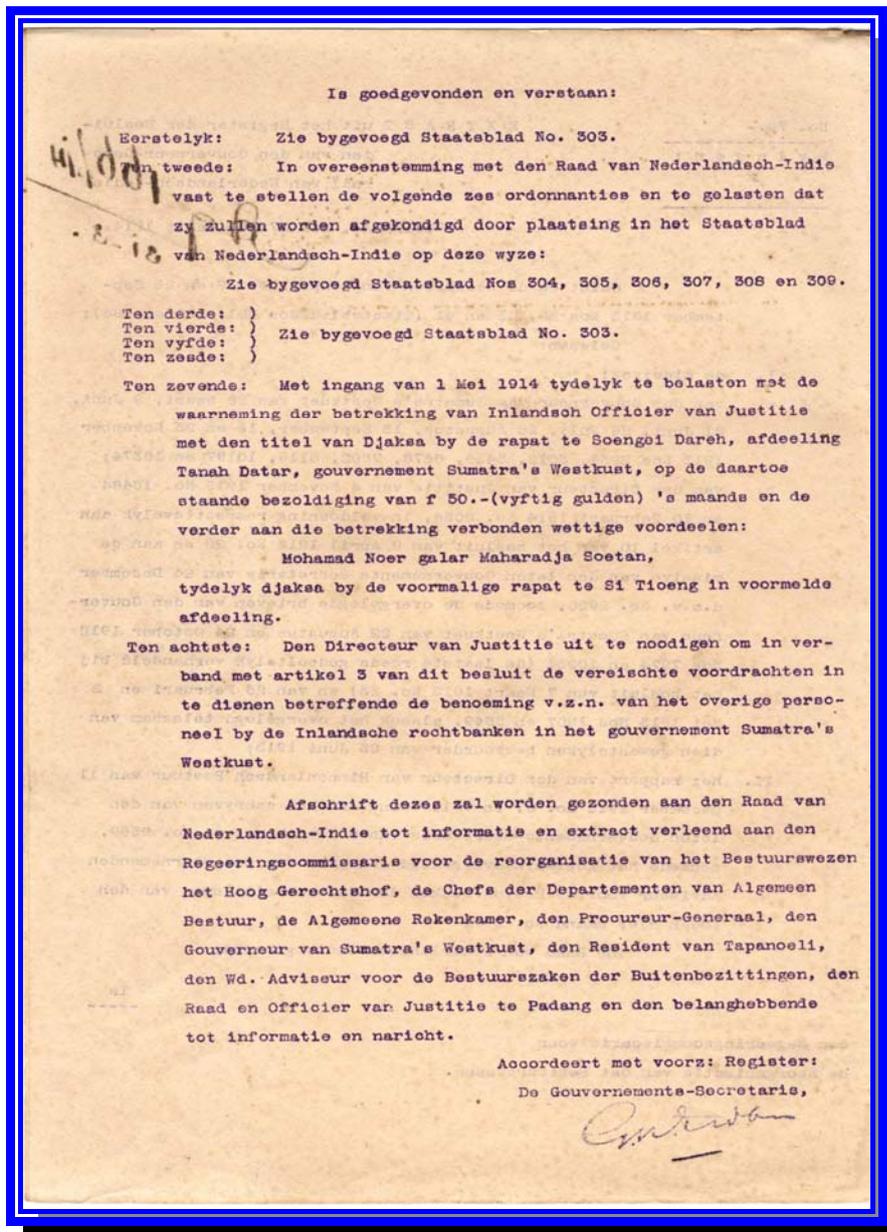
Surat Keputusan No. 14 tanggal 10 Juli 1864 tentang pembagian pengelompokkan pulau-pulau di bawah pemerintahan wilayah Pantai Barat Sumatera, bahwa pulau Mentawai terdiri dari Siberut, Siporak, Pogi Utara, Pogi selatan, dan kelompok pulau-pulau kecil Nassau
10 Juli 1864

ANRI : Besluit. 10 Juli 1864 no. 14



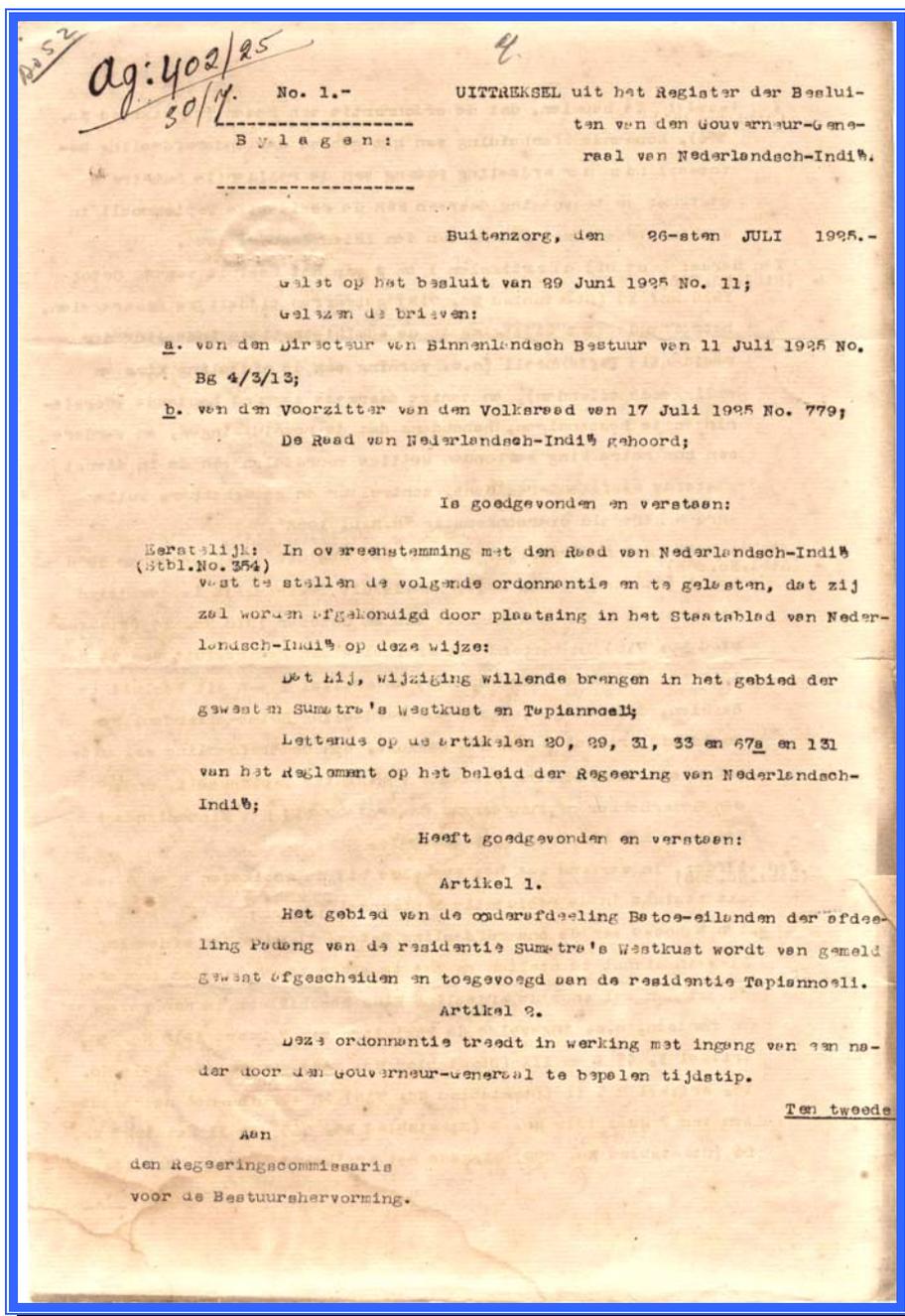
Peta wilayah Distrik Batanghari dan IX Koto Tanpa tahun [?]

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 237/3



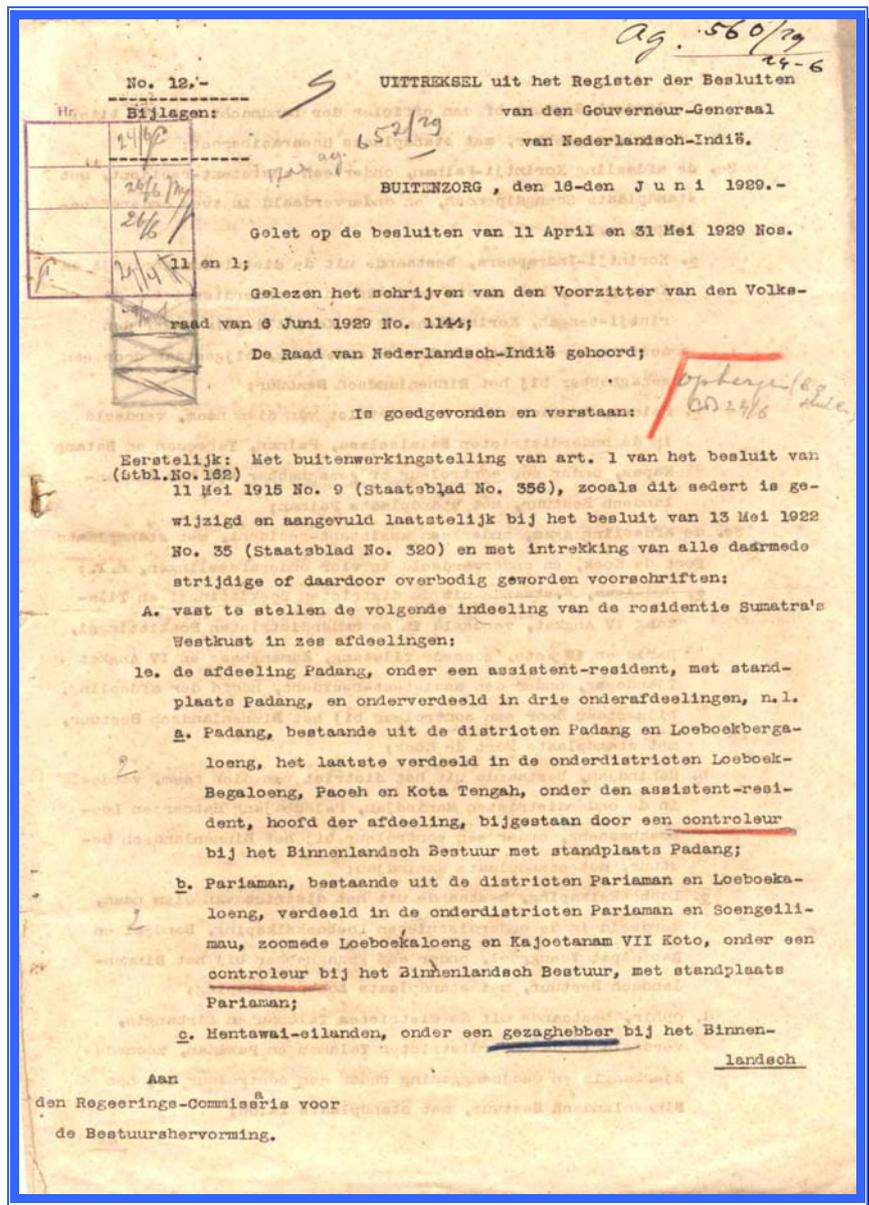
Surat pengangkatan Muhammad Noer dengan gelar Maharaja Sutan sebagai Jaksa Kepala di Si Tiong, Tanah Datar, 27 Maret 1914

ANRI: Ag No. 166/14 dalam Binnenland Bestuur No. 237/1



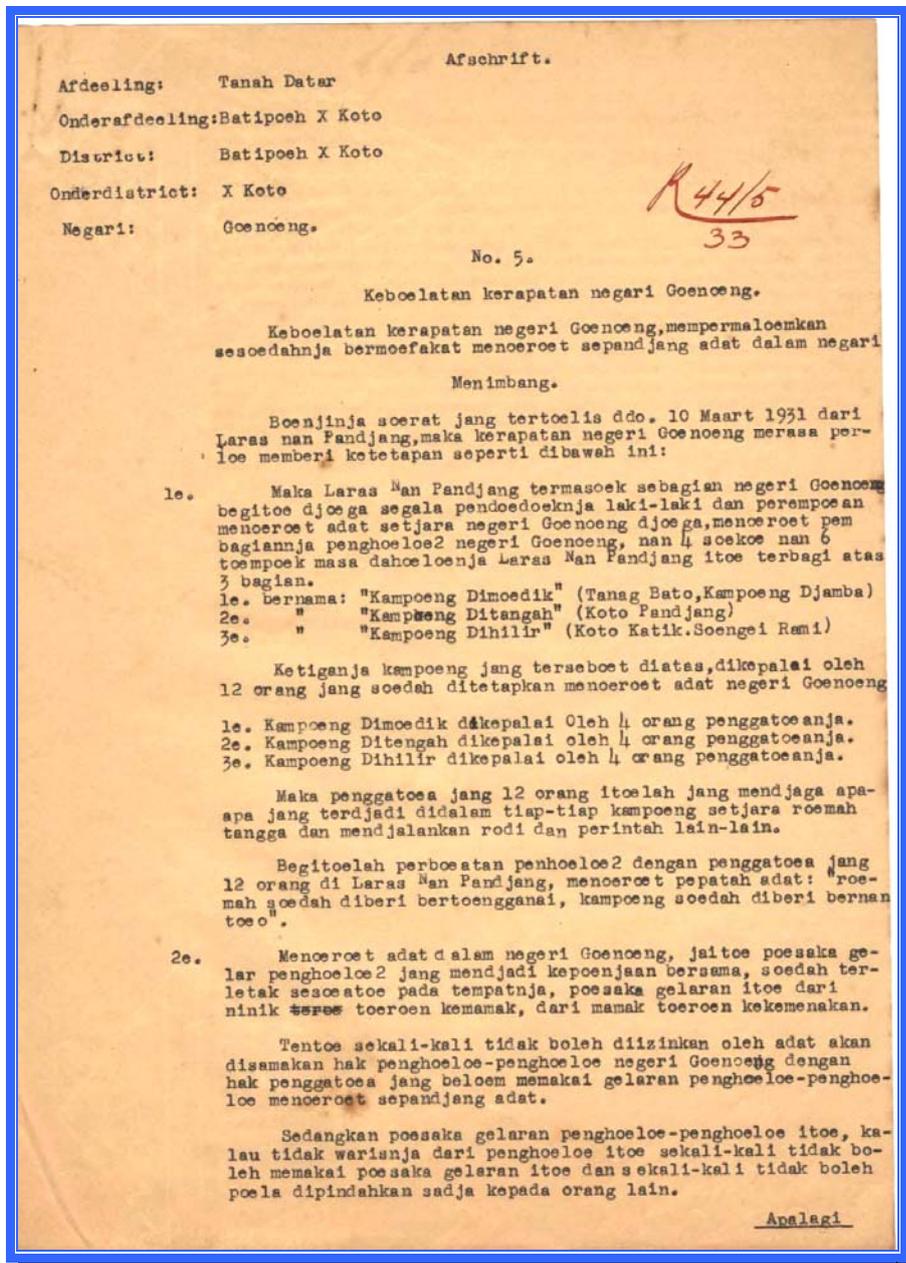
Salinan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang perubahan wilayah *Onderafdeeling* Kepulauan Batoe *Afdeeling* Padang Karesidenan Pantai Barat Sumatera menjadi Karesidenan Tapanuli,
26 Juli 1925

ANRI: Ag No. 402/25 dalam Binnenlandsch Bestuur No. 237/1



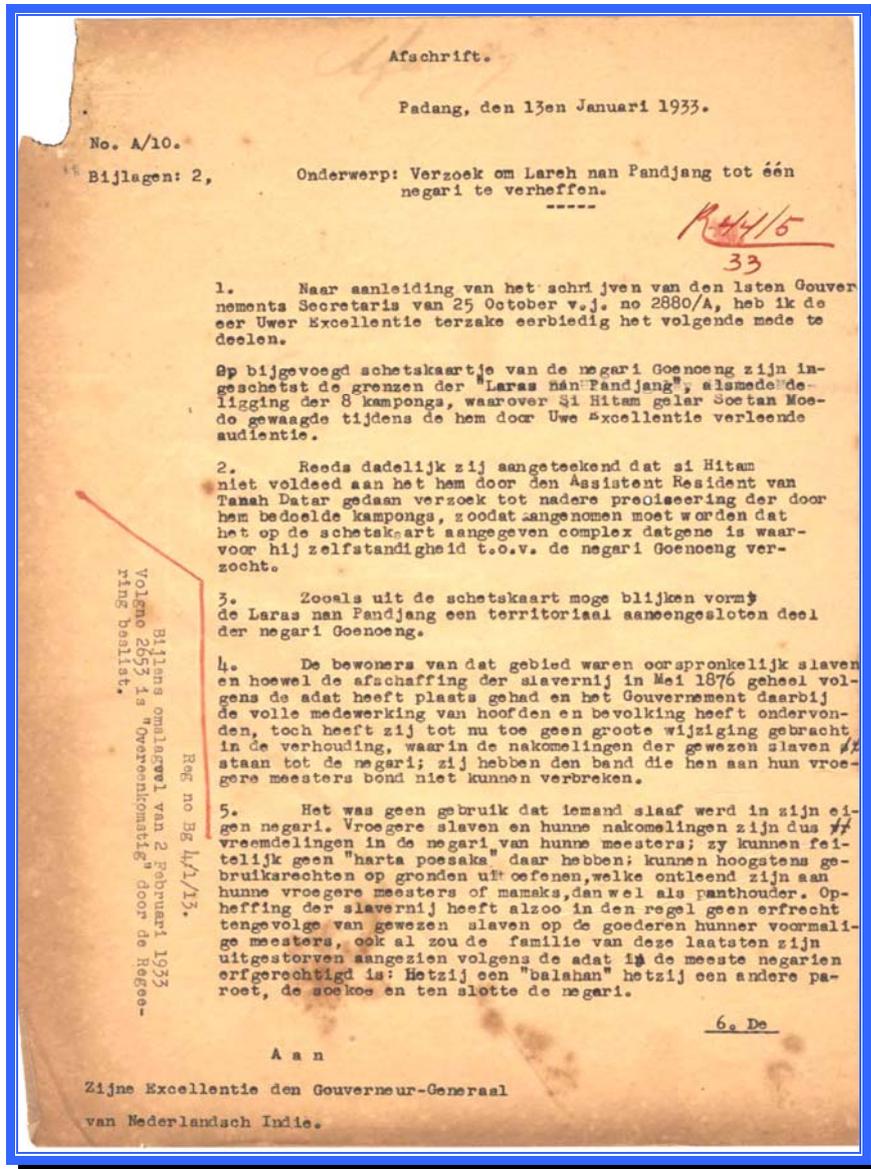
Salinan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pembagian wilayah Karesidenan Pantai Barat Sumatera yang terdiri dari 6 *afdeelingen* yakni *Afdeeling* Padang, *Afdeeling* Kerinci – Painan, *Afdeeling* Agam, *Afdeeling* Lima Puluh Koto, *Afdeeling* Tanah Datar, *Afdeeling* Solok,
 16 Juni 1929

ANRI : Ag No. 560/29 dalam Binnenlandsch Bestuur No. 276/1



Uraian data tentang wilayah Negeri Gunung, *Onderdistrik*
Sepuluh Koto, Distrik Batipuh,
18 November 1932

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1215



Surat permohonan Lareh Nan Pandjang untuk membangun
sebuah negari Goenoeng yang letaknya berbatasan
dengan 8 kampung,
13 Januari 1933

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1215

= 9 =

Kabupaten	Kawedanaan	Ketjamatan	Nama2 Bupati/Wedana/ Tjamat.
	21. Sibohoean		Sth. Kotimboeng D. Pance- soenan
		48. Sosa	A. Hoesin
		49. Baroemcen	Marahamad
9. Nias		50. Sosopan	Soetan Solim
	22. Nias Oetara		Ros. Telarembangoea
		51. G. Sitoli	L. Andries
		52. Toehembowoea	Aeali Zeboes
		53. Idanogawo	Hairoeddin Zaloehoe
		54. Lahewa	Mhd. Siddik Oea
		55. Lahoesa	Kalinga Hareba
	23. Nias Selatan		Maroendocri
		56. Telok Dalam	A.W. Harefa (wk)
		57. Lolowace	Justinus Zeboea
		58. Mandrehe	Poehembow
		59. Poeloe Bato	Pangenas Harefa
		
Keresidenan Sumatera Barat terdiri dari			
7 Kabupaten			
22 Kawedanaan			
63 Ketjamatan			
1. Residen			: Mr. Soetan Mohamed Rasjid
2. Bupati d/p			: Eny Karim
3. Sekretaris			: Karoen al Rasjid
4. Patih d/p			: Anwar glr Dt. Medjo Basa nan Koening
5. Wedana d/p			: Soehtiar glr. St. Pado Penghoeloe
6. Wedana d/p			: Sjari?
7. Wedana d/p			: Ahmad Sjoeb
8. Wedana d/p			: M. Rasjid Manan
9. Wedana d/p			: E. Abdoel Wahab Amin
10. Wedana d/p			: Abdoel Latif
11. Wedana d/p			: Soetan Baroemsjah
12. Tjamat d/p			: Gecali Lemail
13. Tjamat d/p			: Z. Arifin Alip
Kabupaten	Kawedanaan	Ketjamatan	Nama2 Bupati/Wedana/ Tjamat
1. Pasaman (Loe- boek Sikaping)	1. Loeboek Si- kaping	1. Lb. Sikaping	Basjarah Loebis
		2. Bondjol	Loeis glr Imam Pance- tjak nan Koening
		3. Raomapat Toeng- goel (Rao) Soetan Maleka
	2. Telamau (Telamau)	4. Telamau (Teloe)	Taharoedin Arif
		5. Pasaman (Soek- menanti)	Hasan Basri
			Marah Mahjoedin
			Maalip

Laporan Bureau Indonesia bagian Penerangan Jakarta tentang pembagian daerah dalam Propinsi Sumatera/ Kantor Gubernur Sumatera Bukittinggi, Kabupaten Kawedanaan, Kecamatan dan nama-nama Bupati/Wedana/Camat, 1948

ANRI : Djogja Documenten No. 260

RESOLUSI

Rapat Umum di Padang pada hari Rebo tanggal 25 Mei 1949 di bawah pimpinan "Komite Dewan Perwakilan Padang".

Rapat Umum pada hari Rebo tanggal 25 Mei 1949 di "U-Brigade-plein" di Padang dibawah pimpinan "Komite Dewan Perwakilan Padang", sebagai hasil dari inisiatif gerakan rakjat "DISBA (Daerah Istimewa Sumatera Barat), yang dihadiri oleh segala lapisan bangsa jaitu Indonesia, Belanda, Tionghoa dan India, diantara mana utusan-utusan rakjat dari daerah sekitar Padang, yang mewakili ± 150.000 penduduk daerah tsb. dan disana djuga hadir utusan-utusan dari Padang Pandjang dan Pajakoemboeh;

M e n d e n g a r :

Pembitjaraan-pembitjaraan dan uraian-uraian pada rapat tsb. berkenaan dengan suasana politik di Indonesia sekarang: **

M e i n g a t :

Kenjataan-kenjataan dalam persetujuan "Linggadjati" dan "Renville", yang meakui kepada seluruh bangsa Indonesia haknja buat menentukan nasibnja sendiri dalam lingkungan N.I.S. yang merdeka dan berdaulat ;

M e m p e r h a t i k a n :

a. Persetujuan van Royen-Roem tanggal 7 Mei 1949, yang djuga mendjemin hak menentukan nasib sendiri kepada seluruh rakjat di Indonesia ;

b. Suasana politik dan hasrat rakjat, mendesak supaya untuk Padang dan daerah sekitarnya ditijptakan dengan segera kesempatan untuk rakjat buat turut membitjarkan soal ketatanegaraan, maupun yang mengenai seluruh Indonesia, maupun yang mengenai daerahnja sendiri, sebagai langkah pertama untuk penabentukan satu Dewan Perwakilan untuk seluruh Sumatera Barat;

c. Hak kemerdekaan bangsa Indonesia;

M e m u t u s k a n :

1. Setudju dengan usaha-usaha dan tuntutan dari Komite Dewan Perwakilan di Padang untuk dapat terbentuknja satu dewan Perwakilan di Padang ;
2. Menjatakan hasrat penduduk di Padang dan daerah sekitarnya supaya dibentuk Dewan Perwakilan di Padang ;
3. Mendesak agar Dewan Perwakilan tsb. ditijptakan dengan djalan demokratec dan segera ;
4. Menjatakan bahwa Dewan Perwakilan tsb. bersedia dengan ichtiar

Bersama

-2-

sama supaya terbentuk satu Dewan Perwakilan untuk seluruh Sumatera Barat ;

Menjampaikan Resolusi ini kepada yang berhak dan berwajib untuk dipertimbangkannya dan kepada ~~xxx~~ usus untuk dikehajuk.

P a d a h e, 25 Mei 1949
Komite Dewan Perwakilan di Padang.

W.S.

Ketua Umum : Dr. Anas M.

Ketua Harian I : Sidi Sjamsoeddin.

Ketua Harian II : M. Ali.

Secretaris II : Sjarfoedin Boer.

"- I : E.J.Ch. Nettekoven.

Bendahara : Boerhanoedin.

Arissen : Adviseurs :

Maharadja Soetan. Dr. A. Hakim.

Mr. W.M. Ousekerk.

Dr. Roemma.

Dr. Roemawi.

A.L. de Boer.

St. Saibi.

Anggota :

K. Rikusahu.

A. Sait.

St. Alaoedin.

Rachman Rusly.

Padang, 10 Juni 1949
Voor eensluidend afschrift,
De Territoriaal Hoofd Officier,
C.R. van BOLDRIK
C.R. van BOLDRIK
Lt. Kol. ART. KNIL

Resolusi Komite Dewan Perwakilan Padang tentang tuntutan terbentuknja satu Dewan Perwakilan untuk seluruh Sumatera Barat, 10 Juni 1949

ANRI : Algemeene Secretarie No. 1290/1

25 - 11 - 1949

PERWAKILAN REPUBLIK LIJJO BUKITTINGGI

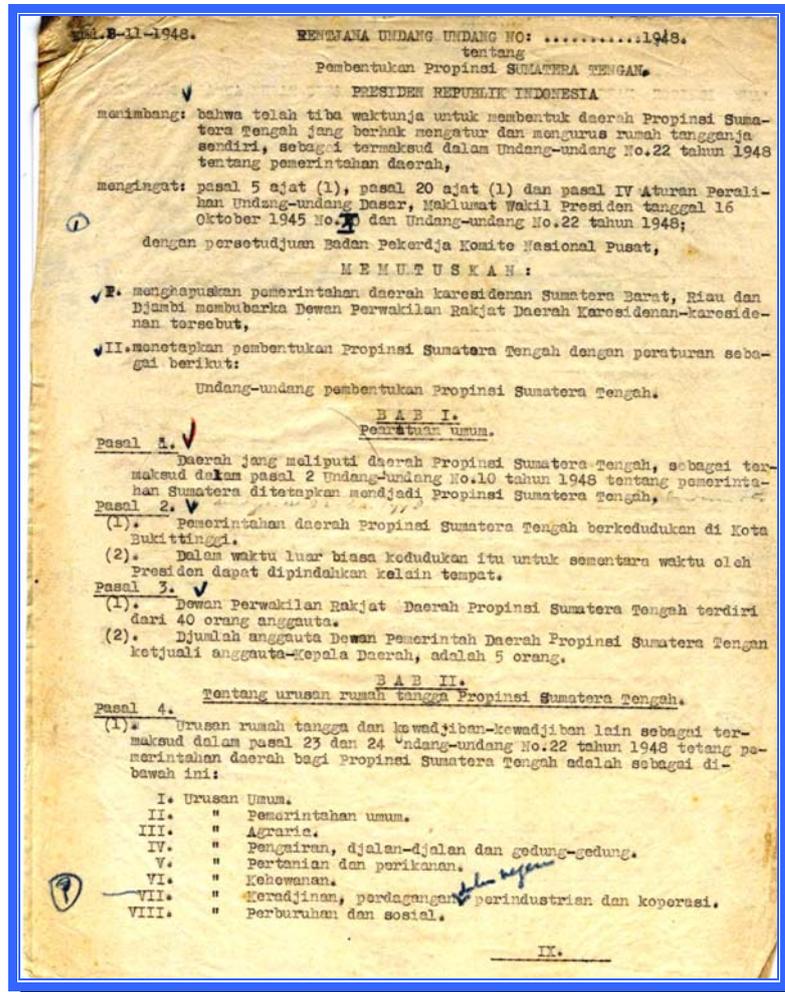
1287/S/DEL SAJA HARAP P T BERITAHUKAN KEPADA GUBMIL SUMATERATENGGAH UNTUK KABARKAN
KEPADA ANGGOTA KNIP UNTUK MENGEADLIRI SIDANG PLENO KNIP DI JOGJAKARTA TTK HARAP
DJUGA DIBERITAHUKAN KEPADA BAKANADALJAN SEKR KOMNIS PUSAT SUMATERATENGGAH DAN ZAINUDIN
UNTUK MEMBERIKAN DARI FONDS PEMERINTAH PUSAT UANG PERORGKOSAN PLANE PADANG-JOJA
TIGARATUS LIMA RUPIAH DAN UANG HARIAN DITAKSIR 8 HARI DUARATUS RUPIAH TIAP ORANG TTE
SEBANYAK SAJA HAL UANG INI DIPERHITUNGKAN TTE DR NASRUN GUBMIL SENDI

SEKDEL DJAN

Sekretariat Delegasi Republik Indonesia, Djl. Gambir-Selatan no. 4
Djakarta.-

Telegram dari Sekretariat Delegasi Indonesia Jakarta kepada
Local Joint Committee Bukittinggi tentang anggota Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menghadiri sidang pleno
Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta
25 Nopember 1949

ANRI : Delegasi Indonesia No. 1129



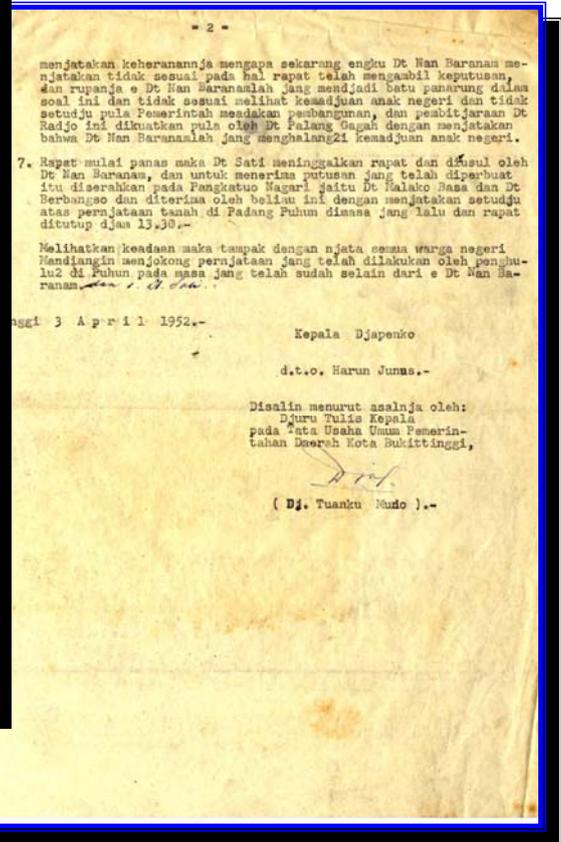
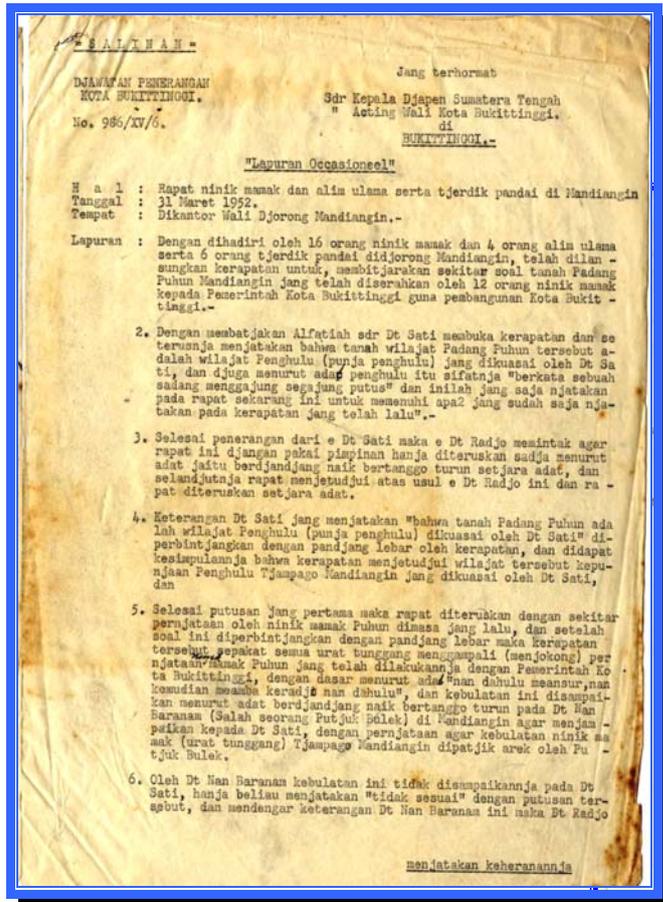
Rancangan Undang-Undang Pembentukan
Provinsi Sumatera Tengah
8 November 1948

ANRI: Sekretaris Negara No. 177



Presiden Sukarno sedang memberikan amanatnya dihadapan ribuan rakyat pada Rapat Umum di Sawah Lunto, 20 Juli 1951

ANRI : Kempen 515515



Laporan berkala Kepala Jawatan Penerangan Kota Bukittinggi kepada Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Tengah dan Acting Walikota Bukittinggi tentang hasil rapat 31 Maret 1952 membicarakan tanah Padang Puhun Mandiangin yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi guna pembangunan kota Bukittinggi.

3 April 1952

ANRI : Kabinet Presiden No. 847



Gubernur Sumatera Tengah dan Istri, Komandan Resimen,
Kepala Polisi Sumatera Tengah dan Komandan AURI sedang
menunggu kedatangan Perdana Menteri
Mr. Ali Sastroamijaya di Padang,
9 Nopember 1953

ANRI: Kempen 531109 CCI



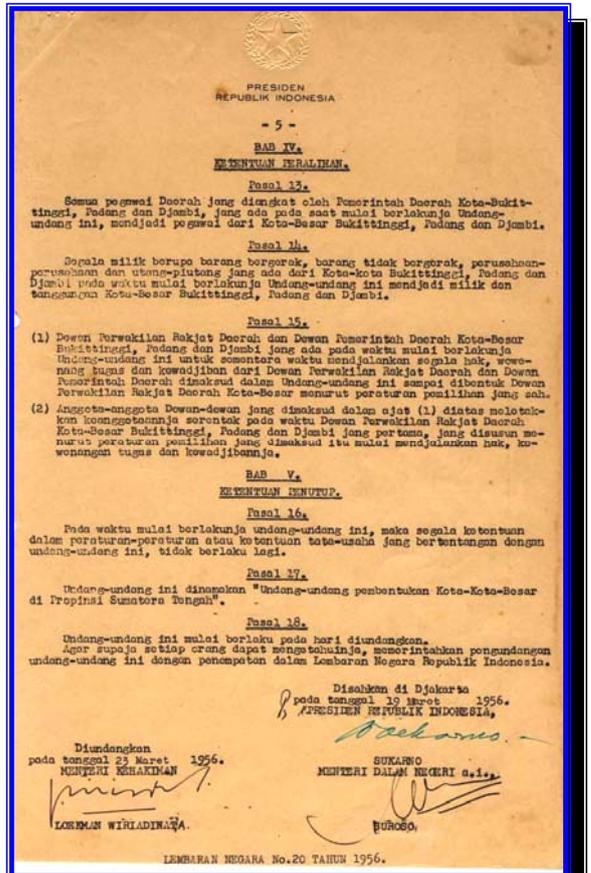
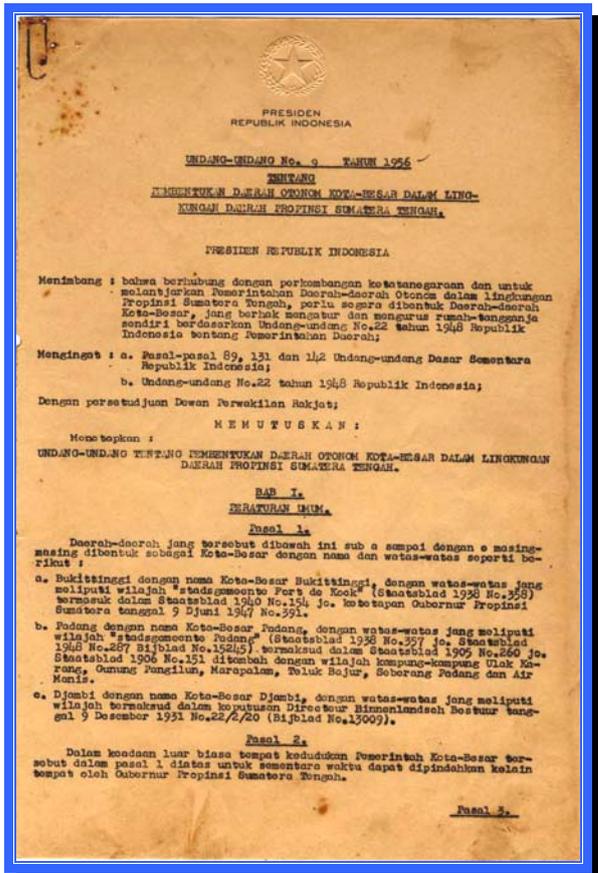
Perdana Menteri Mr.Ali Sastroamidjojo sedang berjabat tangan dengan para pejabat di lapangan terbang sebelum meninggalkan Padang, 9 Nopember 1953

ANRI : Kempen 531109 CC10



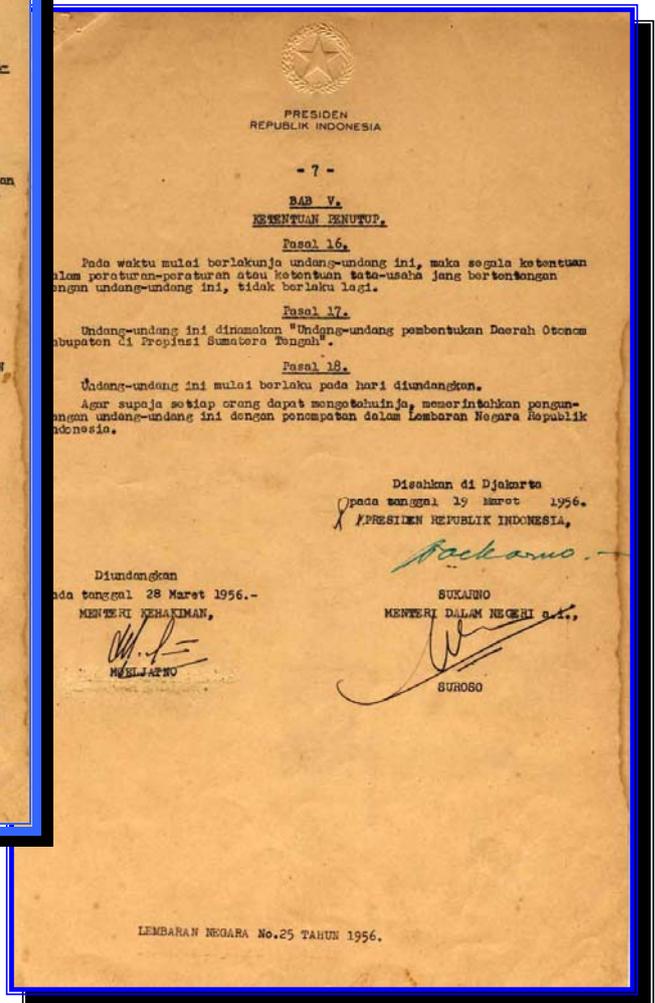
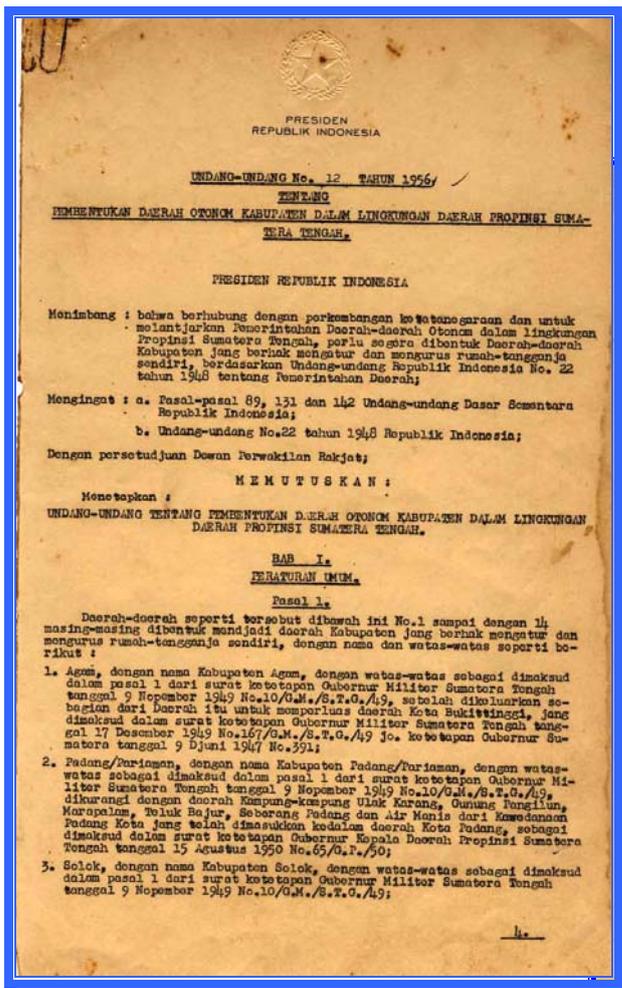
Wakil Presiden RI H. Mohammad Hatta berpidato dalam
rapat umum di Gadang,
10 April 1954

ANRI: Kempen 540410 CC 1 – 23



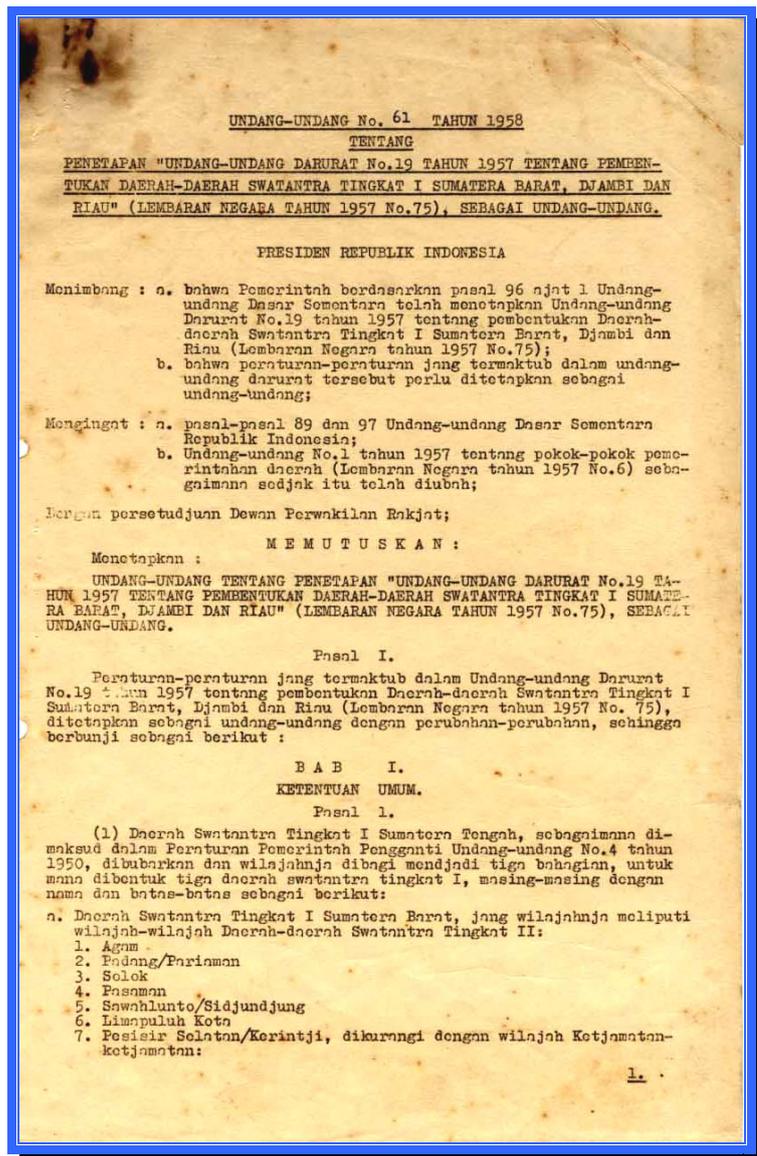
Undang-Undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 19 Maret 1956

Sekcab UU No. 185



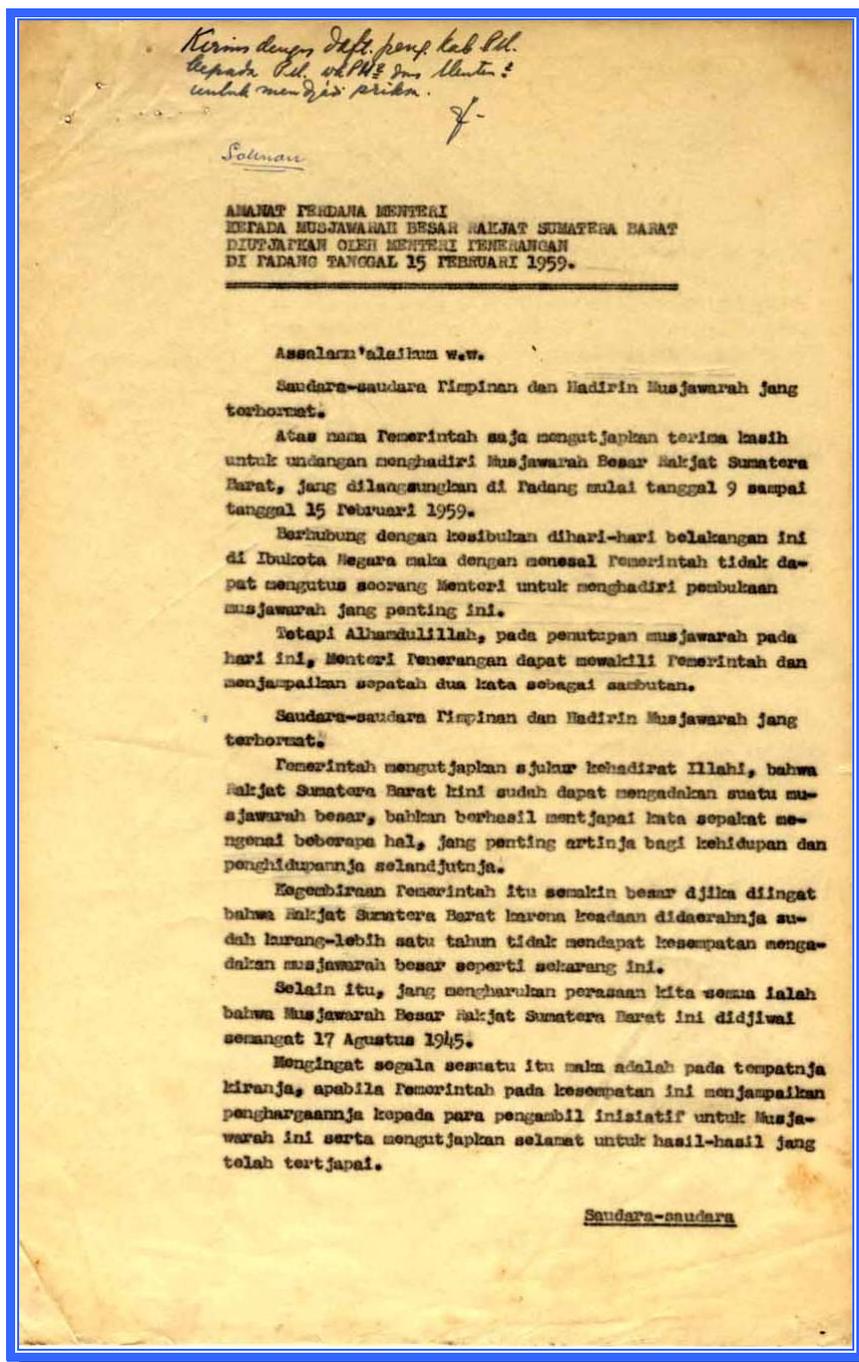
Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 19 Maret 1956

ANRI : Sekkab UU No. 187



Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-Undang.
25 Juli 1958

ANRI : Sekkab UU No. 272



Amanat Perdana Menteri Ir. H. Djuanda kepada Musyawarah Besar Rakyat Sumatera Barat Pertama yang diucapkan oleh Menteri Penerangan, Padang 15 Februari 1959

ANRI : Perdana Menteri Republik Indonesia No. 528

Politik dan Pertahanan



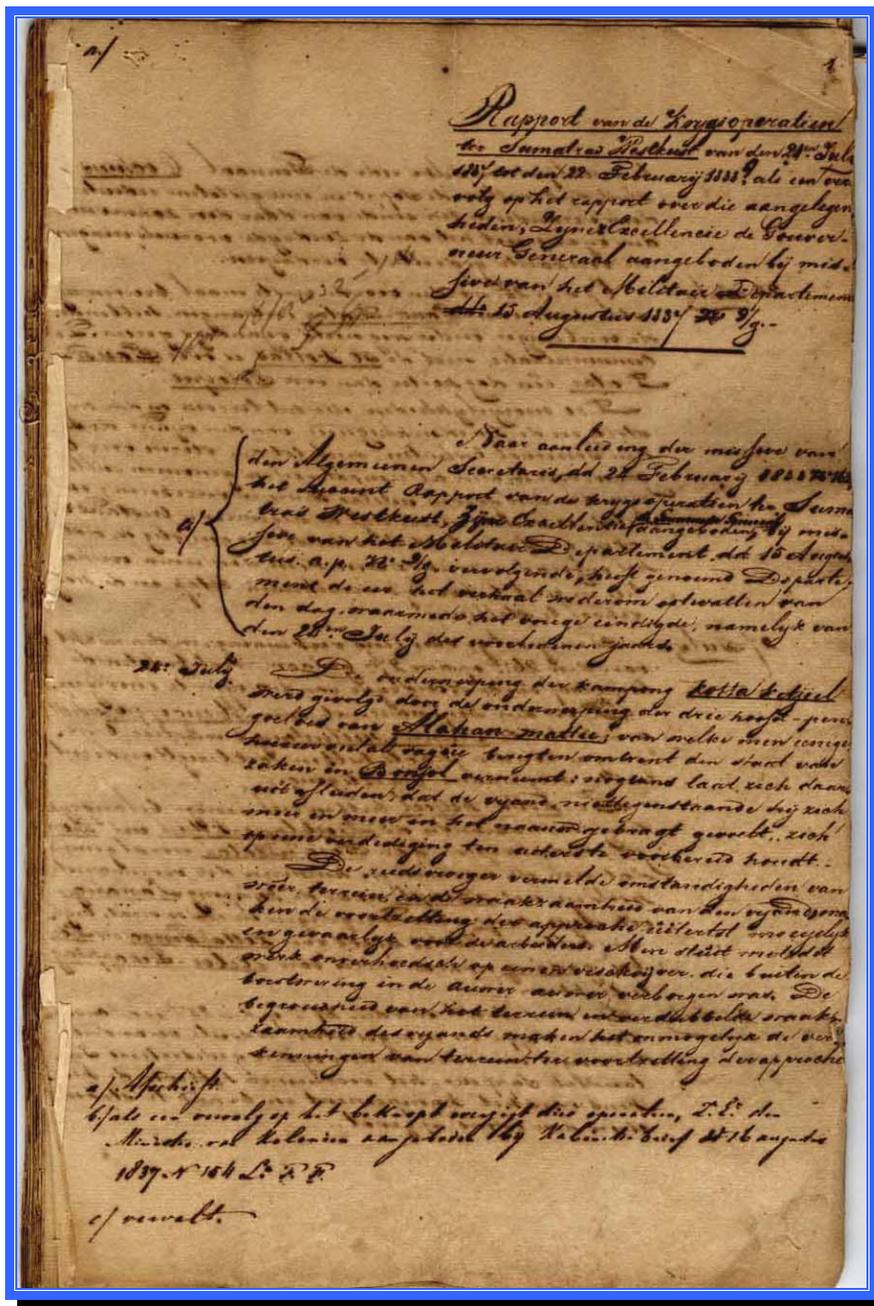
Sket gambar sebagian daerah *Padangche Bovenlanden* yang dipakai sebagai tempat operasi militer 3 Mei 1823

ANRI : Topografi No. B 64



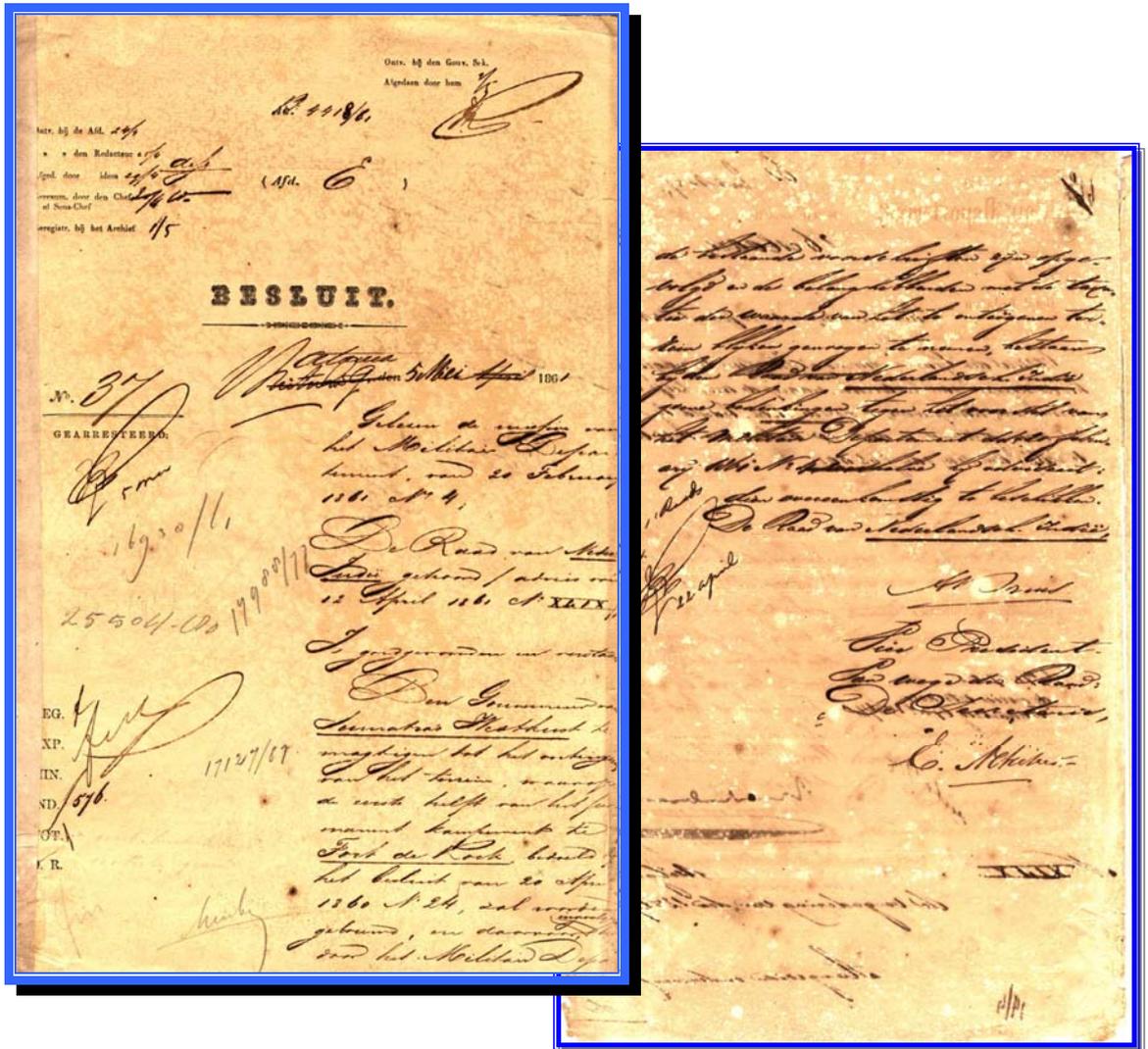
Gambar tentang posisi pengintaian militer di lembah
Alahanpanian,
12 April 1837

ANRI: SWK No. 148/4b



Laporan operasi militer di Pantai Barat Sumatera, mulai 21 Juli 1837 - 22 Februari 1838

ANRI : SWK 148/4a



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 37 Tahun 1861 tentang pembelian tanah datar di bagian selatan Fort de Kock seharga f 46.092 yang akan digunakan sebagai perkampungan militer, 5 Mei 1861

ANRI : Bt 5 Mei 1861 NO. 37

Les. D.
 Salinan surat dari Komandan Militer kepada Komandan Angkatan Laut wilayah Pantai Barat Sumatra tentang keadaan di wilayah Sumatera Barat, 1864
 Padang, den 3^{de} December 1863
 A. B. Schmitt
 N^o 3639
 In verloop van de voorged. missie van den 2^{den} Sept. 1863 tot 26^{sten} October 1863, betreffende het op Noord Soengai te Moeacca Bilage, het Karam Sarilaga, gelyken de meent van die gemaekten van bondelproeven te en Wadjo, te kete voor de daerby bedoelde gelyken die miti dya en fland geschiedt met, te te kete, te Wadjo, alinea aan: lappschyten van de missie van den assistent resident van Padang den 11 October 1863 tot 22^{den} October 1863, met de vertaling van het daerby bedoelde rapport des chevanant van de Kuisproeven te de vertaling van het de gelyken tijd ontwaaren nade rapport van Radja Soem (of Radja Soerah), alsmede de vertaling van een sedit van Radja Soem ontwaaren betragt, gedagte van Soerah den 4^{den} November 1863, waerin by mededeeling werd dat op den 10^{den} der maande October o.e. inwonen van Soerah synelt zyn teaan vanden dat een tyen pannen vanden by die gelyken hied een pynende ontwaaren heeft te sedit van vanden id.
 De instbedelde meent gelyken, volgens vanden bedoelde rapporten, gelyken zyn zonder enige aansluiting van de te de vertalingen, althoe om zeeh met hun kete, te kete nede, volgens veldgelyken, voor gelyken gelyken te te te.
 De Kommandant
 van het Militaire Station
 te Sumatra Westkust.

de inboerlingen, tekenen moeten sluiten.
 Het behoeft niet te zeggen dat alle mededeelingen van gelyken van het gelyken byzette de Soeg. gelyken, die kete, die kete, om die kete van dat kete, dat veld te kete, te kete, te kete, die kete, al te kete te kete, te kete, te kete, te kete.
 De Kommandant
 van het Militaire Station
 te Sumatra Westkust.
 De Kommandant
 van het Militaire Station
 te Sumatra Westkust.

Salinan surat dari Komandan Militer kepada Komandan Angkatan Laut wilayah Pantai Barat Sumatra tentang keadaan di wilayah Sumatera Barat, 1864

ANRI : Lampiran Bt.10 Juli 1864 No.14

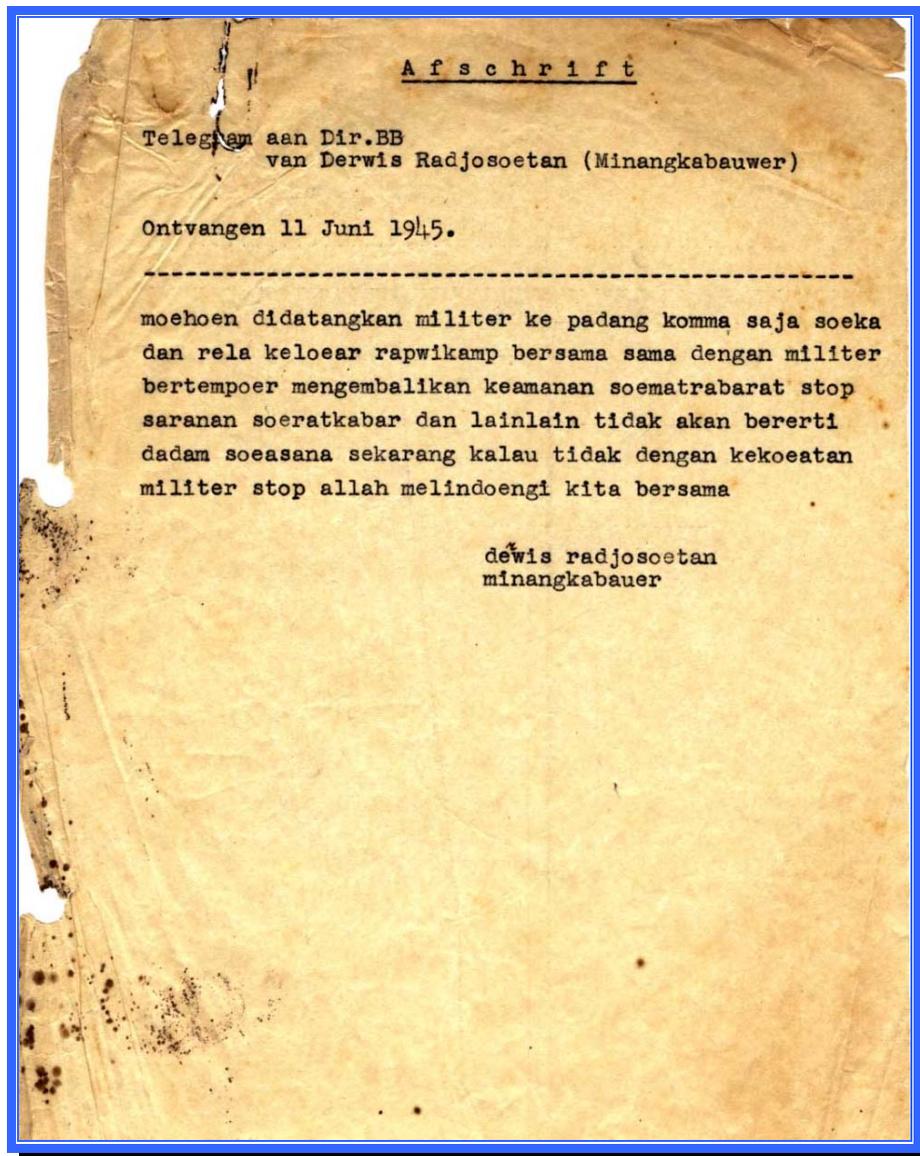
DEPARTEMENT
VAN
OORLOG.
VII^e Afdeling.
Generale Staf.

Rapport van 11 April 1890.
Bijlagen: N^o 1 VII.

ONDERWERP.	TOELICHTING.
<p><i>Voorstel tot wijziging van den bestaanden afstandswijzer van Sumatra's Westkust alsmede tot het doen opstellen dierer wijziging in het staatsblad van Nederlandsch-Indië.</i></p>	<p><i>C. B. bijgevoegd.</i> Op den, bij Gouvernements besluit d'at 26. Augustus 1883, N^o 10, gearresteerden afstandswijzer met bijbehorende schetskaart van het Gouvernement Sumatra's Westkust, opgenomen in Staatsblad N^o 16 van 1884, op den weg van <u>Tadang Sandj</u> naar <u>Fort van de Capellen</u>, <u>Pintoe Angin</u> als etappeplaats aangegeven. Rijkens een van den Militairen Commandant van Sumatra's Westkust ontraagen schrijven be- vindt zich daar ter plaats echter geen pasanten-huis, waar volgens de bepalingen, aangegeven in <u>artikel</u></p> <p style="text-align: right;"><i>826</i></p>

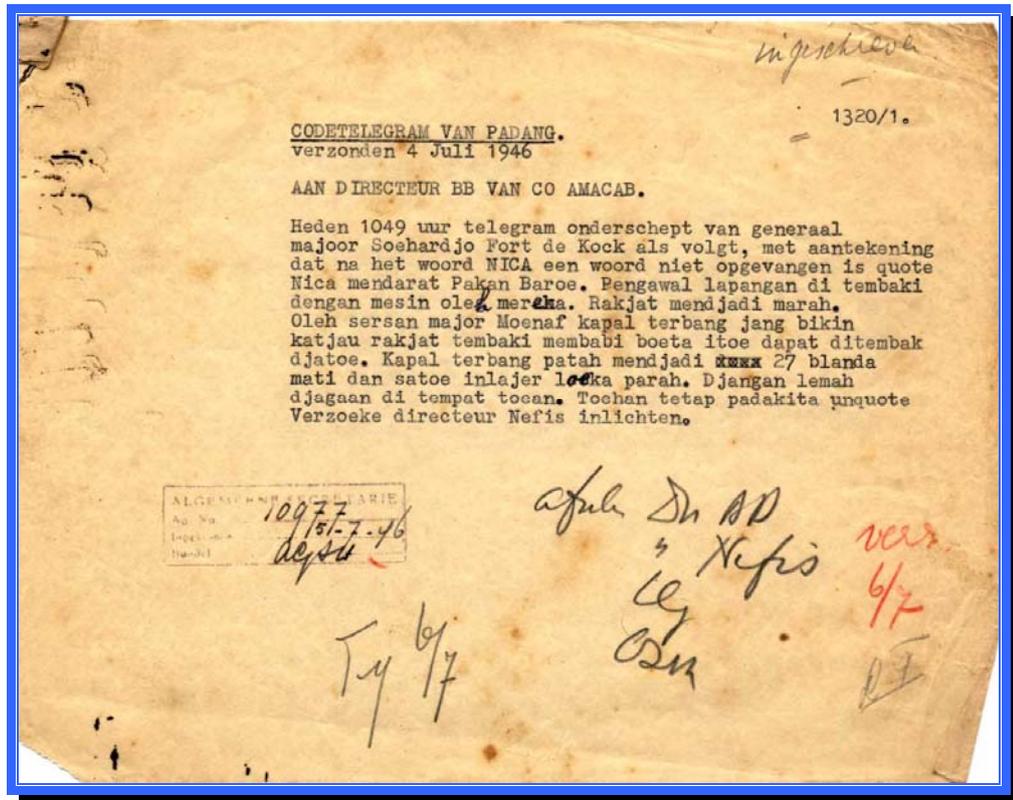
Surat usulan Komandan Departemen Pertahanan untuk membangun rumah peristirahatan di Pintu Angin di Simaboer yang ditunjuk sebagai tempat istirahat militer, 11 April 1890

ANRI : Besluit 11 Juni 1890 No. 6



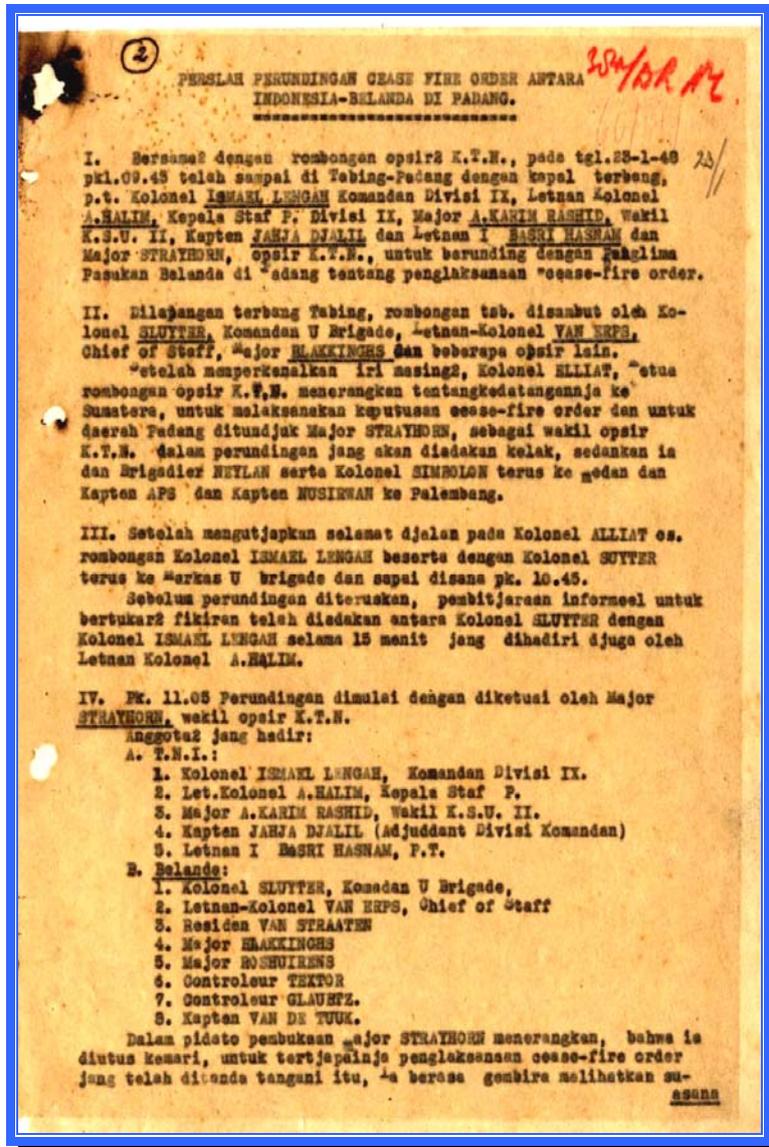
Salinan telegram dari Derwis Radjosoetan kepada Direktur Dalam Negeri tentang permohonan pasukan militer didatangkan ke Padang dan keinginannya bertempur untuk mengembalikan keamanan di Sumatera Barat, 11 Juni 1945

ANRI: Algemeene Secretarie No. 1003



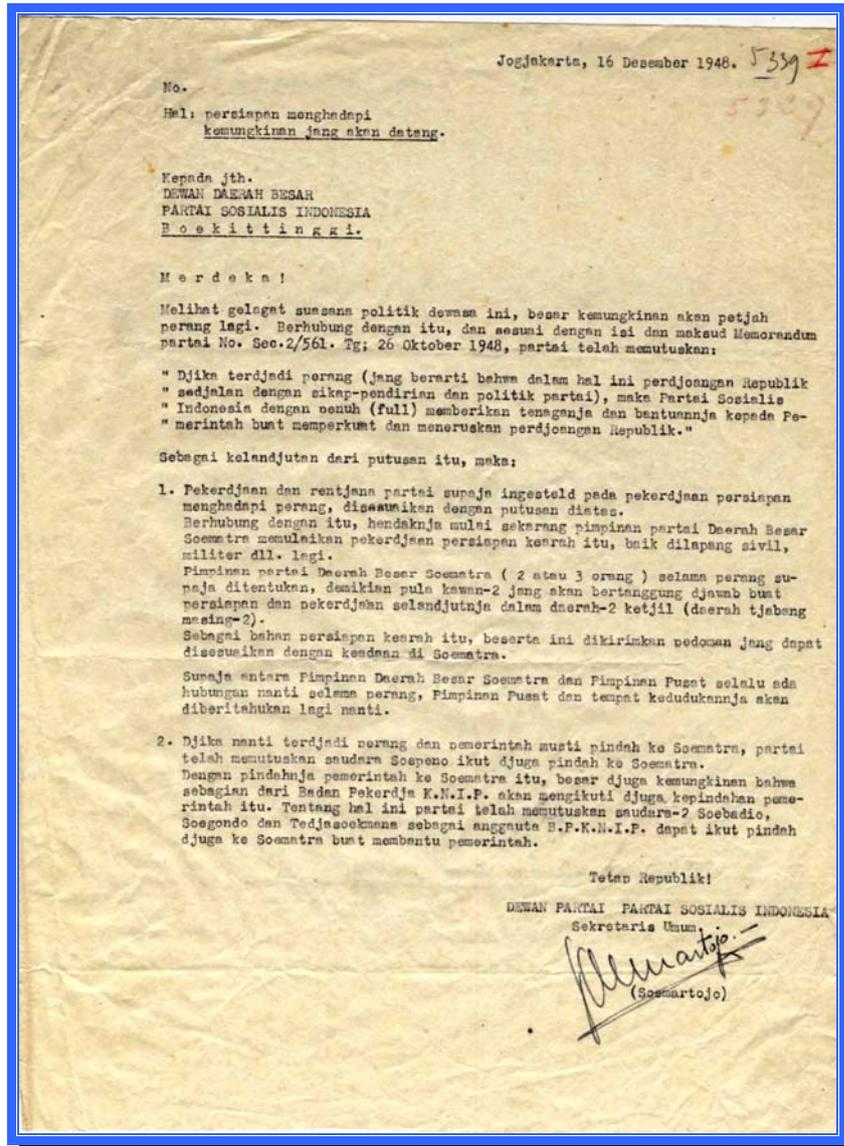
Telegram dari Mayor Jenderal Soehardjo di *Fort de Kock* Padang tentang berita jatuhnya kapal terbang Belanda di Pakan Baru; dimana 27 orang Belanda meninggal dan 1 orang luka parah, 4 Juli 1946

ANRI : Algemeene Secretarie Ag No. 10977/1946



Laporan Wakil Kepala Staf Umum II Tentara Komondo Sumatera
tentang perundingan gencatan senjata antara
Indonesia – Belanda di Padang, 24 Januari 1948

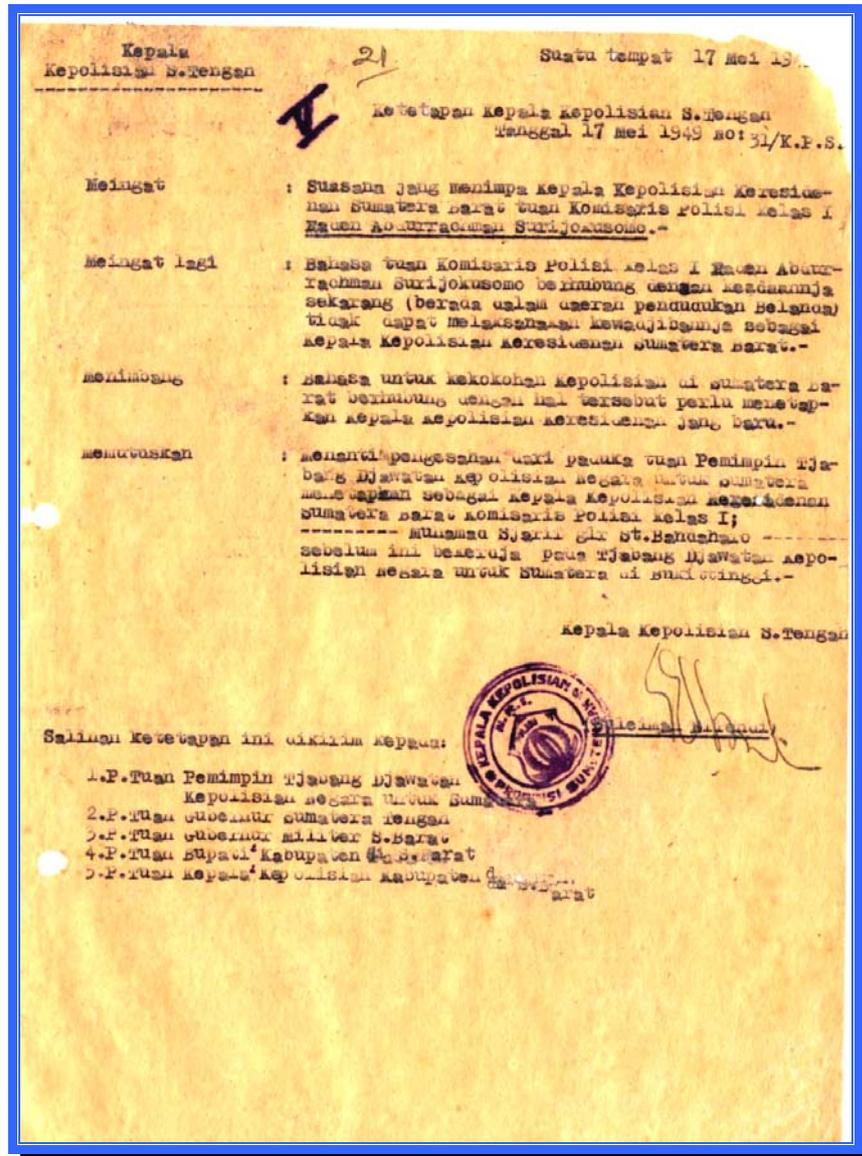
ANRI: Delegasi Indonesia No. 33



Surat dari Dewan Partai-Partai Sosialis Indonesia kepada Dewan Daerah Besar Partai Sosialis Indonesia Bukit Tinggi tentang berbagai macam persiapan menghadapi perang melawan Belanda serta kemungkinan yang akan terjadi,

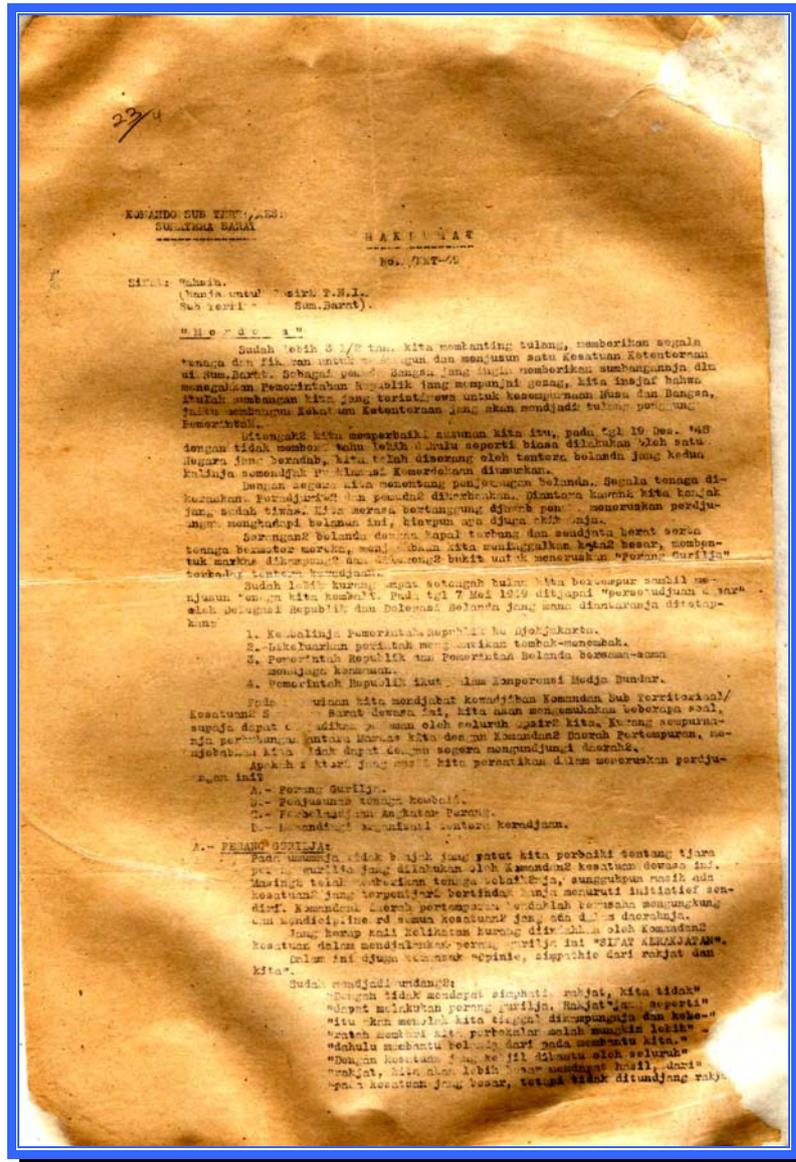
16 Desember 1948

ANRI : Djogja Documenten No. 94



Ketetapan Kepala Kepolisian Sumatera Tengah Suleiman Bilenui
No. 31/K.P.S.T. tentang Pengangkatan Muhammad. Sjarif Gelar
St. Bandaharo sebagai Kepala Kepolisian Karesidenan
Sumatera Barat Komisariss Polisi kelas 1
17 Mei 1949

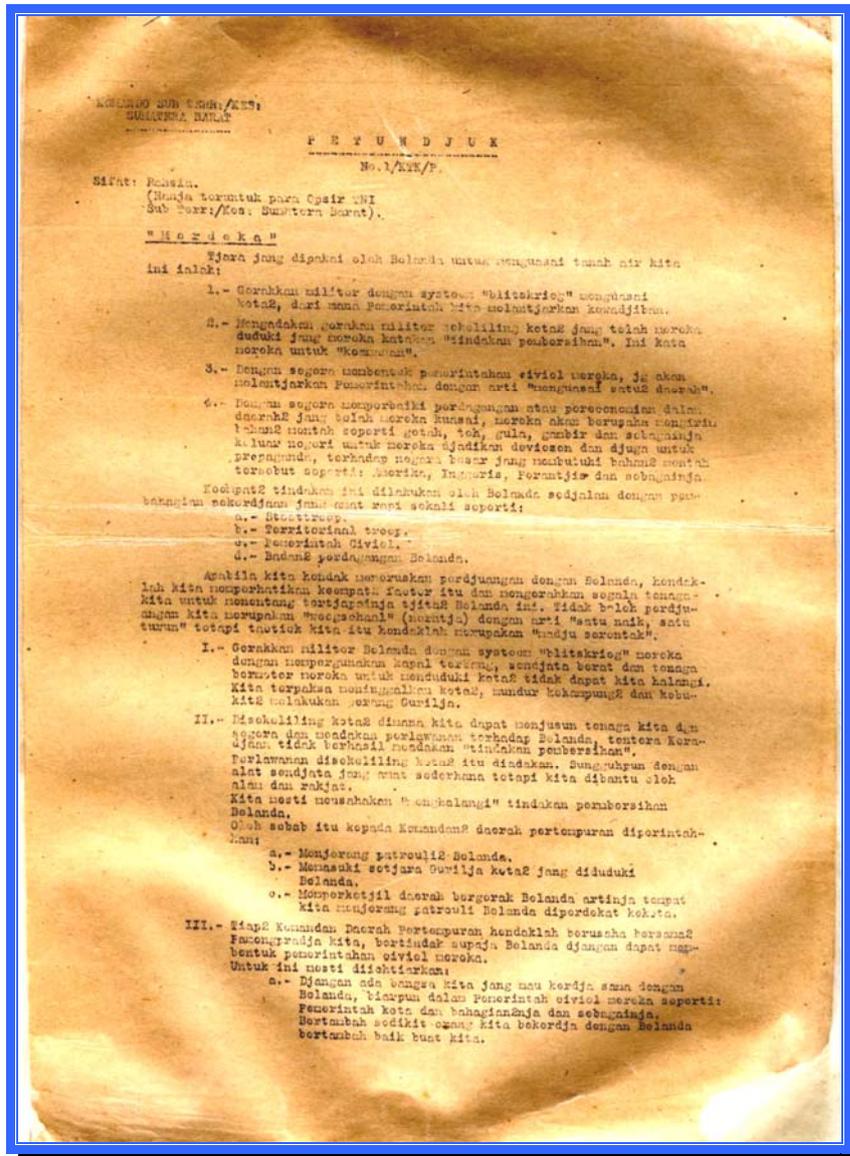
ANRI: PDRI No. 21



Maklumat No. 3 /KKT-49 Komando Subteritorial Kesatuan Sumatera Barat tentang perang gerilya, menyusun tenaga rakyat, perbelanjaan angkatan perang , organisasi dan persetujuan yang di capai antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Belanda.

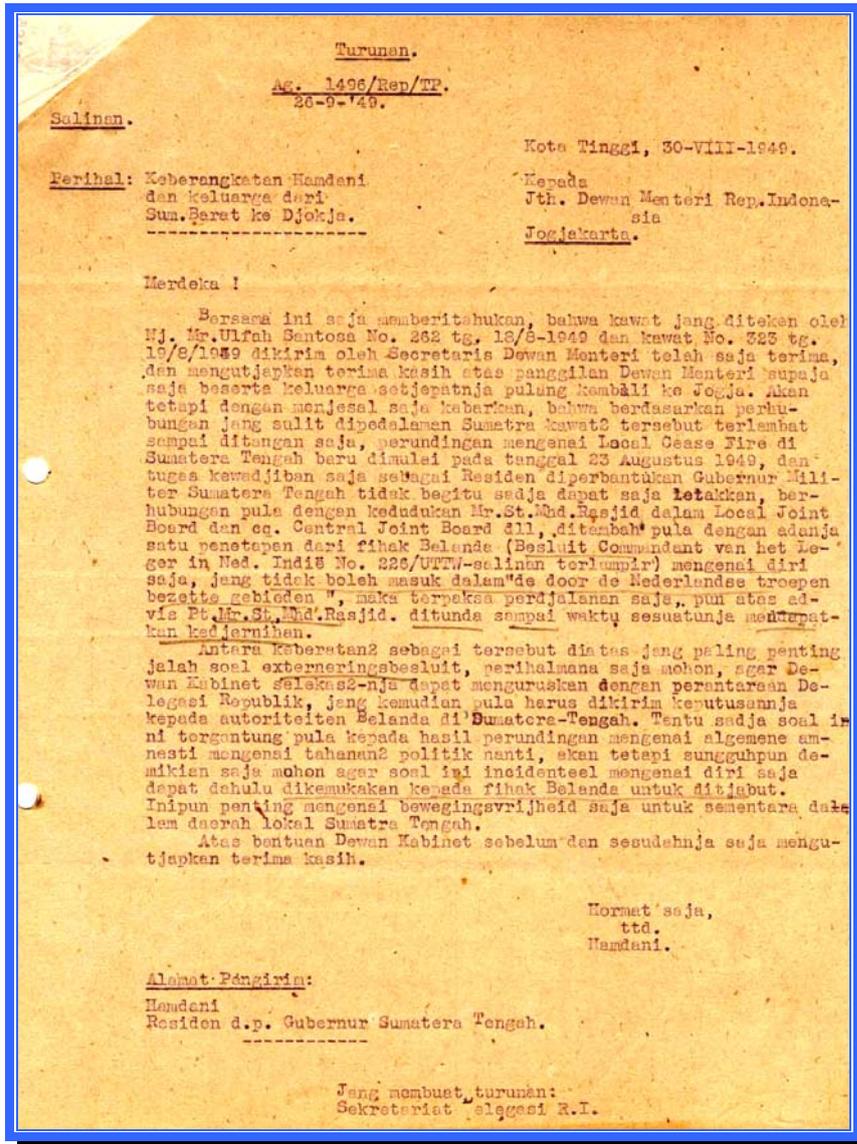
16 Juni 1949

ANRI: PDRI No. 23.



Petunjuk No. 1/KTK/P Komando Subterritoriaal Kesatuan Sumatera Barat tentang strategi yang dipakai oleh Belanda untuk menguasai tanah air, sehingga pihak RI dapat mengantisipasi, 17 Juni 1949

ANRI : PDRI No. 23



Surat dari Residen diperbantukan Gubernur Sumatera Tengah, Hamdani kepada Dewan Menteri RI di Jogjakarta tentang keberangkatannya dan keluarga dari Sumatera Barat ke Jogjakarta tertunda karena larangan oleh tentara Belanda, 30 Agustus 1949

ANRI : Delegasi Indonesia No. 1068

Mr. St. Mohd. Rasjid

GUBERNUR MILITER
SUMATERA TENGAH
-903-

S.O.T.A.

K A L I M A N G I
KOTA BUKIT TINGGI
10. 09 - 10 - 1949.

pengembalian daerah Sumatera Barat
menurut Renville dan pasal 41 dari
Resolusi Dewan Keamanan t.p. 20-1-49.

Resolusi Dewan Keamanan t.p. 20-1-49 dan direktivanya t.p. 20-3-49 beserta Resolusi Statement t.p. 7-5-49 memungkinkan berangsur-angsur dikembalikan Sumatera Belanda dari daerah yang diduduki musuh oleh militer-kota ke t.p. 10-10-49. Sebagai langkah pertama, maka diadakan pertemuan "meeting of minds" t.p. 22 Januari 1949, t.p. 26-2-49 beresidensi Djaja mulai dibicarakan oleh tentara Belanda, berakhir t.p. 3-3-49 dan t.p. 5 April 1949 Pemerintahan Sumatera-Bukita kembali ke Djokja.

Kedudukan Bukit Tinggi ditinjau dari segi politis sebagai ibukota-kota dari Republik sangat penting, oleh sebab itu pada rapat pleno Pemerintah Republik Indonesia (PRRI) t.p. 28-2-49 disetujui tempat di Sumatera Tengah, diambil keputusan oleh PRRI, bahwa sebagai langkah kedua daerah Sumatera Barat menurut Renville mesti pula dibicarakan oleh tentara Belanda (tentara musuh), dimana-mana Bukit Tinggi dan Pekanbaru dengan segera harus dikembalikan kepada Republik.

Tanggal 27-3-49 putusan PRRI telah dikirimkan kepada K.S.A.P. disektor Negeri Tengah dan waktu rombongan Letnan-Mayor-Raja t.p. 6-7-49 mendampingi PRRI disektor Pekanbaru tuntas PRRI itu juga dibicarakan. Peristiwa mendahului, memang hal itu sedang dalam penyelesaian, dan ini akan terlaksana pada waktu "cease fire" akan dimajukan atas nilai berlaku.

Kepercayaan peninjauan antara wakil Republik dengan wakil Belanda mengenai pengembalian daerah ini diluar beresidensi Djaja dirumahnya, karena pihak Belanda tidak mau mengambil visio-politik untuk bertentangan dengan kabinet dan parlemen Belanda.

Sejarah perincian peninjauan terdahulu-meskipun t.p. 3-3-49 dimajukan dan efektif berlaku saat Djaja t.p. 13/1-49 dan saat Sumatera t.p. 14/5-49 soal pengembalian Bukit Tinggi menjadi soal hangat dalam majlis dan di beberapa tempat di Barat dan sekitar Bukit Tinggi oleh rakyat diadukan tempat dimana mempunyai hasil-hasil masalah Pemerintah Pusat dan Delegation Republik dalam Central Joint Board untuk mengemukakan di-tarkannya tentara Belanda dari Bukit Tinggi dan sekitarnya.

Selama itu pers-interview Mr. Ruffin, wakil-Perdana Menteri, di-melatakan Bukit Tinggi mesti segera dikembalikan, sangat menghormati Belanda, sehingga menjadi peninjauan dalam sidang L.C-3 (Bukit Tinggi). Apakah tindakan Mr. J.F. deWit, wakil-Perdana Menteri, maka itu tidak dapat diketahui, tetapi semakin terjate karang diplomatik, karena karavenan Menteri Seberang Belanda, sesudah itu menuntut, bahwa tidak betul Bukit Tinggi akan dikembalikan, karena Belanda berpegang teguh pada 10-10-49-statement dan hanya Djokja (beresidensi) dikembalikan. Pengumuman karavenan ini menyebabkan kita dalam L.C-3 Bukit Tinggi tidak menduduki soal Bukit Tinggi sedjarah lokal, yang sedang dalam masa yang baik dapat ditunjukkan dengan pihak Belanda yang berurusan di Sumatera Barat.

Peristiwa kita Bukit Tinggi saat Sumatera umum dan Sumatera-Tengah dimajukan terjate dari hal yang tersebut di atas ini. Diantar kedudukan Konsariat Pemerintah Pusat (Konsarin) Brussel Utara, Resolusi dan Resolusi, Gubernur Sumatera Tengah dan inspektur Sumatera Tengah, inspektur Bukit Tinggi.

- 2 -

- 2 -

2g. Militer-strategis Bukit Tinggi satu kota yang letaknya baik sekali.

3g. Dari Bukit Tinggi gampang sekali mengadakan pertolongan dengan Djokja (Pemerintah Pusat), karena mempunyai alat yang cukup (sender, radio, pelabuhan kapal terbang dll.).

4g. Perhubungan ke Utara (Tapanuli), Nias (Pakan Baru) dan Nias diadukan melalui Bukit Tinggi.

5g. Untuk menjaga kedudukan Ek. Perdana Menteri, yang sekarang tinggal di Kota Raja, perlu sekali tempat yang strategis, yang hanya Bukit Tinggi satu-satunya tempat yang terdapat.

6g. Bukit Tinggi tidak dapat dimasuki kedudukannya dengan Medan, Padang dan Palembang, karena ketiga kota itu termasuk daerah Renville.

7g. Prestige Pemerintah Pusat dimata Rakyat Sumatera akan naik dengan memperjuangkan dengan segera pengembalian Bukit Tinggi dan sekitarnya kepada Republik.

Sehalasan hal yang tersebut diatas, maka rasanya, selain-jembatarkan soal Djaja dalam CJB, dibicarakan diakhir mengenai soal Barat umum dan Bukit Tinggi beserta Pekanbaru dimajukan dalam CJB, apalagi mengingat KEM hampir berakhir dan penjerahan kodisilat akan dilangsungkan sebelum t.p. 1 Januari 1950, maka sebaiknya dari sekarang diadakan persinjauan yang berangsur dengan Pemerintahan dan K.S.A.P.A.S.A.S.A.S. mengenai pemukiman tentara Belanda dari Barat.

Lebih lekas hal ini dibicarakan, lebih baik, untuk menjaga kegelisahan Rakyat dengan mantap dan perhatian Pemerintah dapat pula ditunjukan kepada hal yang berkenaan dengan Sumatera.

Dengan pengharapan anggotas Delegation Republik Indonesia umum dan Delegation R.I. dalam CJB khususnya akan memuaskan perhatiannya kepada hal yang diatas, maka yang beritanda dengan dibawah ini telah menemui kearah-jembatarkan diberikan oleh Wakil Rakyat dan Pemerintah Sumatera-Tengah kepanjanja-

Djakarta, 28 Oktober 1949.-

GUBERNUR MILITER SUMATERA TENGAH
sekarang di Djakarta sebagai
anggotas Delegation R.I.-
(ttd. Mr. St. Mohd. Rasjid)

J.H. Ketua Delegation R.I.
dan J.H. Ketua Delegation R.I.
dalam C.J.B.
di Djakarta.

Tambahan kepada:

1. Dewan Menteri R.I. di Djokja.
2. Anggotas Delegation dan Anggotas Delegation di C.J.B.
3. Penasehat Delegation.
4. Sekretaris Jenderal Delegation dan Sekretaris Delegation di C.J.B.
5. Komisaris Pemerintah Sumatera Tengah.
6. Staf Gubernur Militer Sumatera Tengah.
7. Delegation Indonesia dalam L.C-3 Bukit Tinggi.

S a r i p . -

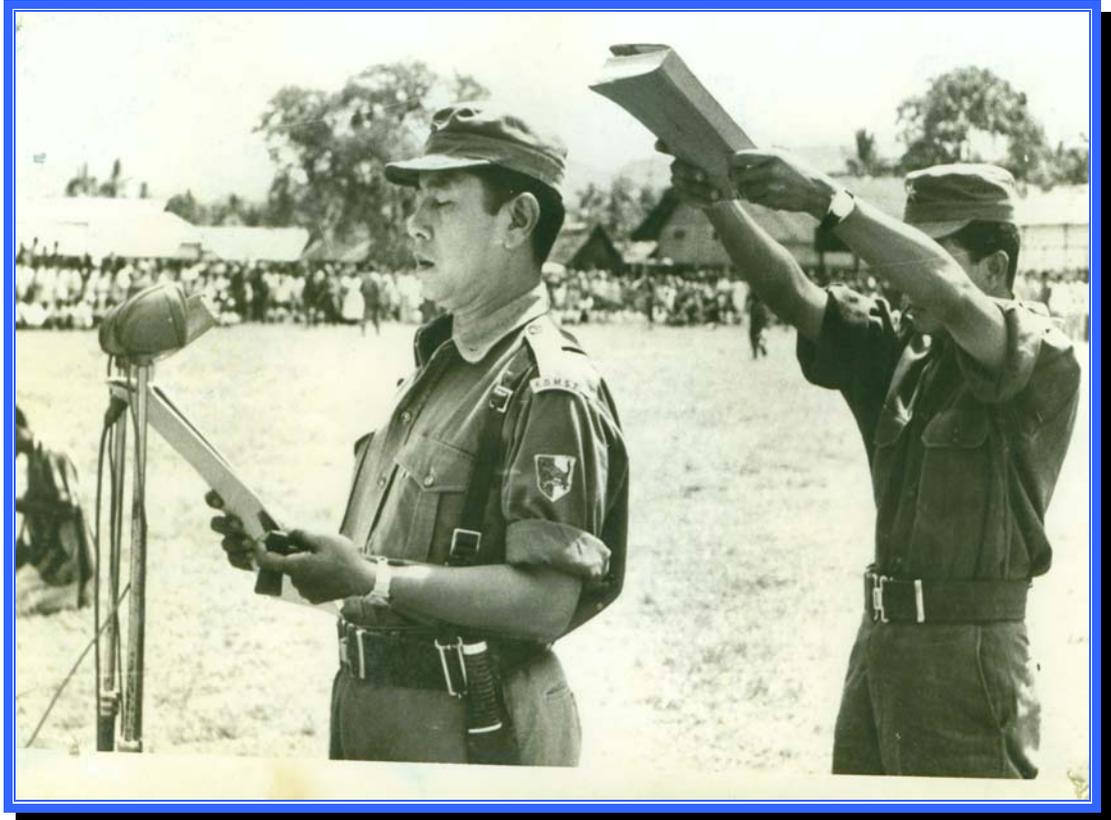
Nota Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. St. Mohd Rasjid tentang pengembalian daerah Sumatera Barat menurut Perjanjian Renville, 28 Oktober 1949

ANRI : Delegasi Indonesia No. 958



Semboyan yang ditulis di Tugu Kemerdekaan di Bukittinggi,
26 Agustus 1950

ANRI: Kempen 50661



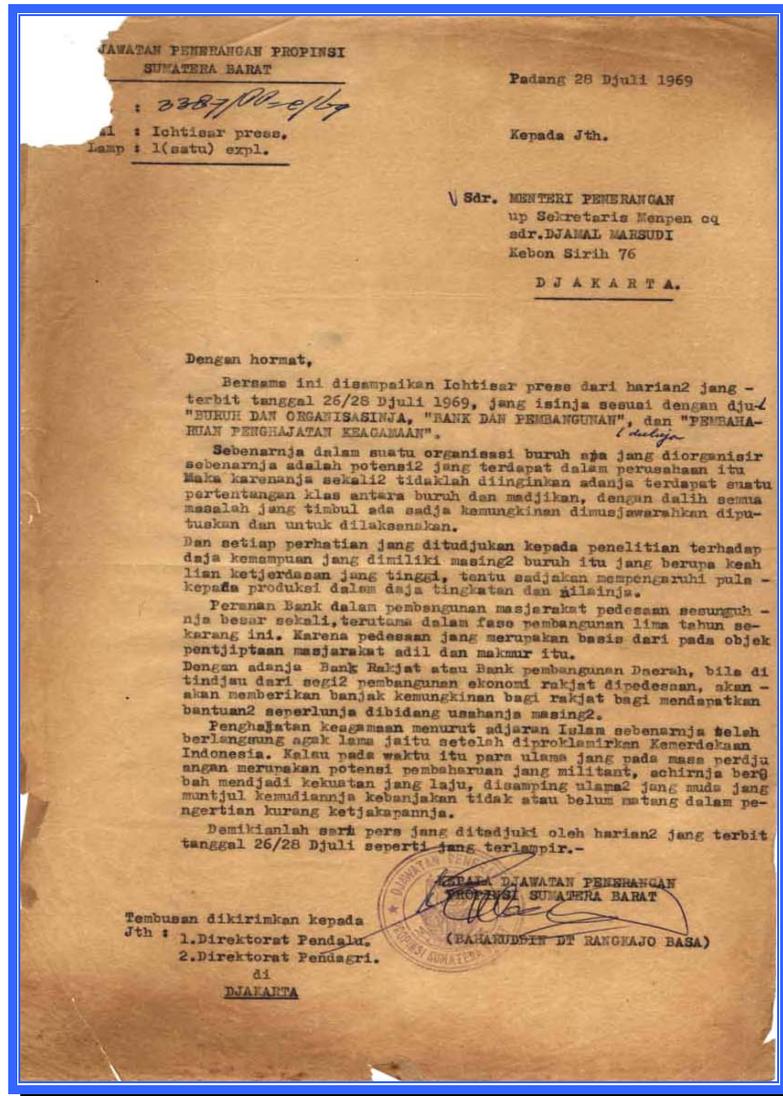
Letkol Achmad Hussein (Bekas Komandan Komando Daerah
Militer Sumatera Timur/KDMST Ketua Dewan Banteng PRRI
Daerah Solok) menyatakan sumpah setia kembali kepangkuan
RI, Alqur'an dipegang oleh Mayor Burhani
dari CPRAD Kodam XVII,
23 Juni 1961

ANRI: Kempen 610623 1A



Pimpinan Kodam XVII Sumatera menyaksikan senjata-senjata yang diserahkan oleh Letkol Achmad Hussein bersama dengan 15 orang perwira menengah PRRI/RPI di daerah Solok, 23 Juni 1961

ANRI : Kempen 610623 51



Surat dari Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Barat kepada Menteri Penerangan RI tentang Ichtisar Press dari harian yang terbit tanggal 26-28 Juli 1969 yang isinya tentang hubungan Buruh dan Organisasinya, Bank Dan Pembangunan dan Pembaharuan Penghayatan Keagamaan.
28 Juli 1969

ANRI : Marzuki Arifin No. 536



Wakil Presiden Moh. Hatta sedang menyaksikan pameran
Tri Divisi IX di Bukittinggi.

Tanpa tahun

ANRI : Kempen 80706 CC 135

Ekonomi

*Serbidig Rapport in twee
 bevolking, der Papie Cul,
 tulle opgetragen aan Zijn
 Excellentie den Heer Caelen, Captain
 der groot getalder Heere
 Daarb Naamel
 Generaal over 's infanterie ten
 dienste van den Staat der ver-
 eenigde Nederlanden, als Major
 van Wyns kwartier Generaal
 Generaal, bemerkt a welk
 Heeren Namen van Voorloeden
 India.*

*Hoog Edele genringel met Jachtieren
 Twee Edele Heeren*

*Den Ontzigtende Gedeputeerde van Caelen, als
 mel de geyne Nantaguer tubdenke lades opnummer
 door*

*voor den adelheid Willem Buggemaer en den Pa-
 langer Augustin Saja de Illie in Saja Gar,
 dan Edele Lijn dwelen Fortaris worden den de
 en de Caelen aangefond vied Wamant, te
 Naamen der Negeren
 in eigenaar*

<i>Naamen der Negeren</i>		<i>in eigenaar</i>
<i>Dats Saja Sjahul</i>	<i>207</i>	<i>207</i>
<i>Languille Nebra</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Labi Laye</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Gapel</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
<i>Laba Nanzaya</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>dats Nanzaya</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
<i>Pandi Saba</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Pandi Saja</i>	<i>2274</i>	<i>2274</i>
<i>Dats Lantien</i>	<i>616</i>	<i>616</i>
<i>Ladja mangioe</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>dats Natchida Nera</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Nebra Lalat</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Laba Lalat</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Gapel jala</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Lamaile</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Ligala</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Lantien Lu</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Lantien Saba</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Jantien Saja</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Kalun mamolli</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>dats mada</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Tandjara</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>

Laporan tentang nama pemilik dan daerah-daerah yang menghasilkan lada, di Pariaman, 15 April 1759

ANRI: SWK No. 14

Ordnung der Kosten
zu Padang, Piamang, Tiku und Ayer Bangis,
 240 R. 10 S. 10 P. 10 K. 10 L. 10 M. 10 N. 10 O. 10 P. 10 Q. 10 R. 10 S. 10 T. 10 U. 10 V. 10 W. 10 X. 10 Y. 10 Z.

240 R. 10 S. 10 P. 10 K. 10 L. 10 M. 10 N. 10 O. 10 P. 10 Q. 10 R. 10 S. 10 T. 10 U. 10 V. 10 W. 10 X. 10 Y. 10 Z.

1740 R. 10 S. 10 P. 10 K. 10 L. 10 M. 10 N. 10 O. 10 P. 10 Q. 10 R. 10 S. 10 T. 10 U. 10 V. 10 W. 10 X. 10 Y. 10 Z.

P. Transport f. 1544: 15.3
 Indische, Nadelige Botten, Orknoten op Koop,
 manischappen, f. 10. Diverse Annings, Looy en
 Sull veler Stille 15.000

Vomma f. 1544: 15.4

Deze opgave is mede naar de opgave, en kannen
 de Nijetse Botten van den Staat Bodejaaren
 Leet ten raaden te antwoorden op de van billijk
 tege gitteld is legulacore, verdunding zal de van
 wijne, de Koop en Pilaam van Sull, en cesum het
 Sull veler en Diverse het gitteld gitteld van van
 veytomaten te ont hen meer het gitteld later gesienem
 Sull veler te grotter Sijn, de Winst en te grotter
 den Pilaam van Sull hen meer Sull veler veytomaten
 te gitteld Sijn den och te Winste.

Men kan het Sull veler Sennings eijgenlyk niet en.
 der de Sull veler Sennings, den Sull veler Sennings veytomaten
 ten aangeten veytomaten, och alle veytomaten
 met veytomaten te gitteld veytomaten Sull veler veytomaten
 den om Sull veler de Sull veler Sennings te kannen veytomaten

§ 317 Deze veytomaten van Sull veler Sennings veytomaten
 met de gitteld den Sull veler Sennings te kannen Sull veler Sennings
 gitteld Sull veler Sennings te kannen Sull veler Sennings

Dein aover meer
 1. Nijetse veytomaten van Padang
 2. Sull veler Sennings
 3. Sull veler Sennings van Sull veler Sennings
 die veytomaten Sull veler Sennings is, te het Sull veler Sennings
 als veytomaten ten veytomaten van de Sull veler Sennings te gitteld
 van den Sull veler Sennings

§ 318 Een veytomaten gitteld Sull veler Sennings veytomaten
 enige veytomaten te gitteld veytomaten veytomaten
 en veytomaten te gitteld veytomaten Sull veler Sennings
 mit

Tabel biaya sehari-hari keperluan operasional perdagangan di Padang, Pariaman, Tiku dan Ayer Bangis, Pantai Barat Sumatra, 21 Desember 1790

ANRI : SWK No 19

311.
B¹ No. 311.4

Batavia 30. Maart 1859.

Bij U. Ed. Gede. missie van 1849
No. 1716 worden wy ingezonden, om U. Ed. Gede.
naded onze beschoouwingen te doen kennen en
ons gevoelens te ontwikkelen over het besluit
om de opsumme door de hevalking der de
Regering geland wordende koffy misie van 1849
de hevalking der Padang naar de Batavia te
doen verkoopen, en de hevalking door ons gep.
punt aan het slot van onze missie van 1849.
Augustus R. P. No. 519, en om de ten uwe
legging waaraan de gezamenlyke kooplieden
van Batavia, sijnre heer of heer heijer van
gezonderd, niet by reder van den 30. September
R. P. lotte Regering hebben punt, door uwe
vrijheit en uwe uwe hevalking dan de
geuzen Gouverneur van Sumatra's besting
ons koppelijke her ingezonden koppelijke
aan te zyn, by Gouverneur's hevalking van 20
Jan. 1849. van de hand is geuzen
Nooit wordt by U. Ed. Gede. missie koppelijke
en of koppelijke van de door U. Ed. Gede. her reder
gelandde koppelijke en advise, in het
den Heer van de Produktie
B. Civile Magazijn

andere rekening uitvande, deken heer
Sprekig de wou aampje koppelijke wordend
en dan mass hearmen, in deken heer
wordt het aandel der Padangjeh zelfstand
der handelsheijer en de verlijken van
het Gouverneur, geuzen. Het is niet onder
heijer, deken uwe hevalking. Over de hevalking
van 1849 van het aandel der koppelijke te
Padang, geuzen de handelsheijer hevalking
byen te beuzen, deken de hevalking koppelijke
koppelijke met her inkoppelijke en de koppelijke
he, deken geuzen hevalking hearmen in
hand van

	Amoy	Swatow	Shanghai	Amoy	Swatow	Shanghai	Amoy	Swatow	Shanghai
1854	12742	21120	22000	12742	21120	22000	12742	21120	22000
1855	12742	21120	22000	12742	21120	22000	12742	21120	22000
1856	12742	21120	22000	12742	21120	22000	12742	21120	22000
1857	12742	21120	22000	12742	21120	22000	12742	21120	22000

U. Ed. Gede. missie, deken de koppelijke
van de koppelijke, Padangjeh heijer van gear
lotte koppelijke koppelijke. Van onze koppelijke koppelijke
koppelijke koppelijke te geuzen, door hevalking door
de hevalking koppelijke en de koppelijke koppelijke
g. 1849

Perdagangan kopi dari Padang untuk dikirim ke Batavia,
30 Maret 1859

ANRI: Batavia No. 311.4



Lumbung padi di Batipuh, Sumatera Barat
1900

ANRI : KIT 175/10

Nota

In einde aan de opdracht van den Resident gegeven by missie van 4 November 1916 18240.7. kunnen voldaan, moet de wijze van werken aan de wegen gewijzigd worden.

Indien men vaak loolse, ge. naamd, loelang goesh gebruikt voor onder. houd van wegen die eens per week moeten uitkomen, dan zou ieder persoon jaarlijks 52 dagen arbeid moeten verrichten, wat met bovengenoemde opdracht in strijd is.

Naar mijn meening is beter de loelang goesh iedere week te doen wisselen, zooals ieder heeren dienstdienende van den weg in voor groot verzamelen, gediend kan worden.

Voor onderhoud van elke paal weg heeft men 2 loelang goesh noodig, dat is in een week 7 x 2 loelang goesh = 14 loelang goesh, als aan op een 6. paal dan is dat eens in de week moeten uitkomen.

Wanneer 14 loelang goesh eens per week voor elke paal weg moeten uitkomen, dan zouden er per jaar benodigd zijn 52 x 14 loelang goesh = 728 loelang goesh.

Voorbeeld:
District Telatang heeft 8200 heeren dienstdienende, dienstdienende en 6 1/2 paal tegens de wegen. Voor die 6 1/2 paal weg zijn noodig voor onderhoud 6 1/2 x 728 loelang goesh.

District	Onderaand	Negeri	Langte van de weg	Aantal heeren dienstdienende	Aantal van de heeren dienstdienende M.	Aantal van de heeren dienstdienende M.
Bockit Tregg		Koebang Boleh	4760	511	11 1/2	5850
		Ladang Lauas	2666	205	13	2700
		Talok	2379	212	11	1964
		Bingharang	1860	290	5	6477
		Pedang Losar	4666	412	11	860
		Aor Biroago	1994	261	7 1/2	-
		Koto Salayan	2270	302	7 1/2	4674
		Mandvangin	7528	400	18 1/2	2640
		Ligo Baluh	2410	236	10	700
		Geogah Pandjangan	3636	474	7 1/2	6990
		Totaal	34660	3503		22428
Bockit Tregg		Koto Gadung	1460	160	9	700
		Sianok	5200	180	23 1/2	-
		Soengai Djuring	2066	120	15 1/2	600
		Kampuang Piarang	1770	106	16 1/2	706
		Koto Toso	2984	268	11	480
		Geogah	1862	148	15 1/2	2736
		Koto Halatang	3680	201	17 1/2	417
		Pahambatan	4800	387	11 1/2	-
		Soengai Landir	3420	293	11 1/2	1200
		Maulak	1800	909	1 1/2	6750
		Totaal	20116	2773		18658
Sgt Boer		Kapalo Koto	1718	400	9 1/2	2417
		Sarik	2850	370	7 1/2	2850
		Balagal	2898	360	7 1/2	4350
		Batos Palano	2700	330	8	3000
		Tangah Koto	3237	300	10	2677
		Totaal	13072	1760		18184
			75256	7826		64140

Laporan tentang pembagian kerja tukang dalam memelihara jalan di Afdeeling Agam Lama, 17 November 1916

ANR : Binnenlandsch Bestuur No. 90/2

E. Andere kerajinan
 1000 bakris bambangan f. 1.50
 1000 biekris en 1000 bantagan " 1.50
 1000 jongeman sivoortleed woel aangelozen (1000) " 2.-
 " " " " de banket " " "

F. Prijze tabak
 1000 kg van nederlandsche of bantagan
 1000 kg van nederlandsche of bantagan
 1000 kg van nederlandsche of bantagan

Tarif voor den aanslag in de
 belasting op bedrijf en andere
 inkomsten.
 Onderafdeeling Agam.
 jaar 1914 en 1915

A. Juwelen
 100 rooktabak (opbrengst) f. 0.20
 10 koffiebomen " 0.01
 100 padden tabak " 1.-
 100 porselijn laamspier " 0.06
 1 zak pepel (karong) " 0.06
 1 kavel boom " 0.01
 1 kavel 1/2 x 1/2 m. van pekelaumbek / aardappelen f. 0.01
 1 zak katong gromog " 0.02
 1 rampaan Complex van / bantaganboomen " 0.13
 1 klappeboom " 0.16
 10 rampaan sikkarint " 0.01

B. De bed
 1 korbans / de bina f. 0.10
 1 pordel " " " 0.30
 1 pordel " " " 0.80
 1 kerp " " " 0.04
 1 geel " " " 0.05
 1 wijer vriesken " 0.1000

C. Gederen, waar uit inkomsten worden geboekt
 1 huurbende (ongeral de signant 1/2 of beland) f. 4.-
 1 pedak door in beland geboekt " 4.-5
 1 " " " " " 3.-3.20
 1 " " " " " 3.-4.
 1 tijstinden " 4.-6.

D. Persep
 een pedak of landi bekeerd f. 3.50
 " kpinie lopau handi " 3.-4-
 " klevmaket " 3.-4-
 " gaed en ij goreneden " 3.-4-
 " verkopet van kleine kledingstukken " 3.-4-
 " kooli " 3-
 " klampennakot " 3.50-4-
 " wachman " 3-f5-
 " kimmerman of vrekelaar " 3.50-4-

Tarif pajak perusahaan di *Onderafdeeling Agam* tahun 1916

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 90/1

Pasar Babak Sikaping		Biaya Kertas
No.	Uraian	ang.
1	uang pasar Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang	1000
2	uang pasar Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang Babak Sikaping	1700 015
3	uang pasar Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang Babak Sikaping	1000
4	uang pasar Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang Babak Sikaping	1000
Jumlah		4700 015

Pasar Babak Sikaping		Biaya Kertas
No.	Uraian	ang.
1	Batas Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang	1000 00
2	Batas Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang Babak Sikaping	1000 00
3	Batas Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang Babak Sikaping	1000 00
4	Batas Babak Sikaping yang akan dibayar kepada para Pedagang Babak Sikaping	1000 00
Jumlah		4000 00

Ditulis Sikaping 27 November 1916
 di Amboin
 J. J. J. J. J.
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

Anggaran Pasar Loeboek Sikaping tahun 1917

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 90/3

DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCH BESTUUR
BATAVIA.

UWE NOS. DATUM

AAN

den Resident van Sumatra's
Westkust.

K 44/1
38

No. DATUM BIJLAGEN
Bg 30/7/2. 13 Dec. 1935.

ONDERWERP:
Coprakleur Sumatra's Westkust.

Met beleefde verwijzing naar Uwerzijdsch schrijven laatstelijk van 25 September 1935 No 11046 nopens de verbetering van de copracultuur in Uw gewest heb ik de eer UHoogEdelGestrange aan te bieden afschrift van het terzake handelend schrijven van den Directeur van Economische Zaken van 13 September 1935 No 8876/L.V. met de daarbij behorende bijlagen.

Zooals in de laatste alinea van evenbedoeld schrijven wordt verondersteld zullen de betreffende voorstellen Uwerzijds wel aanleiding geven tot nadere beschouwingen, welke t.z.t. gaarne zullen worden tegemoet gezien.

Hoewel ik in afwachting van Uw advies vermeen mij van een oordeel over deze voorstellen te moeten onthouden, zou ik slechts in het algemeen willen opmerken, dat het in elk geval aanbeveling zal verdienen, de in het belang van de bevolkingscopracultuur te nemen maatregelen zoo eenvoudig mogelijk te houden, aangezien n.h.v. alleen op die wijze ingrijpen van de overheid in de praktijk tot blijvende gunstige resultaten zal kunnen leiden.

De Directeur van Binnenlandsch Bestuur
Voor dezen:
Het Hoofd van de Afdeling
Bestuurszaken der Buitengewesten,
(vg) Ter Laag. l.h.

MODEL B. B. No. 124/126.
GENORMALISEERD. 4737-35

Surat dari *Directeur Binnenlandsch Bestuur* kepada *Residen Sumatera Westkust* mengenai pembuatan dan kualitas kopra di Sumatera Barat, 13 Desember 1935

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1216

Vraag van den heer Muhammad Yamin
(ingesonden 16 Maart 1940).

Volgens hoofdartikelen in de Sinar Sumatra van 2, 7 en 8 Maart 1940 nos. 49, 53 en 54 onderscheidenlijk getiteld: "Pemoegotan belasting jang ke-ras dimalam hari", "Tiga Hoofdredac-teuren pergi ke Ommelanden", en "Opas Demang lelih "berkoesa" dari Kepala Negeri", zouden twee personen op Vrijdagavond 23 Februari 1940 door den ke-pala negeri der Padangsche Ommelanden en den oppasser van den demang van Pa-dang opgepakt en gedurende 12 uur in een rijstschuur opgesloten zijn. De reden van deze zonder last tot gijse-ling uitgevoerde nachtelijke arresta-tie en opeluiting, zou zijn de niet voldoening van belasting en afkoop heeren dienst tot bedragen respectie-lijk van één gulden en zestig cent. Berichten van ongeveer denzelfden in-houd en strekking zouden eveneens syn opgenomen in de te Padang verschijnen-de dagbladen Radio en Persamaan.

Indien deze berichten geheel of ten deele juist mochten zijn, veroorlooft steller zich de volgende vragen tot de Regeering te richten:

a. Is Zij bereid de noodige maatregelen te nemen tegen alle personen, die by het vorenvervalde optreden zich moechten hebben misdragen en diegenen onder hen die daarvoor in aanmerking mochten komen, gerechtelijk te doen vervolgen?

b. Is Zij bereid het toezicht te doen verscherpen tot voorkoming van elken

vorm

2.-
vorm van wederrechtelijke vrijheids-beroeving bij inning van belasting en bij heffing van heeren diensten?
g. Is Zij niet met steller van oordeel, dat bij de inning van belasting en bij de heffing van heeren diensten soepelheid dient te worden betracht en hierbij in het byzonder rekening moet worden gehouden met de econo-mische omstandigheden, waarin de be-lastingplichtigen, bv. door misluk-king van den oogst e.d. zich bevin-den?

ANTWOORD DER REGERING.

Het onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de in bovenstaande vraag be-deelde persartikelen heeft uitgewezen, dat door de schrijvers deser artikelen een ten-dentieuze en minder juiste voorstelling is gegeven van eenige feiten, welke zich bij de belastinginning en de heeren dienstvor-dering in de Inlandsche gemeente Manggalo hebben voorgedaan.

De juiste toedracht van het gebeurde is, dat een tweetal personen, t.w. Oedin en Boejoeng Tapat, door het hoofd van de ge-meente Inlandsche gemeente, bijgestaan door een oppasser van het districtshoofd van Padang, in den namiddag van den 21sten Fe-bruari 1940 wegens belasting- en heeren dienstachterstand worden aangehouden.

Genoemde Oedin, die zich gedurende vier jaren aan heeren dienst- en negari-belas-tingplicht

Pertanyaan kepada pemerintah dari Mr. Muhammad Yamin mengenai pemungutan pajak yang terjadi di Karesidenan Sumatera Barat, 16 Maret 1940

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1218

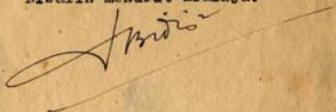
3426

Kantor Pabean/Aksen
Pelabuhan PARIAMAN. = Statistik dari barang2 jang dibawa Keluar Propinsi Sumatera dengan kapal M. TIS. no. 12 dalam bulan December 1947.

Djenis barang	Dari mana	kemana	berat bersih k.g.	H a r g a	T j u k a i
Gedah kampung ke- ring	Pariaman (S. Barat)	Singapore	11000	f 495.000.=	f 99.500.=
Kemenjan	-id-	-id-	2000	" 700.000.=	" 210.000.=
Kopi Robusta	-id-	-id-	17600	" 2288.000.=	" 686.400.=
K o p r a	-id-	-id-	14250	" 285.000.=	" 85.500.=
Kulit manis A.	-id-	-id-	60000	" 900.000.=	" 270.000.=
Kulit manis B.	-id-	-id-	46400	" 696.000.=	" 208.800.=
Tjengkeh	-id-	-id-	6600	" 330.000.=	" 99.000.=
Djumlah berat bersih			157850 kg.		
Djumlah harga				f 5694.000.=	
Djumlah tjukai					f 1.659.200.=
Pendaftaran					" 14.235.=
Upah timbang					" 16.120.=
Djumlah besar					f 1.689.555.=

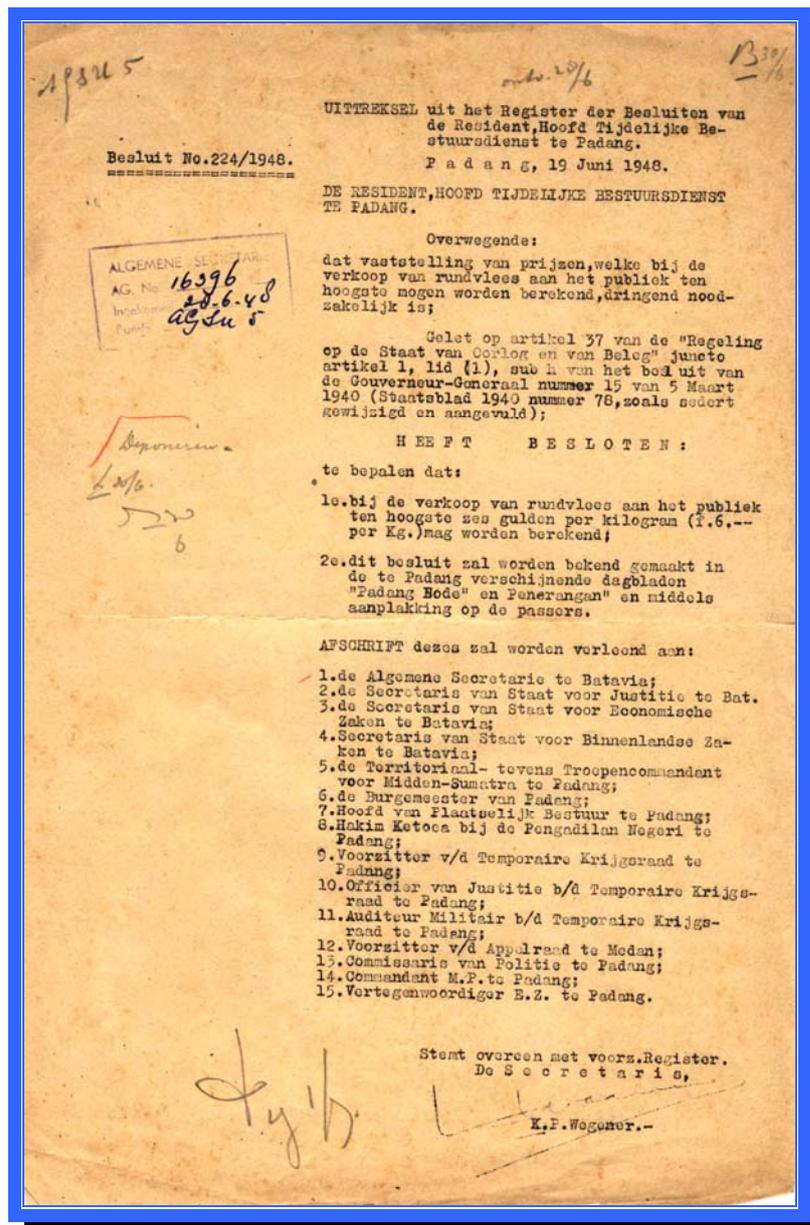
Bulit Tinggi, 7-2-1948.
a/n Kepala Pedjabat Pabean/Aksen R.I
Sumatera Barat.

Disalin menurut asalnja.



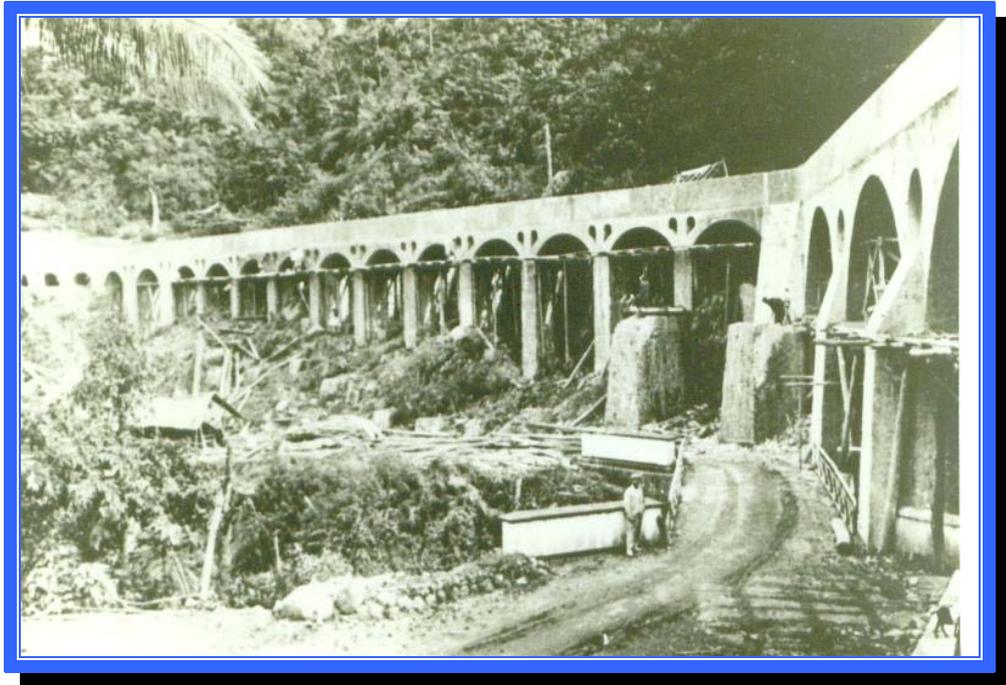
Daftar barang-barang hasil bumi yang keluar dari
Karesidenan Sumatera Barat,
7-8 Februari 1948

ANRI : Djogja Documenten No. 162



Salinan Surat Keputusan Residen Padang tentang masih diberlakukannya ketentuan harga penjualan daging sapi kepada umum sebesar 6 gulden per kilo,
19 Juni 1948

ANRI : Algemeene Secretarie Ag No. 16396/ 1948



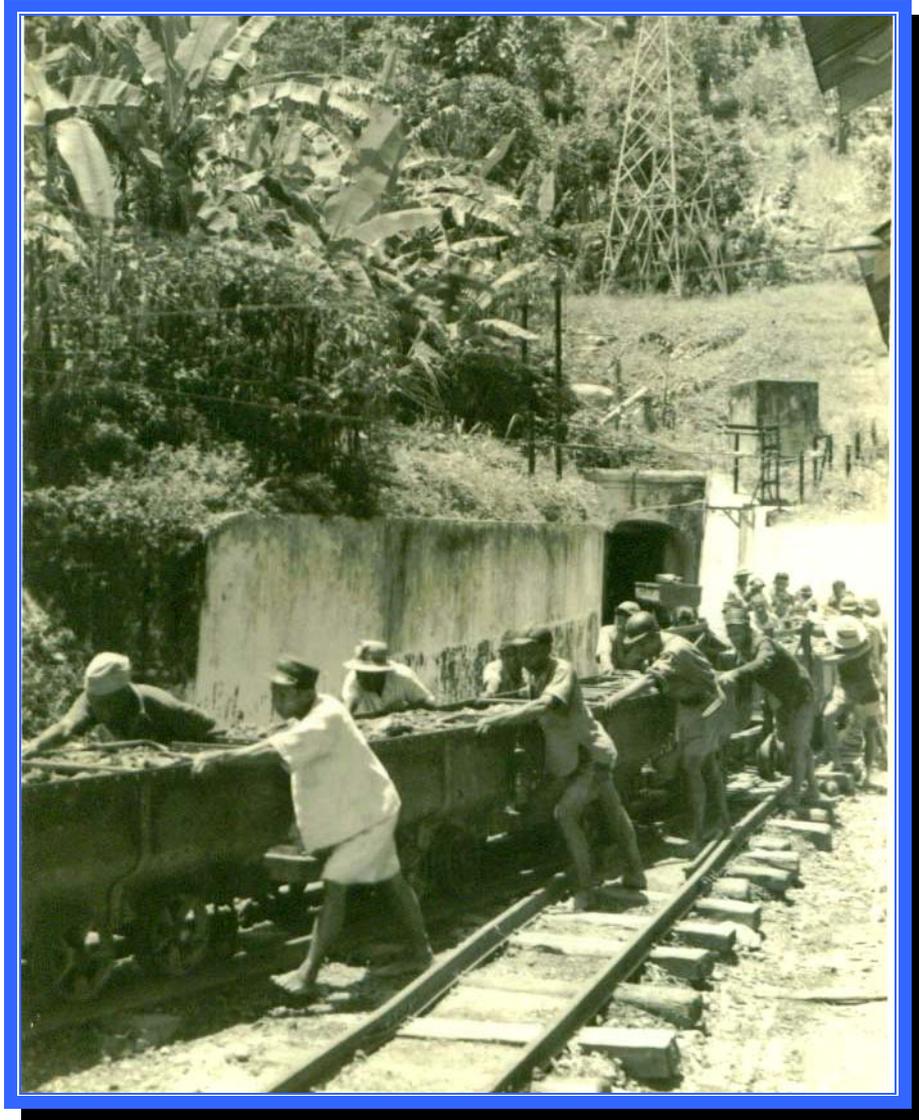
Aquaduct (saluran air) di Pabrik Semen Indarung
Padang, Sumatera Barat
Tanpa tahun

ANRI : KIT 534/6



Peternakan kuda di Pd. Mangatas – Payakumbuh
Tanpa tahun

ANRI : Kempen K 80706 CC 74



Para pekerja sedang mengangkut batu bara dengan lori
Di tambang Batubara Umbilin di Sawah Lunto.
Tanpa tahun

ANRI : RVD 90319 CC 2



Wakil Presiden Moh. Hatta meninjau Koperasi di Sioban,
Sumatera Barat
Tanpa tahun

ANRI : Kempen 520515 CC 1



Wakil Presiden Moh. Hatta sedang mengunjungi
Pabrik Semen di Indarung Padang,
15 Mei 1952

ANRI : Kempen 520515 CC 90



Penjual Sate dan para pengemudi bendi (delman) disekitar Pasar Bukit Tinggi, 21 April 1953

ANRI : Kempen 530421 CC 2-6



Pengangkutan sayur dengan menggunakan gerobak disekitar
Pasar Bukit Tinggi,
21 April 1953

ANRI : Kempen 530421 CC 2 -10



Anggota Barisan Penolong di Tambang Batubara Umbilin
Sawah Lunto,
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 530501 CC 24



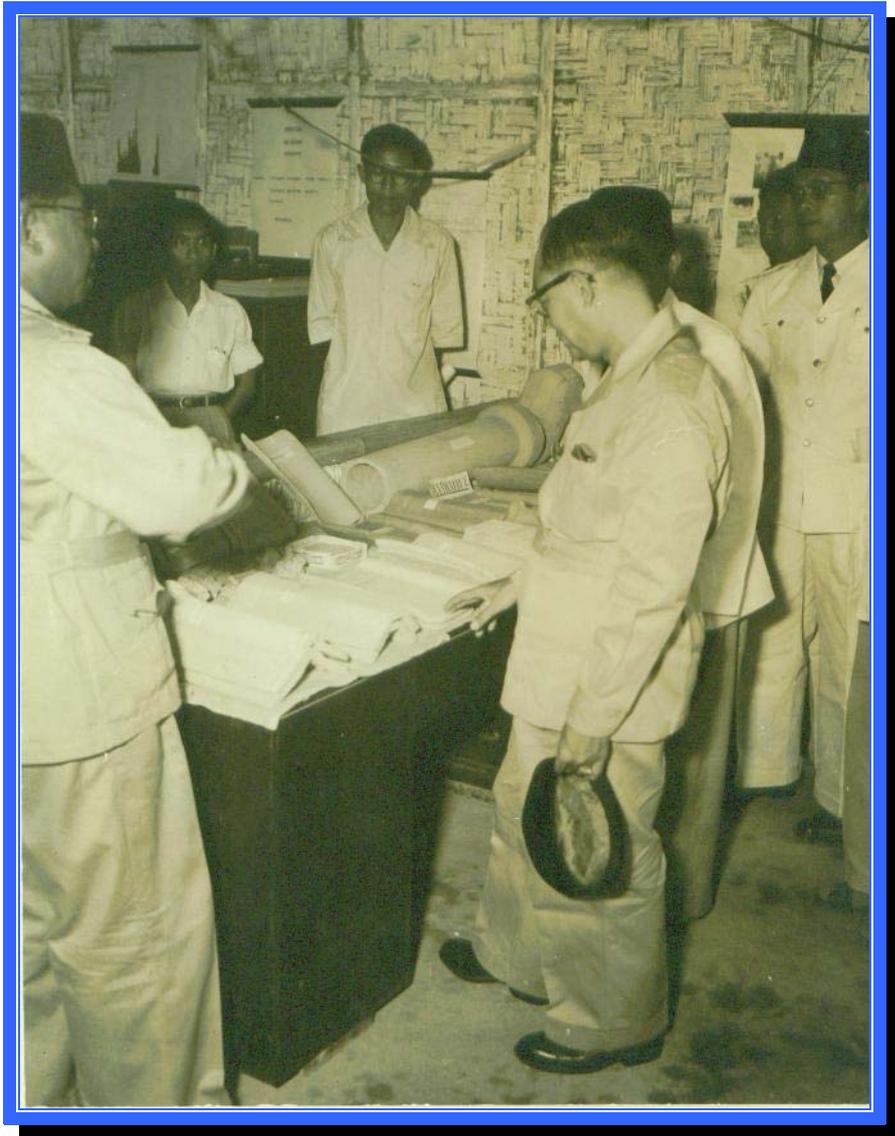
Arang halus yang telah dicuci diisikan kedalam gerbong kereta
api di Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto,
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 530501 CC 65



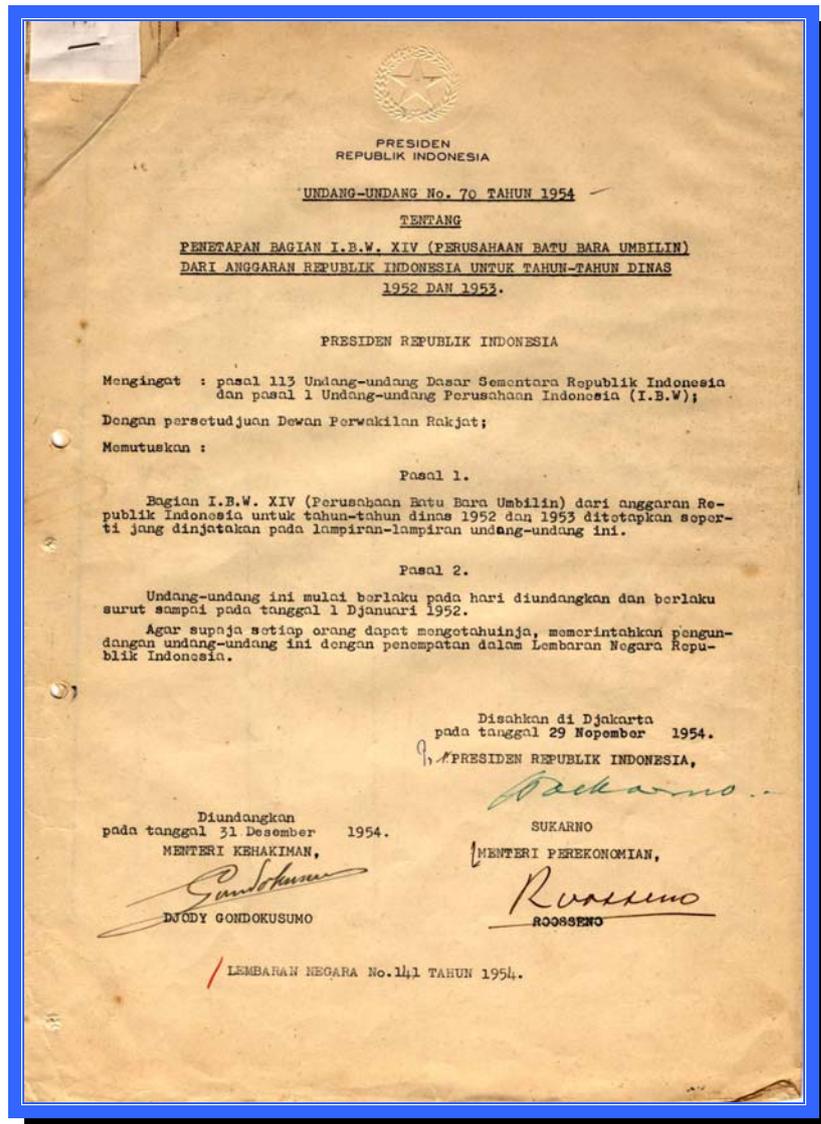
Macam-macam jenis batuan yang terdapat pada lapisan tanah di
Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto,
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 530501 CC 71



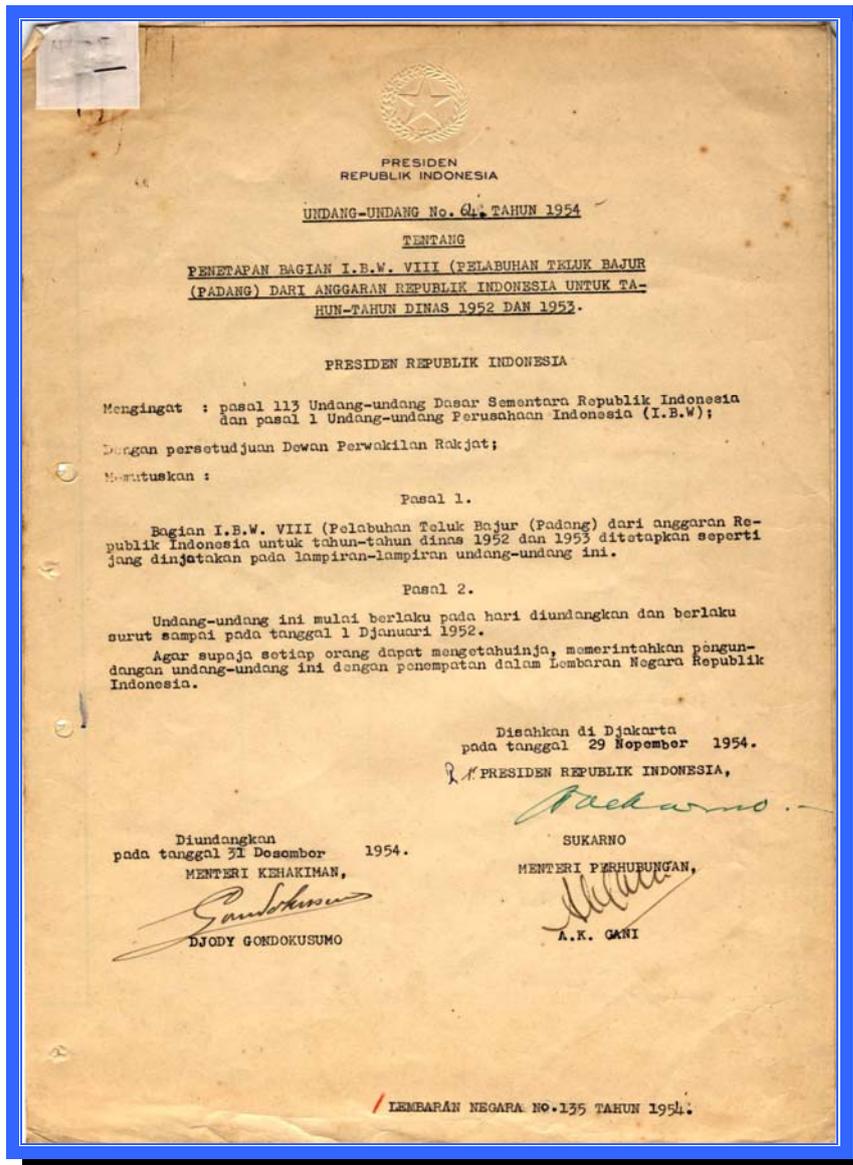
Peninjauan Pabrik Genting di Padang Sibusuk
oleh Wapres RI Moh. Hatta,
15 April 1954

ANRI : Kempen 540510 CC 3



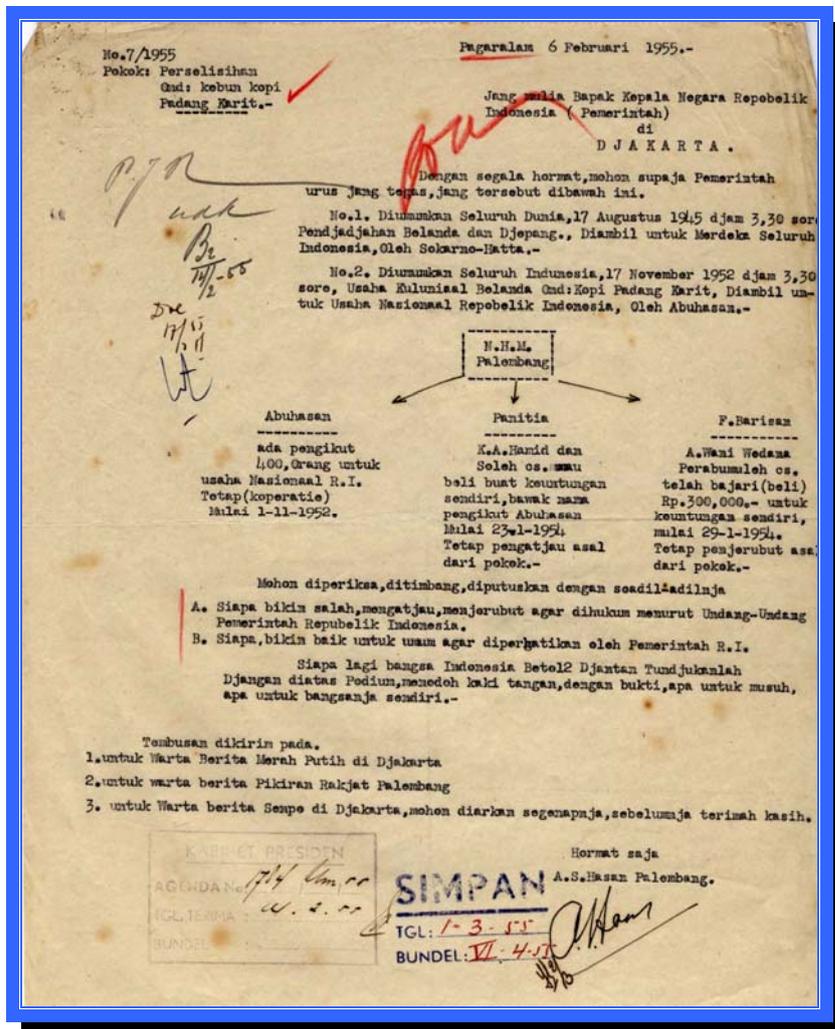
Undang-Undang No. 70 Tahun 1954 tentang Penetapan bagian I.B.W. XIV (Inlandsche Burgelijke Wet) Perusahaan Batubara Umbilin dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953.
29 Nopember 1954

ANRI : Sekkab. UU 1950-1960 No. 163



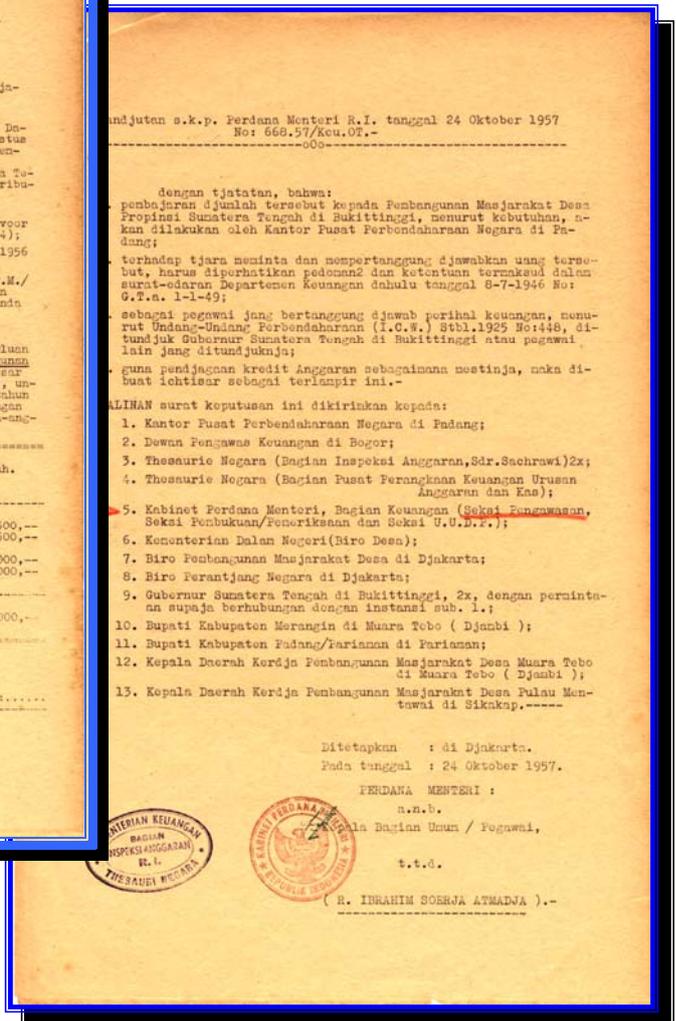
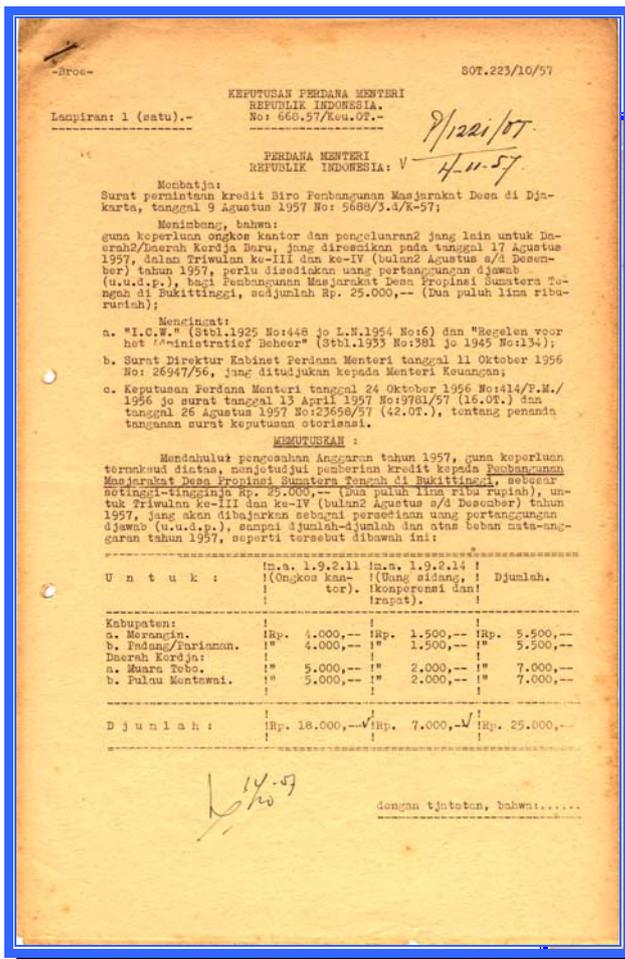
Undang-Undang No. 64 Th 1954 tentang Penetapan bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur Padang) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 .
29 Nopember 1954

ANRI : Sekkab UU No. 157



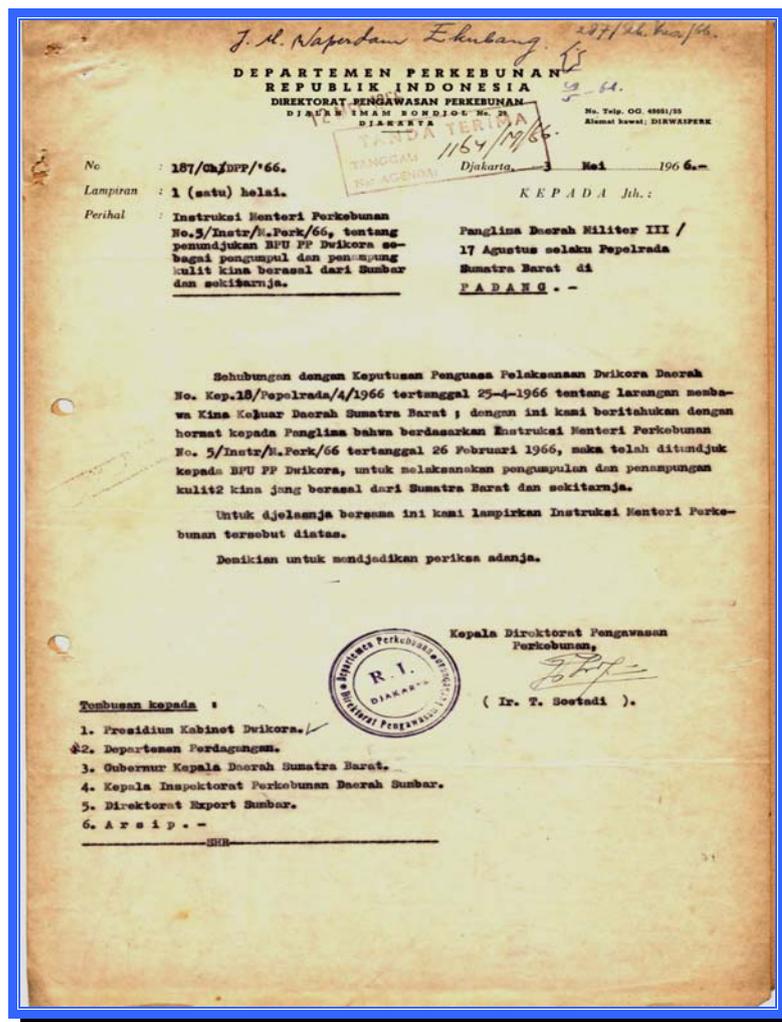
Surat dari A.S. Hasan di Palembang kepada J.M. Kepala Negara RI di Jakarta tentang perselisihan perkebunan kopi di Padang Karit.
6 Februari 1955

ANRI : Kabinet Presiden No. 1945



Surat Keputusan Perdana Menteri RI (Kabinet Perdana Menteri Juanda) No. 668.57/Keu. OT tentang persetujuan pemberian kredit kepada Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi, 24 Oktober 1957

ANRI : Perdana Menteri Republik Indonesia No. 533

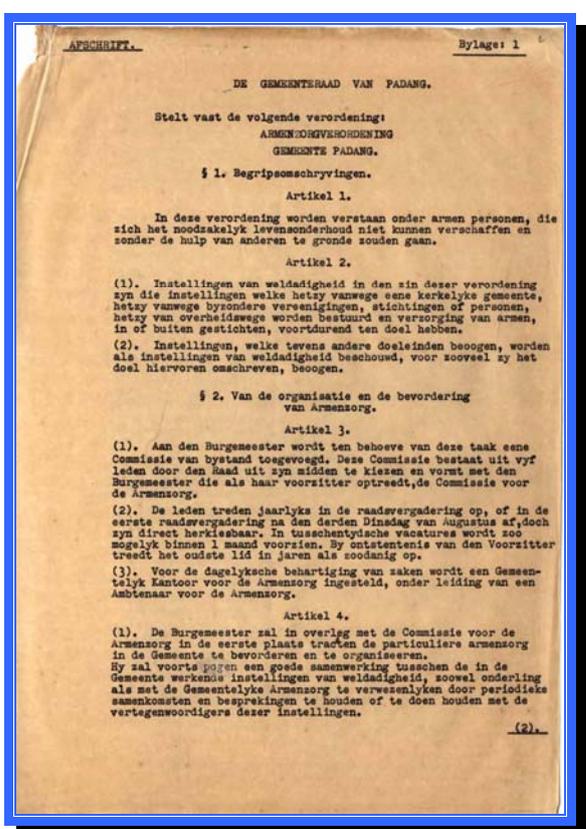
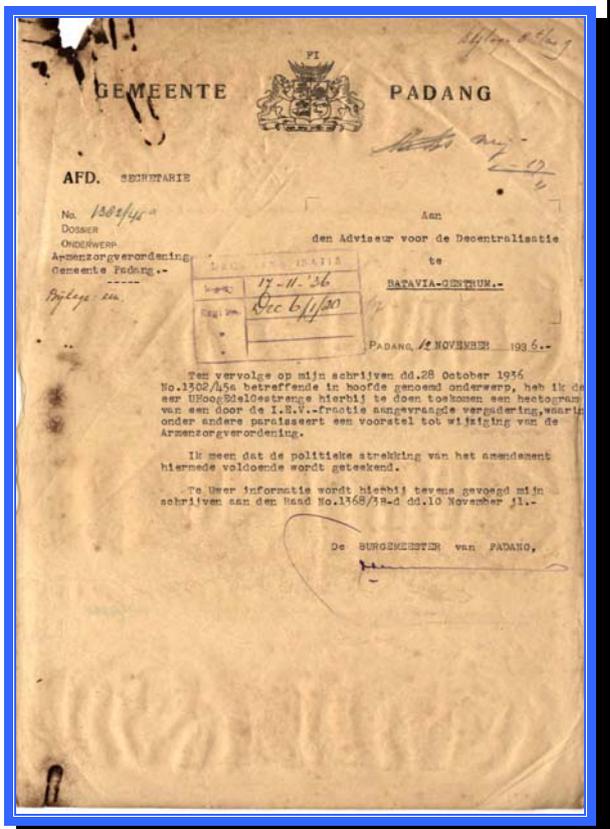


Surat dari Direktorat Pengawasan Perkebunan Departemen Perkebunan RI kepada Panglima Daerah Militer III/17 Agustus selaku Pepelrada Sumatera Barat tentang Penunjukan Badan Pelaksana Urusan Pangan Pusat (BPU PP) Dwikora untuk melaksanakan pengumpulan dan penampungan kulit-kulit kina yang berasal dari Sumatera Barat dan sekitarnya.

3 Mei 1966

ANRI : Ekubang No. 571

Sosial



Peraturan Pemerintah tentang urusan penanganan orang-orang miskin di kota Padang, lampiran surat tanggal 12 November 1936

ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 1514



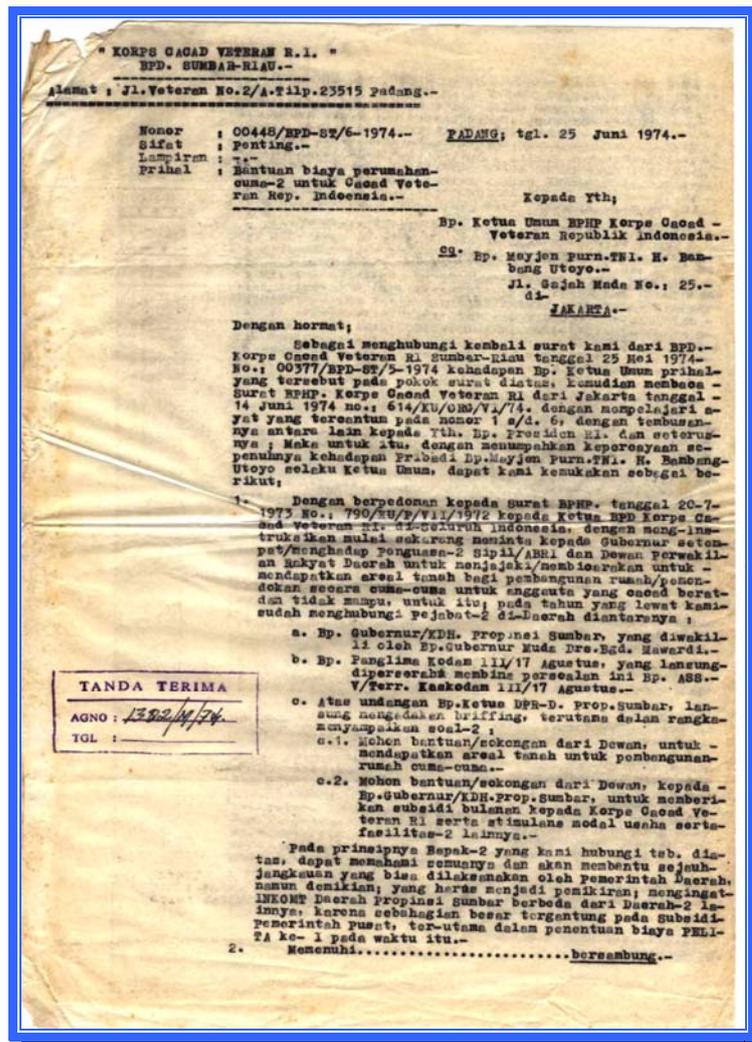
Wakil Presiden Moh. Hatta sedang mengunjungi Rumah Adat
di Sioban, kepulauan Mentawai,
15 Mei 1952

ANRI : Kempen 520515 CC 24



Wakil Presiden Moh. Hatta sedang diperkampungan Bukittinggi
Tanpa tahun

ANRI : Kempen K80706 CC100



Surat dari Ketua Badan Pimpinan Daerah Korps Cacat Veteran R.I. Sumatera Barat kepada Ketua Umum Korps Cacat Veteran R.I. di Jakarta tentang permohonan bantuan biaya perumahan cuma-cuma untuk Cacat Veteran RI, 25 Juni 1974

ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 794

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI
 INDONESIA KAPUPATEN TANAH DATAR ALAMAR
 DARU JALAN MELAJA No.20-26 BATUNASANGKAR.-

LAPORAN TAHUNAN PERJUANGAN DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
 KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERIODE 1975 / 1976 DIDIRIANG
 SOSIAL BUDAYA.

No. : 08/Dpo-1979.

Kepada Yth:
 Saudara Ketua DPP PDI di Jakarta
 Saudara Ketua DPP PDI di Padang.

Dengan hormat,
 Berseka ini kami sampaikan kepada saudara laporan cabang PDI langkah-langkah yang telah dilakukan selama tahun-tahun berlalu dan untuk dilanjutkan pada tahun yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan bidang sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan rakyat dan pertanian, sebagai yang dimaksud pada pokok surat ini, demi untuk kepentingan lingkungan hidup rakyat banyak. Kegiatan di sektor politik dipertimbangkan berdasarkan keadaan keadaan situasi dan kondisi setempat, kami kemukakan sebagai berikut :

1. Memperjuangkan dengan gigih danulet pengembalian status IKIP ketempat leluhurnya di Batunaskar kepada pihak-pihak yang berwenang berdasarkan landasan hukum asasrah dan tanah-tanah wakaf rakyat Batunaskar seluas 450 H.A. kepada Pemerintah RI cq Departemen PP dan K yang selama ini telah tidak di manfaatkan dan diterlantarkan oleh pihak IKIP Padang berpandangan menurut bunyi surat Rektor IKIP Padang tgl.27.10.ember 1970 No.4409/PP 37.5/70, yang dialamatkan kepada Bapak Gubernur/Kepala Daerah Tk.II.Sumatera Barat tambahan s.l.kepada kami sedangkan bekas asrama Mahasiswa PTTG di Bukit Gombang telah banyak yang rusak-rusak mengakibatkan kerugian Negara berpuluh-puluh juta rupiah lebih menurut taksiran harga pada saat ini,perjuangan pengembalian IKIP ke Batunaskar akan dilanjutkan sampai titik terakhir.-
2. Tentang penyelesaian Aquadut Pance Silla di Kubang Landai, yang telah direvisikan oleh Bapak Presiden RI Jenderal SUBANDIYO pada tahun 1966, sampai saat ini terbengkalai belum sampai kesempurnaan dan selama kami telah menelan biaya berpuluh-puluh juta rupiah ditambah dengan tenaga Gotong-roiyong rakyat yang beribu-ribu orang banyaknya menggali dasar bandar air sepanjang 3 km dalam periode tahun 1974 s/d 1977 selama 4 tahun dalam kesamatan 72,5m dilanda kekeringan, sebab-sebab rakyat yang berbudah langit itu, hasil panenya nihil dan menyedihkan, sehingga rakyat difeliasasikan teresat terpaksa meninggalkan kampung halamannya ber-transmigrasi lokal untuk mencari sesuap pagi dan sesuap petang, terak rakyat seperti sapi, kerbau dan kuda banyak yang mati karena kekurangan air minum, telah lebih 10 tahun rakyat di Kesamatan 72,5m menantikan penyelesaian Irigasi Aquadut yang telah menjadi kebanggaan dan telah dipamerkan pada gambar-gambar Aquadut dalam Jakarta-fair, yang telah banyak dikunjungi oleh turis-turis asing yang datang ke Batunaskar.-
3. Memperjuangkan proyek Air minum untuk Kota Batunaskar dan sekitarnya, secara nyata telah sangat parah, pipa-pipa banyak yang bocor-bocor berkebun dipinggir-pinggir jalan yang tidak dikubur dalam tanah lagi, sangat berbahaya bagi kemanan dan kesehatan, menurut hasil pemeriksaan dari Laboratorium kesehatan di Padang Air leding Batunaskar, bakteriologis colli positif angka tertinggi, dalam 1dm air terdapat bacte ri colli 270 dan berbahaya bagi kesehatan terutama anak-anak dan telah mendapat perhatian khusus dari Bapak Menteri Pengerasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bapak Menteri Prof.Dr. Emil Salis dalam surat beliau kepada DPC PDI Kabupaten Tanah Datar, beliau ya telah mengemukakan kenyataan berdasarkan bunyi surat Dirj.Oligo Larry Dep.PU dan telah diadakan survey berupa outline studi dan terakhir oleh pihak IAD Bandung telah mendapat perhatian khusus dari Bapak Gubernur Sumatera Barat dan rombongan DPR RI, air leding yang berasal dari sumber air Kambang menurut laporan Laboratorium Kesehatan Padang telah tercesar dari kotoran manusia dan hewan yang masuk melalui lebang-lobang pipa yang bocor-bocor.-
4. Memperjuangkan pembangunan RSU Batunaskar dan untuk menepatkan Dokter 2 Abli, keadaan Rumah Sakit Umum Batunaskar sekarang sangat parah, situasi dan kondisi tempat tidak mengizinkan untuk memperluas ruangan sebab sangat berdekatan dengan rumah2 rakyat dan jalan raya serta pasar, disamping tidak ada air bersih, pestisid tidak dapat dimuat dengan sempurna, tidak menukupi syarat2 sebagai RSU Kabupaten tidak sesuai dengan keadaan kemajuan zaman modern, ruangan tempat serumat pasien tidak cukup, tempo2 harus bercampur dengan pasien2 sakit semesta. Kapasitas ruangan hanya 66 tempat tidur, untuk persediaan 350.000 orang penduduk Tanah Datar hanya dipimpin oleh seorang Dokter, kalau ada kecelakaan lalu-lintas yang berat seperti luka berat dan patah tulang serta persalinan yang berat, penderitaan terpaksa harus dikirim ke Bukit Tinggi dan Padang selarak 300 km dari Batunaskar, selain dari biaya pengangkutan sangat berat tidak terjangkau oleh sipenderita, banyak yang meninggal dalam perjalanan karena terlambat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan rakyat yang terancam .-

480/14.1.79/13

Bersambung ke -2-

dalam U.U.Dasar 1945 dan mengenai R.S.U, dan sarana air minum adalah suatu barometer dari kemajuan pembangunan tiap-tiap bangsa, dengan demikian akan dapat diciptakan rakyat sehat Negara kuat, dalam Pelita I dan Pelita II secara realitis belum terlaksana di Kabupaten Tanah Datar.-

5. Dapat kami kemukakan sebagaimana yang kami kemukakan pada fasal I diatas, dengan diistigirkan (evalmasi) IKIP dari tempat leluhurnya yang historis itu ke Air Tawar Padang di ta-dita Lahar dari Almarhum Prof.Hokd.Yanto S.I Mahapatra RI dan bekas Menteri '95 dan K untuk menpikniti Kota Batunaskar sebagai Kota Pendidikan dan perkembangan Mahasiswa (Studentendor), seperti Kota Jogyakarta secara realitis telah merupakan suatu kegagalan dari Dep.PP dan K dan sangat menyakitkan lakuk hati masyarakat Tanah Datar, tuntutan pengembalian status IKIP ketempat lahirnya di Batunaskar adalah wajar dan realist sesuai dengan nilai2 Pancasila dan pendidikan.-

Kemapat proyek yang sangat vital sebagai yang kami nyatakan diatas telah mendapat perhatian khusus dari Ketua DPR RI/ Ketua bidang Kesra, begitu pula dengan kedatangan rombongan anggota DPR RI ke Sumatera Barat pada Bulan Desember 1978 yang lain sebanyak 13 anggota yang telah bersedia datang kemapat proyek tersebut dan diantaranya 4 orang langsung ke Batunaskar untuk menyaksikan dari dekat keadaan R.S.U. Batunaskar, dan sumber air minum di Kambang, Asrama bekas PTTG di Bukit Gombang dan ke Kubang Landai menyaksikan keadaan Aquadut Pance Silla yang berlanar itu, dapat kami tambahkan juga telah mendapat atensi dari kaum cerias pandi dan kaum intelektual, s.m.kh masak, olim olim dan para pelajar.-

Dapat kami tambahkan didalam Hukukmas secara nyata cukup stabil dan mantap mengenai Kepop 15, rakyat di Kabupaten Tanah Datar tidak terpengaruh, sebab 95% peranggakan dikuasai oleh rakyat pribumi, perkembangan rakyat cukup stabil keadaan rakyatpun tidak ada yang tinggal digubuk-gubuk.-

Pada akhirnya dengan rahmat Tuhan mudab-mudahan dalam Pelita III ini, kemapat proyek besar tersebut diatas dapat terlaksana keseluruhannya.-

BATUNASANGKAR, 27 JANUARI 1979.-

DEWAN PIMPINAN CABANG PDI KABUPATEN TANAH DATAR

Ketua
 Sekretaris

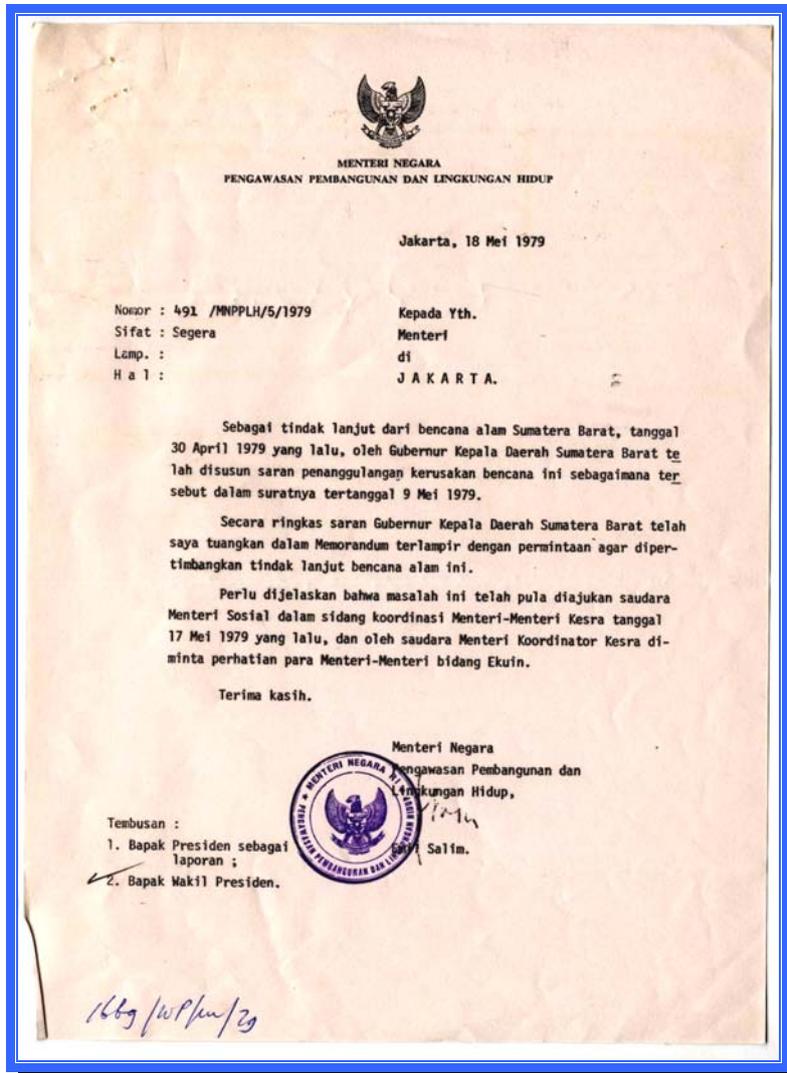
(H.A. Kambali Kh. Suban) (A. Esman Pdk Suban)

Laporan ini kami kirikan juga kepada Yang terhormat:

1. Bapak Presiden R.I. di-JAKARTA
2. Bapak Wakil Presiden RI, di Jakarta
3. Bapak Ketua DPR/MPR RI/Ketua Bidang Kesra di Jakarta
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Kesamatan di Jakarta
5. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesea/MPR/Ketua di Jakarta
6. Bapak Menteri Pertahanan Kesamatan RI di Jakarta
7. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
8. Bapak Menteri Pengerasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Jakarta
9. Bapak Menteri 2 dan K di Jakarta
10. Bapak Menteri Kesehatan di Jakarta
11. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
12. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta
13. Bapak Menteri Ketun Bangsa RI di Jakarta
14. Bapak Gubernur/Kepala daerah Tk.II.Sumatera Barat di Padang
15. Bapak Panglima Kodan III 17 Agustus di Padang
16. Bapak Komak III Sumbar di Padang
17. Ketua DPRD Tingkat I Sumbar di Padang
18. Kakaswil Dep.P dan K di Padang
19. Kakaswil Dep.Kes/Kepala Dinas Kesehatan Tk.II.Sumatera Barat di Padang
20. Kepala Perusahaan Air Minum (PAM) di Padang
21. Bupati Kepala Daerah Tk.II.Tanah Datar di Batunaskar
22. Ketua DPRD Tingkat II.Tanah Datar di Batunaskar
23. Muspidi Tanah Datar di Batunaskar
24. Pargol/Golkar/Umam Tanah Datar di Batunaskar
25. Kepala-Kepala Jawatan se Tanah Datar
26. Pejabat Utama Kepala Kesamatan se Tanah Datar
27. Komisaris PDI Tanah Datar

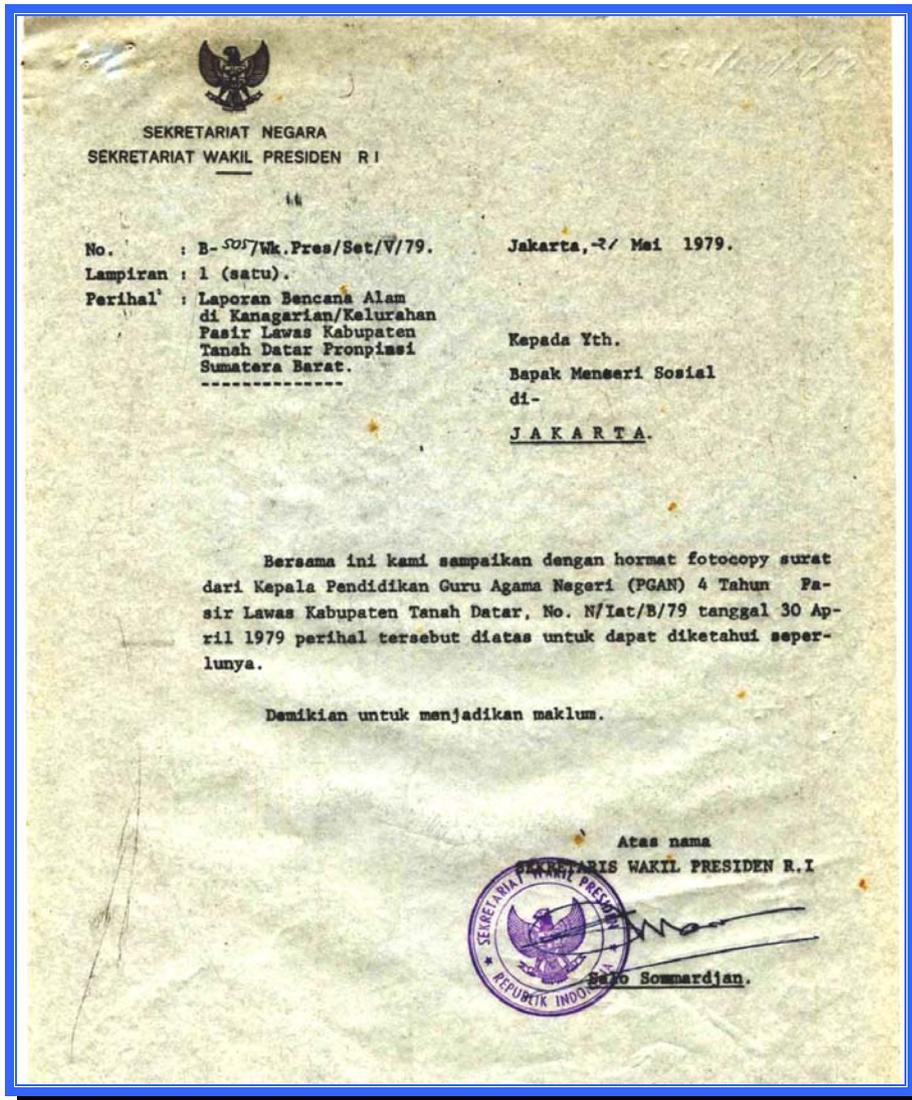
Laporan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi
 Indonesia Kabupaten Tanah Datar tentang masalah sosial
 budaya yaitu penyelesaian saluran air minum yang tertunda,
 27 Januari 1979

ANRI : Setwapres Adam Malik No. 698



Surat dari Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup kepada para Menteri tentang tindak lanjut penanggulangan kerusakan bencana alam di Sumatera Barat karena longsornya lereng Gunung Merapi, 18 Mei 1979

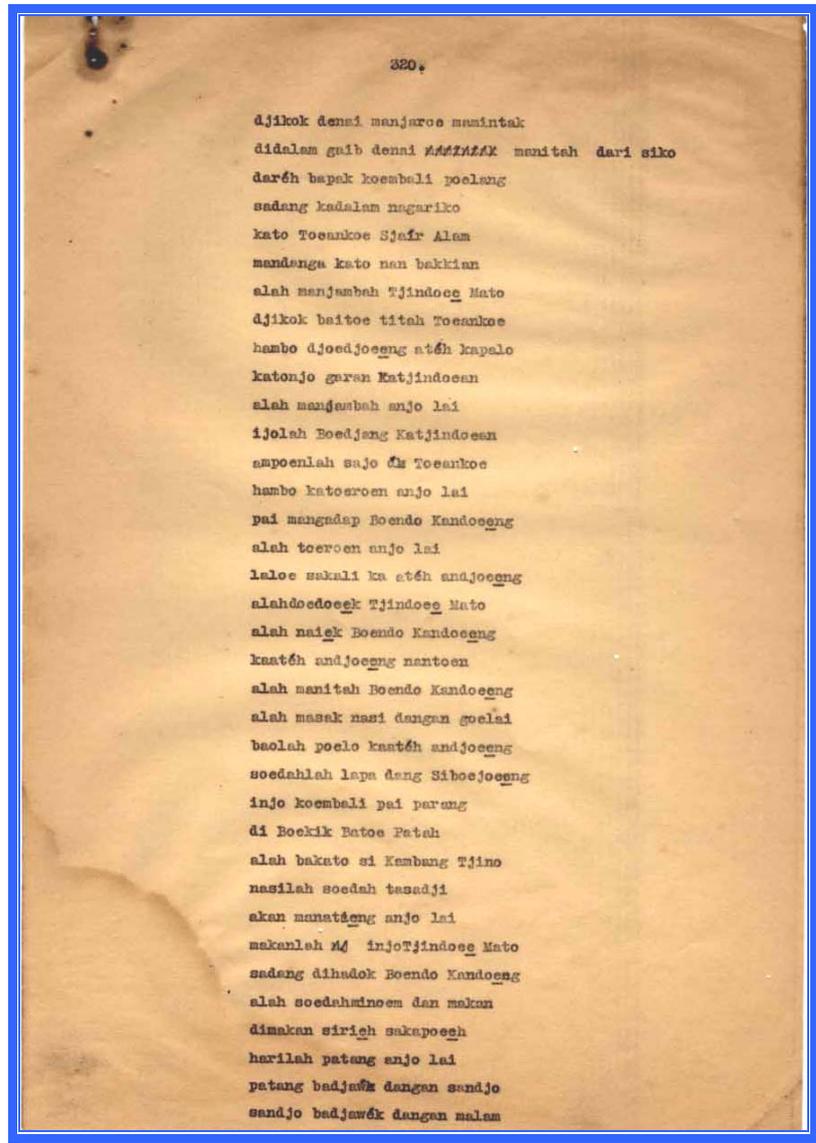
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 915



Laporan dari Sekretaris Wakil Presiden RI kepada Menteri Sosial tentang banjir yang terjadi di Kanagarian Kelurahan Pasir Lawas Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat,
21 Mei 1979

ANRI : Setwapres Adam Malik No. 916

Kebudayaan



Naskah tulisan Muhammad Yamin yang berbentuk prosa
dalam Bahasa Padang
Tanpa tahun

ANRI : M. Yamin No. 635



Daerah perkampungan di Sawah Lunto, Sumatera Barat
1900.

ANRI : KIT 179/88



Pernikahan dengan Adat Bukittinggi, Sumatera Barat,
26 Agustus 1950

ANRI : Kempen 50667



Pemandangan alam di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur,
12 Juni 1950

ANRI : Kempen 500612 CC18



Pemandangan di sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat,
12 Juni 1950

ANRI : Kempen 500612 CC 37



Tari Piring di Minangkabau, Sumatera Barat,
1951

ANRI : Kempen 515662



Tari Payung dari Sumatera Barat,
20 Mei 1951

ANRI : Kempen 511639



Pakaian Adat Minangkabau,
10 Juli 1951

ANRI : Kempen 515373



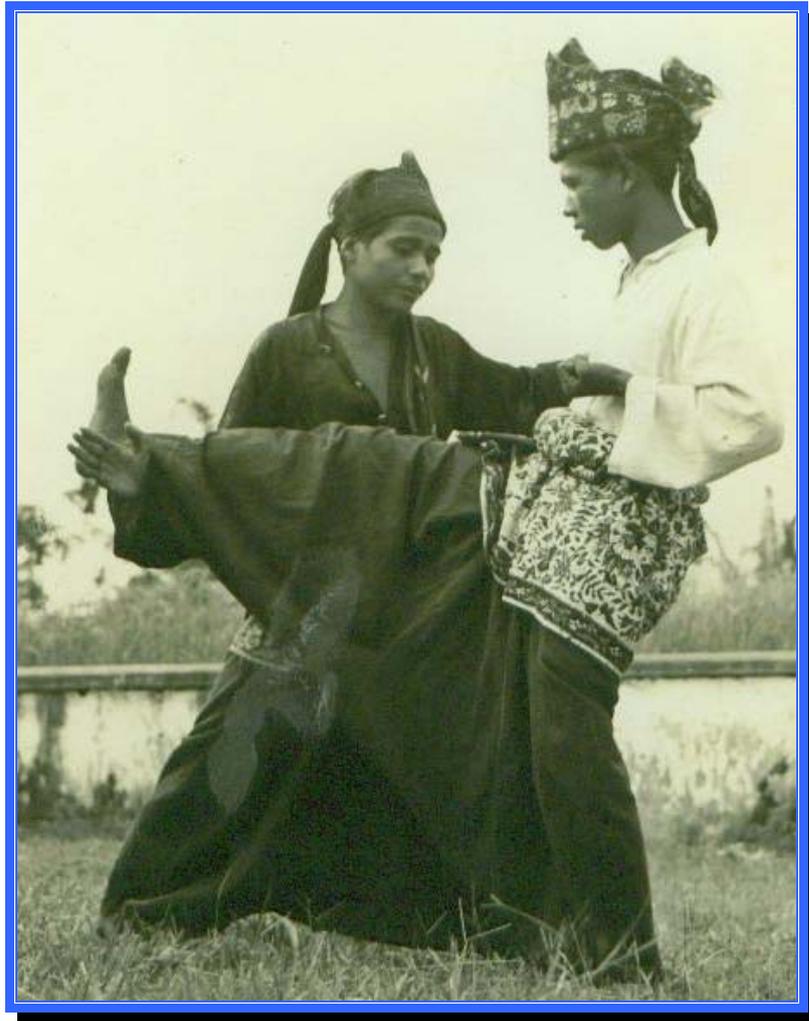
Pemandangan di sekitar pelabuhan Selat Panjang, nampak
perahu nelayan sedang bersandar
19 Juli 1951

ANRI : Kempen K 510719 CC 18



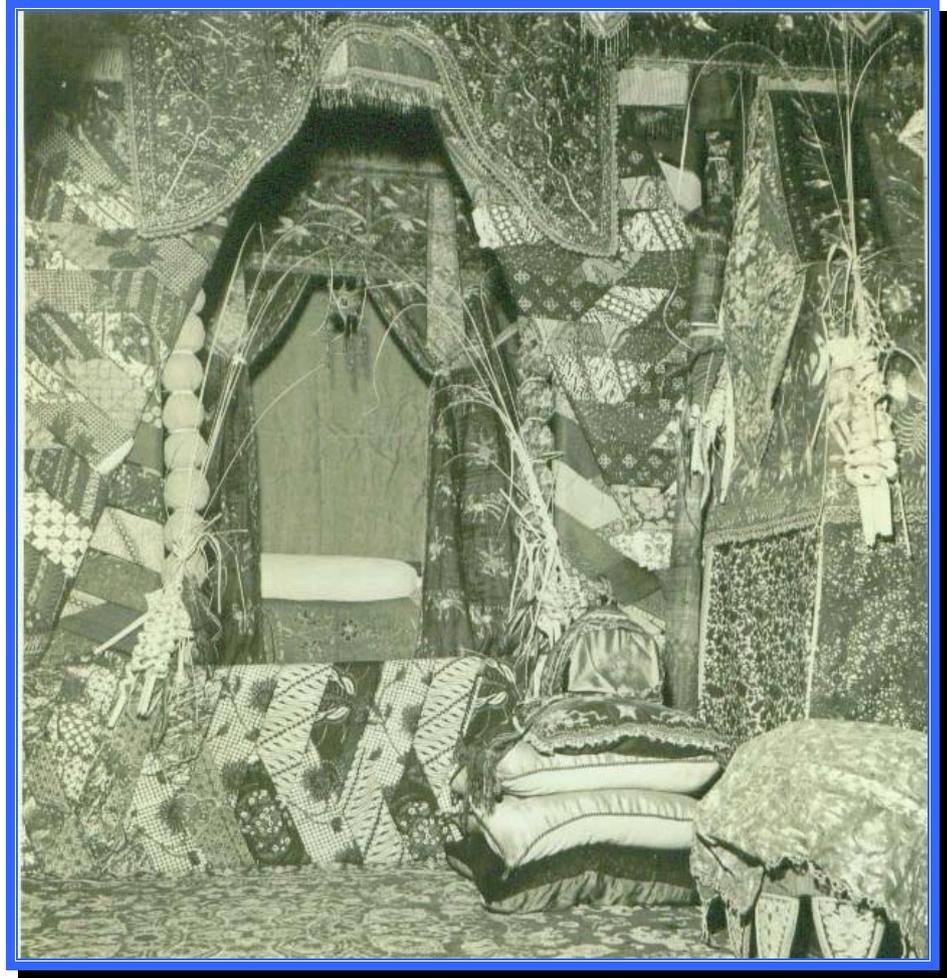
Kesenian Rakyat berupa pertunjukan musik rebana,
di Bukittinggi,
22 Maret 1953

ANRI : Kempen 530322 CC 19



Pertunjukan silat oleh pemuda-pemuda Minangkabau
25 Maret 1953

ANRI : Kempen 53025 CC1-2



Tempat tidur dan aneka hiasan di kamar pengantin pada upacara perkawinan adat di Kerinci, Sumatera Barat
25 Maret 1953

ANRI : Kempen 530325 CC 9



Kesenian oleh para murid Sekolah Kayu Tanam,
23 April 1953

ANRI : Kempen 530423 CC 2-5



Pemandangan dari udara Pelabuhan Teluk Bayur
6 Januari 1954

ANRI : Kempen 540106 CC 3



Gadis-gadis mengenakan pakaian adat Minangkabau ketika akan menyambut Wapres RI Moh. Hatta di Bukit Tinggi
4 April 1954

ANRI : Kempen 540404 CC 17 dan 18



Pertunjukan pencak silat sebagai upacara penyambutan
Wapres RI Moh. Hatta di Kota Baru (Bonjol)
5 April 1954

ANRI : Kempen 540405 CC 7



Upacara adat penyambutan Wapres RI Moh. Hatta
saat tiba di Kota Baru (Bonjol)
5 April 1954

ANRI : Kempen 540411 CC 3



Upacara adat penyambutan Wapres RI Moh. Hatta
ketika tiba di Sijunjung
10 April 1954

ANRI : Kempen 540410 CC 1-16 dan CC 1-19

Kesehatan

No. : 29564/Kab.

DJAKARTA, 10 Februari 1959.-

LAMPIRAN: -

PERIHAL : Jawaban Pemerintah atas
pertanyaan Anggota Jth.
Dr. Sjech H.Djalaluddin.

Mendjawab pertanyaan Anggota D.P.R. Jth. Sdr. Dr. Sjech H. Djalaluddin, tersebut dalam surat Saudara tertanggal 16 Desember 1958, No. 19068/D.P.R.-R.I./58, tentang pemberantasan penyakit t.b.c. di Sumatera Barat, dapatlah diberitahukan sebagai berikut:

Bahwa "penduduk Sumatera Barat hampir 80% dihipangapi hama t.b.c., berarti 80% tjalon sakit t.b.c." adalah tidak tepat; Kalau angka 80% itu benar, dan kalau dimaksud bahwa 80% dari penduduk menundjulkan "reaksi Mantoux positif", maka itu tidak berarti bahwa 80% dari penduduk Sumatera Barat itu tjalon t.b.c., melainkan bahwa 80% dari penduduk Sumatera Barat pernah kemasukan kuman2 penyakit t.b.c., sehingga sebagian besar dari mereka lantaran itu telah mendapat kekebalan terhadap penyakit t.b.c.

Perlu diterangkan, bahwa angka 80% Mantoux positif pada orang dewasa adalah normal.

Menurut laporan yang diterima, maka dokter Iljas tsb. dalam pertanyaan Sdr. Dr. Sjech H. Djalaluddin, sudah kembali di Bukittinggi. Screening oleh yang berwajib sedang dijalankan. Kalau screening selesai, dan seandainya dokter Iljas diizinkan terus bekerja di Bukittinggi, maka kepadanya akan terus diserahkan tugas pemberantasan penyakit t.b.c.

Djika seandainya dokter Iljas perlu dipindah dari Bukittinggi, maka usaha pemberantasan penyakit t.b.c. di Sumatera Barat tetap akan diteruskan, dan untuk itu akan diusahakan seorang pengganti untuk dokter Iljas tsb.-

A.n. Menteri Kesehatan R.I.
Aot. Pemimpin Kabinet Menteri,

(Dr. Soewondo).-

Kepada

Jth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat R.I.
di
DJAKARTA.-
=====

TEMBUSAN: kepada

1. J.M. Wk. Perdana Menteri II,
2. Jth. Sekretaris Dewan Menteri,
DJAKARTA.-
=====

Surat jawaban Menteri Kesehatan mengenai pemberantasan
penyakit *Tuberculosis* (TBC) di Sumatera Barat, atas pertanyaan
Dr. Sjech H. Djalaludin selaku anggota
Dewan Perwakilan Rakyat.
18 Februari 1959

ANRI : Winoto Danuasmoro No. 204



Rumah sakit Sawah Lunto
Tanpa tahun

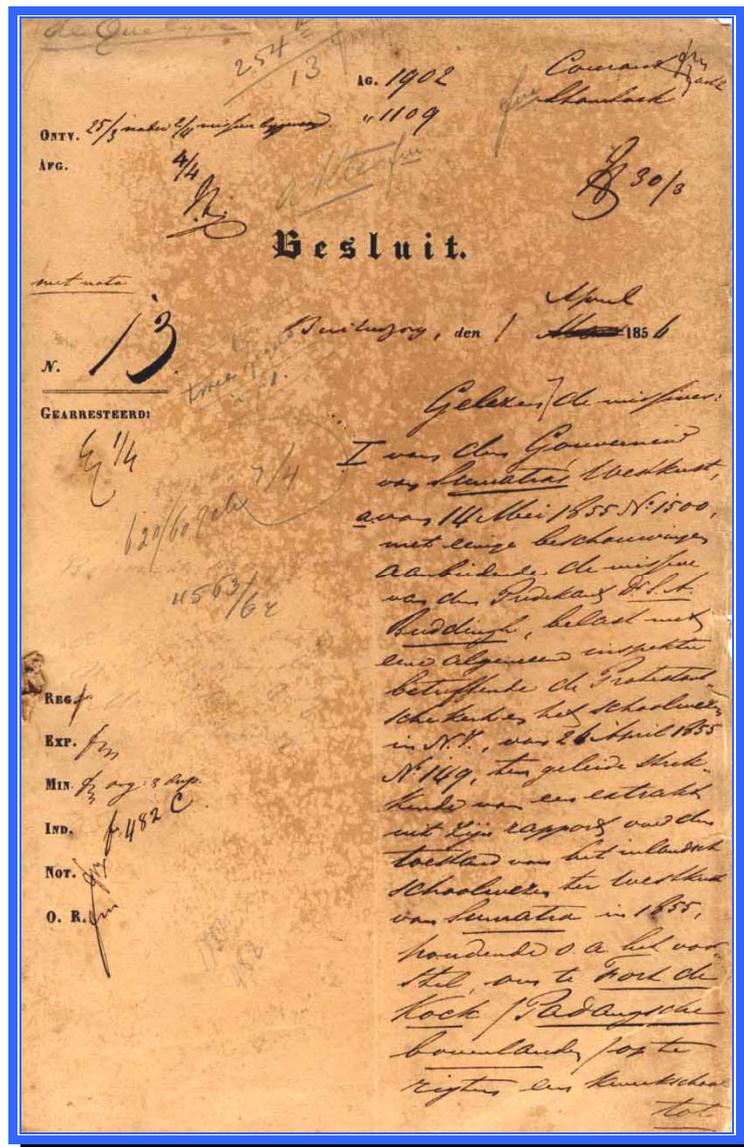
ANRI : KIT No. 357/63



Prasasti Peletakan Batu Pertama Gedung Rumah Sakit di Padang yang diletakkan oleh Wapres Moh. Hatta, 21 April 1953

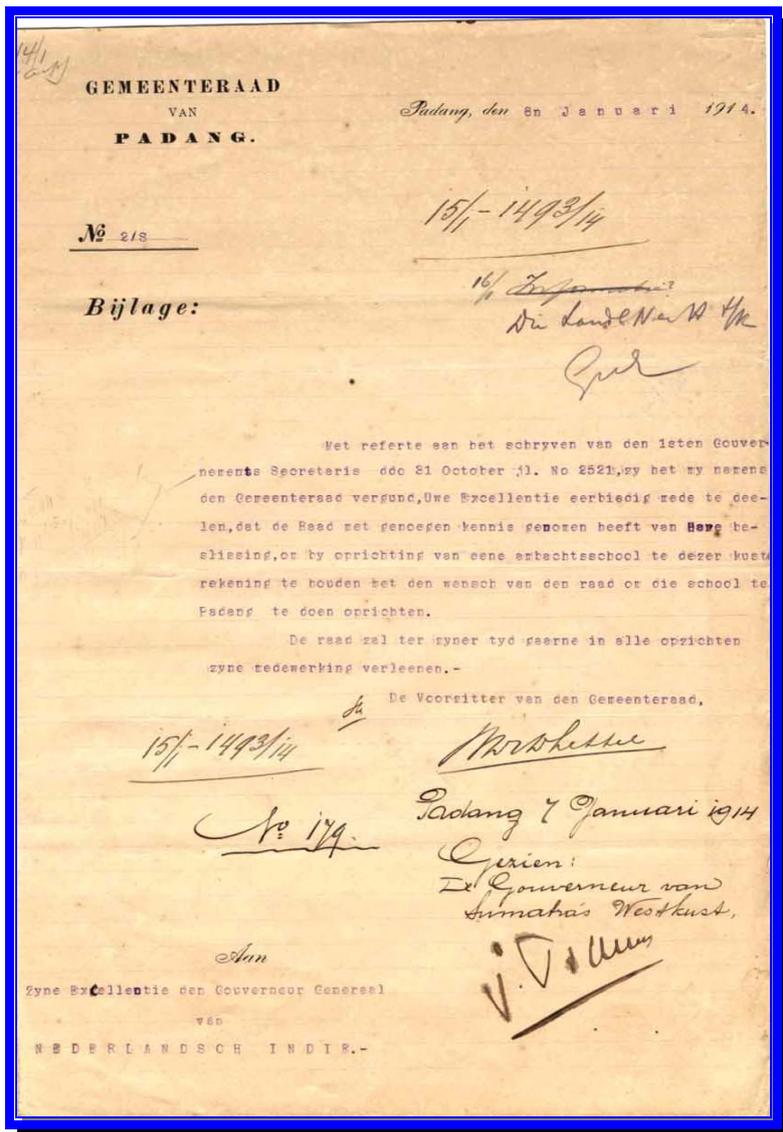
ANRI : Kempen 530421 CC 3

Pendidikan



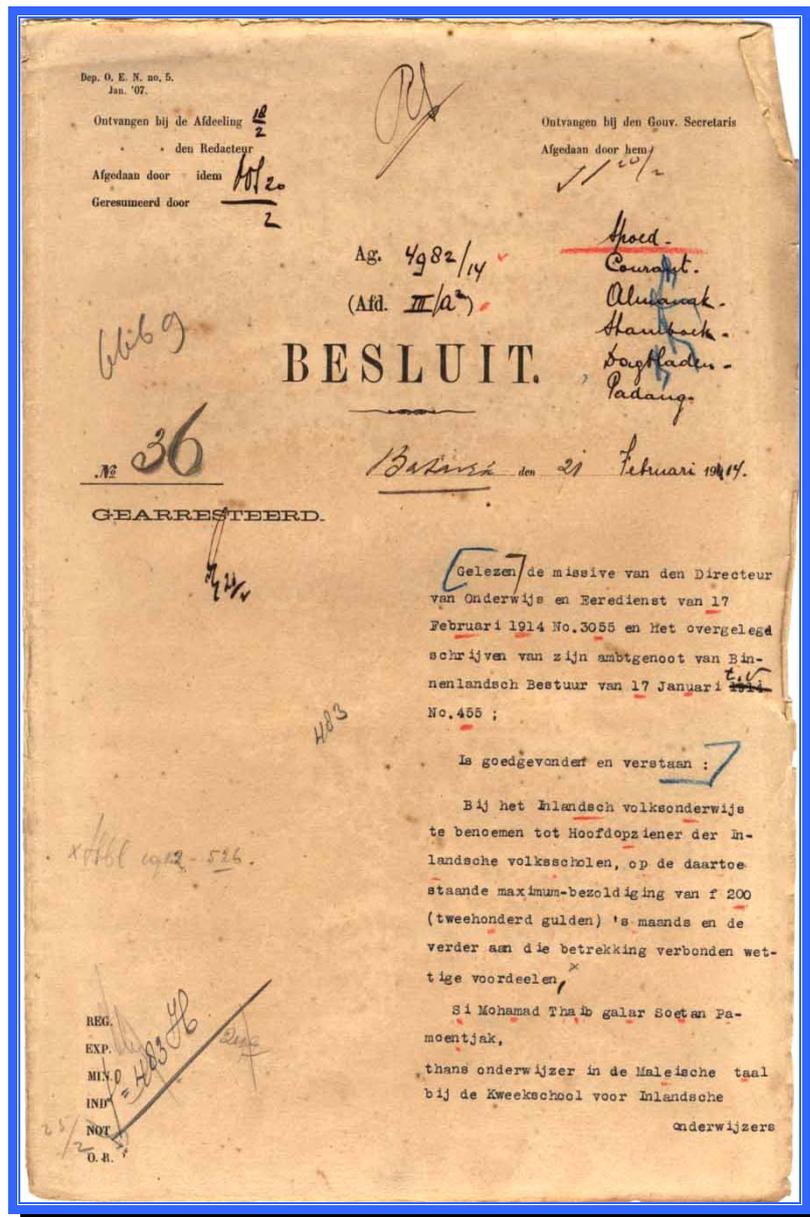
Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 13 Tahun 1856 tentang pendirian Sekolah Raja "Kweekschool" bagi kaum Bumi Putra di Fort de Kock (Padangshe Boverlanden sekarang Bukit Tinggi), 1 April 1856

ANRI : Besluit 1 April 1856 No. 13



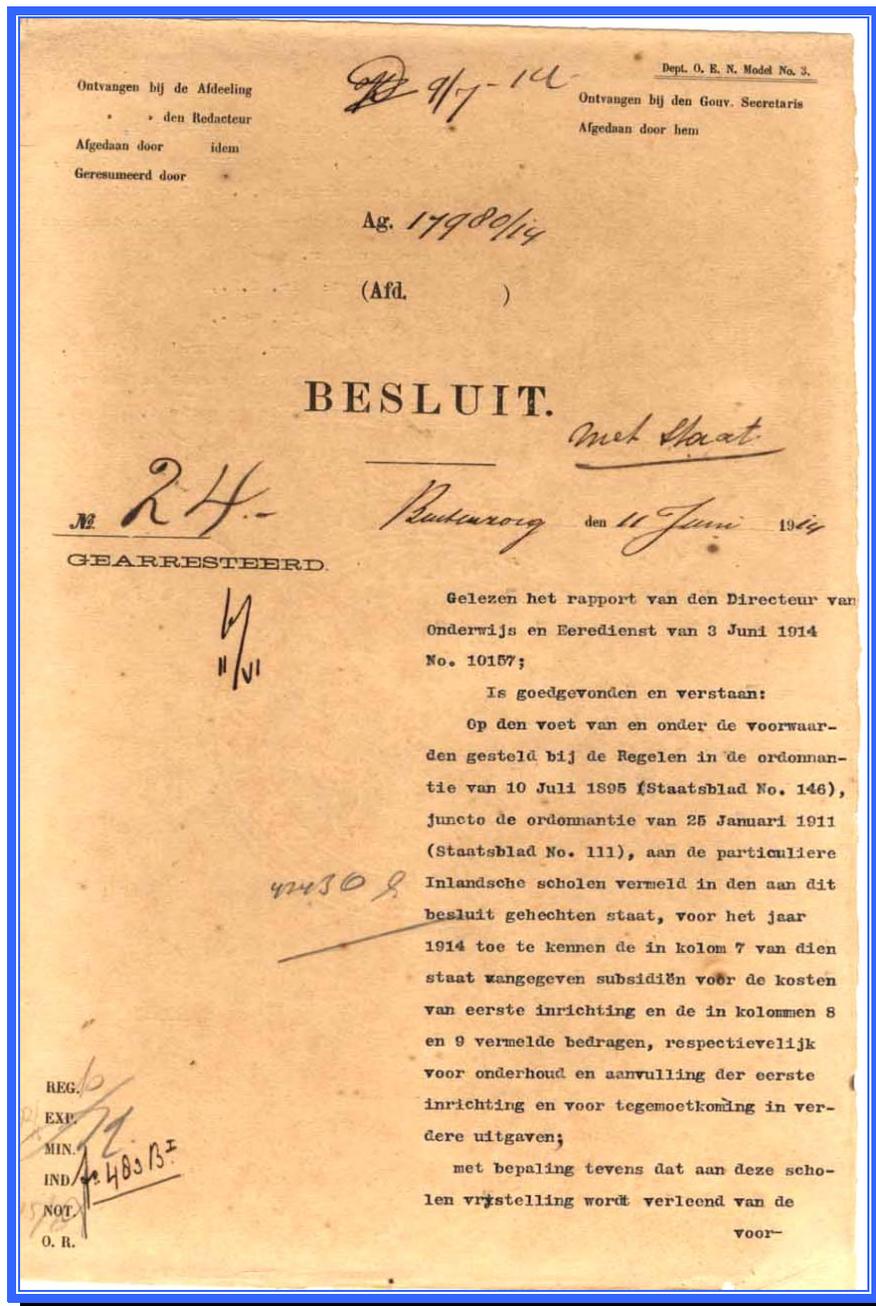
Surat Walikota Padang kepada Gubernur Jendral Hindia
Belanda di Batavia tentang permohonan pendirian sekolah
pertukangan di Padang,
6 Januari 1914

ANRI: RV (A6) 17 Januari 1914, No. 1493



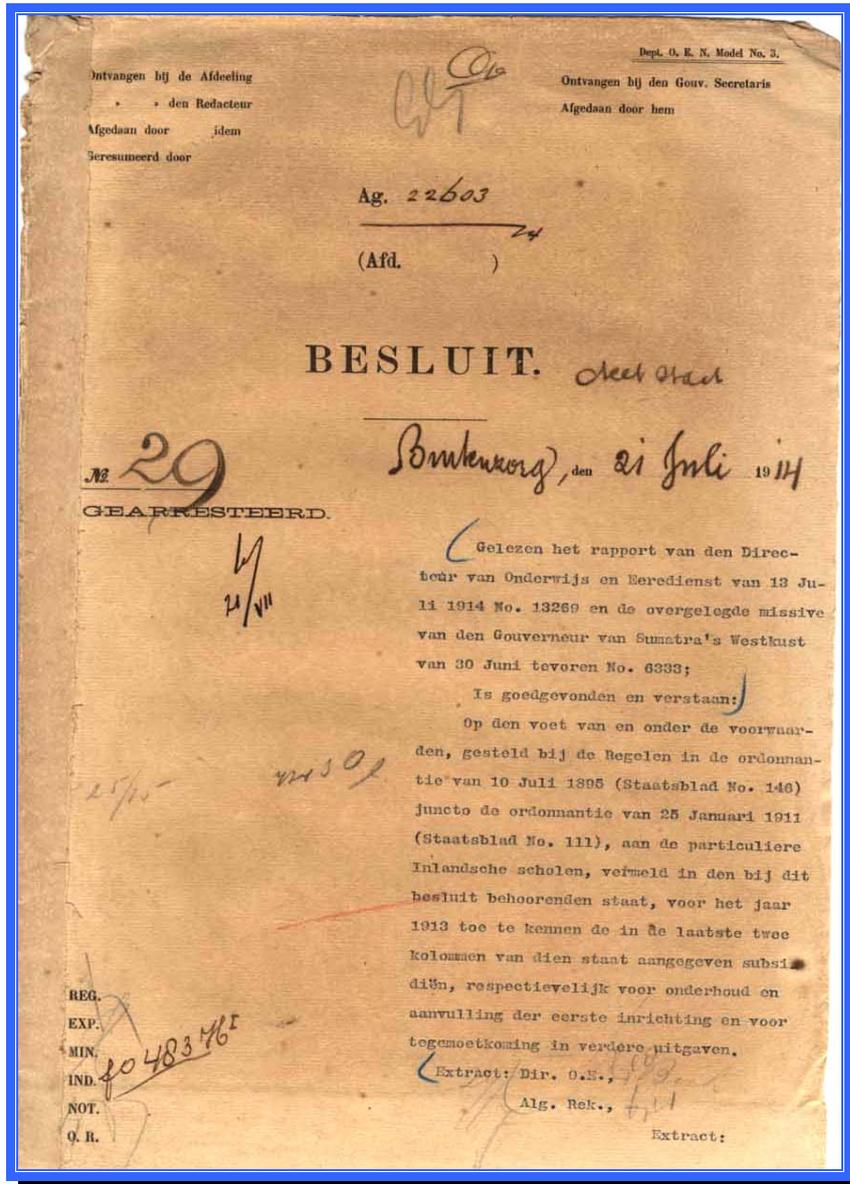
Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 36 1914 tentang pengangkatan Moh. Thaib gelar Soetan Pamoentjak sebagai Guru Bahasa Melayu pada *Kweekschool* untuk kaum pribumi di Padang, 21 Februari 1914

ANRI : Besluit 21 Februari 1914 No. 36



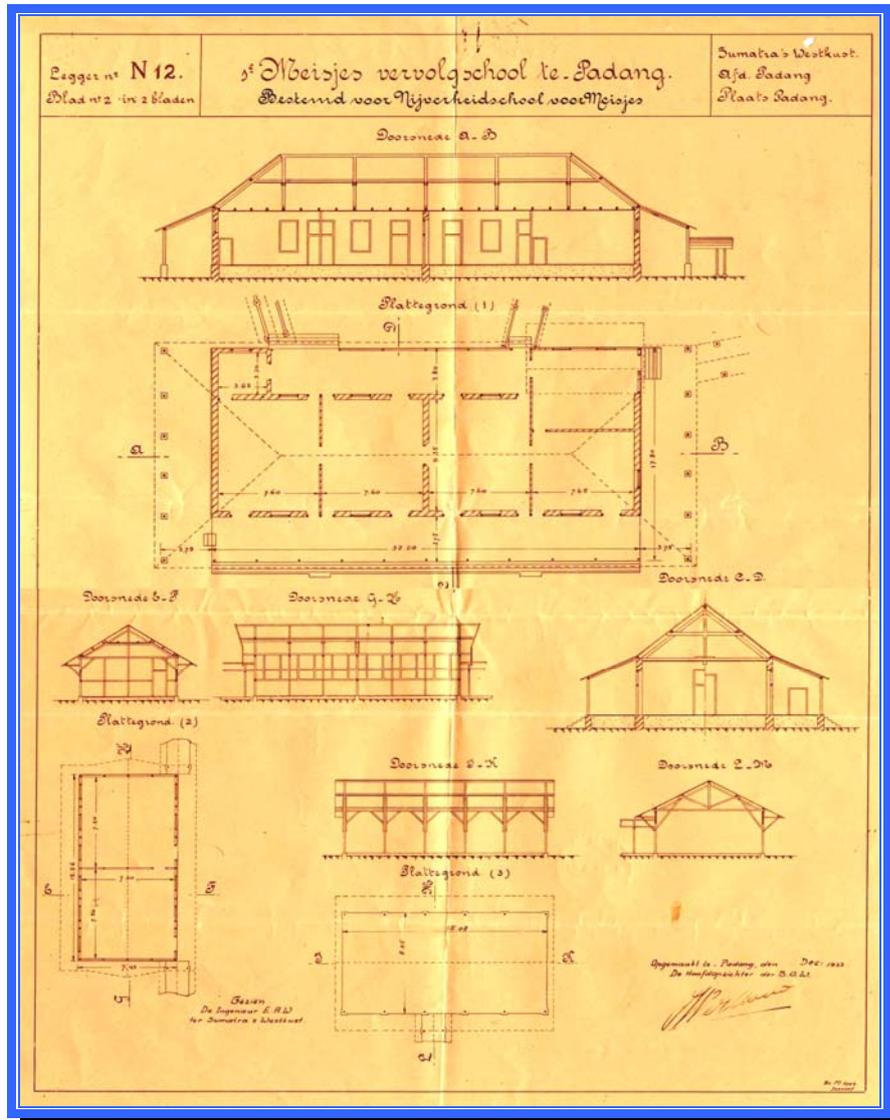
Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi
bagi sekolah pribumi di Loeboeksikaping,
11 Juni dan 21 Juli 1914

ANRI : Besluit 21 Juli 1914 No. 24



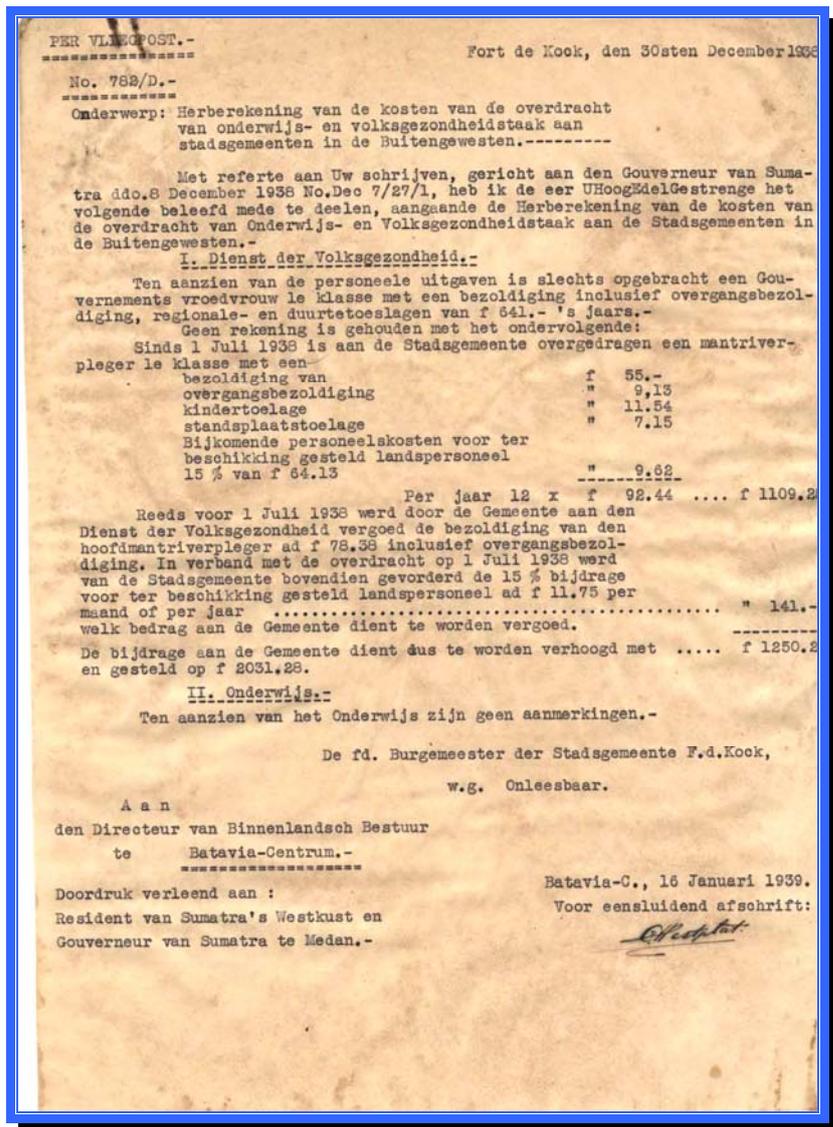
Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi bagi sekolah pribumi di Padang dan daerah sekitarnya, 21 Juli 1914

ANRI : Besluit 21 Juli 1914 No. 29.



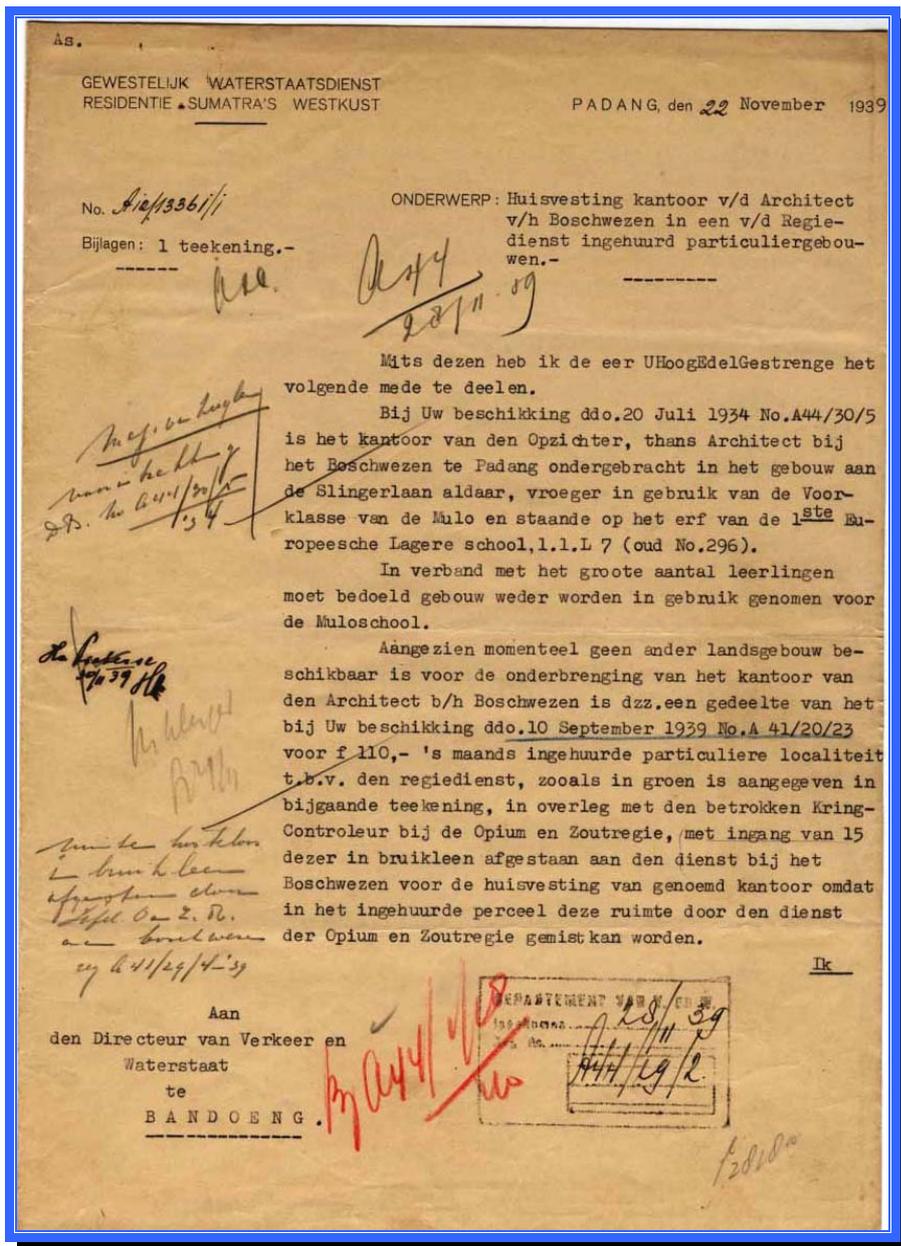
Sket gedung sekolah lanjutan perempuan pada
sekolah ketrampilan di Padang,
Desember 1933

ANRI : BOW AX 63/2



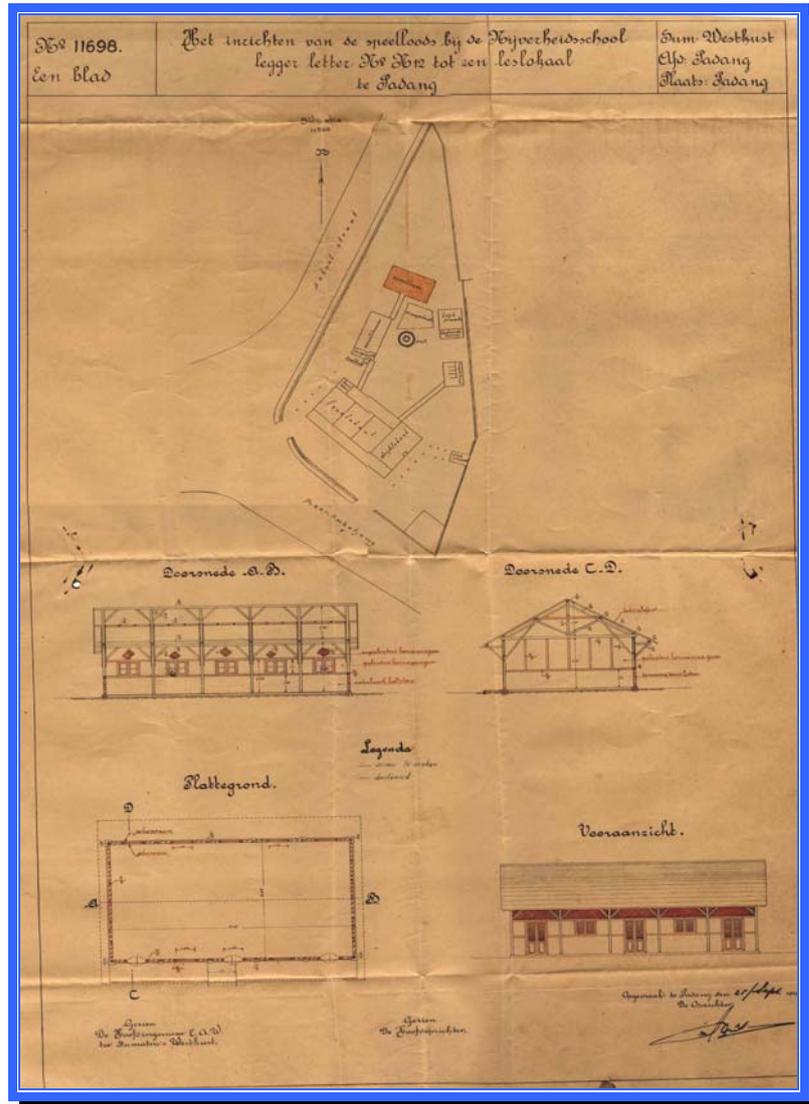
Penghitungan penyerahan anggaran pendidikan dan kesehatan penduduk di luar daerah kepada kotapraja,
30 Desember 1938

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1523



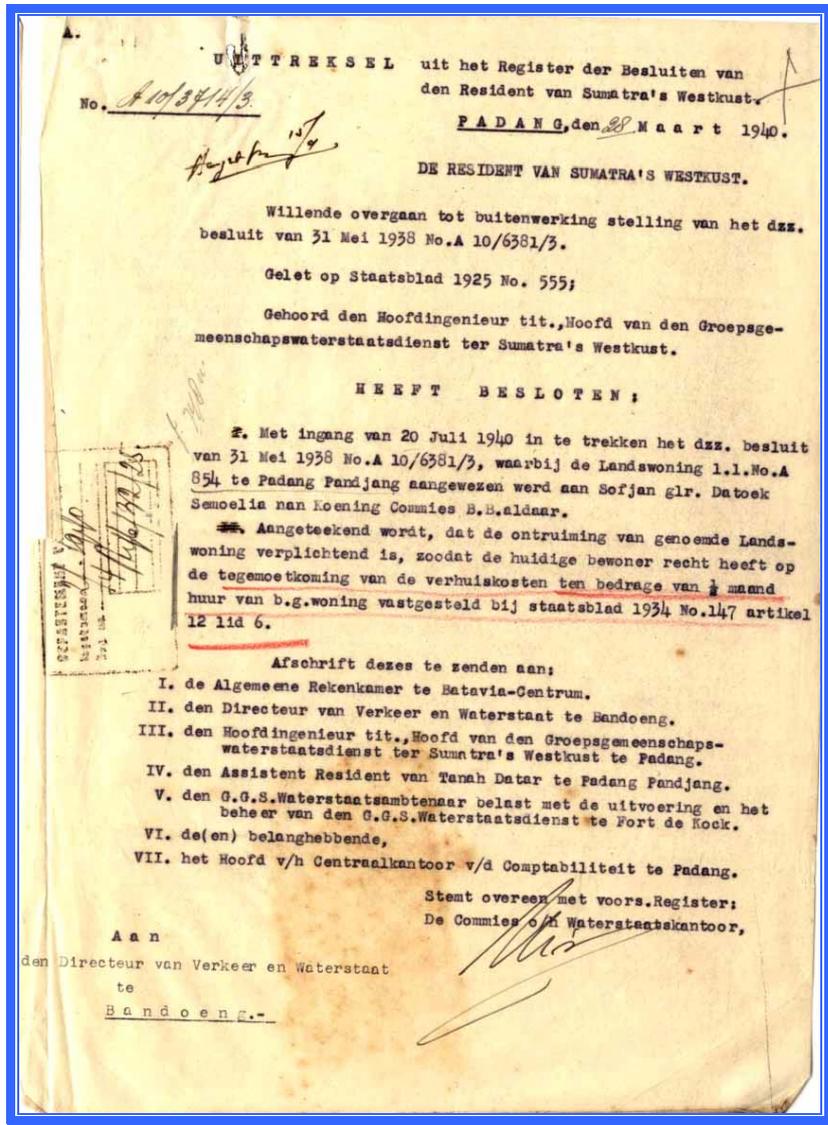
Penunjukan gedung kantor Kehutanan di Padang sebagai tempat sekolah *Meer Uitbreid Lagere School* (MULO) dalam bentuk Salinan Peraturan Direktur Pengairan 29 November 1939

ANRI : BOW No. AX 59/1



Sket tentang Pengaturan ruang bermain pada
 Sekolah Kerajinan di Padang,
 25 September 1939

ANRI : BOW no. AX 63/1



Pembukaan sekolah khusus untuk anak laki-laki
di Padang Panjang,
28 Maret 1940

ANRI : BOW No. AX 113/2

Gelet op *By A 26/9/5*
 ZENDBRIEF *Reg. No. A 26/2/33*

Brf. No. *A 26/2/33* BANDOENG, *25 Juni* 194*1*
 Bijlagen *2* ONDERAVERF:

1 opst. By A 26/9/5-10
1 opst. Rfg A 26/2/33-31
 Folio expeditieboek Archief.

Aangeboden aan
 den Directeur van Oen & te Batavia

Met verwijzing naar het op schrift van
 van 31 Januari 1940 No. A 46/7/16 en
 met verzoek te willen mededeelen of
 overzigt van unen gegaan met
 het bybouwen van een bergplaats by de
 Ouderschool te Padang Panjang.

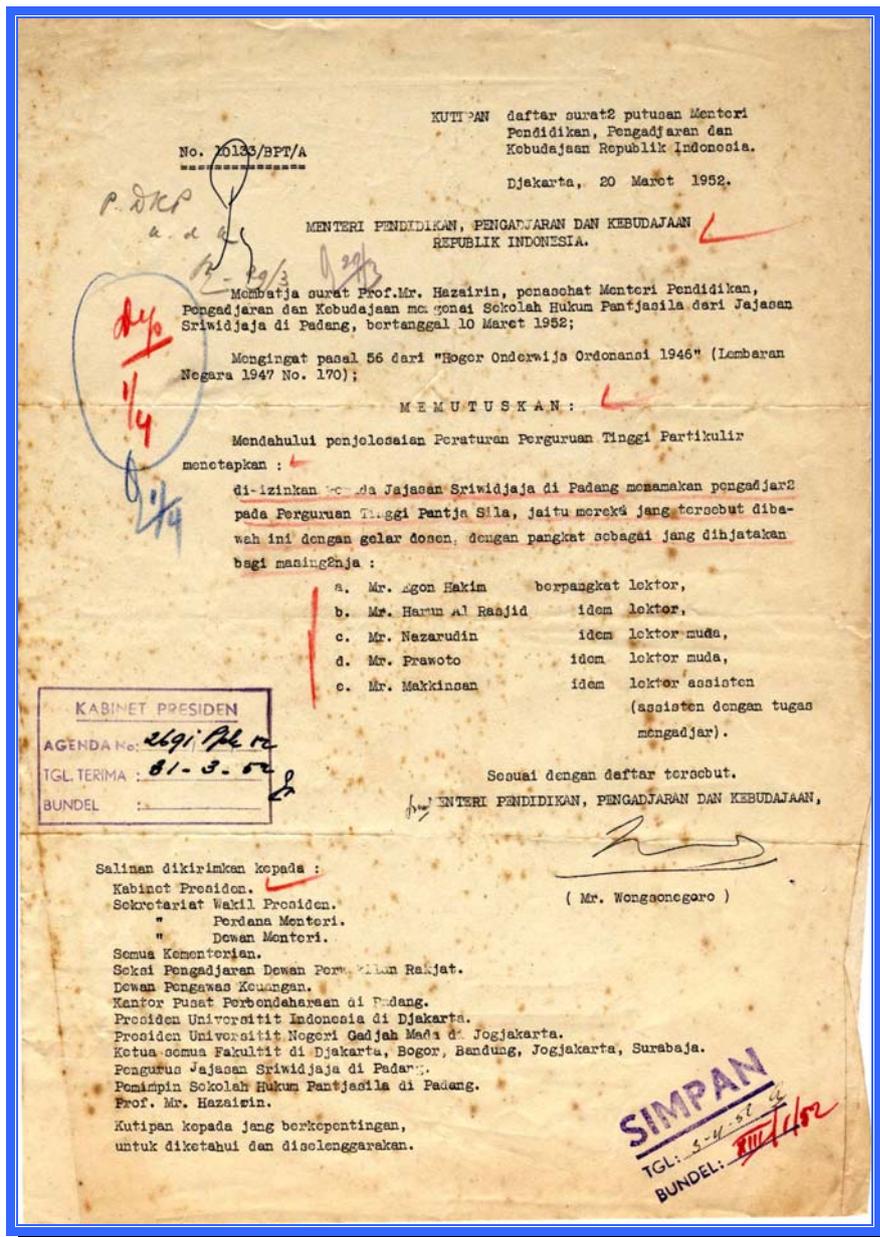
Opnieuw voorbrengen :
 Terug aan :

De Directeur van
 Verkeer en Waterstaat
 Namens dezen :
 Het Hoofd van Afd. Wat

V. en W. Model Alg. 2a. 3-41-10,000.

Pembangunan tempat penyimpanan (gudang) pada Sekolah Gabungan di Padang Panjang, 25 Juni 1941

ANRI : BOW No. AX 113/1



Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 10/33/BPT/A. tentang diizinkan kepada Mr. Agus Hakim dkk. sebagai dosen di Sekolah Hukum Pancasila dari Yayasan Sriwijaya Padang
20 Maret 1952

ANRI : Kabinet Presiden No. 1087



Pemberantasan Buta Huruf di Negeri Saning Bakar yang terletak kira-kira 12 km dari Kota Solok
1 April 1952

ANRI : Kempen 520401



Foto bersama di depan gedung Sekolah Rakyat di Muara Pingai,
Solok yang sedang dibangun secara gotong- royong
1 April 1952

ANRI : Kempen 520401



Para siswa Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi sedang bermain tenis meja di ruang senam
14 November 1952

ANRI : Kempen 521114 CC 3



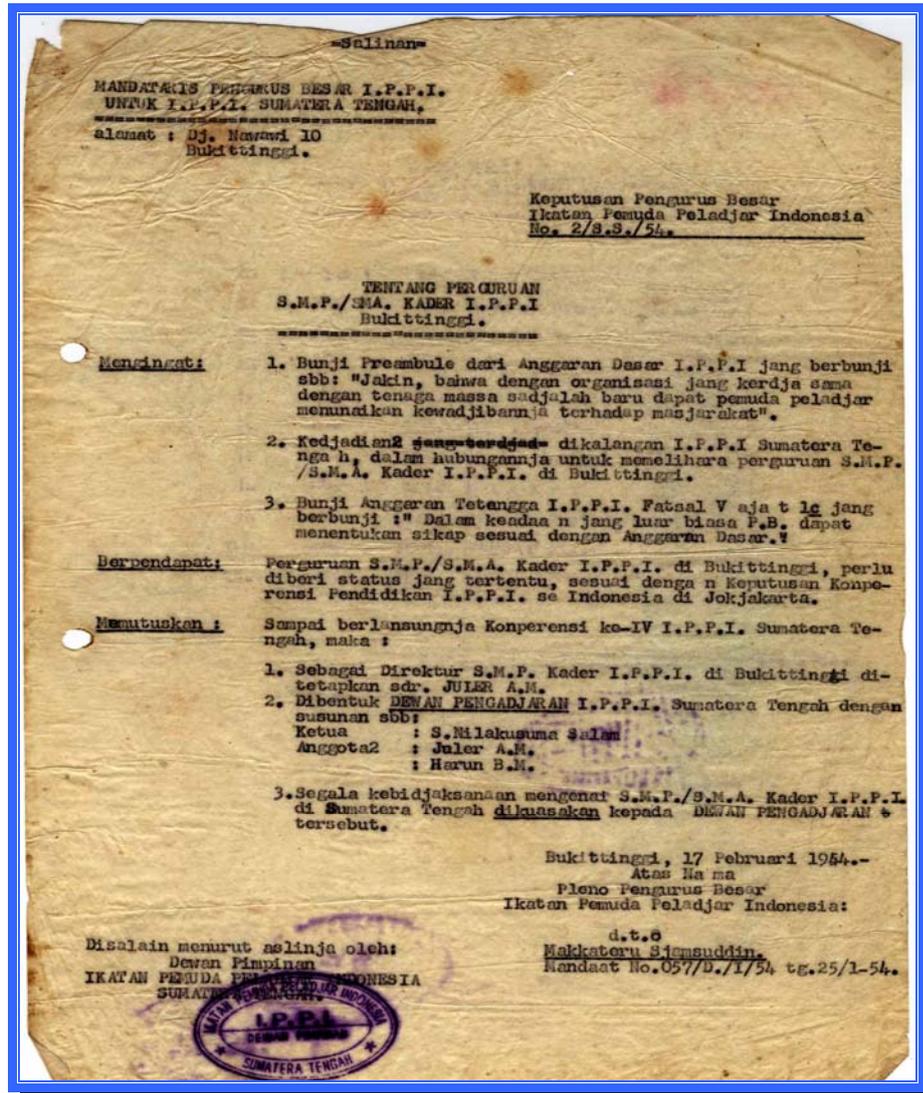
Para siswa sedang membaca di Perpustakaan Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi,
14 November 1952

ANRI : Kempen 521114 CC 5



Sekolah *Indische Nederlandsche School* (INS) di Kayu Tanam
sedang dikunjungi rombongan Wapres RI Moh. Hatta
23 April 1953

ANRI : Kempen 530423 CC 3



Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (PB I.P.P.I) no. 2/S.S./54 tentang Perguruan SMP/SMA Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Bukittinggi mengenai ditetapkan sdr. Juler A.M. sebagai Direktur SMP Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dll.
17 Februari 1954

ANRI : I.P.P.I No. 255.



Sekolah Rakyat di Panti saat dikunjungi
oleh Wapres RI Moh. Hatta
5 April 1954

ANRI : Kempen 540405 CC 18



Murid-murid putri sekolah menengah Islam di Kayu Tanam
sedang melakukan senam
23 April 1954

ANRI : Kempen 530423 CC 2-3



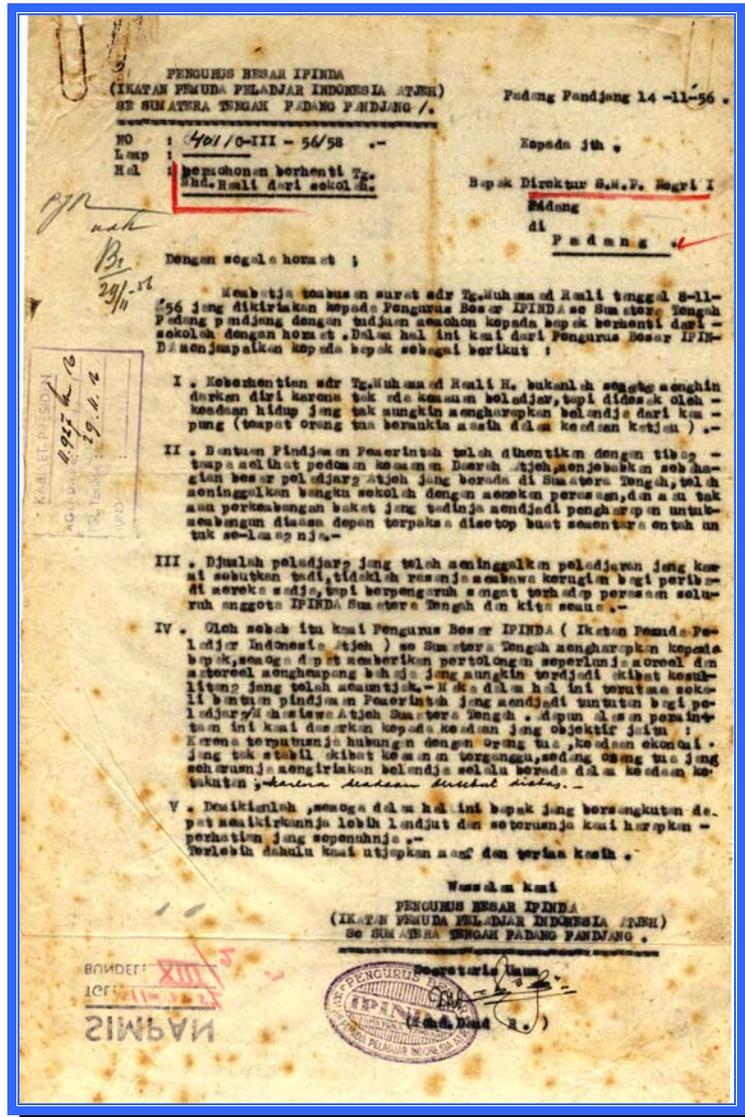
Gedung Fakultas Pertanian Universitas Adityawarman di Payakumbuh di buka oleh Menteri PPK Mr. Moh. Yamin dan diresmikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta
30 Nopember 1954

ANRI : Kempen 541129 CC 2-1



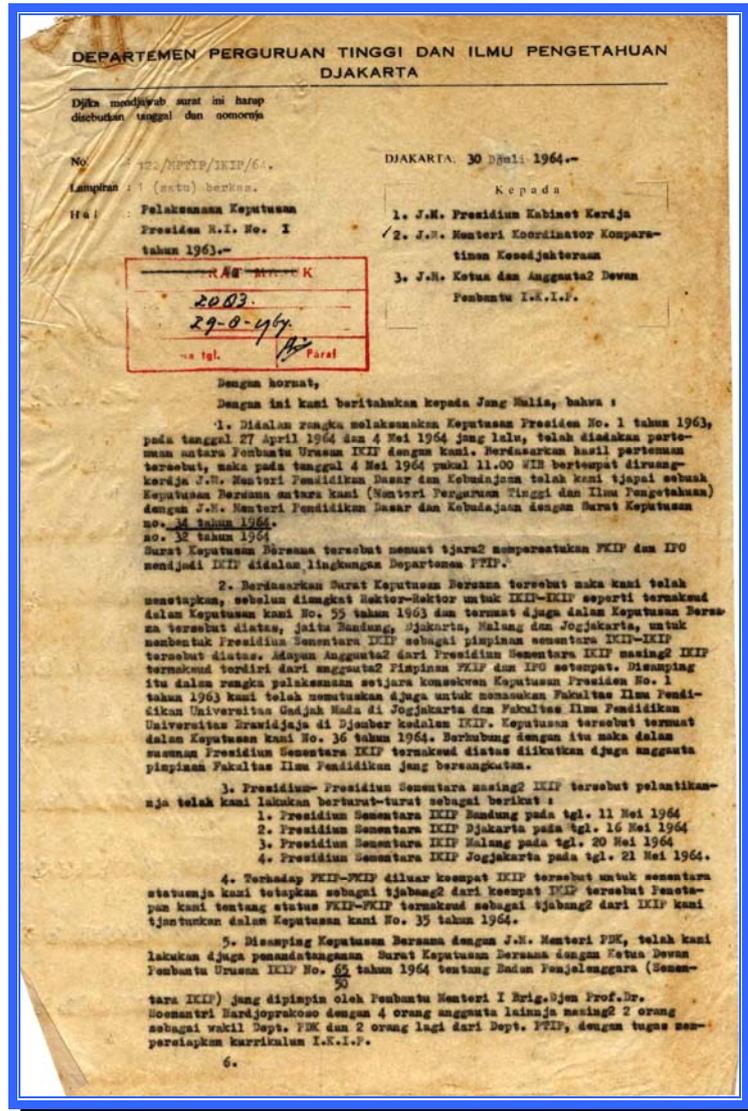
Para Siswa Sekolah Guru Bantu (SGB) Perguruan partikular
Indonesia *Indische Nederlandsche School* (INS) di Kayu
Tanam, Sumatera Barat
27 Desember 1954

ANRI : Kempen 541227 CC 3



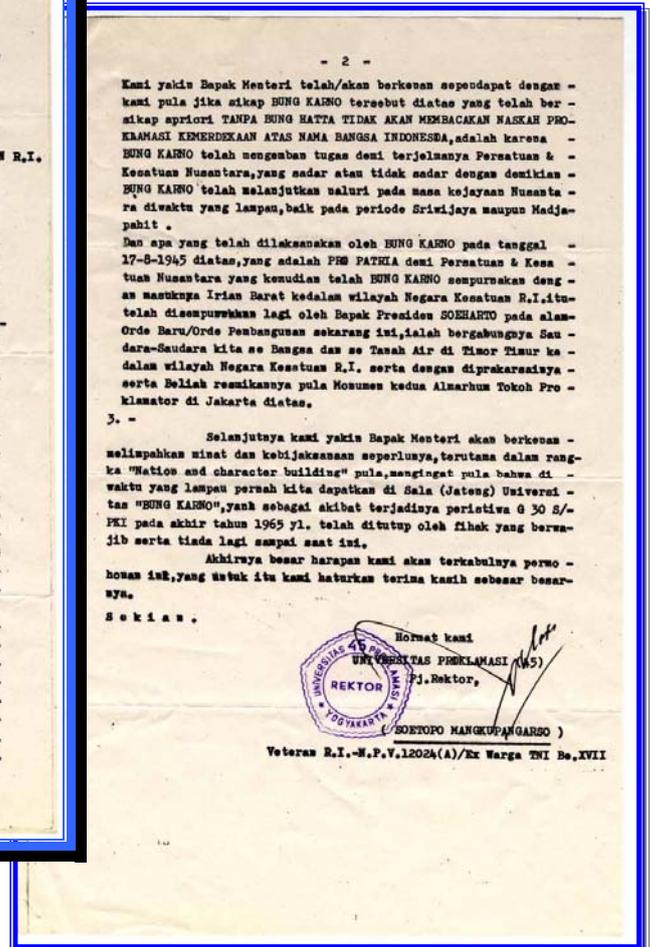
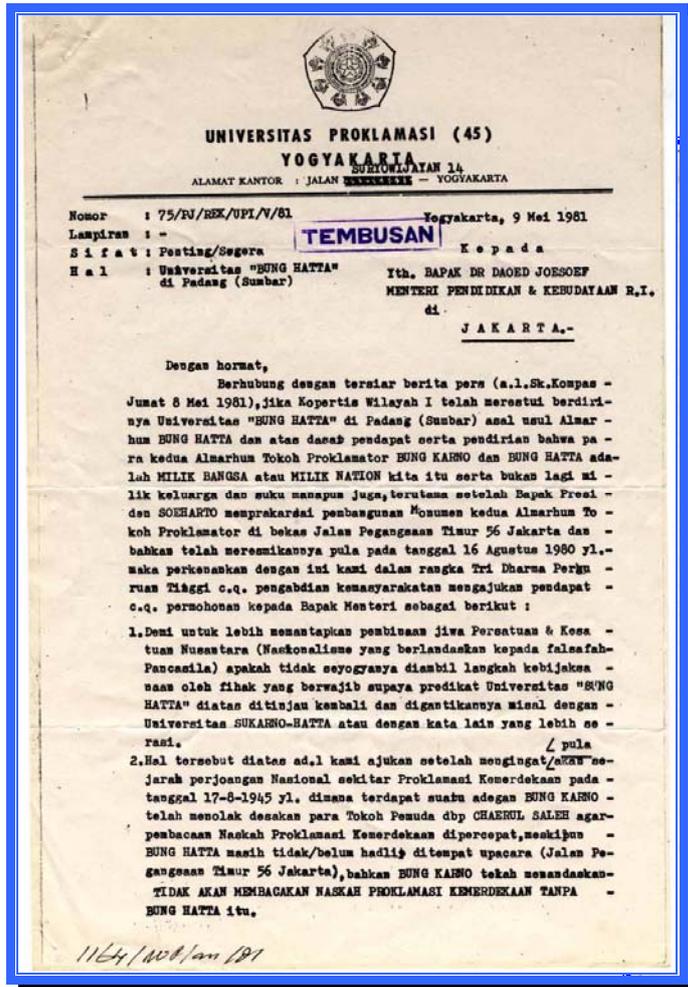
Surat dari Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Aceh (IPINDA) Padang Panjang se Sumatera Tengah kepada Direktur SMPN 1 Padang tentang permohonan berhenti Sdr Tg Muhamad Ramli dari sekolah karena bantuan dari pemerintah dihentikan.
14 Nopember 1956

ANRI : Kabinet Presiden No. 1202



Surat dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Jakarta kepada J.M. Menteri Koordinator Kompartimen
Kesejahteraan tentang penyatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dalam lingkungan
Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP)
30 Juli 1964

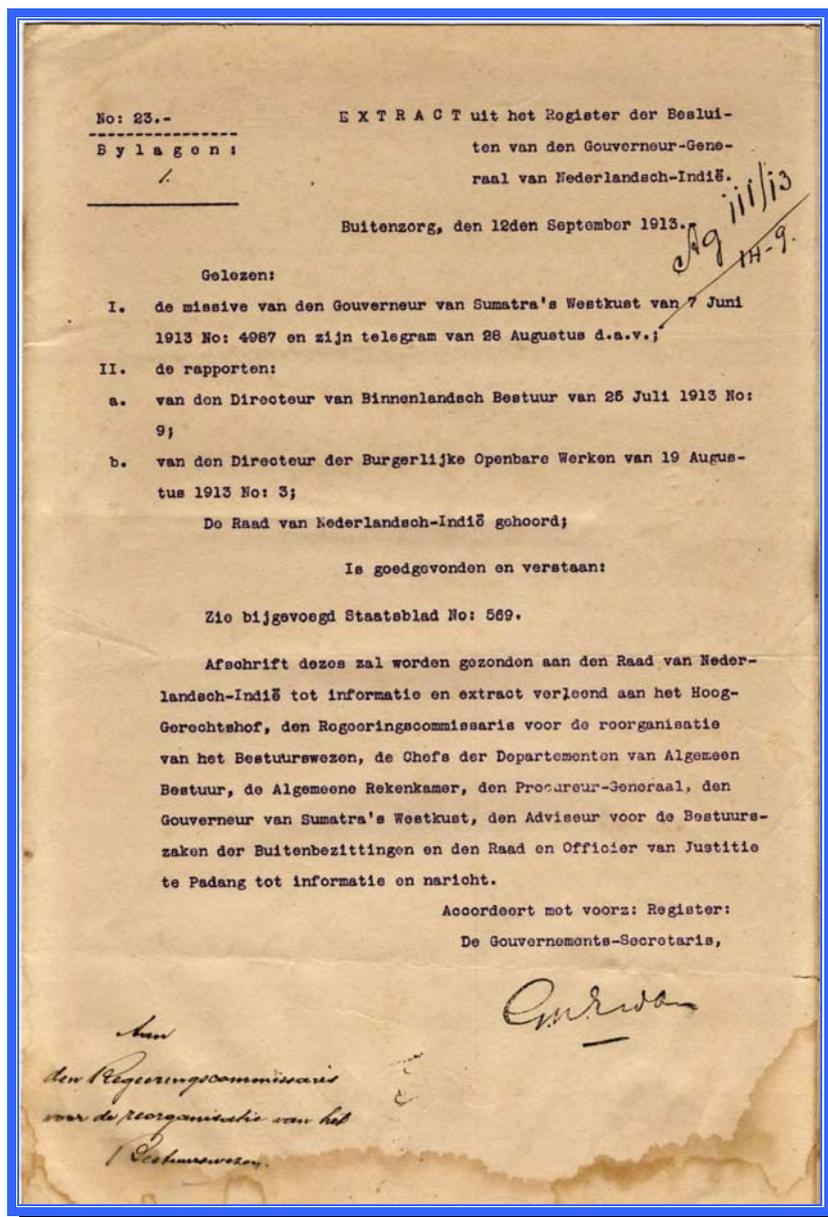
ANRI : HUBRA No. 886



Surat dari Pj. Rektor Universitas Proklamasi (45) Jogjakarta
kepada DR. Daode Joesoef Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI tentang permohonan penggantian nama
Universitas Bung Hatta menjadi Universitas Soekarno-Hatta
9 Mei 1981

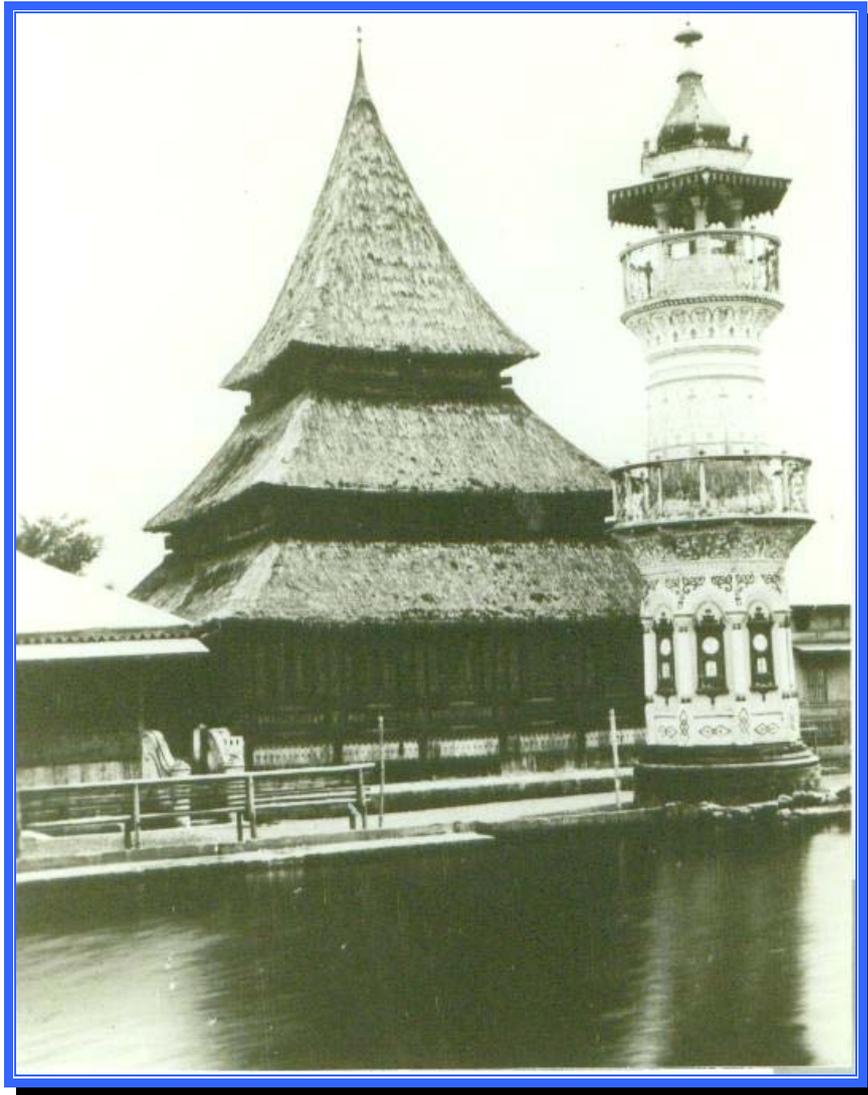
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 670

Agama



Laporan dari Direktur Pekerjaan Umum tentang pendirian bangunan kantor untuk pegawai negeri sipil di Si Tiong, Sungai Dareh, Distrik Batanghari, Afdeeling Tanah Datar tanggal No. 23 12 September 1913

ANRI: Ag No. 111/13 dalam Binnenlandsch Bestuur No. 237/3



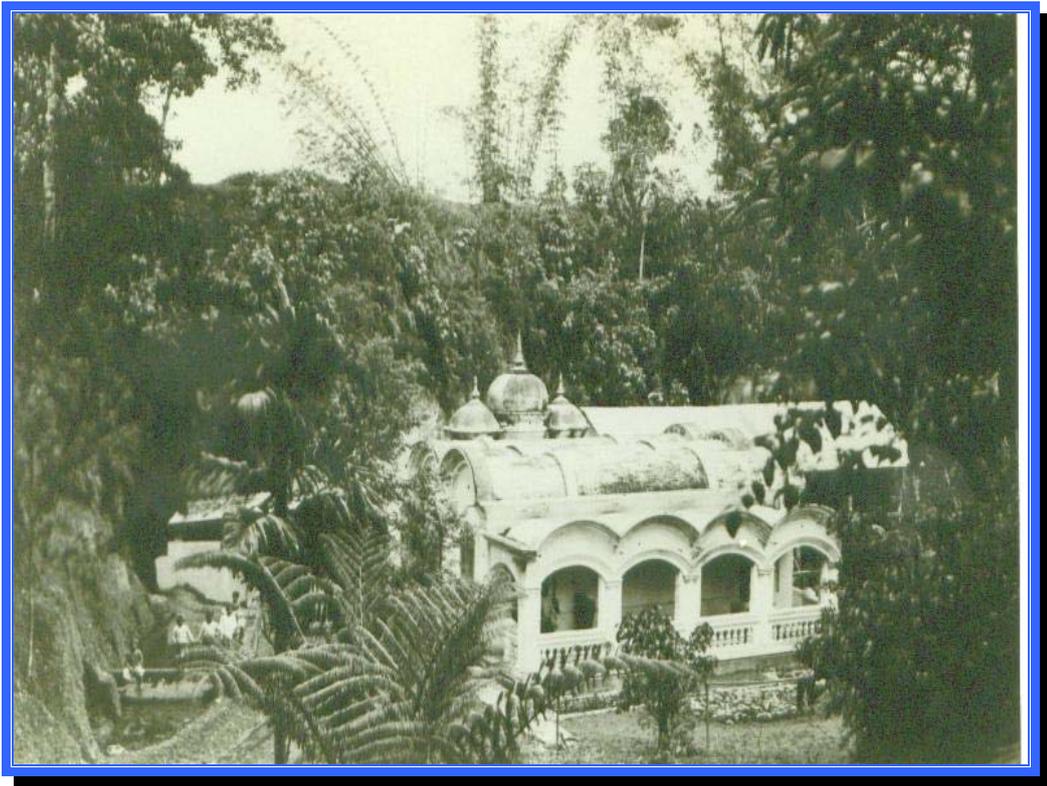
Sebuah masjid dengan pemandangan kolamnya
di Taluk, Bukittinggi
Tanpa tahun

ANRI : KIT 804/87



Masjid di Sungai Puar, Sumatera Barat
Tanpa tahun

ANRI : KIT 804/004



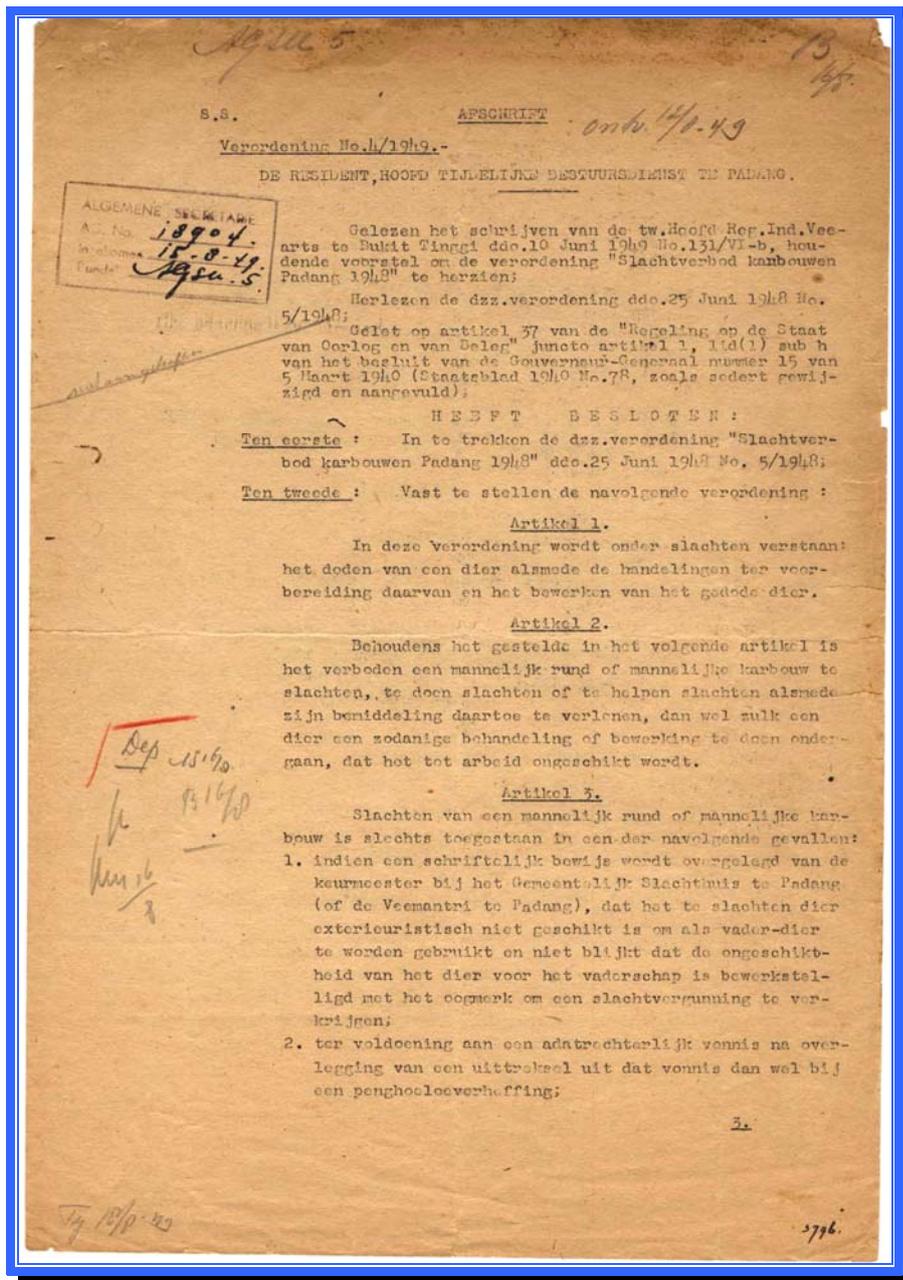
Masjid 1001 malam di Fort de Kock, Bukit Tinggi,
Sumatera Barat
Tanpa tahun

ANRI : KIT 805/64



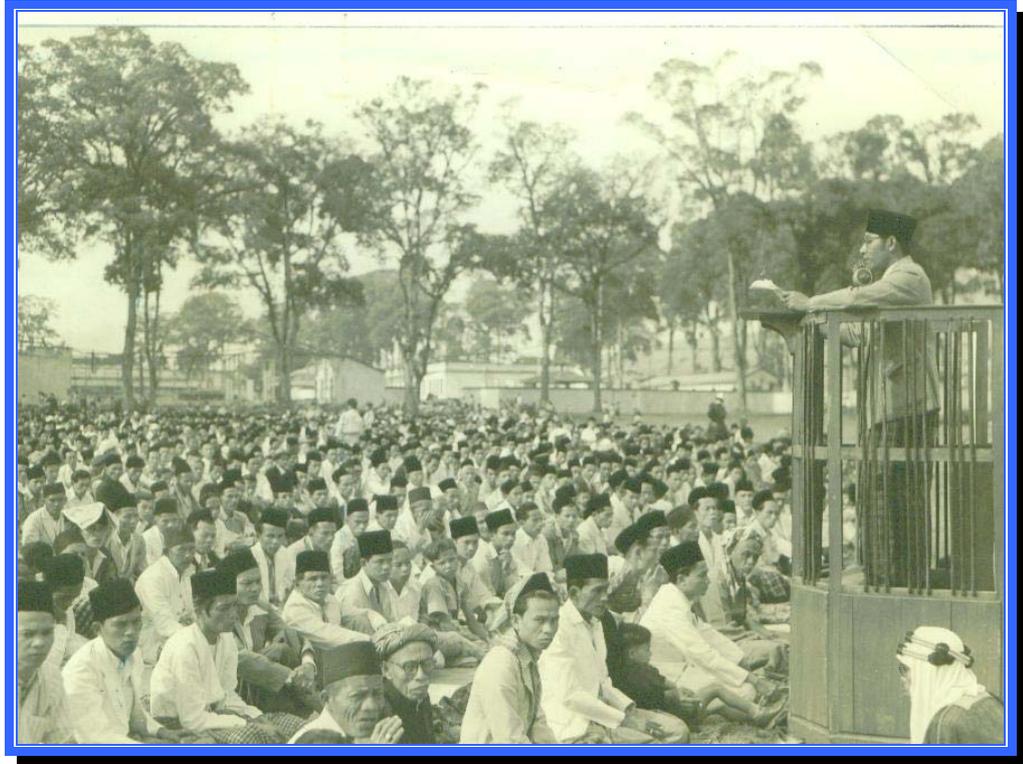
Surau di Baso, Fort de Kock, Sumatera Barat

ANRI : KIT 805/27



Peraturan Residen Padang No. 4 tahun 1949 tentang larangan melakukan penyembelihan kerbau pada saat Idul Qurban dan hari raya Cina "Tjiokø"
5 Agustus 1949

ANRI: Ag 18904/1949



Khotbah Idul Fitri yang diikuti beribu-ribu jama'ah
di lapangan Kantin Bukittinggi
5 Juli 1951

ANRI : Kempen 514971



Bangunan kelenteng dan pemandangan
di sekitar pelabuhan Selat Panjang

19 Juli 1951

ANRI : Kempen 510719 CC 72 K



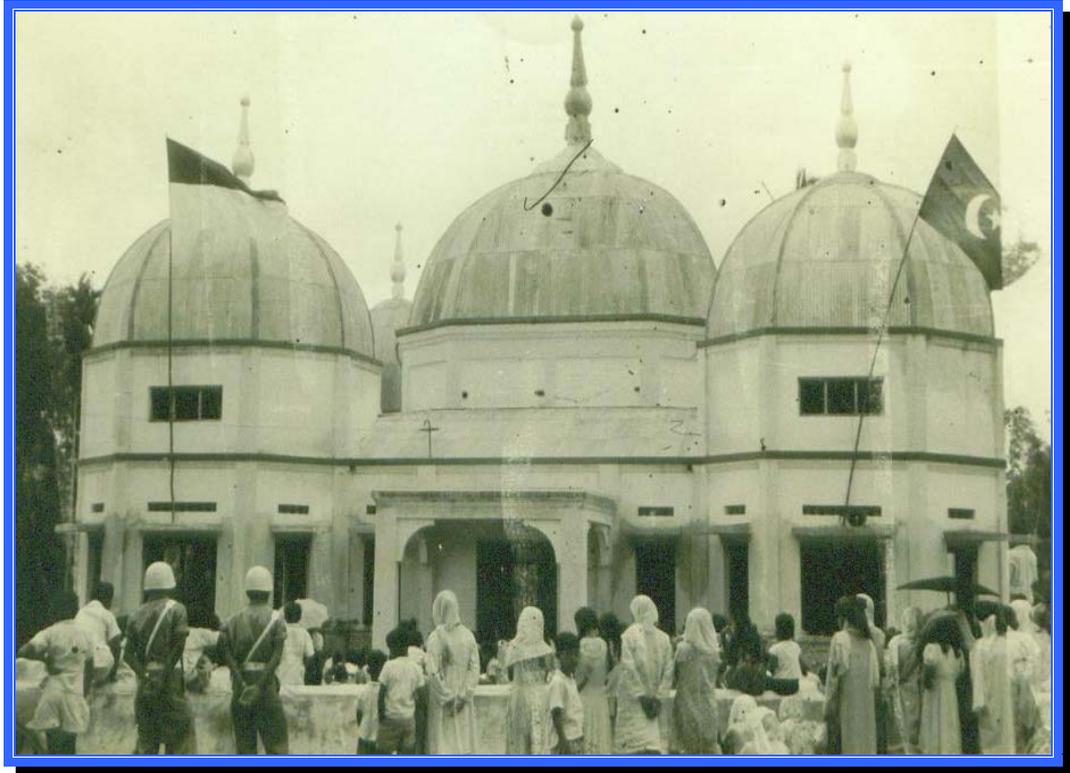
Sebuah masjid di tepi Sungai Siak
19 Juli 1951

ANRI : Kempen K. 510719 CC 76



Para calon haji di Payakumbuh, Sumatera Barat
16 Juni 1952

ANRI : Kempen 520612



Masjid di Bukit Tinggi saat dikunjungi Wapres RI Moh. Hatta
7 April 1954

ANRI : Kempen 540407 CC 1 – 24

**DEWAN PIMPINAN
ISLAM STUDY CLUB (I. S. C.)
JOGJAKARTA**

Alamat Sekretariat: Dj. Tidar 2 - Telp. 455 - Jogjakarta.

KRJG37224.

No. : /
Lamp. :
Hal :

Jogjakarta, 23 Juni 57.
19.....

Kepada jth :

Sdr. ZAINAL MURAD
di
PADANG.

Assalamu'alaikum w.w.

Miat Saudara untuk mendirikan Islam Study Club (I.S.C.) di kota Padang ini kami sambut dengan perasaan gembira. Memang inilah yang telah lama menjadi angan2 kita, baik keinginan ini lahir dari pihak I.S.C. kita di Jogja, maupun seperti yang ditetuskan oleh Konferensi I.S.C. se Indonesia di Surabaya bulan Mei yang lalu, agar di-tiap2 kota Universitas di Indonesia ini dapatlah ditumbuhkan badan I.S.C. , sebagai yang telah kita sedari memang besar sekali manfaatnya bagi perkembangan Islam di Indonesia ini.

Dalam usaha Saudara untuk mendirikan I.S.C. tersebut inginalah kami memberikan beberapa saran yang kiranya berguna bagi Saudara :

1. Sebaiknya jika I.S.C. tersebut ditumbuhkan di-tengah2 masyarakat mahasiswa, agar dari mereka dapat diharapkan bimbingan dan tenaga pengasuhannya ; apabila jika mengingat bahwa fungsi I.S.C. sebagai badan studi dan research erat berhubungan dengan kehidupan dan tjara berkerja mereka.
2. Usahakulah agar I.S.C. di kota Padang ini mendapat dukungan yang luas dari para terkemuka kita, terutama dari kalangan ilmu pengetahuan dan para dermawanannya.
3. Sebagai hasil dari Konferensi Surabaya, yang dihadiri oleh 16 dari 22 I.S.C. lokal yang ada, sekarang telah terbentuk Badan Koordinasi I.S.C. seluruh Indonesia yang berkedudukan di Jogja . Segera setelah I.S.C. Padang berdiri, sampaikanlah segala sesuatunya kepada Sekretariat Badan Koordinasi tersebut, Dj.Tidar 2, Jogja.

Beresea surat ini kami kiribakan pula sebuah buku "Gerak langkah I.S.C." sebagai pedoman bagi usaha Saudara.

Ahirnya kami iringi dengan do'a semoga usaha Saudara berhasil dengan baik dan mendapat sambutan yang memuaskan dari masyarakat kota Padang ini.

I.S.C.-2 untuk kota2 Bukittinggi, Pajalumbuh, Padangpanjang dan kami harapkan juga dari Saudara keterangan2 tentang kemungkinannya berdirinya.

Sekianlah dan selamat berusaha.

Wassalam,

Dewan Pimpinan I.S.C. ,
Jogjakarta



Ketua Umum

(Mr.R.Santoso Pudjosubroto)

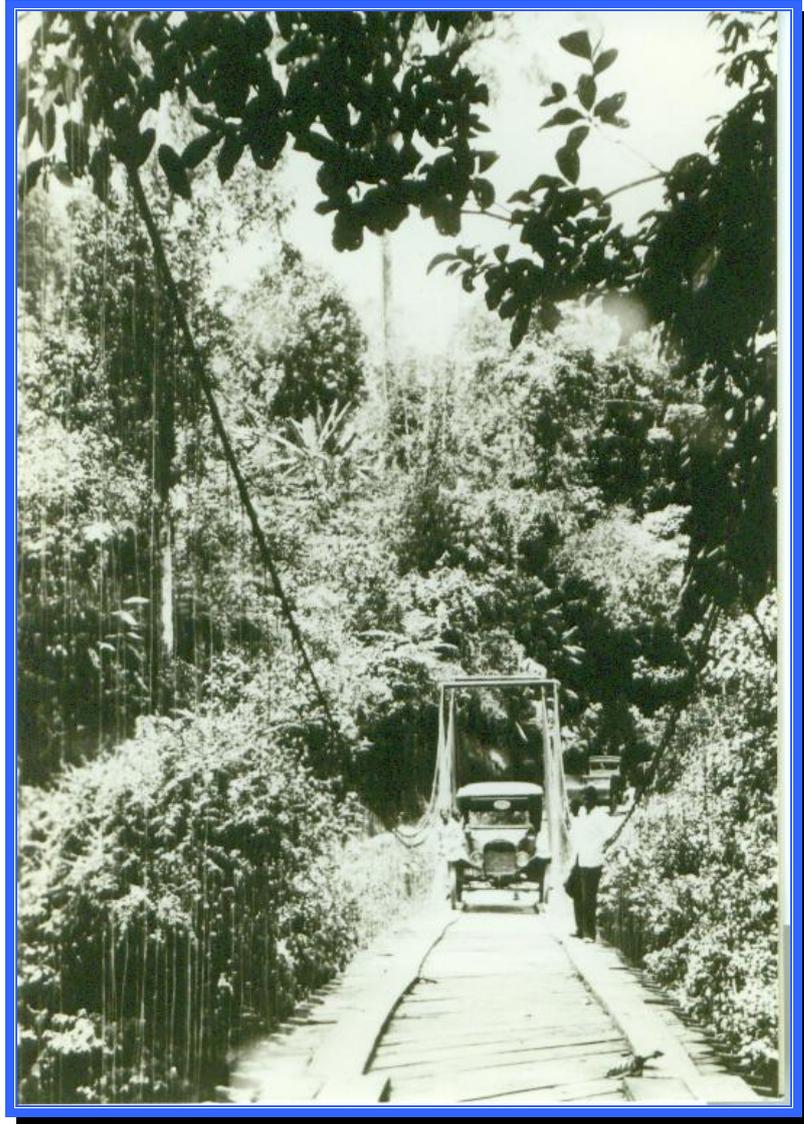
Sekretaris Umum

(Mochtar Ha'in)

Surat dari Dewan Pimpinan *Islam Study Club* (ISC) kepada Zaenal Murad di Padang tentang Saran pendirian ISC di Kota Padang. 23 Juni 1957,

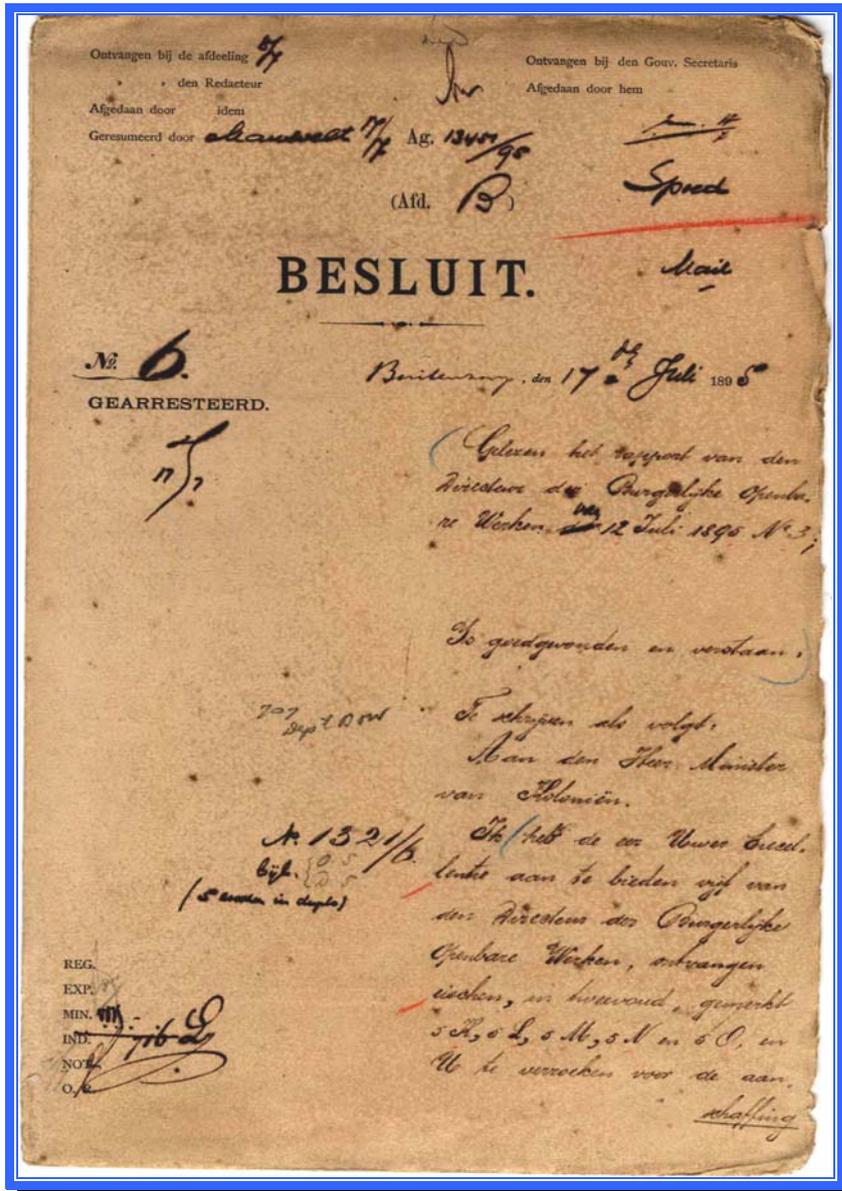
ANRI : I.P.P.I No. 66

Infrastruktur



Jembatan gantung di Muara Labo, Sumatera Barat
Tanpa tahun

ANRI : KIT 0514/28



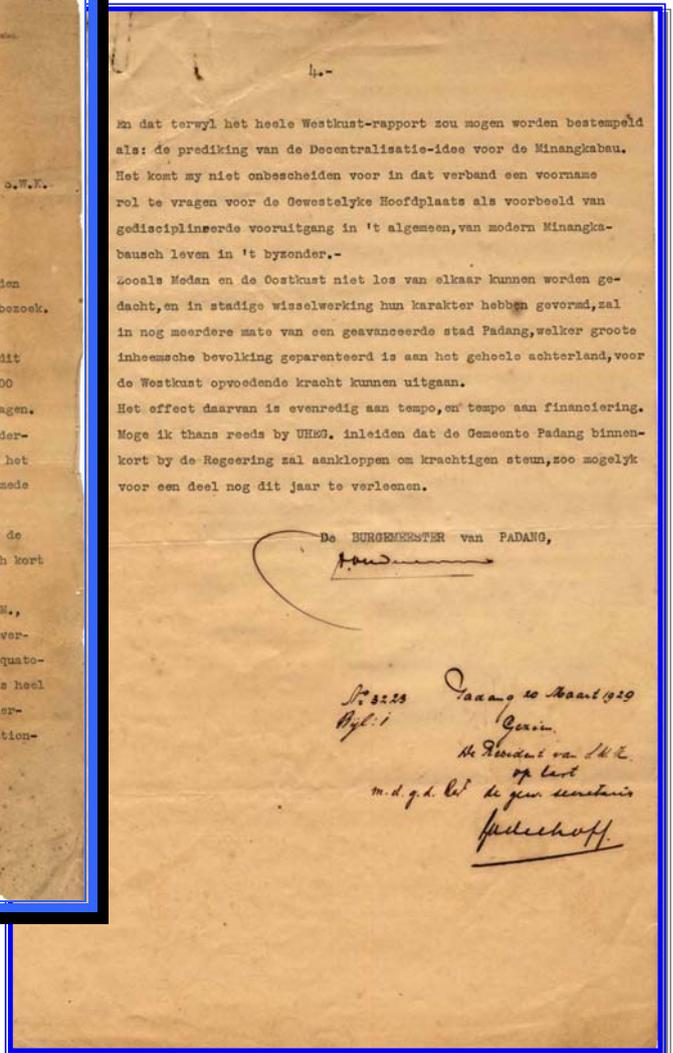
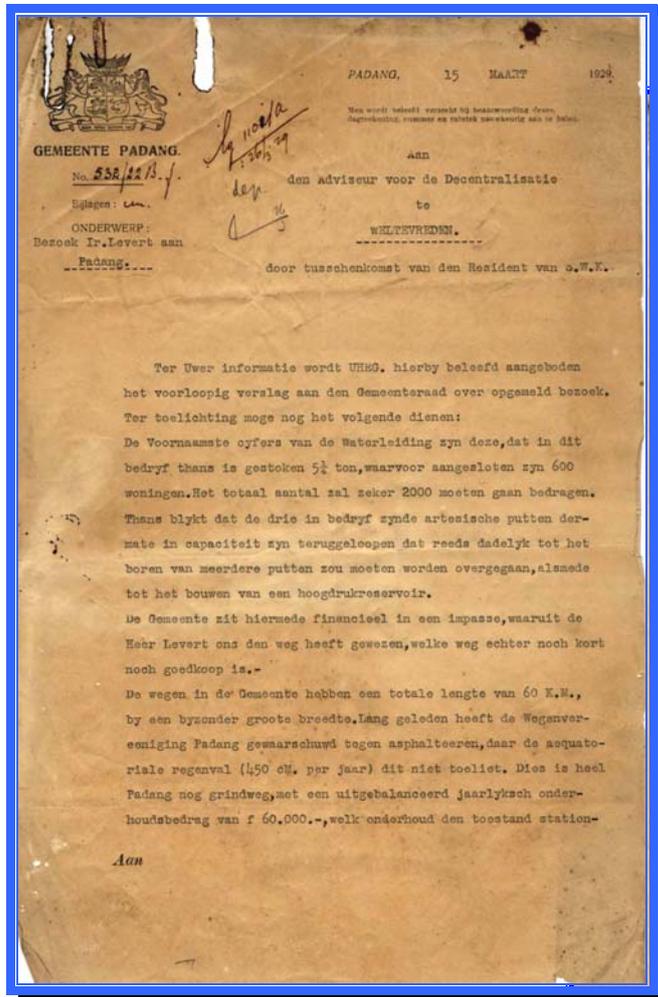
Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang permohonan peralatan dari Eropa bagi perluasan jalur kereta Fort de Kock (Bukittinggi) 17 Juli 1845

ANRI : Besluit 17 Juli 1895 No.6



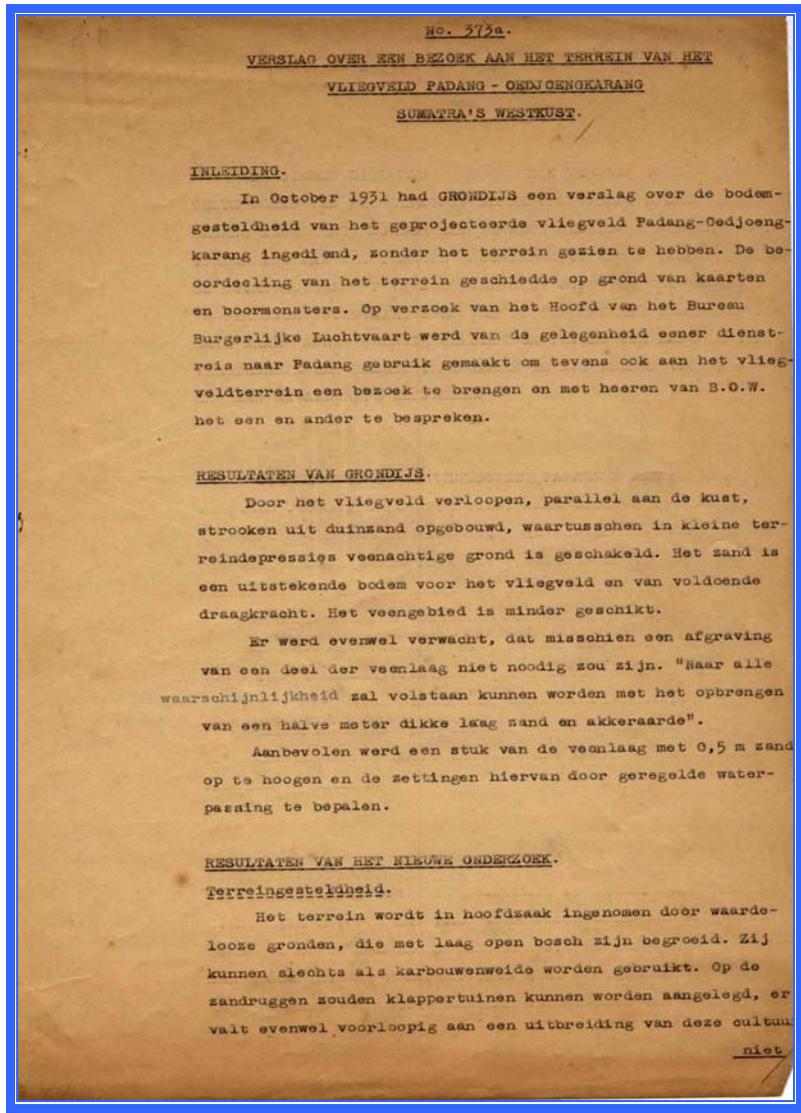
Pembangunan kanal di Payakumbuh, Sumatera Barat
Tahun 1898

ANRI : KIT 252/6



Surat dari Walikota Padang kepada Penasehat Desentralisasi di Weltevreden (Jakarta) tentang pembuatan saluran air ledeng untuk 600 tempat tinggal dengan anggaran f. 60.000 15 Maret 1929

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 2234



Laporan tentang kunjungan ke areal lapangan terbang Padang –
Oejoeng Karang Pantai Barat Sumatra, 24 Oktober 1932

ANRI : BOW BL 13/3

94
 Post, Telegraaf- en Telefoon dienst. *Padang*

HOOFDBESTUUR
 Bedrijf der Posterijen.

BANDOENG. 27 Februari 1935.
 De Katstraat.

Telegram-Adres: H. Post.

No. 6603/Post V2. ONDERWERP: Verstrekking gegevens postverkeer van en naar Sumatra's Westkust.

BIJLAGEN: 1.-

Bij de aanhaling of beantwoording dezer wordt verzocht den datum, het jaartal en het nummer nauwkeurig in te vullen.

Naar aanleiding van Uw schrijven van 28 November v.j., no. 899, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge de navolgende gegevens te verstrekken betreffende het postvervoer van en naar Sumatra's Westkust.

Ad. 1. Op de trajecten Padang - Tandjongpriok en Tandjongpriok - Padang wordt per week gemiddeld resp. 386 en 692 kg - bruto brievenpost verzonden, omfattende brieven, briefkaarten, drukwerken, nieuwsbladen, bijvoegsels, documenten, monsters, braillegeschriften, pakjes en postwissels.

Ad. 2. a. Door Sumatra's Westkust wordt per week gemiddeld 3.4 kg-netto luchtpost naar Medan verzonden, ter doorzending van daar per K.L.M. naar het buitenland ;
 b. door Nederland wordt per week + 3,5 kg-bruto luchtpost bestemd voor Sumatra's Westkust met de K.L.M. - vliegtuigen medegegeven.

Ad. 3. Verkeer per postauto: Gemiddeld per week

	Brieven en briefkaarten	Nieuwsbladen	Overige stukken
Padang - Medan en omgekeerd	49,7 kg netto	40,3 kg netto	40,3 kg netto
Fortdekok - " " "	40,- " "	12,3 " "	14,- " "
Siboga - " " "	103,- " "	46,3 " "	32,2 " "

Ten

Aan
 het Hoofd van het Bureau Luchtvaart bij het Departement van Verkeer en Waterstaat te BANDOENG.-

BUREAU LUCHTVAART

Ag. No. *181*

Ingenomen *2/3-35*

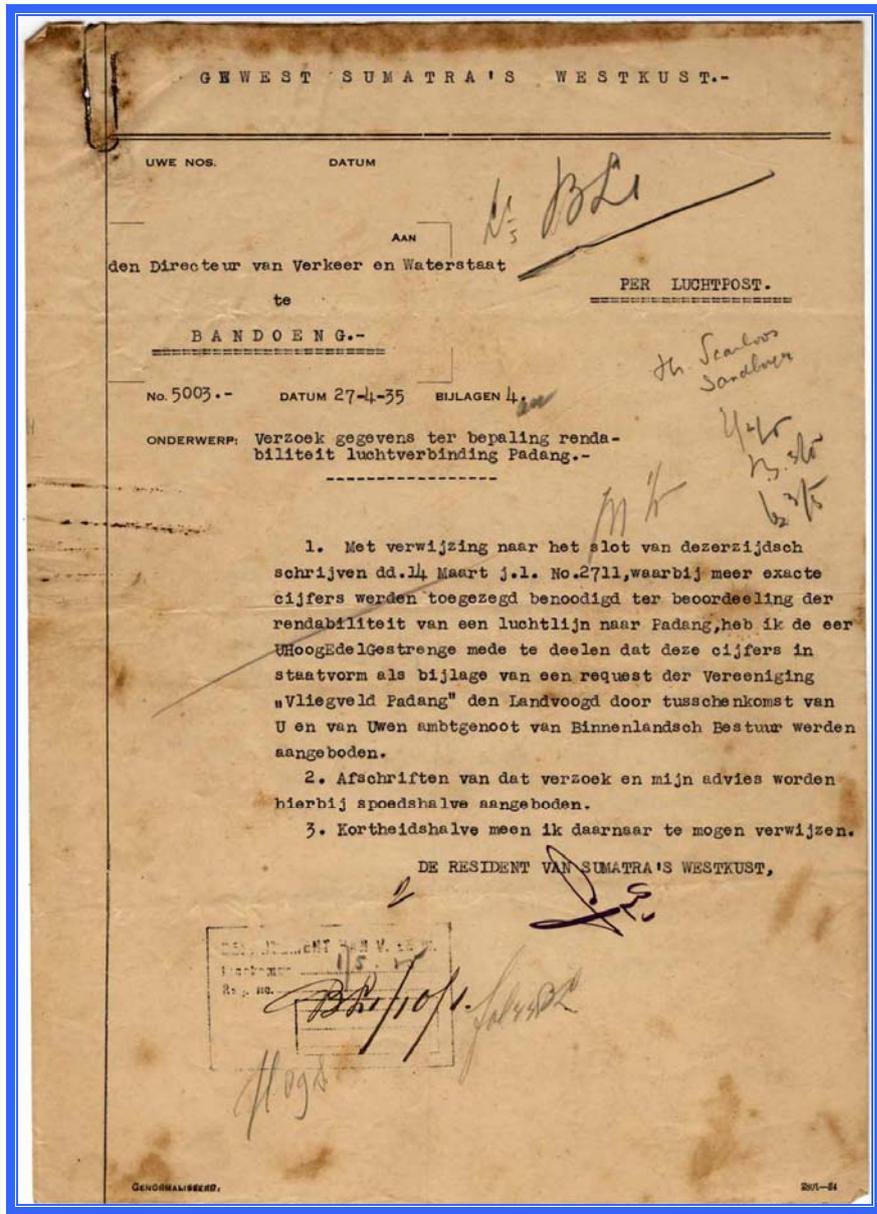
Algemeen *dep*

Bestel *Padang*

M. S. 1932 - 420 - A4.

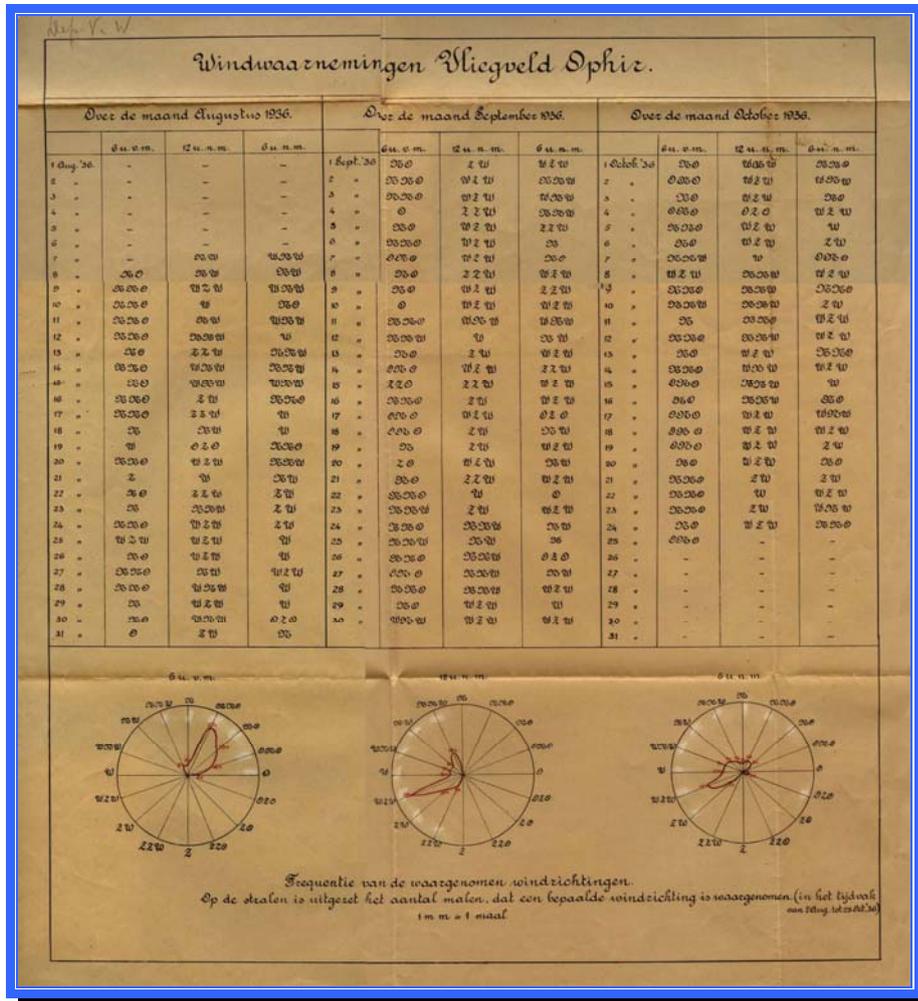
Data-data tentang lalu lintas pengiriman pos dari dan ke Pantai Barat Sumatra
 27 Februari 1935

ANRI : BOW BL 13



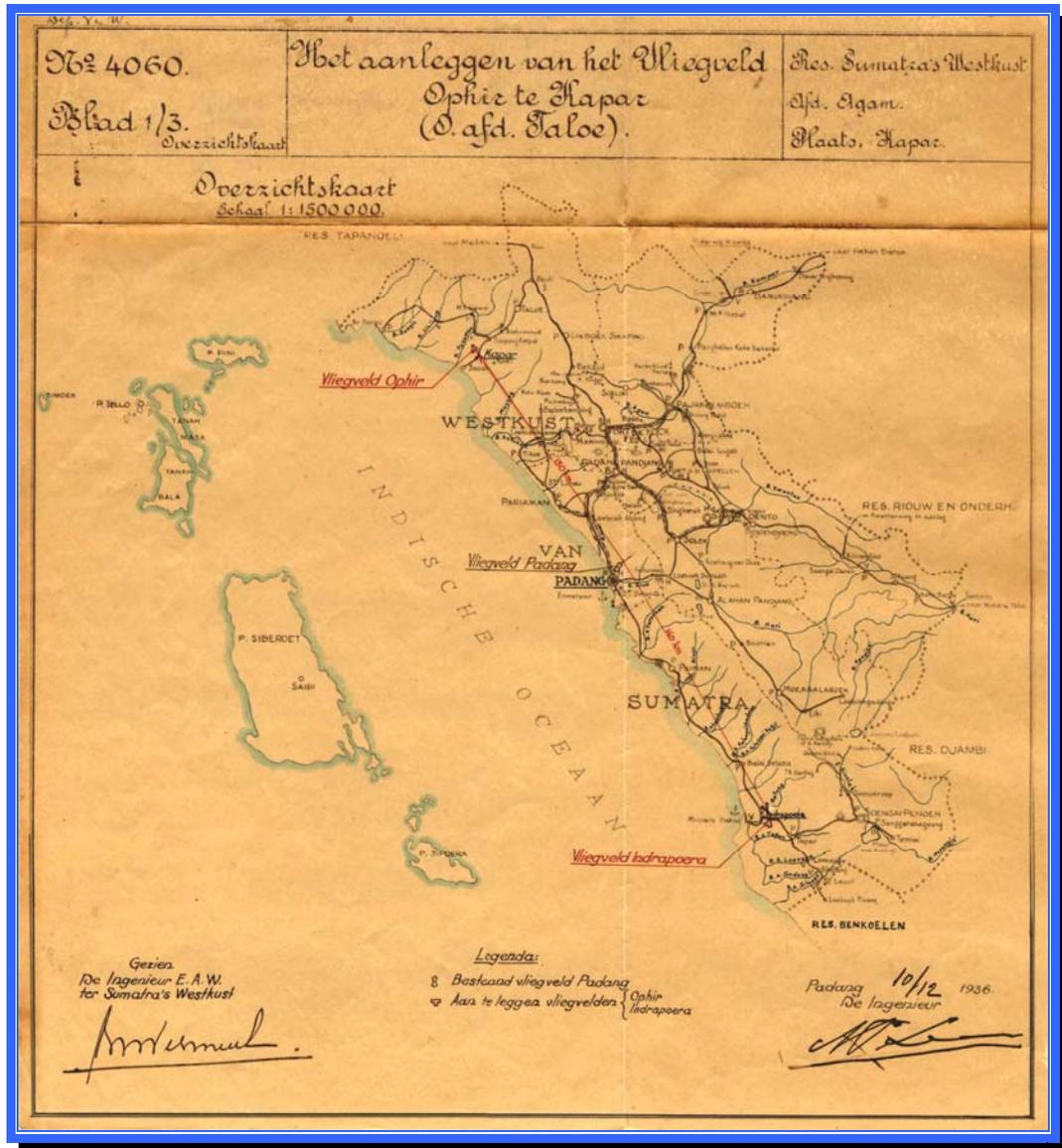
Permohonan data-data tentang pembatasan/penentuan keuntungan hubungan lalu lintas udara di Padang 27 April 1935

ANRI : BOW BL 13/2



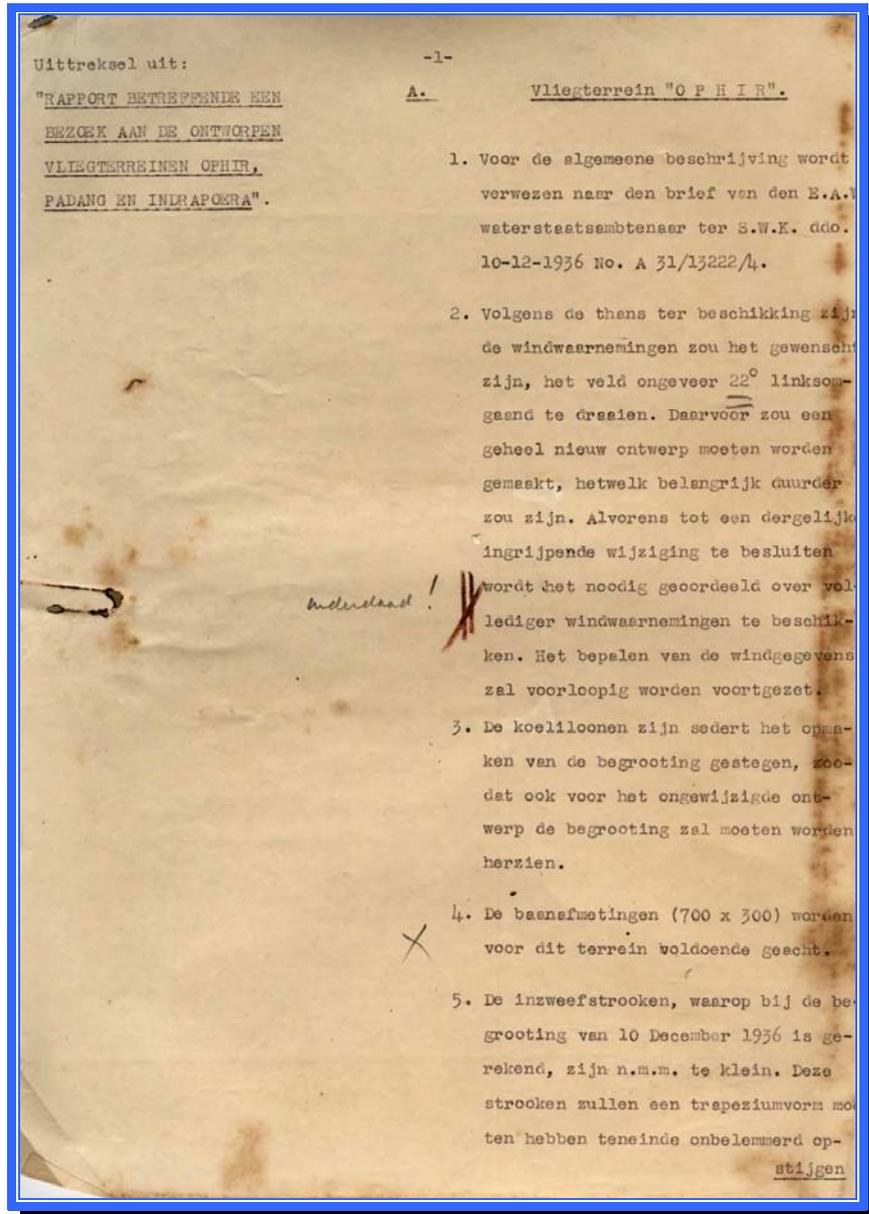
Frekuensi pengawasan lapangan terbang, Ophir
7 Agustus – 25 Oktober 1936

ANRI : BOW AX 133/1



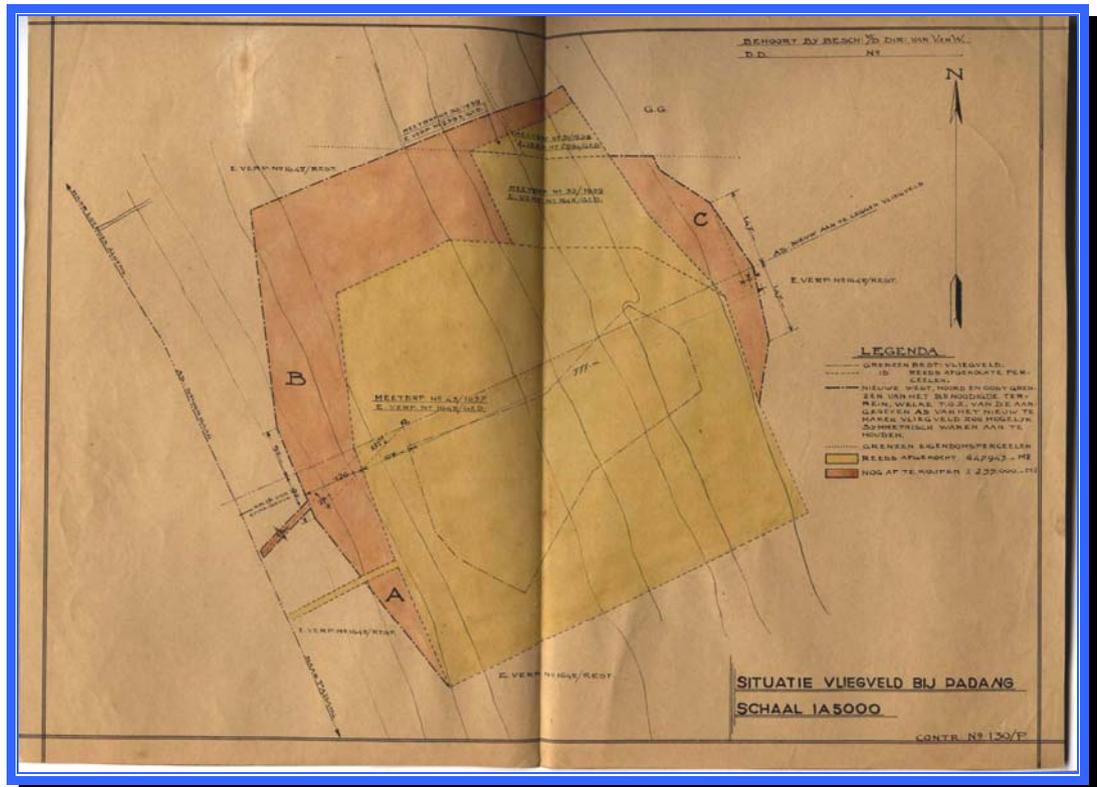
Peta mengenai letak lapangan terbang Ophir di Kapar,
Onderafdeeling Taloe, Afdeeling Agam
10 Desember 1936

ANRI : BOW Ax 133/2



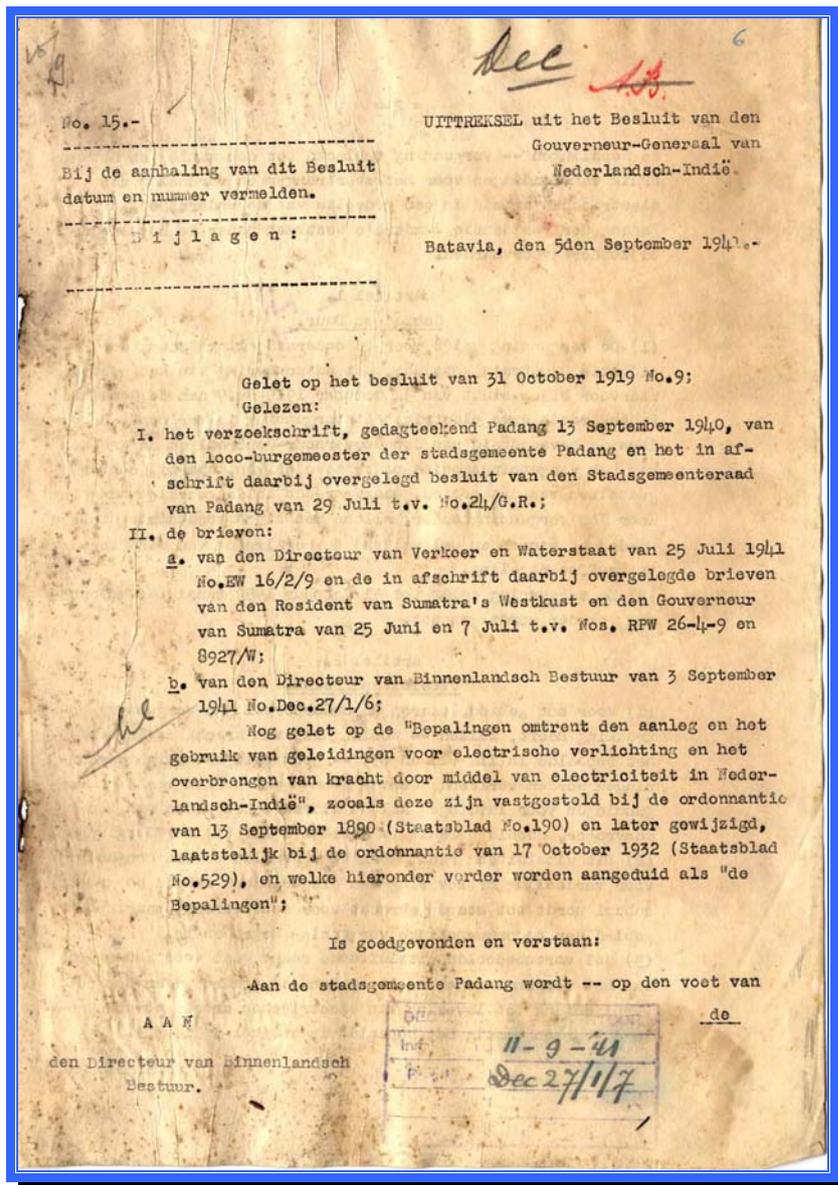
Laporan tentang kunjungan ke lapangan terbang Ophir,
Padang dan Indrapoera
1936

ANRI : BOW AX 133/3



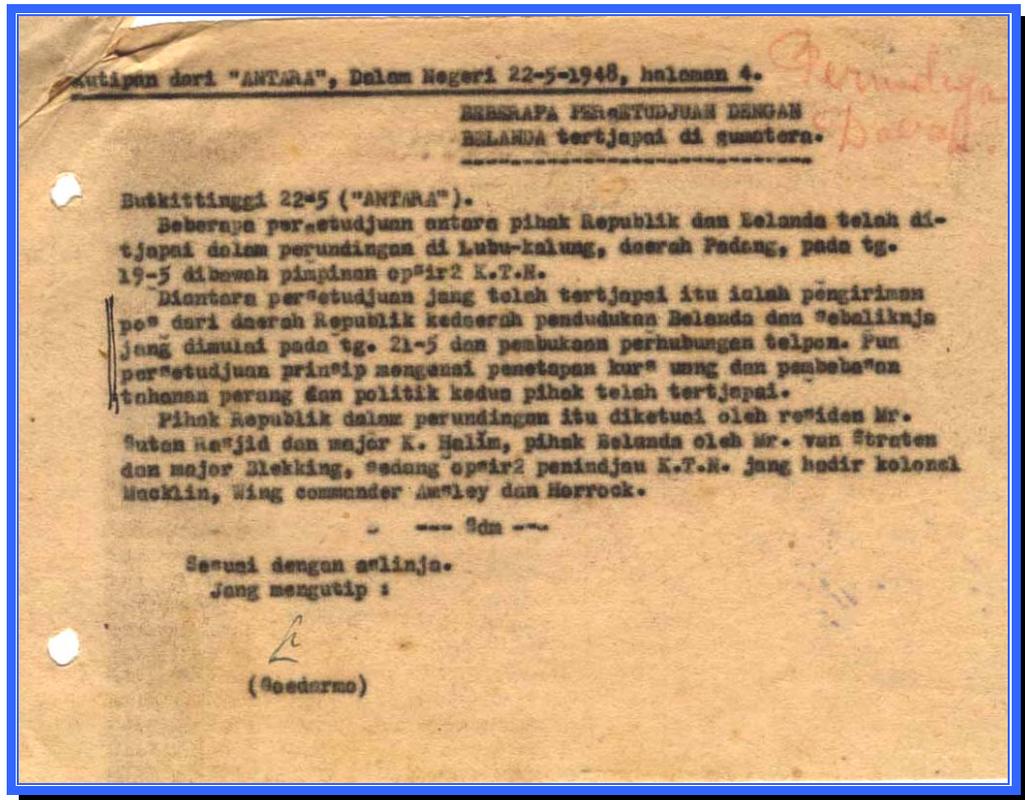
Situasi lapangan terbang di Padang, lampiran dari nota penjelasan tentang anggaran untuk pekerjaan perluasan lapangan terbang di Padang bagian I
15 Mei 1941

ANRI : BOW BL 416/1



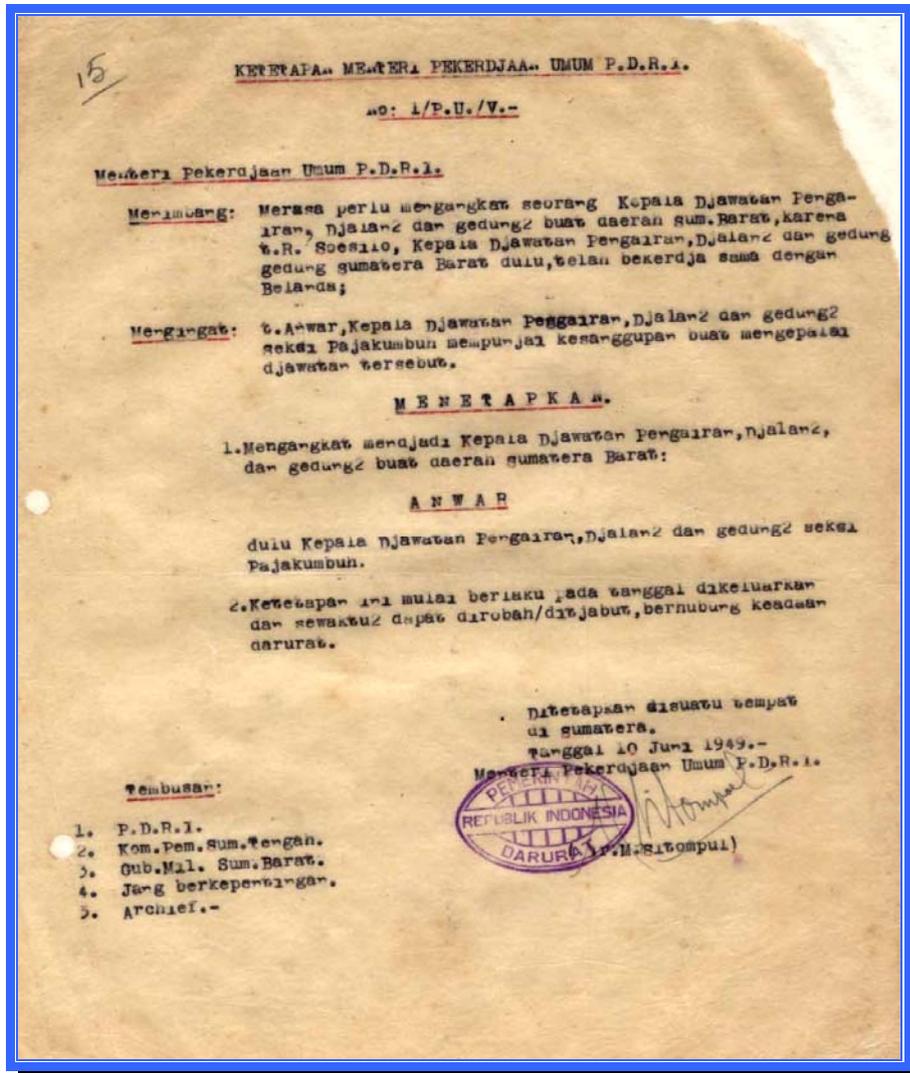
Salinan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang ketentuan pelaksanaan penggunaan penyaluran penerangan listrik dan pemindahan daya menengah 5 September 1941

ANRI : Binnenlandsh Bestuur No. 1708/1



Persetujuan antara Pemerintah RI dan Belanda tentang pengiriman pos dan hubungan telepon dari daerah Republik ke daerah pendudukan Belanda dan sebaliknya
22 Mei 1948

ANRI : Delegasi Indonesia No. 190



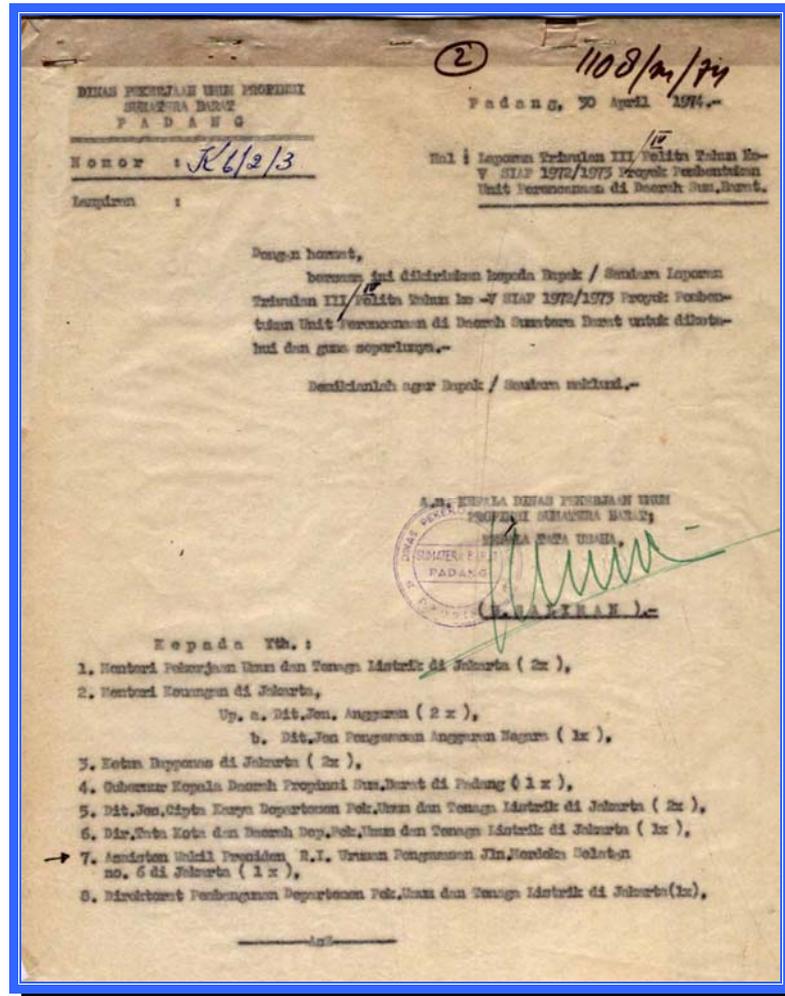
Ketetapan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PU/V tentang Pengangkatan Sdr. Anwar sebagai Kepala Djawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Sumatera Barat.
10 Juni 1949,

ANRI: PDRI No. 15



Lahan tandus yang direncanakan dijadikan Ibu Kota Solok oleh
Bupati /Kepala Daerah Kab. Solok, tampak rakyat sedang
bergotong royong
1 April 1952

ANRI : Kempen 520401



Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat, Laporan – laporan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun (PELITA) V Tahun ke IV 1973-1974, SIAP Tahun 1972-1973 Triwulan III 1973-1974 tentang proyek pembentukan unit perencanaan daerah dan program perencanaan tata kota dan tata daerah 30 April 1974

ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 876

ELAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
1974.- - - 1975.-

LAPORAN KEMAJUAN TRIWULAN

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN No. 12h
T A H U N K E I/II
T R I W U L A N K E I
NOMOR KODE PROYEK/PROYEK 01203.2396.213.06
P R O G R A M Pengaturan serta Pengembangan Sungai dan Rawa.

1. Nama Proyek/Sub. Proyek Perbaikan dan Pengamanan Sungai di Sumatera Barat.-

2. Tempat/Lokasi Kota Desa
Dati II
Dati I Sumatera Barat. PEREMBAHAN UANG PENGELUARAN UANG

Departemen/Leubaga yang bertanggung jawab : P.U.T.L.

	Beban Sementara	Beban Tetap	Beban Sementara	Beban Tetap	Jumlah	Salas
a. Pimpinan Proyek						
N a m a						
Jabatan						
Alamat dan tempat kedudukan						
No. dan Tgl. Srt. Kpts.						
b. Bendaharawan Proyek						
N a m a						
Jabatan						
Alamat dan tempat kedudukan						
No. dan Tgl. Srt. Kpts.						
a. Tempat/Lokasi/KBN/KPBN						
b. Nama, Tempat dan Nomor Rekening						
Bank						

1. Ir. HARUN AL HASYID.
K.D.P.U.P. Sumatera Barat
P a d a n g.
13h/KPSS/1974 Tgl. 12 Juni 1974.-

2. Drs. HOGGIZAR SARI
Bendaharawan Proyek
P a d a n g.
13h/KPSS/1974 Tgl. 12 Juni 1974.-

3. P a d a n g.
Bank Indonesia Cabang Padang No. rekening 503.104

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan-laporan proyek Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Tahun 1974/1975 Triwulan 1 tentang proyek perbaikan dan pengamanan sungai mengenai pengaturan serta pengembangan sungai dan rawa Juni 1974

ANRI: Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 876

Bangunan

✓ *cl/460*
 AFDEELING *Waterstaat*
 Ontvangen bij de Afdeeling
 Afgestaan door den Bewerker *D.B./s.*
 Nazien door den Chef

V. van W. Model Alg. lo.
 539
 Reg. No. *427/1/22-38*
 Ontvangen bij het Archief
 Ontvangen bij de Post
 Verzonden
 Folio Exp. boek *365*

Ref. No. *427/1/22*
 B A N D O E N G, den *22 Maart* 1938

DE DIRECTEUR VAN VERKEER EN WATERSTAAT:

Torug aan Afd. *Geloesig* *6.0.1.1.*
14 2/3
28/3
12/2/23
58

VASTGESTELD:

OORZAKEN: *Verplaatsing*
Openbaar lokaal bij de
voormalige N. I. Kuisch-
school te Fort de Kock
naar de openbare Mulo
School aldaar.

BIJLAGE: *1 opst. Reg. 427/1/22-38*
Opst. 2 bijlage.
3 Opdeur voorbrongen
 op *Lohmeias*
 over *Exp!*

terzij besloten te schrijven
I. van aan den Resident van
✓ C. W. K. te Padang.

Onder aandrading van af-
 schrijven van het schrijven van
 den Directeur van Onderwijs en
 Resident van 2 dagen nr
 5031/B en van de bijlagen,
 heb ik de eer Wildgen te
 verzeken de noodige ontwerpen
 uittebrengen te willen doen samen-
 stellen en op de gebruikelijke
Wijze

Perpindahan lokasi sekolah guru di *Fort de Kock* ke Sekolah
 Umum MULO (*Meer Uitbreid Lager School*)
 22 Maret 1938

ANRI : BOW No. AX 113/4



Prototipe rumah Minangkabau, Sumatera Barat.

Tanpa Tahun

ANRI : KIT 846/019



Balai Adat di Lawang, Maninjau, Sumatera Barat

Tanpa Tahun

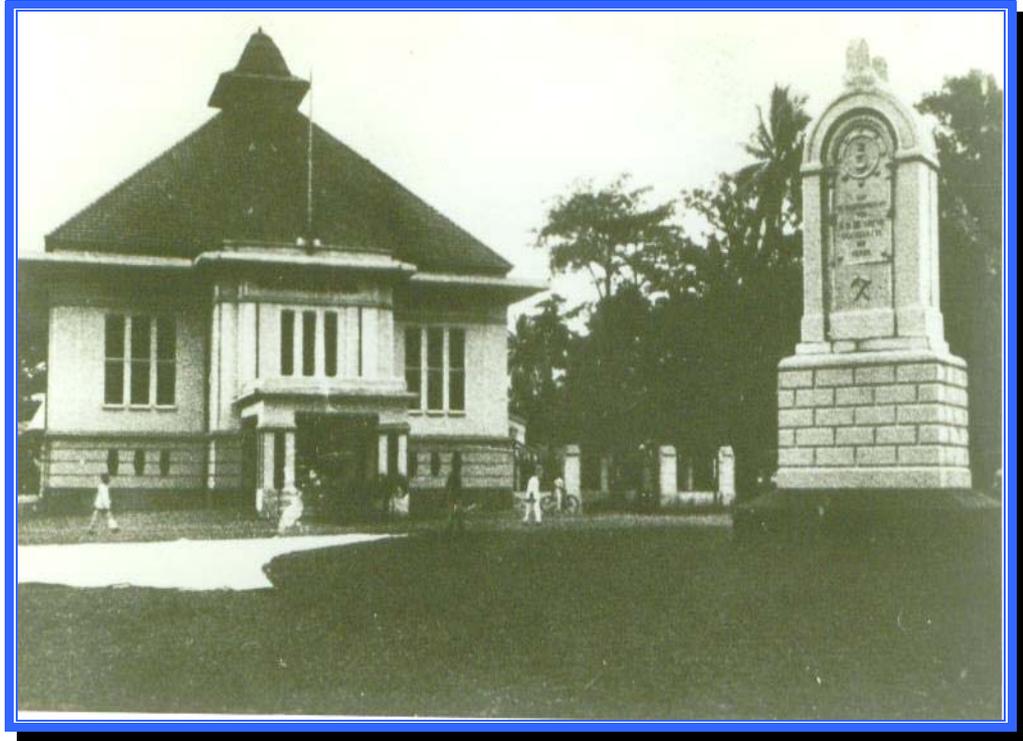
ANRI : KIT 0788/044



Museum Kebudayaan *Fort de Kock* di Bukittinggi

Tanpa Tahun

ANRI : KIT 1101/046



Gedung Bank Indonesia dan Tugu Peringatan *Ir. De Greve*
(penemu tambang Batubara Umbilin)

di Padang, Sumatera Barat.

Tanpa tahun

ANRI : KIT 789/14



Bekas rumah Residen di *Fort de Kock* Bukittinggi
Sumatera Barat
Tanpa tahun

ANRI : KIT 0775/071



Jam Gadang di *Fort de Kock* Bukittinggi
21 April 1953

ANRI : Kempen K 530421 CC 2-2



Pembangunan Tugu Peringatan Pemulihan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di Padang
12 Juni 1950

ANRI : Kempen 500612 CC8



Tugu Peringatan Tuanku Imam Bonjol di Bonjol Sumbar
27 Maret 1953

ANRI : Kempen 530327 CC 1-2



Kantor Polisi Negara Pos Rao, Bukittinggi
7 April 1954

ANRI : Kempen 540407 CC 4-1



Upacara pembukaan Sekolah Polisi Negara di Padang dengan dilakukan pengguntingan pita oleh Wapres RI Moh. Hatta
21 April 1953

ANRI : Kempen 5300421 CC 19



Tugu Kemerdekaan Republik Indonesia di Bukittinggi
27 April 1953

ANRI : Kempen K 530427 CC 1-1



Gedung Sentral Listrik Solok Sawah Lunto
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 5300501 CC 1



Gedung Kompresor Durian Sawah Lunto
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 5300501 CC 2



Rumah Buruh Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 5300501 CC 78



Gedung Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto
1 Mei 1953

ANRI : Kempen 5300501 CC 80



Perkampungan penduduk di tepi Muara Sungai Arau, Padang
23 Mei 1954

ANRI : Kempen 540523 CC 1-1

Finibus

**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
DI PADANG**

PADANG, 28 MARET 1976.-

Honor : B-1741/It-2/1976.-
 Sifat : Penting.
 Lampiran : 1 (satu) gabung.
 Perihal : Inspeksi Khusus Proyek
 Pelita II Tahun Anggaran
 1975/1976 Semester -
 II.

KEPADA :
 YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI
 cq. JAM MASUK / IRJIN
 di JAKARTA.-

Dengan hormat ;

Mengindahkan surat Bapak Honor : B-213/It-5/9/1975 tanggal 30-9-1975 dan surat Honor : B-022/It/2/1976 tanggal 28-2-1976, perihal tertere pada pokok surat, maka sebagai sambung laporan kami terdahulu dengan surat No. : B-6169/It-3-5/12/1975 tanggal 31-12-1975, bersama ini dapat kami laporkan kepada Bapak sebagai berikut :

- 1.- bahwa dengan Surat Perintah Inspeksi (SPI) kami No. : Print-02/PT-02/3/1976 tgl. 2-3-1976, oleh Ass. Pengawasan Daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sdr. Djenbur Djennudin SH. bersama dengan 2 (dua) orang stafnya, pada tanggal 6 Maret 1976 telah dilakukan Inspeksi Khusus terhadap Proyek Pelita II Kejaksaan Tahun Anggaran 1975/1976 yaitu pembangunan baru gedung Kantor Kejaksaan Negeri Solok di Solok, inspeksi mana adalah untuk Semester II (terakhir) ;
- 2.- bahwa seperti telah dilaporkan dalam LHP Semester I terdahulu, pelaksanaan pekerjaan fisik proyek tab. baru dimulai pada tanggal 20 Oktober 1975 dan akan selesai pada tgl. 27 Februari 1976 (jangka waktu 130 hari menurut Surat Perjanjian Pemborongan), akan tetapi jangka waktu tab. terpaksa diperpanjang dengan 26 hari lagi disebabkan adanya perubahan pondasi, untuk itu perlu pula dilakukan perbaikan gambar (gambar revisi) dan perubahan mana mengakibatkan bertambahnya kubikasi pondasi dari rencana semula. Oleh sebab itulah jangka waktu untuk pelaksanaan pekerjaan terpaksa pula ditambah/diperpanjang, sehingga ditetapkan akan selesai 100% pada tanggal 26 Maret 1976 ;
- 3.- bahwa pada saat dilakukan inspeksi pada Proyek tab. tanggal 6 Maret 1976, kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik proyek telah mencapai kemajuan 83% siap, sedangkan anggaran yang diterima/digunakan Pemborong sejumlah Rp. 11.287.500.- yaitu penerimaan terleja I sampai dengan III.

4.- bahwa ..

TANDA TERIMA

AGNO : 470-00-70

TGL : 8 APR 1976

- 2 -

.. bahan sesuai dengan jangka waktu (limit) yang ditetapkan dalam DIP, dimana pelaksanaan pekerjaan proyek itu harus sudah siap 100% selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1976, maka kami telah menetapkan bahan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1976 akan dilakukan penyerahan bangunan tersebut dari Pemborong kepada Pimpinan Proyek dan sekali-gus akan dilangsungkan pula pengurusan penahkumannya yang kami lakukan sendiri selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ;

5.- bahan untuk lebih jelas dan lengkapnya laporan kami ini, terlampir kami sampaikan pada Bapak Berita Acara Inspeksi beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Proyek tersebut.

Demikianlah laporan ini kami susun dan sampaikan pada Bapak, semoga berguna sebagai bahan pemeriksaan sebagaimana mestinya.-



KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,

Haer

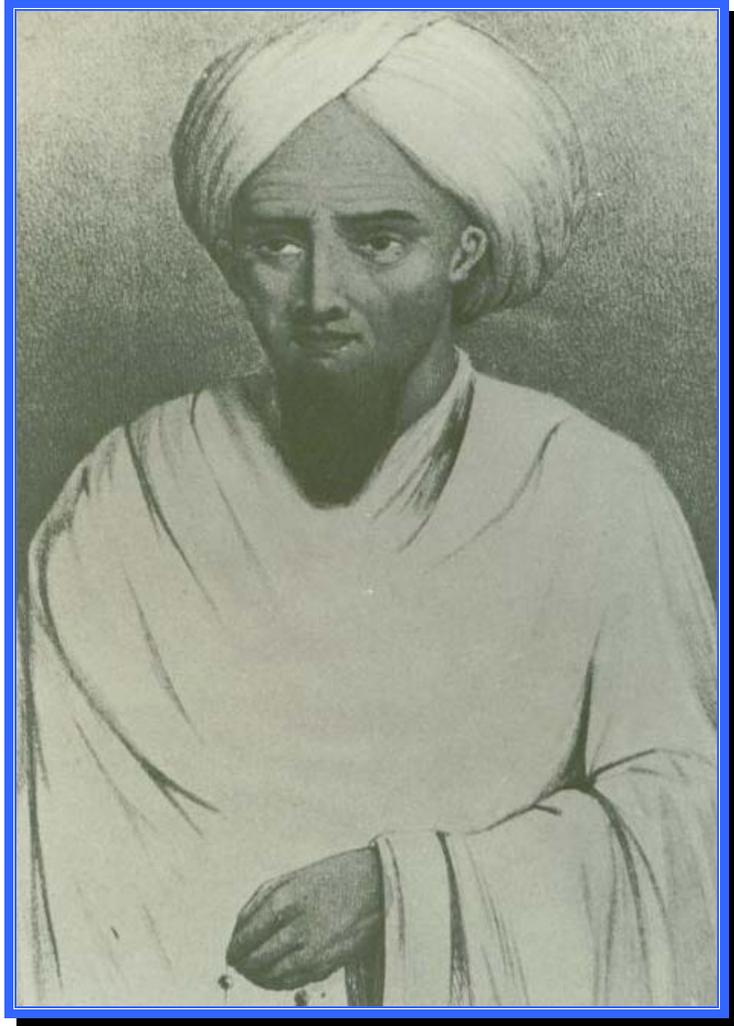
=(SAUBARI S.H.)=
 BINTYA WIRA JAKSA BRP.5561.-

JAKSA AGUNG N.I. di Jakarta.
 JAM PENGUNJUNAN cq. Kadit VIII (Kau/Hat) di Jakarta.
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta.
 Penguasaan Keuangan Negara Dept. Keuangan di Jakarta.
 Wakil Presiden Urusan Pengawasan.
 Sur. Kepala Daerah Tk. I Prop. Sum. Barat di Padang.
 Kejaksaan Negeri Solok/Pimpinan Proyek di Solok.

Surat dari Kejaksaan Tinggi Padang Sumatera Barat kepada
 Jaksa Agung RI Jakarta tentang Inspeksi khusus Proyek
 Pembangunan Lima Tahun (PELITA) II Tahun Anggaran
 1975/1976 semester II mengenai pembangunan baru gedung
 Kantor Kejaksaan Negeri Solok.
 28 Maret 1976

ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 886

Tokoh-tokoh Sumatera Barat



Tuanku Imam Bonjol, lahir di Tanjung Bungo 1796 Panglima Perang Bonjol dengan nama Muhamad Sahab atau Peto Syarif Tanpa tahun

ANRI: Kempen 940919 AV 9



Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA),
Sebagai Pujangga dan Ulama Besar Indonesia
22 November 1953

ANRI : Kempen 531122 FJ 4-1



Haji Agus Salim, lahir di Bukit Tinggi Tahun 1884, Pemimpin
Serikat Islam dan mantan Menteri Muda Luar Negeri pada
Kabinet Syahrir II
24 Maret 1964

ANRI : Kempen 64-2645



Haji Agus Salim bersama dengan Presiden Sukarno
Tanpa tahun

ANRI : KIT 992/18



Marah Rusli lahir di Padang 7 Agustus 1889, Pujangga terkenal
Indonesia dengan karangannya Siti Nurbaya dan Layar
Terkembang
13 Juli 1953

ANRI : Kempen R 530713 FG 1-1



Abdul Muis lahir di Padang tahun 1890, Pemimpin Sarekat Islam
(1920–1923) sebagai pengarang roman terkenal Salah Asuhan
24 Mei 1952

ANRI : Kempen 520524 FP 2



Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang 14 Oktober 1897 terkenal sebagai promotor persatuan perjuangan pendiri Partai Republik Indonesia (PARI) 10 September 1948

ANRI : Kempen 81009 FG 1



Mohammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 mantan
Wakil Presiden Republik Indonesia dan
Bapak Koperasi Indonesia
19 September 1953

ANRI : Kempen 530919 FG 2-10

PENDAFTARAN ORANG INDONESIA JANG TERKEMOEKA
JANG ADA DI DJAWA *II-7, II-8, II-9*
 ——— *I-1 dan III-7*

Daftar ini, sesoedah diisi, hendaklah dikirimkan kembali (gratis) dalam boengkoesnja jang dilampirkan kepada GUNSEIKANBU TJABANG I, Pegangsaan Timoer 36, Djakarta.
 Isilah jang sebenar-benarnja dengan **djelas**, soepaja djangan ada kemoedian soerat-menjoerat lagi tentang itoe. Djika tak tjoekoop roeang tempat mengisinja, lampirkan kertas lain pada daftar ini.

Nama, tempat lahir dan alamat orangnja.	
1. Nama jang lengkap (dan gelar)	Mohammad Hatta
2. Alamat sekarang: Tempat dan Kaboepaten mana?	Oranje Boulevard 57, Djakarta, Tokubetu-31
3. Tanggal dan tempat lahir: Kabupaten atau daerah mana, di- poelau mana?	Lahir tg. 12-8-1902 di Boekit-Tinggi Minangkabau, Soematera Barat
Keloearga seroemah dan keloearga lain-lain.	
4. Nama dan tanggal lahir isterinja (soeaminja)	-
5. Nama dan tanggal lahir anak-anaknja (jang masih hidoep)	-
6. Keloearga lain-lain (djika perloe, isilah djoega nama dan djabatan ajahnja d.l.l.; seboetkan djoega bagai- mana persekoetoean keloearganja)	-
Didikan sekolah dan diploma.	
7. Apa matjam sekolah rendah jang ditempoeh dan dimana? Apabila dapat diploma?	Sekolah Belanda di Boekit-Tinggi dan Padang Diploma examen masoek H.E.S. th. 1916
8. Sesoedah itoe menempoeh sekolah mulo atau sekolah menengah atau sekolah vak apa dan dimana? Apabila mendapat diplomanja?	Mulo di Padang, dapat diplomanja th. 1919; kemoedian P.H.S. di Djakarta, diploma th. 1921.
9. Selandjoetnja dimana bersekolah tinggi dan bagian apa? Apabila mendapat diploma?	Ned. Economische Hoogeschool (nama bermoeala Ned. Handels-Hoogeschool), ex. doctoral 1932

KOLFF 1889-32

Daftar Riwayat Hidup mantan Wapres RI Mohammad Hatta

1943

ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 1027



Mohammad Yamin, lahir 23 Agustus 1903 mantan
Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Juanda
27 Oktober 1950

ANRI : Kempen 502023

**PENDAFTARAN ORANG INDONESIA JANG TERKEMOEKA
JANG ADA DI DJAWA**

Y-2
III-7, III-5

Daftar ini, sesudah diisi, hendaklah dikirimkan kembali (gratis) dalam boengkoesnja jang dilampirkan kepada GUNSEIKANBU TJABANG I, Pegangsaan Timoer 36, Djakarta.
Isilah jang sebenar-benarja dengan **djelas**, soepaja djangan ada kemoedian soerat-menjoerat lagi tentang itoe. Djika tak tjoekeo, roeang tempat mengisinja, lampirkan kertas lain pada daftar ini.

Nama, tempat lahir dan alamat orangnja.	
1. Nama jang lengkap (dan gelar)	Meester Muhammad Yamin
2. Alamat sekarang: Tempat dan Kaboepaten mana?	Oranjeboulevard 56, Djakarta Djakarta.
3. Tanggal dan tempat lahir: Kabupaten atau daerah mana, di- poelau mana?	23 Auagustus 1903 (Masehi) lahir di Sawahlente.
Keloearga seroemah dan keloearga lain-lain.	
4. Nama dan tanggal lahir isterinja (soeaminja)	R.A. M. Sitti Soendari, 23-IV-1906.
5. Nama dan tanggal lahir anak-anaknja (jang masih hidoep)	Dang Rahadian Sinajangeih, 24-IV-1937)laki-laki)
6. Keloearga lain-lain (djika perloe, isilah djoega nama dan djabatan ajahnja, dll.; seboetkan djoega bagaimana persekoetean keloearganja)	Bapak: bekas Toeankoe Laras Talawi Keloearga: Dt. Adi Nagoro Djamaloeidin Dr. M. Amir, dll.
Didikan sekolah dan diploma.	
7. Apa matjam sekolah rendah jang ditempoeh dan dimana? Apabila dapat diploma?	Sekolah kelas II, dan H.I.S. Palembang; tamat tahoen 1918.
8. Sesoedah itoe menempoeh sekolah mulo atau sekolah menengah atau sekolah vak apa dan dimana? Apabila mendapat diplomanja?	Sekolah Landbouw dan Veearts, Bogor Sekolah A.M.S. Mataram, tamat tahoen 1927.
9. Selandjoetnja dimana bersekolah tinggi dan bagian apa? Apabila mendapat diploma?	Sekolah Hakim Tinggi, Djakarta 1927-'32.

Daftar riwayat hidup Moh. Yamin mantan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Juanda, 16 Maret 1943

ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 1018



Sutan Takdir Alisyahbana, lahir di Natal Tapanuli tahun 1908
pada tahun 1951 menjabat sebagai
Direktur Pustaka Rakyat sedang berada diruang kerjanya
21 Februari 1951

ANRI : Kempen 511058



Mohammad Natsir, lahir di Alahan Panjang 17 Juli 1908
mantan Perdana Menteri RI
tanpa tahun

ANRI : Kempen AV 931013 MR

PENDAFTARAN ORANG INDONESIA JANG TERKEMOEKA
JANG ADA DI DJAWA

III-6

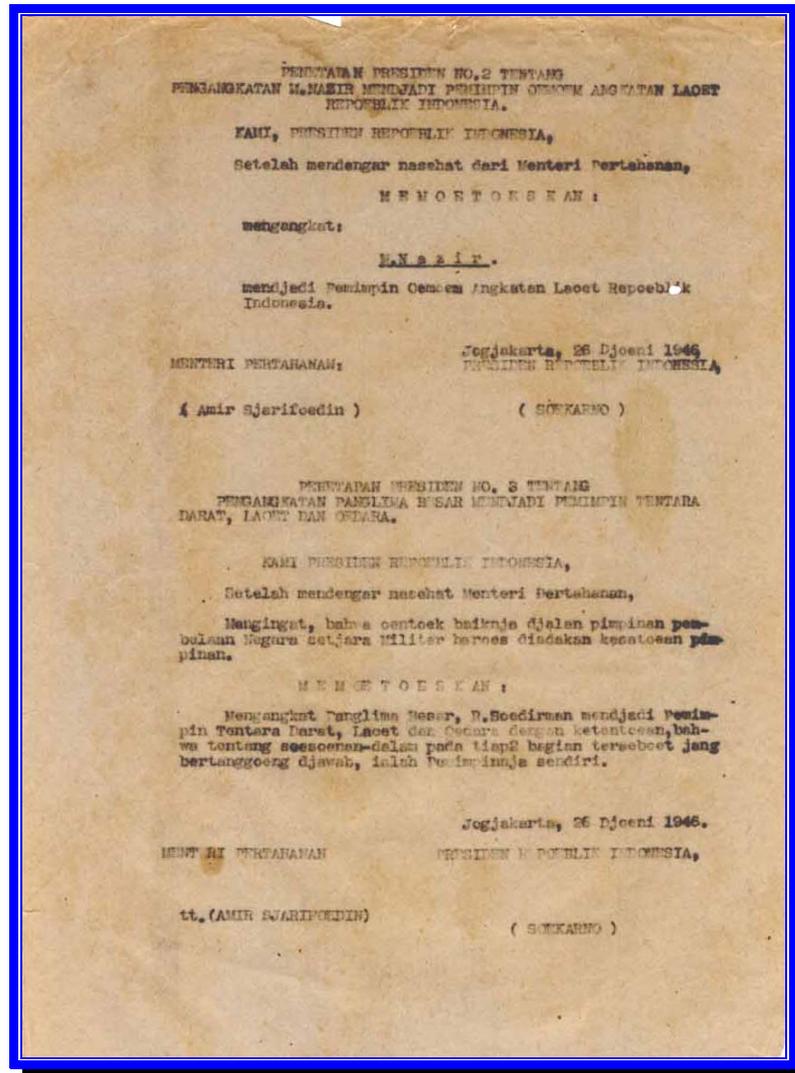
Daftar ini, sesoedah diisi, hendaklah dikirimkan kembali (gratis) dalam boengkoesnja jang dilantipirkan kepada GUNSEIKANBU TJABANG I, Pegangsaan Timoer 36, Djakarta.

Isilah jang sebenar-benarnja dengan djelas, soepaja djangan ada kemoedian soerat-menoerat lagi tentang itoe. Djika tak tjoekep roeang tempat mengisinja, lampirkan kertas lain pada daftar ini.

Nama, tempat lahir dan alamat orangnja.	
1. Nama jang lengkap (dan gelar)	Mohammad Natsir, Datoek Sinaro Pandjang Datoek Pandjang, Andalan Barat
2. Alamat sekarang: Tempat dan Kaboepaten mana?	Bungamerta Cempew 30 Bandung
3. Tanggal dan tempat lahir: Kabupaten atau daerah mana, di- poelau mana?	19 Januari 1908/ab. Datoek Pandjang Andalan Barat
Keloearga seroemah dan keloearga lain-lain.	
4. Nama dan tanggal lahir isterinja (soeaminja)	Marwanah 20 Mei 1905
5. Nama dan tanggal lahir anak-anaknja (jang masih hidoep)	Sufi Maschidul 20 April 1936 Nopi Ramifan 27 April 1937 Nona Firdah 17 Januari 39 Nona Fajal 5 Mei 1941 Najat Nurrah 20/5 - 1942
6. Keloearga lain-lain (djika perloe- islah tjoeaga nama dan djabatan alah- nja d.t.t.; seboetkan tjoeaga bagai- mana persokoetoean keloearga)	
Didikan sekolah dan diploma.	
7. Apa matjam sekolah rendah jang ditempoeh dan dimana? Apabila da- pat diploma?	H.S.S. Dept. 1920, di Padang
8. Sesoedah itoe menempoeh sekolah mulo atau sekolah menengah atau sekolah vak apa dan dimana? Apa- bila mendapat diplomanja?	Wafa Padang dipl 1924 S. M.S. di Bandung 1930 Kawanan Guru P.G.R. Bandung 1932
9. Selandjoetnja dimana bersekolah ting- gi dan bagian apa? Apabila mendapat diploma?	S.M.S. aft. B.

Daftar Riwayat Hidup Moh. Natsir gelar Datoek Sinaro Pandjang,
10 Januari 1943

ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 1675



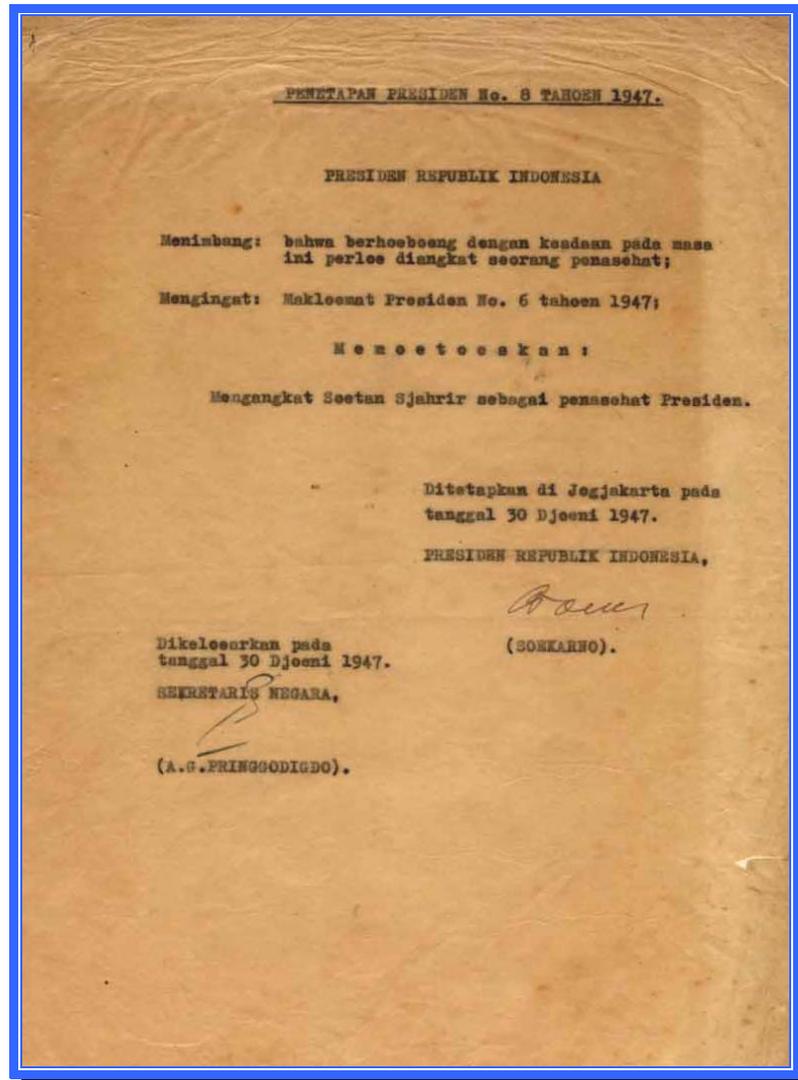
Surat Penetapan Presiden No. 2 tentang pengangkatan Moh.
Natsir menjadi Pemimpin Umum Angkatan Laut RI
26 Juni 1946

ANRI : Setneg No. 548



Sutan Syahrir, lahir di Minangkabau tahun 1910, mantan Perdana Menteri RI, tanpa tahun

ANRI : Kempen AV 940531 JH



Surat Penetapan Presiden No. 8 tahun 1947 tentang pengangkatan Soetan Sjahrir sebagai penasihat Presiden 30 Juni 1947

ANRI : Setneg 552



Chairil Anwar lahir di Padang tahun 1922, pujangga muda Indonesia yang terkenal dengan karangannya Deru Campur Debu, Kerikil Tajam, wafat 28 April 1949 tanpa tahun

ANRI : Kempen A 920831 CR



Abdul Hakim lahir di Padang, anggota BPUPKI
tanpa tahun

ANRI : Asia Raya AV 940425 AA



Hajah Rangkayo Rasuna Said, lahir di Padang mantan Pimpinan
Permi Bagian Wanita, 20 Desember 1952

ANRI : Kempen 5F143



H.B. Yasin lahir di Padang sebagai Pengarang Indonesia terkenal
6 November 1951

ANRI : Kempen 511106 FG 1-3

Daftar Arsip yang Diserahkan

DAFTAR ARSIP CITRA DAERAH SUMATERA BARAT

I. PEMERINTAHAN

1. Peta Sumatra Barat, tanpa tahun, 1 lembar
ANRI : De Haan No. D 35
2. Perjanjian antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang diwakili oleh *Laurens Pit de Jonge* dengan Kepala Adat dan Bupati di wilayah Pantai Barat Sumatera tentang hubungan persahabatan dan jaminan keamanan di Sumatra Barat, 29 Agustus 1680, 8 lembar.
ANRI : SWK No.6/7
3. Surat dari *J. Gv. Staveren* kepada Gubernur Jenderal *P.A.van der Parra* tentang keadaan di wilayah Pasaman, 25 Desember 1767, 50 lembar.
ANRI : SWK No. 3/4
4. Surat rahasia dari E.H.Eneth kepada Gubernur Jenderal *Alting* tentang peraturan perdagangan pemerintah di Pantai Barat Sumatera, 20 Januari 1790, 3 lembar
ANRI : SWK no. 4/6
5. Daftar tentang daerah Padang Lawas dan *Tamboezij* yang terdiri dari distrik- distrik, disertai nama-nama dari kepala - kepala distriknya, November 1839, 3 lembar.
ANRI : SWK 151/4
6. Peta Padang, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : De Haan E 80

7. Laporan umum pemerintahan Sumatra Barat tahun 1860, 27 Juni 1861, 35 lembar
ANRI : SWK No. 127/9
8. Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1864 No. 14 tentang pembagian pengelompokkan pulau-pulau di bawah pemerintahan wilayah Pantai Barat Sumatera, bahwa pulau Mentawai terdiri dari Siberut, Siporak, Pogi Utara, Pogi Selatan, dan kelompok pulau-pulau kecil Nassau, 17 lembar
ANRI : Bt. 10 Juli 1864 no. 14
9. Peta wilayah Distrik Batanghari dan IX Koto, 1 lembar
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 237/3
10. Surat pengangkatan Muhammad Noer dengan gelar Maharaja Sutan sebagai , Jaksa Kepala di Si Tiong, Tanah datar, 27 Maret 1914, 9 lembar.
ANRI : Ag No. 166/14 dalam Binnenland Bestuur No. 237/1
11. Salinan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang perubahan wilayah *Onderafdeeling* Kepulauan Batoe *Afdeeling* Padang Karesidenan Pantai Barat Sumatera menjadi Karesidenan Tapanuli, 26 Juli 1925, 4 lembar
ANRI : Ag No. 402/25 dalam Binnenlandsch Bestuur No. 237/1
12. Salinan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pembagian wilayah Karesidenan Pantai Barat Sumatera yang terdiri dari 6 *afdeelingen* yakni *Afdeeling* Padang, *Afdeeling* Kerinci – Painan, *Afdeeling* Agam, *Afdeeling* Lima Puluh Koto, *Afdeeling* Tanah datar, *Afdeeling* Solok, 16 Juni 1929, 12 lembar.
ANRI : Ag No. 560/29 dalam Binnenlandsch Bestuur No. 276/1

13. Uraian data tentang wilayah Negeri Gunung, Onderdistrik Sepuluh Koto, Distrik Batipuh, 18 November 1932, 1 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1215
14. Surat permohonan Lareh Nan Panjang untuk membangun sebuah Negari Goenoeng yang letaknya berbatasan dengan 8 kampung, 13 Januari 1933, 5 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1215
15. Laporan Bureau Indonesia bagian Penerangan Jakarta tentang pembagian daerah dalam Propinsi Sumatera/ Kantor Gubernur Sumatera Bukittinggi, Kabupaten Kawedanaan, Kecamatan dan nama-nama Bupati/Wedana/Camat, 1948, 4 lembar
ANRI : Djogja Documenten No. 260
16. Resolusi Komite Dewan Perwakilan Padang tentang tuntutan terbentuknya satu Dewan Perwakilan untuk seluruh Sumatera Barat, 10 Juni 1949, 5 lembar.
ANRI : Algemene Secretarie No. 1290/1
17. Telegram dari Sekretariat Delegasi Indonesia Jakarta kepada *Local Joint Committee Bukittinggi* tentang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menghadiri sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat di Jogjakarta. 25 Nopember 1949, 1 lembar.
ANRI : Delegasi Indonesia No. 1129
18. Rancangan Undang-Undang Tahun 1948 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, November 1948, 10 lembar.
ANRI : Sekretaris Negara No. 177

19. Presiden Sukarno sedang memberikan amanatnya dihadapan ribuan rakyat pada Rapat Umum di Sawah Lunto, 20 Juli 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 515515
20. Laporan berkala Kepala Jawatan Penerangan Kota Bukittinggi kepada Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Tengah dan Acting Walikota Bukittinggi tentang hasil rapat 31 Maret 1952 membicarakan tanah Padang Puhun Mandiangin yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi guna pembangunan kota Bukittinggi. 3 April 1952, 2 lembar.
ANRI : Kabinet Presiden No. 847
21. Gubernur Sumatera Tengah dan Istri , Komandan Resimen, Kepala Polisi Sumatera Tengah dan Komandan AURI sedang menunggu kedatangan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamijaya di Padang, 9 Nopember 1953. 1 lembar.
ANRI : Kempen 531109 CCI
22. Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo sedang berjabat tangan dengan para pejabat di lapangan terbang sebelum meninggalkan Padang, 9 Nopember 1953. 1 lembar.
ANRI : Kempen 531109 CC10
23. Wakil Presiden RI H. Mohammad Hatta berpidato dalam rapat umum di Gadang, 10 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540410 CC 1 – 23
24. Undang-Undang No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 19 Maret 1956, 5 lembar
ANRI : Sekkab UU No. 185.

25. Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 19 Maret 1956, 7 lembar.
ANRI : Sekkab UU No. 187
26. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-Undang. 25 Juli 1958, 8 lembar.
ANRI : Sekkab UU No. 272
27. Amanat Perdana Menteri Ir. H. Djuanda kepada Musyawarah Besar Rakyat Sumatera Barat Pertama yang diucapkan oleh Menteri Penerangan, Padang 15 Februari 1959, 5 lembar.
ANRI : Perdana Menteri Republik Indonesia No. 528

II. POLITIK DAN PERTAHANAN

28. Sket gambar sebagian daerah *Padangche Bovenlanden* yang dipakai sebagai tempat operasi militer, 3 Mei 1823, 1 lembar
ANRI : Topografi No. B 64
29. Laporan lanjutan tindakan perang Bonjol di Pantai Barat Sumatra mulai Juni 1835 sampai dengan 1837, 36 lembar
ANRI : SWK No. 141/1
30. Gambar tentang posisi pengintaian militer di lembah Alahanpanian, 12 April 1837, 1 lembar.
ANRI : SWK No. 148/4b

31. Laporan operasi militer di Pantai Barat Sumatera, mulai 21 Juli 1837 - 22 Februari 1838, 30 lembar.
ANRI : SWK 148/4a
32. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 37 Tahun 1861 tentang pembelian tanah datar di bagian selatan *Fort de Kock* seharga f 46.092 yang akan digunakan sebagai perkampungan militer, 5 Mei 1861, 8 lembar.
ANRI: Bt 5 Mei 1861 NO. 37
33. Salinan surat Komandan Militer kepada Komandan Angkatan Laut wilayah Pantai Barat Sumatra tentang keadaan di wilayah Sumatera Barat, 1864, 5 lembar.
ANRI : Lampiran Bt.10 Juli 1864 No. 14
34. Surat Usulan Komandan Departemen Pertahanan untuk membangun rumah peristirahatan di Pintu Angin di Simaboer yang ditunjuk sebagai tempat istirahat militer, 11 April 1890, 6 lembar.
ANRI : Bt 11 Juni 1890 No. 6
35. Telegram dari Derwis Radjosoetan kepada Direktur Dalam Negeri tentang permohonan pasukan militer di datangkan ke Padang dan keinginannya bertempur untuk mengembalikan keamanan di Sumatra Barat, 11 Juni 1945, 2 lembar.
ANRI : Algemeene Secretarie No. 1003
36. Telegram dari Mayor Jenderal Soehardjo di *Fort de Kock* Padang tentang berita jatuhnya kapal terbang Belanda di Pakan Baru; dimana 27 orang Belanda meninggal dan 1 orang luka parah, 4 Juli 1946, 4 lembar.
ANRI : Algemeene Secretarie Ag No. 10977/1946

37. Laporan Wakil Kepala. Kepala Staf Umum II Tentara Komondo. Sumatera tentang perundingan *Cease Fire Order* (gencatan senjata) antara Indonesia – Belanda di Padang, 24 Januari 1948, 4 lembar.
ANRI: Delegasi Indonesia No. 33
38. Surat dari Dewan Partai-Partai Sosialis Indonesia kepada Dewan Daerah Besar Partai Sosialis Indonesia Bukit Tinggi tentang berbagai macam persiapan menghadapi perang melawan Belanda serta kemungkinan yang akan terjadi, 16 Desember 1948, 4 lembar.
ANRI : Djogja Documenten No. 94
39. Ketetapan Kepala Kepolisian Sumatera Tengah Suleiman Bilenui No. 31/K.P.S.T. Tgl 17-5-1949 tentang Pengangkatan Muhammad. Sjarif Gelar St. Bandaharo sebagai Kepala Kepolisian Karesidenan Sumatera Barat Komisarisi Polisi kelas 1, 17 Mei 1949, 1 lembar.
ANRI : PDRI No. 21
40. Maklumat No. 3 /KKT-49 Komando Subteritorial Kesatuan Sumatera Barat tentang perang gerilya, menyusun tenaga rakyat , perbelanjaan angkatan perang , organisasi dan persetujuan yang di capai antara Delegasi Republik dan Delegasi Belanda. 16 Juni 1949, 2 lembar
ANRI : PDRI No. 23.
41. Petunjuk No. 1/KTK/P Komando subteritorial Kesatuan Sumatera Barat tentang strategi yang dipakai oleh Belanda untuk menguasai tanah air, sehingga pihak RI dapat mengantisipasi, 17 Juni 1949, 2 lembar.
ANRI : PDRI No. 23

42. Surat dari Residen diperbantukan Gubernur Sumatera Tengah, Hamdani kepada Dewan Menteri RI di Jogjakarta tentang keberangkatannya dan keluarga dari Sumatera Barat ke Jogjakarta tertunda karena dilarang Belanda, 30 Agustus 1949, 4 lembar.
ANRI : Delegasi Indonesia No. 1068, 3 lbr
43. Nota Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. St. Mohd Rasjid tentang pengembalian daerah Sumatera Barat menurut perjanjian Renville, 28 Oktober 1949, 2 lembar.
ANRI : Delegasi Indonesia No. 958
44. Semboyan yang ditulis di Tugu Kemerdekaan di Bukit Tinggi, 26 Agustus 1950, 1 lembar.
ANRI : Kempen 50661
45. Letkol Achmad Hussein (Bekas Komandan Komando Daerah Militer Sumatera Timur/KDMST Ketua Dewan Banteng PRRI Daerah Solok) menyatakan sumpah setia kembali kepangkuan RI, Alquran dipegang oleh Mayor Burhani dari CPRAD Kodam XVII, 23 Juni 1961, 1 lembar.
ANRI : Kempen 610623 1A
46. Pimpinan Kodam XVII Sumatera menyaksikan senjata-senjata yang diserahkan oleh Letkol Achmad Hussein bersama dengan 15 orang perwira menengah PRRI/RPI di daerah Solok, 23 Juni 1961, 1 lembar.
ANRI : Kempen 610623 51
47. Surat dari Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Barat kepada Menteri Penerangan RI tentang Ichtisar Press dari harian yang terbit tgl 26-28 Juli 1969 yang isinya tentang hubungan Buruh Dan Organisasinya, Bank Dan Pembangunan dan Pembaharuan Penghayatan Keagamaan. 28 Juli 1969, 7 lembar.
ANRI : Marzuki Arifin No. 536

48. Wakil Presiden Moh. Hatta sedang menyaksikan pameran Tri Divisi IX di Bukittinggi, 1 lembar.
ANRI : Kempen 80706 CC 135

III. EKONOMI

49. Laporan tentang nama pemilik dan daerah-daerah yang menghasilkan lada, di Pariaman ,15 April 1759, 16 lembar
ANRI : SWK No. 14
50. Tabel biaya sehari-hari keperluan operasional perdagangan di Padang, Pariaman, Tiku dan Ayer Bangis, Pantai Barat Sumatra, 21 Desember 1790, 26 lembar.
ANRI : SWK No 19
51. Perdagangan kopi dari Padang untuk dikirim ke Batavia, 30 Maret 1859, 5 lembar.
ANRI : Batavia No. 311.4
52. Lumbung padi di Batipuh , Sumatera Barat 1900, 1 lembar.
ANRI : KIT 175/10
53. Laporan tentang pembagian kerja tukang dalam memelihara jalan di *Afdeeling* Agam Lama, 17 November 1916, 6 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 90/2
54. Tarif pajak perusahaan di *Onderafdeeling* Agam tahun 1916, 4 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 90/1

55. Anggaran Pasar Loeboek Sikaping tahun 1917, 4 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 90/3
56. Surat dari Directeur Binnenlandsch Bestuur kepada Resident Sumatera Westkust mengenai pembuatan dan kualitas kopra di Sumatera Barat, 13 Desember 1935, 6 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1216
57. Pertanyaan kepada pemerintah dari Mr. Muhammad Yamin mengenai pemungutan pajak yang terjadi di Karesidenan Sumatera Barat, 16 Maret 1940, 8 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1218
58. Daftar barang-barang hasil bumi yang keluar dari Karesidenan Sumatera Barat, 7-8 Februari 1948, 4 lembar.
ANRI : Djogja Documenten No. 162
59. Salinan Surat Keputusan Residen Padang tentang masih diberlakukannya ketentuan harga penjualan daging sapi kepada umum sebesar 6 gulden per kilo, 19 Juni 1948, 1 lembar.
ANRI : Algemeene Secretarie Ag No. 16396/ 1948
60. Aquaduct (saluran air) di Pabrik Semen Indarung Padang, Sumatera Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 534/6
61. Peternakan kuda di Pd. Mangatas – Payakumbuh, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen 80706 CC 74

62. Para pekerja sedang mengangkut batu bara dengan lori di tambang Batubara Umbilin di Sawah Lunto, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : RVD 90319 CC 2
63. Wakil Presiden Moh. Hatta meninjau Koperasi di Sioban, Sumatera Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520515 CC 1
64. Wakil Presiden Moh. Hatta sedang mengunjungi Pabrik Semen di Indarung Padang, 15 Mei 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520515 CC 90
65. Penjual Sate dan para pengemudi bendi (delman) disekitar Pasar Bukit Tinggi, 21 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530421 CC 2-6
66. Pengangkutan sayur dengan menggunakan gerobak disekitar Pasar Bukit Tinggi, 21 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530421 CC 2 -10
67. Anggota Barisan Penolong di Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530501 CC 24
68. Arang halus yang telah dicuci diisikan kedalam gerbong kereta api di Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530501 CC 65
69. Macam-macam jenis batuan yang terdapat pada lapisan tanah di Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530501 CC 71
70. Peninjauan Pabrik Genting di Padang Sibusuk oleh Wapres RI Moh. Hatta, 15 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540510 CC 3

71. Undang-Undang No. 70 Th 1954 tentang Penetapan bagian I.B.W. XIV (Inlandsche Burgelijke Wet) Perusahaan Batubara Umbilin dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953.29 Nopember 1954, 3 lembar.
ANRI : Sekkab. UU 1950-1960 No. 163
72. Undang-Undang No. 64 Th 1954 tentang Penetapan bagian I.B.W. VIII Pelabuhan Teluk Bayur Padang dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 . 29 Nopember 1954, 1 lembar.
ANRI : Sekkab UU No. 157.
73. Surat dari A.S. Hasan di Palembang kepada J.M. Kepala Negara RI di Jakarta tentang perselisihan perkebunan kopi di Padang Karit. 6 Februari 1955, 1 lembar.
ANRI : Kabinet Presiden No. 1945
74. Surat Keputusan Perdana Menteri RI (Kabinet Perdana Menteri Juanda) karya Djuanda No. 668.57/Keu. OT tentang persetujuan pemberian kredit kepada Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Tengah di Bukit Tinggi , 24 Oktober 1957, 3 lembar.
ANRI : Perdana Menteri Republik Indonesia No. 533.
75. Surat dari Direktorat Pengawasan Perkebunan Departemen Perkebunan RI kepada Panglima Daerah Militer III/17 Agustus selaku Pepelrada Sumatera Barat tentang Penunjukan Badan Pelaksana Urusan Pangan Pusat (BPU PP) Dwikora untuk melaksanakan pengumpulan dan penampungan kulit-kulit kina yang berasal dari Sumatera Barat dan sekitarnya. 3 Mei 1966, 1 lembar.
ANRI : Ekubang No. 571.

IV. SOSIAL

76. Peraturan Pemerintah tentang urusan penanganan orang-orang miskin di kota Padang, lampiran surat tanggal 12 November 1936, 8 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1514
77. Wakil Presiden Moh. Hatta sedang mengunjungi Rumah Adat di Sioban, kepulauan Mentawai, 15 Mei 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520515 CC 24
78. Wakil Presiden Moh. Hatta sedang diperkampungan Bukit Tinggi, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen K80706 CC100
79. Surat dari Ketua Badan Pimpinan Daerah Korps Cacat Veteran RI Sumatera Barat kepada Ketua umum Korps Cacat Veteran RI di Jakarta tentang permohonan bantuan biaya perumahan cuma-cuma untuk cacat veteran RI, 25 Juni 1974, 4 lembar.
ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 794
80. Laporan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Tanah Datar tentang masalah sosial budaya yaitu penyelesaian saluran air minum yang tertunda, 27 Januari 1979, 4 lembar.
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 698
81. Surat dari Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup kepada para Menteri tentang tindak lanjut penanggulangan kerusakan bencana alam di Sumatera Barat karena longsornya lereng gunung Merapi, 18 Mei 1979, 5 lembar.
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 915

82. Laporan dari Sekretaris Wakil Presiden RI kepada Menteri Sosial tentang banjir yang terjadi di Kanagarian kelurahan Pasir Lawas Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, 21 Mei 1979, 6 lembar.
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 916

V. KEBUDAYAAN

83. Naskah tulisan Muhammad Yamin tentang prosa dalam Bahasa Padang , tanpa tahun, 4 lembar.
ANRI : M. Yamin No. 635
84. Daerah perkampungan di Sawah Lunto, Sumatera Barat , 1900, 1 lembar.
ANRI : KIT 179/88
85. Pernikahan dengan adat Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 26 Agustus 1950, 1 lembar.
ANRI : Kempen 50667
86. Pemandangan alam di sekitar Pelabuhan Teluk Bayur, 12 Juni 1950, 1 lembar.
ANRI : Kempen 500612 CC18
87. Pemandangan di sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat, 12 Juni 1950, 1 lembar.
ANRI : Kempen 500612 CC 37
88. Tari Piring di Minangkabau, Sumatra Barat, 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 515662
89. Tari Payung di Sumatera Barat, 20 Mei 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 511639

90. Pakaian Adat Minangkabau, 10 Juli 1951 , 1 lembar.
ANRI : Kempen 515373
91. Pemandangan di sekitar pelabuhan Selat Panjang, 19 Juli 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen K 510719 CC 18
92. Kesenian Rakyat berupa pertunjukan musik rebana, di Bukittinggi, 22 Maret 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530322 CC 19
93. Pertunjukan silat oleh pemuda-pemuda Minangkabau , 25 Maret 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 53025 CC1-2
94. Tempat tidur dan aneka hiasan di kamar pengantin pada upacara perkawinan adat di Kerinci , Sumatera Barat, 25 Maret 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530325 CC 9
95. Kesenian oleh para murid Sekolah Kayu Tanam, 23 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530423 CC 2-5
96. Pemandangan dari udara Pelabuhan Teluk Bayur, 6 Januari 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540106 CC 2 dan 3
97. Gadis-gadis mengenakan pakaian adat Minangkabau ketika akan menyambut Wapres RI Moh. Hatta di Bukit Tinggi, 4 April 1954, 2 lembar.
ANRI : Kempen 540404 CC 17 dan 18
98. Pertunjukan pencak silat sebagai upacara penyambutan Wapres RI Moh. Hatta di Kota Baru (Bonjol), 5 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540405 CC 7

99. Upacara adat penyambutan Wapres RI Moh. Hatta saat tiba di Kota Baru (Bonjol), 5 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540411 CC 3
100. Upacara adat penyambutan Wapres RI Moh. Hatta ketika tiba di Sijunjung, 10 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540410 CC 1-16 dan CC 1-19
101. Pemandangan disekitar Pantai Teluk Bungus (Selatan Teluk Bayur) Padang, 23 Mei 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540523 CC 2-2

VI. KESEHATAN

102. Surat jawaban Menteri Kesehatan RI mengenai pemberantasan penyakit *Tuberculosis* (TBC) di Sumatera Barat, atas pertanyaan Dr. Sjah H. Djalaludin selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 18 Februari 1959, 2 lembar.
ANRI : Winoto Danuasmoro No. 204
103. Bangsal rumah sakit di Sawah Lunto, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT No. 358/69
104. Rumah sakit Sawah Lunto tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT No. 357/63
105. Rumah sakit untuk buruh tambang di Sawah Lunto tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT No. 357/55
106. Prasasti Peletakan Batu Pertama Gedung Rumah Sakit di Padang yang diletakkan oleh Wapres Moh. Hatta , 21 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530421 CC 3

VII. PENDIDIKAN

107. Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 13 Tahun 1856 tentang pendirian Sekolah Raja "*Kweekschool*" bagi kaum Bumi Putra di Fort de Kock (Padangshe Boverlanden sekarang Bukit Tinggi), 1 April 1856, 10 lembar.
ANRI : Bt 1 April 1856 No. 13
108. Surat Walikota Padang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia tentang permohonan pendirian sekolah pertukangan di Padang, 6 Januari 1914, 3 lembar
ANRI : RV (A6) 17 Januari 1914, No. 1493
109. Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 36 1914 tentang pengangkatan Moh. Thaib gelar Soetan Pamoentjak sebagai Guru Bahasa Melayu pada *Kweekschool* untuk kaum pribumi di Padang, 21 Februari 1914, 3 lembar.
ANRI : Bt 21 Februari 1914 No. 36
110. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi bagi sekolah pribumi di Loeboeksikaping, 11 Juni dan 21 Juli 1914, 5 lembar.
ANRI : Bt 21 Juli 1914 No. 24
111. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang pemberian subsidi bagi sekolah pribumi di Padang dan daerah sekitarnya, 21 Juli 1914, 6 lembar.
ANRI : Bt 21 Juli 1914 No. 29.
112. Sket gedung sekolah lanjutan perempuan pada sekolah ketrampilan di Padang, Desember 1933, 1 lembar.
ANRI : BOW AX 63/2

113. Penghitungan penyerahan anggaran pendidikan dan kesehatan penduduk di luar daerah kepada kotapraja, 30 Desember 1938, 4 lembar.
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 1523
114. Penunjukan gedung kantor Kehutanan di Padang sebagai tempat sekolah *Meer Uitbreid Lager School / MULO* dalam bentuk Salinan Peraturan Direktur Pengairan, 29 November 1939, 4 lembar.
ANRI : BOW No. AX 59/1
115. Sket gedung kantor kehutanan di Padang yang disewakan untuk keperluan sekolah MULO (*Meer Uitbreid Lager School*), 1939, 2 lembar.
ANRI : BOW No. AX 59/2
116. Sket tentang Pengaturan ruang bermain pada Sekolah Kerajinan di Padang, 25 September 1939, 1 lembar
ANRI : BOW no. AX 63/1
117. Pembukaan sekolah khusus untuk anak laki-laki di Padang Panjang, 28 Maret 1940, 4 lembar.
ANRI : BOW No. AX 113/2
118. Pembangunan tempat penyimpanan (gudang) pada Sekolah Gabungan di Padang Panjang, 25 Juni 1941, 3 lembar.
ANRI : BOW No. AX 113/1
119. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 10/33/BPT/A. tentang diizinkan kepada Mr. Agus Hakim dkk sebagai dosen di Sekolah Hukum Pancasila dari Yayasan Sriwijaya Padang, 20 Maret 1952, 1 lembar.
ANRI : Kabinet Presiden No. 1087

120. Pemberantasan Buta Huruf di negeri Saning Bakar yang terletak kira-kira 12 km dari Kota Solok, 1 April 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520401
121. Foto bersama di depan gedung Sekolah Rakyat di Muara Pingai , Solok yang sedang dibangun secara gotong- royong, 1 April 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520401
122. Para siswa Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi sedang bermain Tenismeja di ruang senam (*recreatiezaal*), 14 November 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 521114 CC 3
123. Para siswa sedang membaca di perpustakaan Sekolah Guru dan Hakim Agama bagian C di Bukittinggi, 14 November 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 521114 CC 5
124. Sekolah *Indische Nederlandsche School* (INS) di Kayu Tanam sedang dikunjungi rombongan Wapres RI Moh. Hatta, 23 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530423 CC 3
125. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (PB I.P.P.I) no. 2/S.S./54 tentang Perguruan SMP/SMA Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Bukittinggi mengenai ditetapkan sdr. Juler A.M. sebagai Direktur SMP Kader Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia dll. 17 Februari 1954, 1 lembar.
ANRI : I.P.P.I No. 255
126. Sekolah Rakyat di Panti saat dikunjungi oleh Wapres RI Moh. Hatta, 5 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540405 CC 18

127. Murid-murid putri sekolah menengah Islam di Kayu Tanam sedang melakukan senam, 23 April 1954, 2 lembar.
ANRI : Kempen 530423 CC 2-1 dan 2-3
128. Gedung Fakultas Pertanian Universitas Adityawarman di Payakumbuh di buka oleh Menteri PPK Mr. Moh. Yamin dan diresmikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, 30 Nopember 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 541129 CC 2-1
129. Para Siswa Sekolah Guru Bantu (SGB) Perguruan partikulir Indonesia *Indische Nederlandsche School* (INS) di Kayu Tanam, Sumatera Barat, 27 Desember 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 541227 CC 3
130. Surat dari Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Aceh (IPINDA) Padang Panjang se Sumatera Tengah kepada Direktur SMPN 1 Padang tentang permohonan berhenti Sdr Tg Muhamad Ramli dari sekolah karena bantuan dari pemerintah dihentikan. 14 Nopember 1956, 2 lembar.
ANRI : Kabinet Presiden No.1202
131. Surat dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Jakarta kepada J.M. Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.1 tahun 1963 memuat cara mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dalam lingkungan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), 30 Juli 1964, 2 lembar.
ANRI : HUBRA No. 886

132. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Kabupaten Tanah Datar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengembalian status Universitas Andalas dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 27 Juli 1980, 2 lembar.
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 654
133. Surat dari Pj. Rektor Universitas Proklamasi (45) Jogjakarta kepada DR. Daoed Joesoef Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang permohonan penggantian nama Universitas Bung Hatta menjadi Universitas Soekarno-Hatta, 9 Mei 1981, 2 lembar.
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 670

VIII. AGAMA

134. Laporan dari Direktur Pekerjaan Umum tentang pendirian bangunan kantor untuk pegawai negeri sipil di Si Tiong, Sungai Dareh, Distrik Batanghari, Afdeeling Tanah Datar, 12 September 1913 No. 23, 10 lembar
ANRI : Ag No. 111/13 dalam Binnenlandsch Bestuur No. 237/3
135. Sebuah masjid dengan pemandangan kolamnya di Taluk, Bukit Tinggi, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 804/87
136. Masjid di Sungai Puar, Sumatra Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 804/004
137. Masjid 1001 malam di Fort de Kock, Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 805/64

138. Surau di Baso, Fort de Kock, Sumatra Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 805/27
139. Peraturan Residen Padang No. 4 tahun 1949 tentang larangan melakukan penyembelihan kerbau pada saat Idul Qurban dan hari raya Cina "*Tjioko*", 5 Agustus 1949, 2 lembar.
ANRI : Ag 18904/1949
140. Khotbah Idul Fitri yang diikuti beribu-ribu jama'ah dilapangan Kantin Bukit Tinggi 5 Juli 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 514971
141. Bangunan kelenteng dan pemandangan di sekitar pelabuhan Selat Panjang, 19 Juli 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 510719 CC 72 K
142. Sebuah masjid di tepi Sungai Siak , 19 Juli 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen K. 510719 CC 76
143. Para calon haji di Payakumbuh, Sumatera Barat, 16 Juni 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520612
144. Masjid di Bukit Tinggi saat dikunjungi Wapres RI Moh. Hatta, 7 April 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540407 CC 1 – 24
145. Surat dari Dewan Pimpinan *Islam Study Club* (ISC) kepada Zaenal Murad di Padang tentang Saran pendirian ISC di Kota Padang. 23 Juni 1957, 1 lembar
ANRI : I.P.P.I No. 66

IX. INFRASTRUKTUR

146. Jembatan gantung di Muara Labo, Sumatra Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 0514/28
147. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang permohonan peralatan dari Eropa bagi perluasan jalur kereta *Fort de Kock* (Bukittinggi) Pajakumbu, 17 Juli 1845, 3 lembar.
ANRI : BT 17 Juli 1895 No.6
148. Surat Keputusan Gubernur Jenderal tentang permohonan peralatan dari Eropa bagi perluasan jalur kereta *Fort de Kock* (Bukittinggi) Pajakumbu, 15 November 1895, 3 lembar.
ANRI : BT 15 November 1895 No. 30
149. Pembangunan kanal di Payakumbuh, 1898, 1 lembar.
ANRI : KIT 252/6
150. Surat dari Walikota Padang kepada Penasehat Desentralisasi di *Weltevreden* (Jakarta) tentang pembuatan saluran air ledeng untuk 600 tempat tinggal dengan anggaran f. 60.000, 15 Maret 1929, 4 lembar
ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 2234
151. Laporan tentang kunjungan ke areal lapangan terbang Padang – Oejoeng Karang Pantai Barat Sumatra, 24 Oktober 1932, 4 lembar.
ANRI : BOW BL 13/3
152. Data-data tentang lalu lintas pengiriman pos dari dan ke Pantai Barat Sumatra, 27 Februari 1935, 3 lembar.
ANRI : BOW BL 13

153. Permohonan data-data tentang pembatasan/ penentuan keuntungan hubungan lalu lintas udara di Padang, 27 April 1935, 20 lembar.
ANRI : BOW BL 13/2
154. Frekuensi pengawasan lapangan terbang, Ophir, 7 Agustus – 25 Oktober 1936, 1 lembar.
ANRI : BOW AX 133/1
155. Peta mengenai letak lapangan terbang Ophir di Kapar, *Onderafdeeling* Taloe, *Afdeeling* Agam, 10 Desember 1936, 1 lembar.
ANRI : BOW Ax 133/2
156. Laporan tentang kunjungan ke lapangan terbang Ophir, Padang dan Indrapoera, 1936, 8 lembar.
ANRI : BOW AX 133/3
157. Situasi lapangan terbang di Padang, lampiran dari nota penjelasan tentang anggaran untuk pekerjaan perluasan lapangan terbang di Padang bagian I, 15 Mei 1941, 12 lembar.
ANRI : BOW BL 416/1
158. Salinan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang ketentuan pelaksanaan penggunaan penyaluran penerangan listrik dan pemindahan daya menengah, 5 September 1941, 21 lembar.
ANRI : Binnenlandsh Bestuur No. 1708/1
159. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Belanda tentang pengiriman pos dan hubungan telepon dari daerah Republik ke daerah pendudukan Belanda dan sebaliknya, 22 Mei 1948, 1 lembar.
ANRI : Delegasi Indonesia No. 190

160. Ketetapan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PU/V tentang Pengangkatan Sdr. Anwar sebagai Kepala Djawatan Pengairan, Jalan-jalan dan Gedung-gedung Daerah Sumatera Barat. 10 Juni 1949, 1 lembar.
ANRI : PDRI No. 15
161. Lahan tandus yang direncanakan dijadikan Ibu Kota Solok oleh Bupati /Kepala Daerah Kab. Solok, tampak rakyat sedang bergotong royong pada 1 April 1952 .
1 lembar.
ANRI : Kempen 520401
162. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Barat, Laporan – laporan proyek-proyek Pembangunan Lima Tahun (PELITA) V Tahun ke IV 1973-1974, SIAP Tahun 1972-1973 Triwulan III 1973-1974 tentang proyek pembentukan unit perencanaan daerah dan program perencanaan tata kota dan tata daerah, 30 April 1974, 6 lembar.
ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 876
163. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan-laporan proyek Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Tahun 1974/1975 Triwulan 1 tentang proyek perbaikan dan pengamanan sungai mengenai pengaturan serta pengembangan sungai dan rawa, Juni 1974, 4 lembar.
ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX, No. 876
164. Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Tanah Datar kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk II Kab Tanah Datar Batusangkar, tentang proyek Aquaduct untuk mengairi sawah rakyat di Kanagarian Saruaso, Kototangah dan Tg Barulak. 20 Juni 1978, 2 lembar
ANRI : Setwapres Adam Malik, No. 990

X. BANGUNAN

165. Perpindahan lokasi sekolah guru di *Fort de Kock* ke Sekolah Umum MULO (*Meer Uitbreid Lager School*), 22 Maret 1938, 14 lembar.
ANRI : BOW No. AX 113/4
166. Anggaran biaya pembangunan ruang senam dari sekolah MULO (*Meer Uitbreid Lager School*) di *Fort de Kock*, Padang, 14 Juni 1938, 6 lembar.
ANRI : BOW : AX 113/3
167. Prototipe rumah Minangkabau, Sumatera Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 846/019
168. Balai adat di Lawang, Maninjau, Sumatera Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 0788/044
169. Museum Kebudayaan *Fort de Kock* di Bukittinggi, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 1101/046
170. Gedung Bank Indonesia dan Tugu Peringatan *Ir. De Greve* (penemu tambang Batubara Umbilin) di Padang, Sumatera Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 789/14
171. Bekas rumah Residen di *Fort de Kock* Bukittinggi, Sumatera Barat, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 0775/071
172. Jam Gadang di *Fort de Kock* Bukittinggi, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen K 530421 CC 2-2

173. Pembangunan Tugu Peringatan pemulihan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Padang, 12 Juni 1950, 1 lembar.
ANRI : Kempen 500612 CC8
174. Tugu Peringatan Tuanku Imam Bonjol di Bonjol Sumbar, 27 Maret 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530327 CC 1-2
175. Kantor Polisi Negara Pos Rao, Bukittinggi, 21 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540407 CC 4-1
176. Upacara pembukaan Sekolah Polisi Negara di Padang dengan dilakukan pengguntingan pita oleh Wapres RI Moh. Hatta, 21 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5300421 CC 19
177. Batu Peringatan Sekolah Polisi Negara di Padang, 21 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5300421 CC 20
178. Tugu Kemerdekaan Republik Indonesia di Bukittinggi, 27 April 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen K 530427 CC 1-1
179. Gedung Sentral Listrik Solok Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5300501 CC 1
180. Gedung Kompresor Durian Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5300501 CC 2
181. Rumah Buruh Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5300501 CC 78

182. Gedung Tambang Batu Bara Umbilin Sawah Lunto, 1 Mei 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5300501 CC 80
183. Perkampungan penduduk di tepi Muara Sungai Arau, Padang, 23 Mei 1954, 1 lembar.
ANRI : Kempen 540523 CC 1-1
184. Kejaksaan Tinggi Padang Sumatera Barat kepada Jaksa Agung RI Jakarta tentang Inspeksi khusus Proyek Pembangunan Lima Tahun (PELITA) II Tahun Anggaran 1975/1976 semester II mengenai pembangunan baru gedung Kantor Kejaksaan Negeri Solok, 28 Maret 1976, 3 lembar.
ANRI : Sri Sultan Hamengkubuwono IX No. 886
185. Surat-surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Tanah Datar Batusangkar tentang usul pembangunan rumah sakit umum Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. 25 Oktober 1978, 5 lembar.
ANRI : Setwapres Adam Malik No. 800

XI. TOKOH – TOKOH DARI SUMATERA BARAT

186. Tuanku Imam Bonjol, lahir di Tanjung Bungo 1796 Panglima Perang Bonjol dengan nama Muhamad Sahab atau Peto Syarif, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI: Kempen 940919 AV 9
187. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), Sebagai Pujangga Indonesia, 22 November 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 531122 FJ 4-1

188. Haji Agus Salim, lahir di Bukit Tinggi Tahun 1884, Pemimpin Serikat Islam dan mantan Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II, 24 Maret 1964, 1 lembar.
ANRI : Kempen 64-2645
189. Haji Agus Salim bersama dengan Presiden Sukarno, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : KIT 992/18
190. Surat Dari Haji Agus Salim (ketika beliau menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II) kepada Menlu Pakistan tentang pengiriman Mr. Idham sebagai Diplomat di Karachi, 11 Oktober 1948, 1 lembar.
ANRI : Djogja Documenten No. 34
191. Surat dari Haji Agus Salim (ketika beliau menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II) kepada Menlu *Executive Secretarie United Nation Economic Commission* untuk Asia dan Timur jauh tentang pengiriman Dr. Usman Satroamijoyo pada konferensi ECAFE, 3 Desember 1948, 1 lembar.
ANRI : Djogja Documenten No. 45
192. Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang pemberian tunjangan kepada Haji Agus Salim mantan Menteri Muda Luar Negeri RI, 3 Oktober 1951, 1 lembar.
ANRI : PMRI No. 128
193. Marah Rusli lahir di Padang 7 Agustus 1889, Pujangga terkenal Indonesia dengan karangannya Siti Nurbaya dan Layar Berkembang, 13 Juli 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen R 530713 FG 1-1

194. Daftar riwayat hidup Marah Rusli, 22 Desember 1942, 2 lembar.
ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 2023
195. Abdul Muis lahir di Padang tahun 1890, Pemimpin Sarekat Islam (1920 – 1923) sebagai pengarang roman terkenal Salah Asuhan, 24 Mei 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 520524 FP 2
196. Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gadang 14 Oktober 1897 terkenal sebagai promotor persatuan perjuangan pendiri Partai Republik Indonesia (PARI), 10 September 1948, 1 lembar.
ANRI : Kempen 81009 FG 1
197. Instruksi Presiden Sukarno dan Wapres Hatta kepada Tan Malaka, Iwa Koesoema Soemantri, Wongsonegoro dan Syahrir agar mereka tetap berjuang, 29 Maret 1946, 2 lembar.
ANRI : Djogja Documenten No. 65
198. Hasil wawancara Tuan Alimin tentang Tan Malaka, 14 Oktober 1946, 2 lembar.
ANRI : Djogja Documenten No. 309
199. Resensi dan Terjemahan Buku karangan Tan Malaka " Sang Gerilya" dan " Gerpolek" yang ditemukan Kapten Bachtiar Kepala Divisi IX banteng di Payakumbuh, Agustus 1948, 4 lembar
ANRI : Djogja Documenten No. 46
200. Mohammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902 mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia, 19 September 1953, 1 lembar.
ANRI : Kempen 530919 FG 2-10

201. Daftar Riwayat Hidup mantan Wapres RI Mohammad Hatta, 1943, 2 lembar.
ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 1027
202. Mohammad Yamin, lahir 23 Agustus 1903 mantan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Juanda, 27 Oktober 1950, 1 lembar.
ANRI : Kempen 502023
203. Daftar Riwayat Hidup Moh. Yamin mantan Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Juanda, 16 Maret 1943, 2 lembar.
ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 1018
204. Sutan Takdir Alisyahbana, lahir di Natal Tapanuli tahun 1908, pada tahun 1951 menjabat sebagai Direktur Pustaka Rakyat sedang berada diruang kerjanya, 21 Februari 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 511058
205. Mohammad Natsir, lahir di Alahan Panjang 17 Juli 1908, mantan Perdana Menteri RI, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen AV 931013 MR
206. Daftar Riwayat Hidup Moh. Natsir gelar Datoek Sinaro Pandjang, 10 Januari 1943, 2 lembar.
ANRI : Daftar Orang Terkemuka di Jawa No. 1675
207. Surat Penetapan Presiden No. 2 tentang pengangkatan Moh. Natsir menjadi Pemimpin Umum Angkatan Laut RI, 26 Juni 1946, 1 lembar.
ANRI : Setneg No. 548
208. Sutan Syahrir, lahir di Minangkabau tahun 1910, mantan Perdana Menteri RI, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen AV 940531 JH

209. Maklumat Presiden RI No. 2 Tahun 1946 tentang susunan kabinet yang diajukan oleh Paduka Tuan Soetan Syahrir, 2 Oktober 1946, 1 lembar.
ANRI : Setneg 1945 – 1949 No. 285
210. Surat Penetapan Presiden No. 8 tahun 1947 tentang pengangkatan Sutan Syahrir sebagai penasehat Presiden, 30 Juni 1947, 2 lembar.
ANRI : Setneg 552
211. Chairil Anwar lahir di Padang tahun 1922, pujangga muda Indonesia yang terkenal dengan karangannya *Deru Campur Debu*, *Kerikil Tajam*, wafat 28 April 1949, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Kempen A 920831 CR
212. Abdul Hakim lahir di Padang, anggota BPUPKI, tanpa tahun, 1 lembar.
ANRI : Asia Raya AV 940425 AA
213. Hajah Rangkayo Rasuna Said, lahir di Padang mantan Pimpinan Permi Bagian Wanita, 20 Desember 1952, 1 lembar.
ANRI : Kempen 5F143
214. H.B. Yasin lahir di Padang sebagai Pengarang Indonesia terkenal, 6 November 1951, 1 lembar.
ANRI : Kempen 511106 FG 1-3

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Sumatera Barat Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyebarkan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.